



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, selanjutnya disebut RKPD Tahun 2015, adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 2

RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

- a. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
- b. pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;
- c. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015.

Pasal 3

Dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan RKPD Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2015 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Narasi RKPD Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- b. Rencana Program Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Mei 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 23 Mei 2014

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 29



GUBERNUR JAWA TENGAH

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015**



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	x
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.4. Kaidah Pelaksanaan.....	I-7
1.5. Sistematika RKPD	I-8
1.6. Maksud dan Tujuan.....	I-9
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi	II-1
2.1.2 Aspek Demografi	II-6
2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-8
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II-29
2.1.4.1 Fokus Layanan Wajib	II-29
2.1.4.2 Fokus Layanan Pilihan	II-92
2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah	II-110
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dan Realisasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013...	II-114
2.2.1 Urusan Wajib	II-114
2.2.2 Urusan Pilihan	II-201
2.3. Evaluasi Capaian MDG's.....	II-218
2.4 Lingkungan Strategis	II-225
2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-230
2.6 Isu Strategis Pembangunan Daerah	II-231
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah	III-1
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	III-4
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-7
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	III-7
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-9
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-10
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-10
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-16
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015.....	IV-1
4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Jangka Menengah.....	IV-1
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-29
4.3 Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target MDGs Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2015	IV-67
4.4 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kewilayahan Jawa Tengah	IV-73
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015	V-1
5.1 Urusan Wajib.....	V-1
5.2 Urusan Pilihan.....	V-30
BAB VI PENUTUP.....	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Frekuensi Kejadian Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2013	II-6
Tabel	2.2	Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, serta Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012	II-7
Tabel	2.3	Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 (Trilyun Rupiah).....	II-9
Tabel	2.4	Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan di Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 (Trilyun Rupiah).....	II-9
Tabel	2.5	Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi se Jawa – Bali Tahun 2012 - 2013 (%)	II-10
Tabel	2.6	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) di Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 (Juta Rupiah).....	II-11
Tabel	2.7	Kontribusi Jenis Penggunaan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013	II-11
Tabel	2.8	Inflasi Nasional dan Provinsi se Jawa – Bali Tahun 2012-2013 (%)	II-13
Tabel	2.9	PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 (Rupiah).....	II-13
Tabel	2.10	Pemerataan Pendapatan Penduduk Provinsi Jawa Tengah Menurut Kriteria Bank Dunia Tahun 2009 – 2012	II-14
Tabel	2.11	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-15
Tabel	2.12	Kemiskinan Nasional dan Provinsi se Jawa – Bali Tahun 2012 - 2013	II-16
Tabel	2.13	Jumlah Tindak Pidana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-17
Tabel	2.14	Usia Harapan Hidup Nasional dan Provinsi se Jawa - Bali Tahun 2011 - 2012 (Tahun)	II-19
Tabel	2.15	Angka Melek Huruf Penduduk Berusia 15 tahun ke Atas Menurut Nasional dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2011-2012..	II-20
Tabel	2.16	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Menurut Nasional dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2011 - 2012 (Tahun)	II-21
Tabel	2.17	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2009 – 2012.....	II-21
Tabel	2.18	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009 – 2013.....	II-22
Tabel	2.19	Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009 – 2013.....	II-22
Tabel	2.20	Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Berdasarkan Penduduk Usia Kerja (15 - 64 Tahun) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011	II-23
Tabel	2.21	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi se Jawa – Bali dan Nasional Tahun 2011 - 2012.....	II-26
Tabel	2.22	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi se Jawa – Bali dan Nasional Tahun 2011 - 2012.....	II-27
Tabel	2.23	Perkembangan Seni dan Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-28

Tabel	2.24	Perkembangan Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-28
Tabel	2.25	Perkembangan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-29
Tabel	2.26	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012	II-29
Tabel	2.27	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI (7-12 th) Menurut Nasional dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2011 - 2012	II-30
Tabel	2.28	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs (13-15 th) Menurut Nasional dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2011-2012	II-30
Tabel	2.29	Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012.....	II-31
Tabel	2.30	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap 10.000 Jumlah Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012	II-31
Tabel	2.31	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012	II-32
Tabel	2.32	Rasio Guru dan Murid per Kelas Rata-Rata Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012	II-32
Tabel	2.33	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (16-18 th) Menurut Nasional dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2011-2012..	II-33
Tabel	2.34	Rasio Ketersediaan Sekolah SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012	II-34
Tabel	2.35	Rasio Guru terhadap Murid SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012	II-34
Tabel	2.36	Rasio Guru dan Murid Jenjang SMA/SMK/MA per Kelas Rata-Rata di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012	II-34
Tabel	2.37	Kondisi Bangunan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Dalam Kondisi Baik Tahun 2009 – 2013...	II-35
Tabel	2.38	Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-36
Tabel	2.39	Angka Lulus SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-36
Tabel	2.40	Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Tahun 2009 – 2013.....	II-36
Tabel	2.41	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012	II-37
Tabel	2.42	Persentase Pendidik Berkualifikasi SI/D4 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-37
Tabel	2.43	Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012	II-38
Tabel	2.44	Perkembangan Rasio Dokter Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012.....	II-38
Tabel	2.45	Perkembangan Rasio Tenaga Paramedis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012.....	II-38
Tabel	2.46	Persentase Balita Usia 0-6 Bulan yang Mendapat ASI Eksklusif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-39
Tabel	2.47	Kondisi Penyakit Menular Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-39
Tabel	2.48	Persentase Rumah Sakit yang Dibina Untuk Akreditasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-40
Tabel	2.49	Jumlah Penduduk Miskin Pemanfaat Jamkesmas dan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012.....	II-40
Tabel	2.50	Kondisi Jalan Kewenangan Provinsi Tahun 2009 – 2013.....	II-42
Tabel	2.51	Kondisi Jembatan Kewenangan Provinsi Tahun 2009 – 2013	II-42

Tabel 2.52	Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah	II-43
Tabel 2.53	Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2009 – 2013.....	II-43
Tabel 2.54	Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-43
Tabel 2.55	Cakupan Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, dan Persampahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-44
Tabel 2.56	Perkembangan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012.....	II-44
Tabel 2.57	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012	II-45
Tabel 2.58	Perkembangan Pelayanan Angkutan Darat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-46
Tabel 2.59	Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-46
Tabel 2.60	Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-46
Tabel 2.61	Perkembangan Pelayanan ASDP di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-46
Tabel 2.62	Perkembangan Pelayanan Angkutan Laut di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-47
Tabel 2.63	Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-48
Tabel 2.64	Kinerja Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-49
Tabel 2.65	Perkembangan Pelayanan Urusan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-49
Tabel 2.66	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012	II-52
Tabel 2.67	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-52
Tabel 2.68	Persentase Anak yang Bekerja Usia 10 – 17 Tahun Tahun 2009 – 2012.....	II-54
Tabel 2.69	Jumlah Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi se-Jawa dan Nasional Tahun 2012	II-55
Tabel 2.70	Persentase Perempuan yang Bekerja di Pemerintahan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2009 – 2013.....	II-56
Tabel 2.71	Persentase Perempuan yang Bekerja di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Eselonisasi Tahun 2009-2013.....	II-57
Tabel 2.72	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2011 – 2013	II-57
Tabel 2.73	Peserta KB Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ...	II-59
Tabel 2.74	Peserta DO KB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-59
Tabel 2.75	Unmet Need KB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-60
Tabel 2.76	Peserta KB Mandiri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-60
Tabel 2.77	Jumlah Keluarga Sejahtera Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012.....	II-61
Tabel 2.78	Peningkatan Kualitas Sarpras Panti Sosial Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012	II-61
Tabel 2.79	Penanganan PMKS di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012.....	II-62
Tabel 2.80	Jumlah PMKS yang Mendapatkan Bantuan Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-62

Tabel 2.81	Penguatan Kapasitas PSKS di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-63
Tabel 2.82	Jumlah Balai Rehabilitasi Sosial Yang Menerapkan Standar Pelayanan (SOP) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-63
Tabel 2.83	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-64
Tabel 2.84	Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-64
Tabel 2.85	Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-65
Tabel 2.86	Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-65
Tabel 2.87	Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2013.....	II-66
Tabel 2.88	PDRB ADHK Tahun 2000 per Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-67
Tabel 2.89	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja (yang bekerja) (%) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-67
Tabel 2.90	Rasio Rata - Rata Upah Minimum Kabupaten/Kota Dibanding Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-68
Tabel 2.91	Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-68
Tabel 2.92	Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-69
Tabel 2.93	Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-69
Tabel 2.94	Jumlah Koperasi Sehat KSP/USP di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-70
Tabel 2.95	Data UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ..	II-70
Tabel 2.96	Realisasi KUR Menurut Bank Pelaksana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-72
Tabel 2.97	Jumlah Investor PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Izin Usaha Tahun 2009 – 2013.....	II-73
Tabel 2.98	Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-73
Tabel 2.99	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-74
Tabel 2.100	Nilai Realisasi PMDN dan Pertumbuhan Realisasi PMDN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-74
Tabel 2.101	Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-75
Tabel 2.102	Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-76
Tabel 2.103	Perkembangan Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-77
Tabel 2.104	Perkembangan Olahraga di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-77
Tabel 2.105	Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-78
Tabel 2.106	Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-78

Tabel 2.107	Jumlah Tindak Pidana dan Tindak Pidana Menonjol di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-78
Tabel 2.108	Pendidikan Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-79
Tabel 2.109	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012.....	II-80
Tabel 2.110	Pembinaan Terhadap LSM, Ormas, dan OKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-80
Tabel 2.111	Rasio Jumlah Polisi PP per 10.000 Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-81
Tabel 2.112	Penyelesaian Pelanggar Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-81
Tabel 2.113	Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-82
Tabel 2.114	Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-82
Tabel 2.115	Penataan, Pengawasan dan Penegakan Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-82
Tabel 2.116	Sertifikasi ISO 9001:2008 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-85
Tabel 2.117	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-85
Tabel 2.118	Diklat Aparatur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-85
Tabel 2.119	Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012	II-86
Tabel 2.120	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013.....	II-86
Tabel 2.121	Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-87
Tabel 2.122	Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-87
Tabel 2.123	Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-87
Tabel 2.124	Target Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2015	II-88
Tabel 2.125	Target dan Realisasi Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2013	II-89
Tabel 2.126	Perkembangan Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-89
Tabel 2.127	Pengelolaan Arsip Secara Baku di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013	II-90
Tabel 2.128	Persentase SKPD Provinsi Jawa Tengah Memiliki Website Tahun 2009 - 2013.....	II-91
Tabel 2.129	Persentase SKPD Provinsi Jawa Tengah yang Melakukan Update Data Pada Website Tahun 2009 – 2013.....	II-91
Tabel 2.130	Perkembangan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-92
Tabel 2.131	Produksi Hasil Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-93
Tabel 2.132	Produktivitas Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-93
Tabel 2.133	Produksi Hortikultura di Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013	II-94
Tabel 2.134	Produksi Tanaman Perkebunan Utama di Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-94
Tabel 2.135	Populasi Ternak di Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013	II-95

Tabel 2.136	Perkembangan Kelembagaan dan SDM Penyuluh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-95
Tabel 2.137	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012	II-96
Tabel 2.138	Luas Rehabilitasi Hutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-96
Tabel 2.139	Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-97
Tabel 2.140	Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012	II-97
Tabel 2.141	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Galian Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013	II-97
Tabel 2.142	Penertiban Area Penambangan Liar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-98
Tabel 2.143	Rasio Elektrifikasi dan Upaya Peningkatan Rasio Elektrifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-98
Tabel 2.144	Jumlah Obyek Wisata dan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-99
Tabel 2.145	Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata dan Pramuwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-99
Tabel 2.146	Jumlah, Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan dan Pengeluaran Belanja Wisatawan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-100
Tabel 2.147	Jumlah Masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata serta Kerjasama dengan Asosiasi/Lembaga Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-100
Tabel 2.148	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Total PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 (Juta rupiah).....	II-101
Tabel 2.149	Produksi Perikanan dan Ekspor Produk Perikanan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-102
Tabel 2.150	Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-103
Tabel 2.151	Luas Terumbu Karang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012.....	II-103
Tabel 2.152	Luas Hutan Mangrove Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012.....	II-104
Tabel 2.153	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 (Juta Rupiah).....	II-104
Tabel 2.154	Ekspor Bersih Perdagangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-105
Tabel 2.155	Jumlah Izin Usaha Perdagangan Luar Negeri dan Jumlah Jenis Barang Bersertifikat Mutu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-105
Tabel 2.156	Jumlah Usaha Dagang Kecil dan Menengah dan Izin Usaha Perdagangan Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-106
Tabel 2.157	Kinerja Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-106
Tabel 2.158	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 (Juta Rupiah).....	II-107
Tabel 2.159	Pertumbuhan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-108
Tabel 2.160	Pengembangan Klaster Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-108
Tabel 2.161	Jumlah Bina Kelompok Pengrajin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-109

Tabel 2.162	Capaian Pengiriman Transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.....	II-109
Tabel 2.163	Perkembangan Pelatihan Calon Transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-110
Tabel 2.164	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012	II-110
Tabel 2.165	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012	II-111
Tabel 2.166	Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012	II-112
Tabel 2.167	Rasio Ketergantungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012	II-112
Tabel 2.168	Rasio Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012.....	II-113
Tabel 2.169	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 (Juta orang)	II-113
Tabel 2.170	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012.....	II-114
Tabel 2.171	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan	II-114
Tabel 2.172	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan	II-120
Tabel 2.173	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum.....	II-126
Tabel 2.174	Capaian Kinerja Urusan Perumahan.....	II-134
Tabel 2.175	Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang	II-136
Tabel 2.176	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan.....	II-139
Tabel 2.177	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan.....	II-144
Tabel 2.178	Capaian Kinerja Lingkungan Hidup	II-148
Tabel 2.179	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan.....	II-153
Tabel 2.180	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	II-154
Tabel 2.181	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-155
Tabel 2.182	Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	II-162
Tabel 2.183	Capaian Kinerja Urusan Sosial	II-166
Tabel 2.184	Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan.....	II-170
Tabel 2.185	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	II-172
Tabel 2.186	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal	II-174
Tabel 2.187	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan	II-176
Tabel 2.188	Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga	II-178
Tabel 2.189	Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.....	II-180
Tabel 2.190	Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah	II-182
Tabel 2.191	Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan	II-189
Tabel 2.192	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa....	II-192
Tabel 2.193	Capaian Kinerja Urusan Statistik.....	II-195
Tabel 2.194	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan	II-196
Tabel 2.195	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika	II-198
Tabel 2.196	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan	II-200
Tabel 2.197	Capaian Kinerja Urusan Pertanian.....	II-201
Tabel 2.198	Capaian Kinerja Urusan Kehutanan	II-207
Tabel 2.199	Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral.....	II-210
Tabel 2.200	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata.....	II-212
Tabel 2.201	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	II-214

Tabel 2.202	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan.....	II-215
Tabel 2.203	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian	II-217
Tabel 2.204	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi	II-218
Tabel 2.205	Capaian Indikator MDGs Tujuan 1	II-219
Tabel 2.206	Capaian Indikator MDGs Tujuan 2	II-220
Tabel 2.207	Capaian Indikator MDGs Tujuan 3	II-220
Tabel 2.208	Capaian Indikator MDGs Tujuan 4	II-221
Tabel 2.209	Capaian Indikator MDGs Tujuan 5	II-221
Tabel 2.210	Capaian Indikator MDGs Tujuan 6	II-222
Tabel 2.211	Capaian Indikator MDGs Tujuan 7	II-224
Tabel 3.1	Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 - 2012.....	III-2
Tabel 3.2	Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 - 2013.....	III-2
Tabel 3.3	Distribusi PDRB Jawa Tengah Menurut Jenis Penggunaan Tahun 2012 - 2013.....	III-3
Tabel 3.4	PDRB per Kapita Jawa Tengah Tahun 2012 - 2013.....	III-3
Tabel 3.5	Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2013, Target Tahun 2014 dan Prediksi Tahun 2015 - 2016.....	III-6
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2016	III-8
Tabel 3.7	Persentase Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2013.....	III-9
Tabel 3.8	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Jawa Tengah Tahun 2012 - 2016 (Rp.000,-)	III-13
Tabel 3.9	Anggaran dan Proyeksi Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Kewenangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 - 2016 (Rp.000,-).....	III-14
Tabel 3.10	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2016	III-17
Tabel 3.11	Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi, DAK dan Tugas Pembantuan) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2014.....	III-19
Tabel 4.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018.....	IV-13
Tabel 4.2	Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.....	IV-39
Tabel 4.3	Pagu Indikatif Anggaran Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015	IV-62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Alur Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015	I-3
Gambar	2.1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 (%)	II-10
Gambar	2.2	Perkembangan Inflasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 (%)	II-12
Gambar	2.3	Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012.....	II-14
Gambar	2.4	Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012	II-15
Gambar	2.5	Jumlah Penduduk Miskin Kota Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 (%)	II-16
Gambar	2.6	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012	II-17
Gambar	2.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi se Jawa – Bali dan Nasional Tahun 2012	II-18
Gambar	2.8	Perkembangan Usia Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 (Tahun)	II-18
Gambar	2.9	Perkembangan Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012	II-19
Gambar	2.10	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 (Tahun)	II-20
Gambar	2.11	Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013	II-24
Gambar	2.12	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-24
Gambar	2.13	Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-25
Gambar	2.14	Persentase Balita Gizi Buruk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-25
Gambar	2.15	Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012	II-26
Gambar	2.16	Perkembangan IDG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012	II-27
Gambar	2.17	Angka Partisipasi Sekolah pada Jenjang Pendidikan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012	II-33
Gambar	2.18	Angka Partisipasi Kasar PAUD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-35
Gambar	2.19	Persentase kepemilikan KTP (KTP-el) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012	II-50
Gambar	2.20	Perkembangan Kepemilikan Akte Lahir Usia 0 – 18 Tahun di Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-51
Gambar	2.21	Persebaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	II-66
Gambar	2.22	Tingkat Konsumsi Ikan Per Kapita Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 (Kg/Kapita/Tahun)	II-102
Gambar	2.23	Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013	II-111
Gambar	3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2009-2013	III-1
Gambar	3.2	Inflasi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013.....	III-4
Gambar	4.1	Peta Potensi Wilayah Pengembangan di Provinsi Jawa Tengah.....	IV-81

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 memasuki rencana pembangunan tahunan daerah Tahap III perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, mengingat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025, kurun waktu pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah Tahap II adalah Tahun 2010-2014 dan Tahap III adalah Tahun 2015-2019. Kebijakan pembangunan pada Tahap III diarahkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Jawa Tengah, berlandaskan keunggulan sumberdaya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, infrastruktur wilayah yang makin berkualitas dan kondusivitas wilayah yang makin mantap serta kemampuan ilmu dan teknologi yang makin meningkat.

RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 dan disusun dengan mengacu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015. RKPD dimaksud memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tahapan dan proses penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 berpedoman pada Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Secara umum tahapan penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut : 1) Persiapan penyusunan RKPD; 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD; 3) Penyusunan Rancangan RKPD; 4) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang sebelumnya didahului dengan

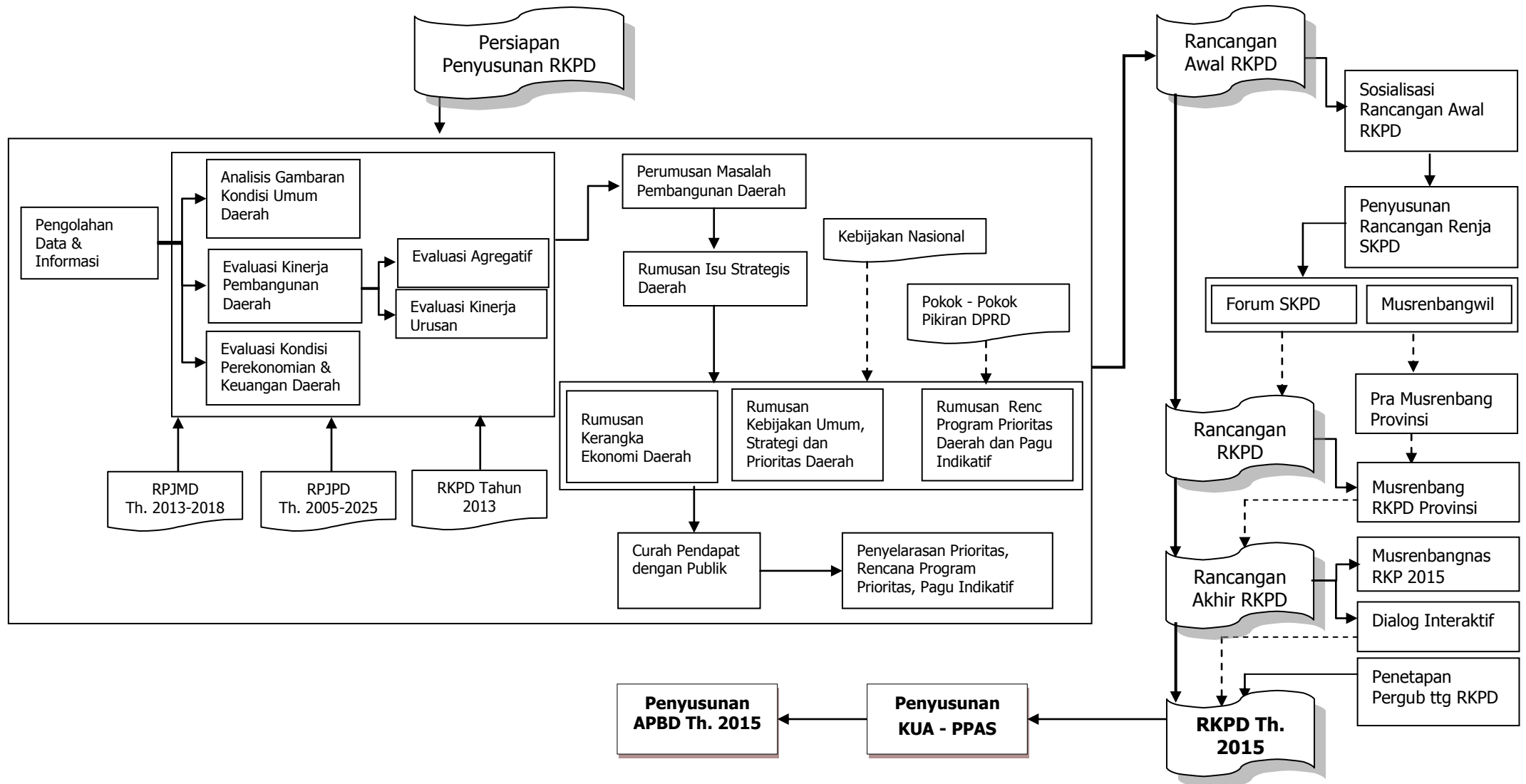
kegiatan Pra Musrenbang; 5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan 6) Penetapan RKPD.

Secara rinci proses penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dimulai dengan persiapan penyusunan RKPD berupa pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi RKPD, penyusunan agenda kerja dan penyiapan data serta informasi perencanaan pembangunan daerah. Langkah berikutnya adalah penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2015, mencakup berbagai aktivitas antara lain : a) Pengolahan data dan informasi; b) Analisis gambaran umum kondisi daerah; c) Analisis kondisi perekonomian dan keuangan daerah; d) Evaluasi kinerja pembangunan tahun 2013; e) Telaah kebijakan Pemerintah; f) Telaah pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Jawa Tengah; g) Perumusan permasalahan pembangunan daerah; h) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah; i) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta pagu indikatif; j) Perumusan program prioritas dan pagu indikatif; k) Penyajian dan sosialisasi Rancangan Awal RKPD; dan l) Penyelarasan rencana program prioritas dan pagu indikatif. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan RKPD yang pada intinya menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan masukan dan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan harmonisasi serta sinergitas terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2015. Setelah rancangan RKPD tersusun selanjutnya dibahas dalam forum Musrenbang Tahun 2014, sebagai wahana perwujudan pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil Musrenbang, kemudian dirumuskan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2015 dan langkah selanjutnya adalah penetapan RKPD dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah.

Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 diupayakan sinergis dan sinkron dengan kebijakan pemerintah melalui 4 (empat) pilar pembangunan yaitu *pro poor*, *pro job*, *pro growth*, dan *pro environment*, mendukung aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, meningkatkan keterkaitan antar sektor dan antar wilayah, serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015 dan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015. Disamping itu juga menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2015 bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Alur penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Alur Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan dokumen ini juga memperhatikan RKP Tahun 2015.

Beberapa dokumen perencanaan multi sektor di tingkat nasional yang memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 adalah : 1) Standar Pelayanan Minimal (SPM); 2) Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) di Indonesia; 3) *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ; 4) *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); 5) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG) 2011-2015; 6) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) Tahun 2010-2020; 7) Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009-2015; 8) *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025; 9) Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025; 10) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan 11) Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

Selanjutnya dokumen perencanaan multi sektor di tingkat provinsi yang juga menjadi rujukan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, antara lain : 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029; 2) Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millenium Development Goals* (RAD MDG's) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015; 3) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015; 4) Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Tahun 2010-2020; dan 5) Rencana Aksi Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

1.4. Kaidah Pelaksanaan

1. RKPD Tahun 2015 merupakan rencana kerja pemerintah daerah selama satu tahun dengan mendasarkan potensi yang tersedia, prioritas, target dan capaian yang telah ditetapkan.
2. Berdasarkan pasal 285 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan

dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan;
- d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.5. Sistematika RKPD

Sistematika RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; kaidah pelaksanaan; sistematika RKPD; serta maksud dan tujuan.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi daerah yang terdiri dari aspek geografi, aspek demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing; evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2013 dan realisasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 menurut urusan kewenangan provinsi; evaluasi capaian MDG's; lingkungan strategis yang terdiri atas internal dan eksternal; permasalahan pembangunan daerah; serta isu strategis pembangunan daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri atas kondisi ekonomi daerah, dan tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2015 dan 2016; serta arah kebijakan keuangan daerah yang terdiri atas proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah; prioritas pembangunan daerah; percepatan pencapaian target MDG's; dan kebijakan serta strategi pengembangan kewilayahan Jawa Tengah.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015

Memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2015 menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

BAB VI PENUTUP

Memuat harapan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.

1.6. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 adalah untuk:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2015;
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2015.

Adapun tujuannya adalah untuk :

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015;
2. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;
3. Menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2015 bagi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah;
4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Gambaran Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi

Letak geografis Provinsi Jawa Tengah berada pada 5^o40' - 8^o30' Lintang Selatan dan 108^o30' - 111^o30' Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 3.254.412 Ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa. Wilayah Provinsi Jawa Tengah berada di tengah Pulau Jawa yang berbatasan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan; Provinsi Jawa Barat di sebelah barat; Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, meliputi 573 Kecamatan, 7.809 Desa, dan 769 Kelurahan.

Kondisi permukaan bumi wilayah Provinsi Jawa Tengah terbentang dengan ketinggian yang beragam, meliputi dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan yang membujur di wilayah tengah, dengan sekitar 53% wilayah Jawa Tengah berada pada ketinggian 0-99 m dpl. Sedangkan kemiringan lahan di wilayah Jawa Tengah juga bervariasi, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2% sebesar 38%; lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31%; lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19%; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12%.

Wilayah Jawa Tengah memiliki jenis dan struktur tanah yang beraneka ragam, dengan tingkat kesuburan yang cukup tinggi, meliputi organosol, aluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, dan podsolik, dan didominasi jenis tanah latosol, aluvial, dan grumosol. Sedangkan jenis tanah aluvial yang ada di Jawa Tengah adalah Aluvial Hidromorf, Aluvial Kelabu Kekuningan dan Aluvial Coklat Kelabu Gelap.

Kondisi hidrologis di wilayah Jawa Tengah, digambarkan dengan jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Jawa Tengah yang cukup banyak. Terdapat 19 DAS Prioritas di Jawa Tengah, yaitu DAS Garang (Babon), DAS Serang, DAS Bodri, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Babakan, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Citanduy (Segara Anakan; Jabar Jateng), DAS Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Progo (Jateng, DIY), DAS Bribin (Jateng, DIY), dan DAS Serang (Jateng, DIY).

Sedangkan jumlah sungai di wilayah Jawa Tengah juga cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah, antara lain Sungai Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Tuntang, Klawing, Lusi, Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-

lain. Sungai Bengawan Solo dan Sungai Serayu merupakan dua sungai di Jawa Tengah yang cukup besar dan panjang, memiliki luas daerah pengaliran lebih dari 1.000 km², dengan debit yang cukup besar dan perlu diwaspadai karena berisiko mengakibatkan wilayah di sekitarnya rawan banjir limbah.

Iklim wilayah Jawa Tengah, seperti juga wilayah Indonesia secara umum, termasuk dalam kategori iklim tropis basah, dengan suhu udara rata-rata pada tahun 2012 berkisar antara 25°C–28°C dan kelembabam udara berkisar antara 75%-83%. Pada periode yang sama, tercatat curah hujan tertinggi di Stasiun Meteorologi Bojongsari sebesar 4.972 mm, dan hari hujan terbanyak sebesar 203 hari yang tercatat di Stasiun Meteorologi Cilacap.

Penggunaan lahan dengan memperhatikan peruntukannya berdasarkan pola ruang dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, terdiri dari Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung. Peruntukan Kawasan Budidaya meliputi Hutan Produksi, Hutan Rakyat, Pertanian, Perkebunan, Pertambangan, Industri, Peternakan dan Permukiman seluas 2.693.008 Ha, dan lahan peruntukan Kawasan Lindung meliputi Hutan Lindung, Kawasan Sempadan, Suaka Alam dan Pelestarian Alam, Kawasan Lindung Karst seluas 561.404 Ha.

Sedangkan pembagian penggunaan lahan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 berdasarkan kriteria lahan sawah dan bukan lahan sawah, diketahui luas lahan sawah sebesar 991.524 Ha (30,47%) dan luas bukan lahan sawah sebesar 2.262.888 Ha (69,53%).

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi wilayah yang cukup besar untuk dikembangkan sesuai dengan pola ruang dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029, terutama potensi peruntukan kawasan budidaya yaitu sebagai berikut :

1. Kawasan hutan produksi dengan luas 546.290 Ha terbagi ke dalam 20 KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan), meliputi :
 - a. Kawasan hutan produksi tetap seluas ± 183.930 Ha, berada di seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Karanganyar;
 - b. Kawasan hutan produksi terbatas seluas ± 362.360 Ha, berada di seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Semarang;
2. Kawasan hutan rakyat seluas 345.822,96 Ha (10,63% luas Jawa Tengah), meliputi 29 Kabupaten dan 5 Kota kecuali Kota Tegal;
3. Kawasan peruntukan pertanian, meliputi :
 - a. Kawasan pertanian lahan basah, seluas ± 990.652 ha, yang ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan, yang diarahkan di semua Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
 - b. Kawasan pertanian lahan kering ± 955.587 ha, yang diarahkan di semua Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;

4. Kawasan peruntukan perkebunan seluas \pm 885.344 Ha, terdiri dari perkebunan rakyat seluas 845.668 Ha (96%), PTP Nusantara IX seluas 28.212 Ha (3%), dan Perkebunan Besar Swasta seluas 11.464 Ha (1%);
5. Kawasan peruntukan peternakan, meliputi :
 - a. Kawasan peternakan besar dan kecil, yang diarahkan di semua Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
 - b. Kawasan peternakan unggas, yang diarahkan di semua Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
6. Kawasan peruntukan perikanan sebesar \pm 24.802 Ha, diarahkan untuk dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan difungsikan menjadi lokasi budidaya ikan, meliputi :
 - a. Kawasan perikanan tangkap, yang diarahkan pada perairan Pantai Utara dan Pantai Selatan, danau, waduk, rawa, sungai, dan embung;
 - b. Kawasan perikanan budidaya baik perikanan air payau, air tawar, dan laut, yang diarahkan di semua Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
7. Kawasan peruntukan pertambangan hampir merata di sebagian besar wilayah kabupaten/kota, meliputi :
 - a. Kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batu bara, terletak di kawasan Majenang-Bantarkawung, Serayu-Pantai Selatan, kawasan Serayu-Pantai Utara, kawasan Gunung Slamet, kawasan Sindoro-Sumbing-Dieng, kawasan Merapi-Merbabu-Ungaran, kawasan Gunung Muria, kawasan Pegunungan Kendeng Utara, kawasan Kendeng Selatan, dan kawasan Gunung Lawu;
 - b. Kawasan pertambangan panas bumi, terletak di 9 (sembilan) lokasi kompleks/kawasan panas bumi yang ada di 15 kabupaten, yaitu Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi : Dieng, Gunung Telomoyo, Gunung Ungaran, Gunung Lawu, Baturraden, Guci, Banyugaram, Mangunan-Wanayasa, dan Condrodimuka;
 - c. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, terletak di Wilayah Kerja Migas di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Boyolali, Klaten, Sragen, Karanganyar, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Grobogan, Demak, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Salatiga, Pekalongan, Tegal dan pengembangan sumur tua/marjinal yang tersebar di Kabupaten Blora, Grobogan dan Kendal;
8. Kawasan peruntukan industri, meliputi semua kabupaten/kota di Jawa Tengah kecuali Kota Magelang dan Kota Surakarta, sedangkan kawasan berikat berada di Kabupaten Cilacap, Semarang, Kendal dan Kota Semarang;

9. Kawasan peruntukan pariwisata, meliputi kawasan pengembangan pariwisata koridor Borobudur – Prambanan – Surakarta, koridor Borobudur – Dieng, koridor Semarang – Demak – Kudus – Jepara – Pati – Rembang – Blora, koridor Semarang – Ambarawa – Salatiga, koridor Batang – Pekalongan – Pemalang – Tegal – Brebes, koridor Cilacap – Banyumas – Purbalingga – Banjarnegara, dan koridor Cilacap – Kebumen – Purworejo;
10. Kawasan peruntukkan permukiman, meliputi kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan;
11. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi kawasan pesisir yang terletak di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Pekalongan, dan Tegal; dan kawasan pulau-pulau kecil yaitu Kepulauan Karimunjawa, Pulau Panjang dan Pulau Mandalika (Kabupaten Jepara), Pulau Marongan, Pulau Gede dan Pulau Sualan (Kabupaten Rembang), dan Pulau Nusakambangan (Kabupaten Cilacap).

Selain itu Jawa Tengah termasuk dalam wilayah yang tergolong rawan bencana alam seperti banjir, tsunami, abrasi dan longsor. Berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia BNPB Tahun 2011, Provinsi Jawa Tengah memiliki Skor Indeks Rawan Bencana tertinggi di Indonesia dengan 34 kabupaten/kota memiliki Skor Indeks Rawan pada kategori tinggi. Kerawanan bencana di Jawa Tengah tersebut dapat diindikasikan dengan frekuensi kejadian bencana alam di Jawa Tengah pada kurun waktu 2008-2012 yang semakin meningkat. Kawasan rawan bencana alam di Jawa Tengah meliputi 10 kawasan yaitu :

1. Kawasan Rawan Banjir berdasarkan data rekapitulasi bencana banjir periode bulan Oktober 2012 sampai dengan Mei 2013, wilayah yang mengalami genangan akibat curah hujan tinggi, luapan air sungai ataupun rusaknya bendung/tanggul yang mengancam areal persawahan, jalan dan permukiman, yaitu Kabupaten Demak, Grobogan, Kendal, Semarang, Pati, Kudus, Brebes, Tegal, Pekalongan, Kebumen, Magelang, Purworejo, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Sragen, Karanganyar, Cilacap, Banjarnegara, Banyumas, dan Purbalingga;
2. Kawasan Rawan Kekeringan, yaitu kawasan dengan ketersediaan air rendah untuk pertanian dan kebutuhan konsumsi masyarakat, khususnya pada musim kemarau yang diperparah dampak perubahan iklim dan pemanasan global yang mengancam Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Jepara, Kudus, Blora, Rembang, Pati, Demak, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes;
3. Kawasan Rawan Tanah Longsor, yaitu wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah bergerak akibat patahan atau pergeseran, kemiringan lereng, jenis/karakter batuan, hujan,

- kandungan air dalam tanah dan penggunaan lahan yang terdapat di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes dan Kota Semarang;
4. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi, yaitu wilayah di sekitar puncak gunung berapi yang rawan terhadap bahaya primer berupa lelehan lava, semburan api, luncuran awan panas piroklastik, gas vulkanik beracun dan bahaya sekunder berupa aliran lahar hujan, banjir bandang dan longsoran material vulkanik. Bahaya tersebut khususnya mengancam kawasan Gunung Merapi di Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten, Kota Magelang dan Gunung Slamet di Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, Brebes dan Kota Tegal;
 5. Kawasan Rawan Gempa Bumi, meliputi wilayah Selatan Jawa Tengah dimana relatif lebih dekat dengan zona tumbukan lempeng benua dan terdapat sebaran garis-garis sesar aktif yang terdapat di wilayah Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Klaten dan Wonogiri. Peristiwa gempa bumi signifikan terakhir terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 berkekuatan 6,3 Skala Richter, yang mengguncang bagian selatan Pulau Jawa dan berdampak hingga radius 95 km dari pusat gempa meliputi Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Wonogiri, Purworejo, Magelang, Kebumen, Temanggung dan Karanganyar;
 6. Kawasan Rawan Gelombang Pasang, meliputi wilayah pantai berkemiringan landai di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Pekalongan dan Tegal;
 7. Kawasan Rawan Tsunami, meliputi kawasan Pesisir Pantai Selatan berhadapan dengan Samudera Hindia yang terdapat di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo dan Wonogiri. Tsunami terakhir terjadi pada 17 Juli 2006 akibat gempa bawah laut di Samudera Hindia dan menimbulkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan sarana prasarana perikanan dan kerusakan lingkungan pantai di Kabupaten Cilacap, Kebumen dan Purworejo;
 8. Kawasan Rawan Abrasi yang mengikis tanah daratan kawasan pesisir pantai utara berakibat pada rusaknya kawasan pertambakan, pelabuhan dan permukiman di Kabupaten Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Pekalongan dan Tegal;
 9. Kawasan Rawan Angin Topan dimana angin dengan kecepatan dan daya rusak tinggi melintasi daratan yang seringkali terjadi di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Blora, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Kota Semarang dan Pekalongan;

10. Kawasan Rawan Gas Beracun, meliputi wilayah di sekitar kawah Sinila, Timbang, Sikendang, Sibanteng dan Sileri di kawasan Pegunungan Dieng, mengancam areal permukiman dan pertanian desa-desa sekitarnya yang terdapat di wilayah perbatasan Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo.

Selama kurun waktu 2010-2013, frekuensi kejadian bencana alam di Jawa Tengah cenderung fluktuatif. Terutama kejadian bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah pantai utara Jawa Tengah hingga awal tahun 2014, yang menimbulkan dampak dan kerugian cukup besar di semua sektor. Frekuensi kejadian bencana di Jawa Tengah dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Frekuensi Kejadian Bencana di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010 - 2013

No	Jenis Bencana	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Banjir	115	85	160	114
2	Tanah Longsor	141	202	201	244
3	Gempa Bumi	1	3	-	8
4	Letusan Gunung Berapi	3	1	-	2
5	Gas Beracun	-	1	-	-
6	Gelombang Pasang & Abrasi	-	-	8	2
7	Tsunami	-	-	-	-
8	Angin Topan	122	104	312	212
9	Kekeringan	-	15	17	2
10	Kebakaran	73	268	305	201
11	Lainnya	3	-	-	6
	Jumlah	458	679	1.003	791

Sumber : Sekretariat BPBD Prov. Jateng, 2013

2.1.2. Aspek Demografi

Berdasarkan proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010, jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2012 sebanyak 33.270.207 jiwa atau sekitar 13,52% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 16.495.705 Jiwa (49,58%) dan perempuan sebanyak 16.774.502 Jiwa (50,42%), dengan Rasio Jenis Kelamin (RJK) adalah sebesar 98,34.

Penduduk di Jawa Tengah tersebar di seluruh kabupaten/kota, namun distribusinya belum merata. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kabupaten Brebes (1.770.480 jiwa), sedangkan paling sedikit berada di Kota Magelang (120.447 jiwa).

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2012, maka kepadatan penduduk Jawa Tengah diproyeksikan sebesar 1.022 jiwa/km², meningkat dibandingkan kondisi tahun 2011 sebesar 1.003 jiwa/km². Sedangkan sebaran kepadatan penduduk di kabupaten/kota menunjukkan bahwa wilayah kota rata-rata memiliki kepadatan

penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten. Pada tahun 2012, kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Surakarta (11.573 jiwa/km²) dan terendah di Kabupaten Blora (472 jiwa/km²). Selengkapnya jumlah penduduk, rasio jenis kelamin dan kepadatan penduduk pada masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2012 disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, serta Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2012*)				Kepadatan Penduduk Tahun 2012*)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	
1.	Kab. Cilacap	841.392	838.472	1.679.864	100,35	786
2.	Kab. Banyumas	800.728	802.309	1.603.037	99,80	1.207
3.	Kab. Purbalingga	433.425	444.064	877.489	97,60	1.128
4.	Kab. Banjarnegara	446.245	444.717	890.962	100,34	833
5.	Kab. Kebumen	588.284	593.394	1.181.678	99,14	921
6.	Kab. Purworejo	349.321	359.162	708.483	97,26	685
7.	Kab. Wonosobo	390.970	380.477	771.447	102,76	783
8.	Kab. Magelang	611.711	607.660	1.219.371	100,67	1.123
9.	Kab. Boyolali	469.242	484.075	953.317	96,94	939
10.	Kab. Klaten	565.750	587.297	1.153.047	96,33	1.759
11.	Kab. Sukoharjo	420.398	428.320	848.718	98,15	1.819
12.	Kab. Wonogiri	459.859	486.514	946.373	94,52	519
13.	Kab. Karanganyar	414.715	424.047	838.762	97,80	1.086
14.	Kab. Sragen	428.761	446.522	875.283	96,02	925
15.	Kab. Grobogan	662.215	676.912	1.339.127	97,83	678
16.	Kab. Blora	416.823	430.302	847.125	96,87	472
17.	Kab. Rembang	303.183	305.365	608.548	99,29	600
18.	Kab. Pati	590.871	629.122	1.219.993	93,92	818
19.	Kab. Kudus	397.211	409.794	807.005	96,93	1.898
20.	Kab. Jepara	570.684	574.232	1.144.916	99,38	1.140
21.	Kab. Demak	540.561	550.818	1.091.379	98,14	1.216
22.	Kab. Semarang	475.682	492.701	968.383	96,55	1.023
23.	Kab. Temanggung	366.155	364.565	730.720	100,44	840
24.	Kab. Kendal	469.461	456.864	926.325	102,76	924
25.	Kab. Batang	363.720	364.858	728.578	99,69	923
26.	Kab. Pekalongan	427.785	433.581	861.366	98,66	1.030
27.	Kab. Pemasang	635.899	649.125	1.285.024	97,96	1.270
28.	Kab. Tegal	706.171	714.830	1.421.001	98,79	1.615
29.	Kab. Brebes	889.428	881.052	1.770.480	100,95	1.068
30.	Kota Magelang	59.274	61.173	120.447	96,90	6.647
31.	Kota Surakarta	247.728	261.848	509.576	94,61	11.573
32.	Kota Salatiga	86.788	90.692	177.480	95,70	3.351

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2012*)				Kepadatan Penduduk Tahun 2012*)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	
33.	Kota Semarang	799.034	830.890	1.629.924	96,17	4.362
34.	Kota Pekalongan	145.130	145.217	290.347	99,94	6.458
35.	Kota Tegal	121.101	123.531	244.632	98,03	7.092
	Jumlah 2012*)	16.495.705	16.774.502	33.270.207	98,34	1.022
	2011*)	16.273.976	16.369.636	32.643.612	99,42	1.003

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013

Keterangan : *) Angka Sementara Proyeksi SP 2010

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Pertumbuhan PDRB

Dalam rentang waktu selama tahun 2009 – 2013 nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan secara positif. Tahun 2009 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp.397,903 Trilyun meningkat menjadi Rp.623,749 Trilyun pada tahun 2013. Sedangkan tahun 2009 nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp.176,673 Trilyun, meningkat menjadi Rp. 223,099 Trilyun pada tahun 2013.

Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2009 – 2013 bergerak secara positif, berturut-turut sejak tahun 2009 hingga 2013 sebesar 5,14%, 5,84%, 6,01%, 6,34%, dan 5,81%.

Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,81% dibandingkan tahun 2012, dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar 54.838,20 milyar rupiah, dan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 623.749,6 milyar rupiah. Selama tahun 2013, hampir seluruh sektor ekonomi pembentuk PDRB mengalami pertumbuhan positif dibandingkan tahun 2012. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan mencapai 10,6%, dan yang terendah adalah sektor pertanian sebesar 2,2%.

Melihat distribusi dan peranan sektor ekonomi pada PDRB tahun 2013, maka diketahui tiga sektor utama di Jawa Tengah masih memberikan kontribusi yang cukup besar pada PDRB yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor pertanian, masing-masing memberikan peranan sebesar 32,6 persen, 20,7 persen, dan 18,3 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, beberapa sektor mengalami peningkatan peranan yaitu pertambangan dan penggalian, listrik, gas, dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real estate dan jasa perusahaan. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan peranan yaitu sektor pertanian dan industri pengolahan.

Nilai dan perkembangan pertumbuhan PDRB Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada Tabel 2.3, Tabel 2.4 dan Gambar 2.1.

Tabel 2.3.
Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku
di Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 (Trilyun Rupiah)

No	Sektor	2009		2010		2011 ¹⁾		2012 ¹⁾		2013 ²⁾	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian	79,342	8,89	86,667	9,23	95,078	9,71	104,311	9,71	114,142	9,42
2	Pertambangan & Galian	3,852	9,63	4,302	11,67	4,726	9,85	5,243	10,94	5,980	14,06
3	Industri Pengolahan	130,352	4,28	146,155	12,11	165,850	13,49	182,715	10,17	203,104	11,16
4	Listrik, Gas & Air Bersih	4,114	9,74	4,645	12,91	5,110	10,00	5,648	10,54	6,599	16,84
5	Bangunan	24,448	15,34	27,124	10,94	29,851	10,05	33,352	11,73	37,196	11,52
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	78,262	9,28	86,998	11,16	98,462	13,18	112,908	14,67	129,303	14,52
7	Pengangkutan & Komunikasi	23,836	13,02	26,298	10,33	29,172	10,93	32,951	12,95	37,611	14,14
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	14,447	14,51	15,899	10,05	17,684	11,22	19,993	13,06	23,280	16,44
9	Jasa-jasa	39,246	10,61	46,599	18,74	52,828	13,37	59,359	12,36	66,530	12,08
PRDB Total		397,903	8,38	444,692	11,75	498,763	12,17	556,479	11,57	623,749	12,09

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2011 dan 2012, BRS 2014, BPS Provinsi Jawa Tengah

Keterangan : ¹⁾ Angka Revisi

²⁾ Angka Sementara

³⁾ Angka Sangat Sementara

Tabel 2.4.
Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan
di Jawa Tengah Tahun 2009-2013 (Trilyun Rupiah)

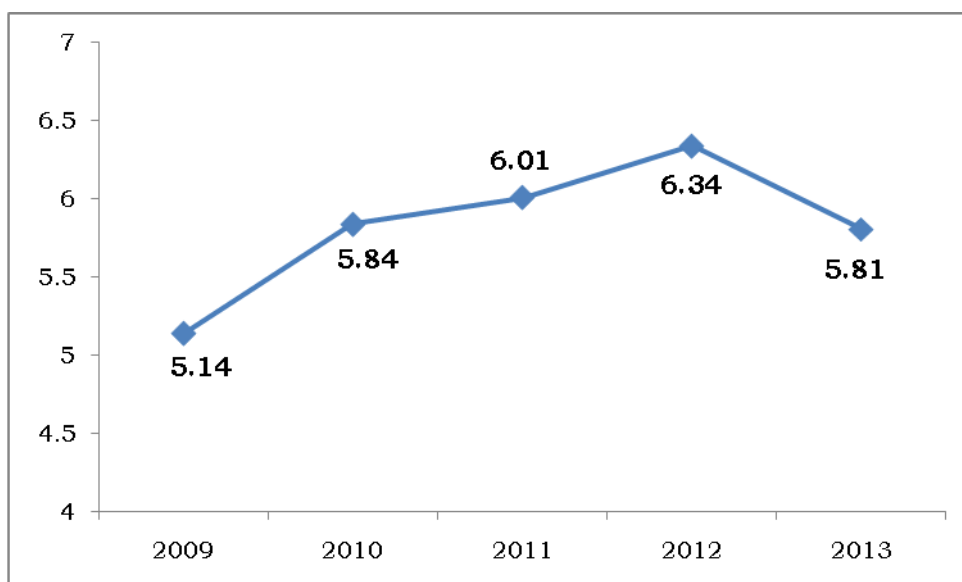
No	Sektor	2009		2010		2011 ¹⁾		2012 ¹⁾		2013 ²⁾	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian	34,101	3,71	34,956	2,51	35,399	1,27	36,712	3,71	37,513	2,18
2	Pertambangan & Galian	1,952	5,49	2,091	7,09	2,193	4,91	2,355	7,38	2,504	6,33
3	Industri Pengolahan	57,444	3,79	61,387	6,86	65,439	6,60	69,012	5,46	73,092	5,91
4	Listrik, Gas & Air Bersih	1,489	5,74	1,614	8,41	1,711	5,97	1,820	6,38	1,973	8,39
5	Bangunan	10,300	6,77	11,014	6,93	11,753	6,71	12,573	6,98	13,449	6,96
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	37,766	7,21	40,056	6,06	43,159	7,75	46,719	8,25	50,209	7,47
7	Pengangkutan & Komunikasi	9,192	7,12	9,805	6,66	10,645	8,56	11,486	7,90	12,238	6,55
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	6,701	7,78	7,038	5,02	7,503	6,62	8,206	9,36	9,073	10,56
9	Jasa-jasa	17,724	5,05	19,029	7,37	20,464	7,54	21,961	7,32	23,044	4,93
PRDB Total		176,673	5,14	186,995	5,84	198,270	6,01	210,848	6,34	223,099	5,81

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2011 dan 2012, BRS 2014, BPS Provinsi Jawa Tengah

Keterangan : ¹⁾ Angka Revisi

²⁾ Angka Sementara

³⁾ Angka Sangat Sementara



Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2011 dan 2012, BRS 2014, BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 (%)

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2013 apabila dibandingkan dengan Provinsi lain di wilayah Jawa – Bali berada pada posisi ke 5 (lima) setelah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Bali dan Banten. Namun masih lebih baik dari angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,78%. Pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi lain di wilayah Jawa – Bali dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi se Jawa – Bali
Tahun 2012 - 2013 (%)

No	Provinsi/Nasional	2012	2013
1	Jawa Timur	7,27	6,55
2	Jawa Barat	6,21	6,06
3	Bali	6,65	6,05
4	Banten	5,87	5,84
5	Jawa Tengah	6,34	5,81
6	DKI Jakarta	6,5	5,63
7	D.I. Yogyakarta	5,32	5,40
	Nasional	6,23	5,78

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013 dan 2014

Selama kurun waktu Tahun 2009 – 2013, struktur pembentuk PDRB Provinsi Jawa Tengah masih didominasi oleh 3 (tiga) sektor yang memberikan kontribusi cukup besar yaitu industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, serta pertanian. Pada Tahun 2013 kontribusi tiga sektor utama pada PDRB yaitu industri pengolahan yang memiliki kontribusi sebesar 32,56%, perdagangan, hotel dan restoran yang memiliki kontribusi sebesar 20,73%, serta pertanian yang memiliki kontribusi sebesar 18,30%. Perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB (ADHB dan ADHK) selama tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6.
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
di Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 (%)

No	Sektor	2009		2010		2011 ^{*)}		2012 ^{*)}		2013 ^{**)}	
		(Hb)	(Hk)	(Hb)	(Hk)	(Hb)	(Hk)	(Hb)	(Hk)	(Hb)	(Hk)
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1.	Pertanian	19,94	19,31	19,49	18,69	19,06	17,85	18,74	17,41	18,30	16,81
2.	Pertambangan dan Galian	0,97	1,11	0,97	1,12	0,95	1,11	0,94	1,12	0,96	1,12
3.	Industri Pengolahan	32,76	32,51	32,87	32,83	33,25	33,01	32,83	32,73	32,56	32,76
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	1,03	0,84	1,04	0,86	1,02	0,86	1,02	0,86	1,06	0,88
5.	Bangunan	6,14	5,83	6,10	5,89	5,99	5,93	5,99	5,96	5,96	6,03
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	19,67	21,38	19,56	21,42	19,74	21,77	20,29	22,16	20,73	22,51
7.	Pengangkutan & Komunikasi	5,99	5,20	5,91	5,24	5,85	5,37	5,92	5,45	6,03	5,49
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perush	3,63	3,79	3,58	3,76	3,55	3,78	3,59	3,89	3,73	4,07
9.	Jasa-jasa	9,86	10,03	10,48	10,18	10,59	10,32	10,67	10,42	10,67	10,33
PRDB Total		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2011 dan 2012, BRS 2013, BPS Provinsi Jawa Tengah

Keterangan : ^{*)} Angka Revisi

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Selanjutnya jika dilihat dari pola distribusi berdasarkan jenis penggunaan maka PDRB ADHB Tahun 2013 menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang terbesar yaitu sebesar 63,94%, yang disusul oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 20%. Perkembangan kontribusi jenis penggunaan terhadap PDRB ADHB selama tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Kontribusi Jenis Penggunaan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013 (%)

No	Jenis Penggunaan	PDRB Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku				
		2009	2010	2011	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
1	Konsumsi Rumah Tangga	64,44	64,21	64,24	63,95	63,94
2	Konsumsi Lembaga Swasta	1,52	1,43	1,39	1,43	1,47
3	Konsumsi Pemerintah	12,11	11,35	11,25	11,06	11,17
4	PMTB	19,45	19,19	18,47	19,63	20,00
5	Perubahan Stok	0,03	(0,50)	3,02	1,22	1,36

No	Jenis Penggunaan	PDRB Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku				
		2009	2010	2011	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
6	Ekspor	44,66	45,15	44,69	46,79	47,67
7	Impor	42,21	40,83	43,06	44,08	45,61
	PDRB Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

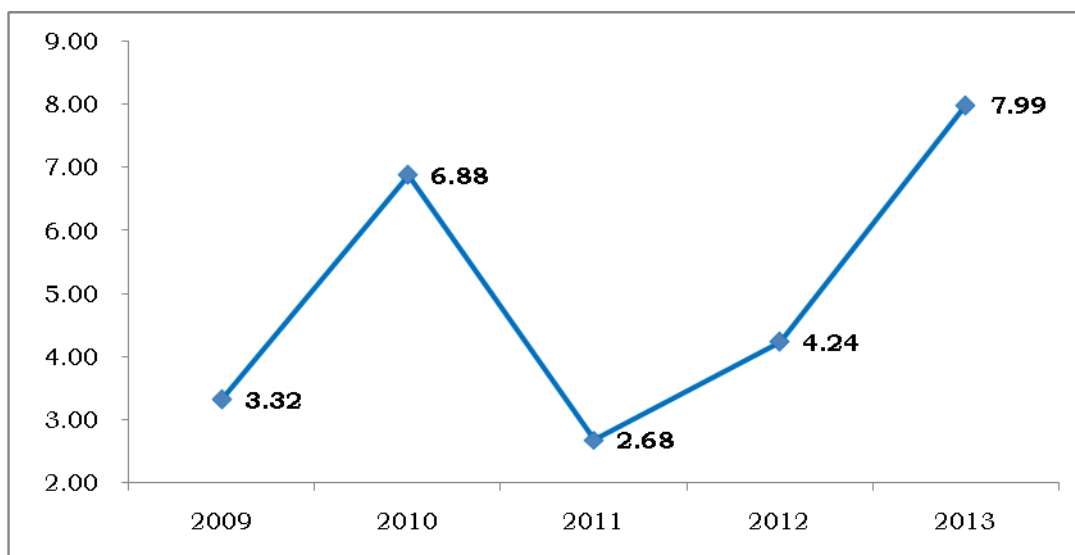
Sumber : PDRB Jateng 2010, 2011, 2012, BRS Jawa Tengah, 2014, BPS Provinsi Jawa Tengah

Keterangan : ^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

2. Inflasi

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai dari Tahun 2009 – 2013 perkembangan inflasi Jawa Tengah sangat fluktuatif, tetapi cenderung meningkat. Laju inflasi tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 (*year on year*) sebesar 7,99 %, lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 sebesar 4,24%. Inflasi terjadi disebabkan adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok makanan jadi; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; bahan makanan; kesehatan dan pendidikan, rekreasi dan olahraga; sandang, dan transport, komunikasi dan jasa keuangan. Perkembangan inflasi di Jawa Tengah selama tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2011 dan 2012, BRS 2014, BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.2

Perkembangan Inflasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 (%)

Apabila dibandingkan dengan Provinsi se Jawa – Bali, inflasi Jawa Tengah Tahun 2013 berada pada urutan ke 4 (empat) setelah Provinsi DI. Yogyakarta, Bali, dan Jawa Timur tetapi masih lebih baik dibanding angka Nasional sebesar 8,38%. Perbandingan inflasi Jawa Tengah dengan provinsi lain se Jawa – Bali dan nasional dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8.
Inflasi Nasional dan Provinsi se Jawa – Bali
Tahun 2012-2013 (%)

No	Provinsi/Nasional	2012	2013
1	Banten	4,37	9,65
2	Jawa Barat	3,86	9,15
3	DKI Jakarta	4,52	8,00
4	Jawa Tengah	4,24	7,99
5	Jawa Timur	4,50	7,59
6	Bali	4,71	7,35
7	D.I. Yogyakarta	4,31	7,32
	Nasional	4,34	8,38

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013 dan 2014

3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2013 angka PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku diperkirakan mencapai Rp 18,7 juta dibandingkan dengan PDRB per kapita tahun 2012 sebesar Rp 16,8 juta. Sedangkan PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2013 sebesar Rp 6,7 juta lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp 6,4 juta. Perkembangan PDRB per kapita Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9.
PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 – 2013 (Rupiah)

Tahun	ADHB	ADHK Tahun 2000
2009	12.322.889	5.471.490
2010	13.730.016	5.773.809
2011 ^{r)}	15.240.878	6.058.600
2012 ^{*)}	16.863.808	6.389.598
2013 ^{**)}	18.751.323	6.706.882

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2013, dan 2014

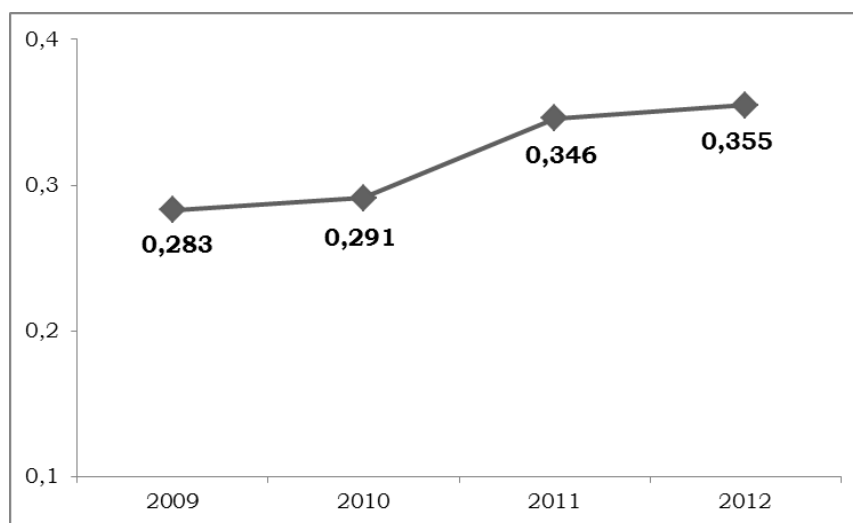
Keterangan : ^{r)} Angka Revisi

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

4. Indeks Gini

Perkembangan Indeks Gini di Jawa Tengah selama tahun 2009-2012 menunjukkan angka yang semakin meningkat. Hal ini menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan antar masyarakat di Jawa Tengah semakin senjang. Indeks Gini pada Tahun 2009 sebesar 0,283 meningkat menjadi 0,355 pada Tahun 2012. Selengkapnya perkembangan Indeks Gini di Jawa Tengah selama tahun 2009 – 2012 dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah Tahun 2012, BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.3
Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012

5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Distribusi pendapatan penduduk Jawa Tengah dapat diukur dengan mendasarkan pada kriteria Bank Dunia, yang membagi menjadi tiga kelompok pendapatan. Kondisi pemerataan pendapatan penduduk berdasarkan kriteria Bank Dunia Tahun 2012, distribusi pendapatan penduduk Jawa Tengah tergolong merata pada ketimpangan rendah. Hal tersebut ditunjukkan sebesar 18,79% pendapatan dinikmati oleh 40% penduduk berpenghasilan rendah, sebesar 32,21% oleh 40% penduduk berpenghasilan menengah dan sebesar 49% oleh 20% penduduk berpenghasilan tinggi. Pemerataan pendapatan penduduk Jawa Tengah versi Bank Dunia dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10.
Pemerataan Pendapatan Penduduk Provinsi Jawa Tengah Menurut Kriteria Bank Dunia Tahun 2009 – 2012 (%)

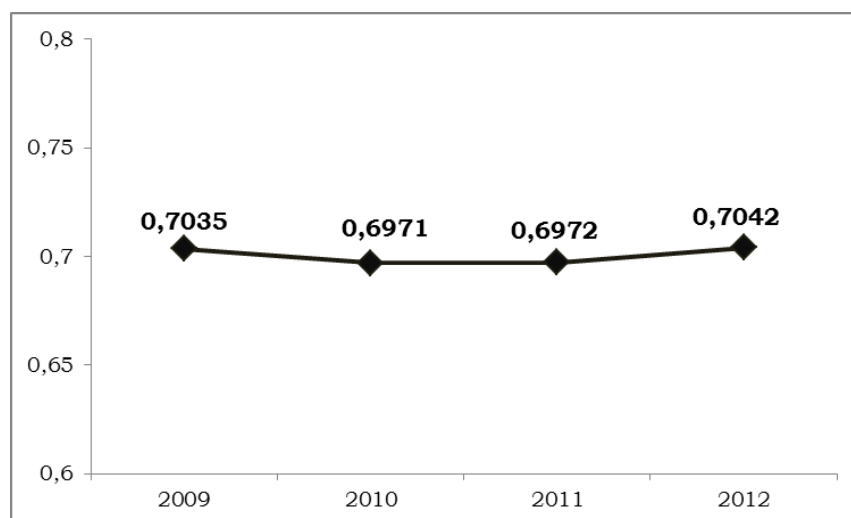
No	Tahun	Kriteria Bank Dunia		
		40% I	40% II	20% III
1	2009	24,11	37,75	38,14
2	2010	22,75	36,95	40,30
3	2011	20,15	36,30	43,55
4	2012	18,79	32,21	49,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013

6. Indeks Williamson

Indeks Williamson sebagai ukuran untuk menggambarkan tingkat kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah menunjukkan bahwa pada kurun waktu tahun 2009-2012 kesenjangan antar wilayah semakin meningkat, dengan indeks sebesar 0,7035 pada tahun 2009 menjadi 0,7042 pada tahun 2012.

Indeks tersebut juga menunjukkan bahwa kesenjangan antar wilayah di Jawa Tengah termasuk kategori tinggi. Perkembangan Indeks Williamson Jawa Tengah tahun 2009 – 2012 dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Sumber : Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota 2011, BPS dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.4
Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012

7. Kemiskinan

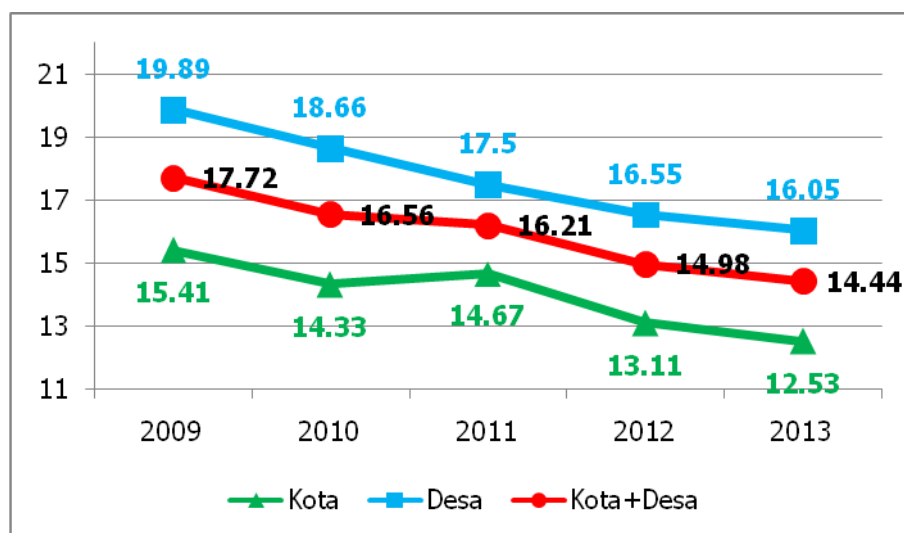
Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah selama tahun 2009-2013 cenderung mengalami penurunan walaupun laju penurunannya melambat. Jumlah penduduk miskin tahun 2013 sebanyak 4,70 juta jiwa (14,44%) lebih rendah dibandingkan tahun 2012 sebanyak 4,86 juta jiwa (14,98%), namun masih di atas rata – rata angka nasional sebesar 11,47%. Secara terinci dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No	Tahun / Bulan	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			Persentase (%)		
		Kota	Desa	Total	Kota	Desa	Total
1	2009/Maret	2.420,90	3.304,80	5.725,70	15,41	19,89	17,72
2	2010/Maret	2.258,94	3.110,22	5.369,16	14,33	18,66	16,56
3	2011/Maret	2.092,51	3.014,85	5.107,36	14,12	17,14	15,76
4	2011/Sept	2.175,82	3.080,17	5.255,99	14,67	17,50	16,21
5	2012/Maret	2.001,12	2.976,25	4.977,36	13,49	16,89	15,34
6	2012/Sept	1.946,51	2.916,90	4.863,41	13,11	16,55	14,98
7	2013/Maret	1.911,21	2.821,74	4.732,95	12,87	15,99	14,56
8	2013/Sept	1.870,73	2.834,14	4.704,87	12,53	16,05	14,44

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2009-2013

Sedangkan persentase penduduk miskin di Jawa Tengah tahun 2013 menunjukkan sebagian besar berada di perdesaan (16,05%) dibanding perkotaan (12,53%). Secara terinci dilihat pada Gambar 2.5.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010-2013

Gambar 2.5
Persentase Penduduk Miskin Kota Desa
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 (%)

Persentase penduduk miskin di Jawa Tengah apabila dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Jawa – Bali tahun 2013 berada pada urutan ke 6 (enam) dan masih di atas rata-rata angka nasional. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12.
Kemiskinan Nasional dan Provinsi se Jawa – Bali
Tahun 2012-2013

No	Provinsi/Nasional	2012		2013	
		(ribu jiwa)	(%)	(ribu jiwa)	(%)
1.	DKI Jakarta	366,77	3,70	375,70	3,72
2.	Bali	160,95	3,95	186,52	4,49
3.	Banten	648,25	5,71	682,71	5,89
4.	Jawa Barat	4.421,48	9,89	4.382,65	9,61
5.	Jawa Timur	4.960,54	13,08	4.865,82	12,73
6.	Jawa Tengah	4.863,41	14,98	4.704,87	14,44
7.	D.I. Yogyakarta	562,11	15,88	535,19	15,03
	Nasional	28.594,64	11,66	28.553,97	11,47

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013 dan 2013

8. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Penanganan tindak kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan kondusivitas daerah, mendukung stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Angka kriminalitas yang tertangani menyatakan jumlah tindak kriminal yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah selama satu tahun terhadap 10.000 penduduk. Angka kriminalitas yang tertangani sebagaimana Tabel 2.13.

Tabel 2.13.
Jumlah Tindak Pidana di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2013

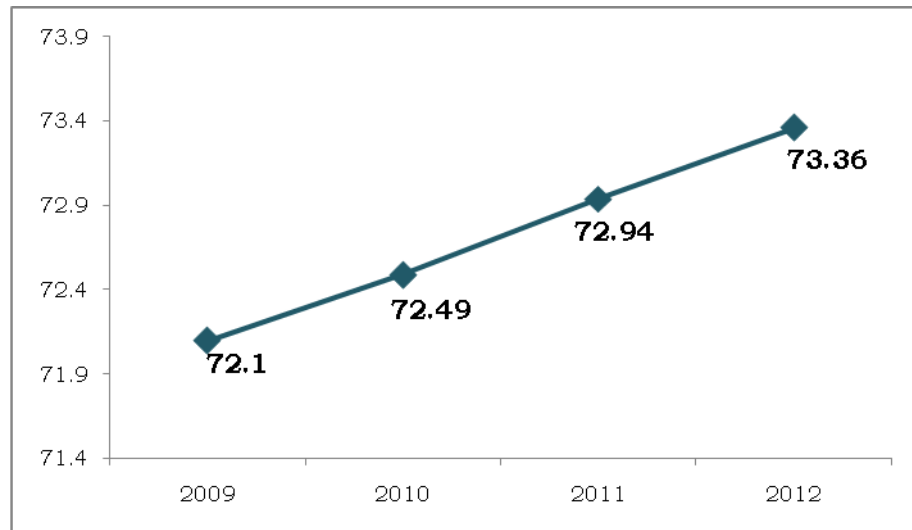
No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana			Angka Kriminalitas Yang Tertangani
		Lapor	Selesai	Rasio (%)	
1	2009	17.391	12.850	73,89	3,91
2	2010	19.645	12.709	64,69	3,92
3	2011	21.675	13.913	64,19	4,26
4	2012	19.094	12.039	63,05	3,61
5	2013	17.444	10.905	62,51	3,28

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 dan Polda Jawa Tengah, 2014

9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang terdiri dari 4 (empat) komponen indikator yaitu Usia Harapan Hidup (UHH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, dan pengeluaran riil per kapita.

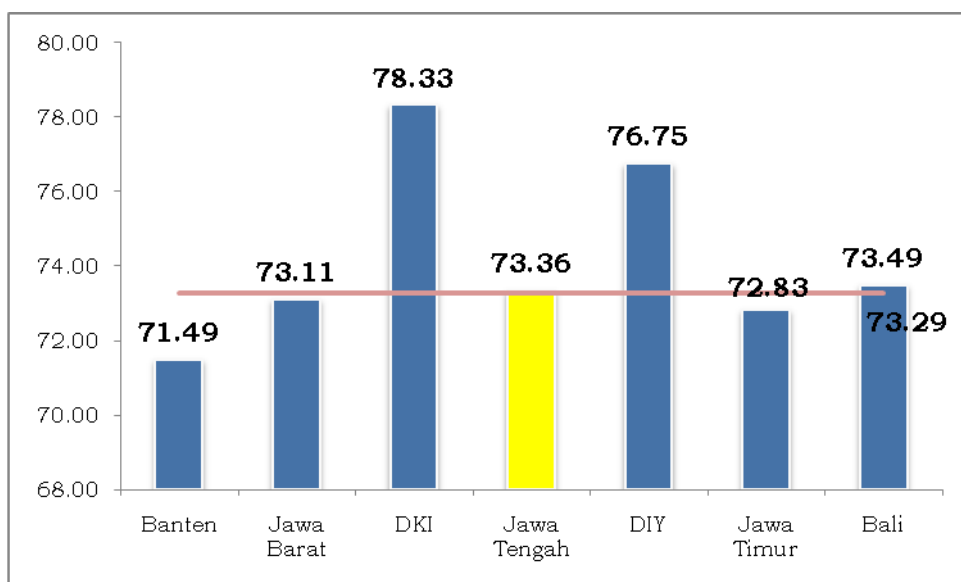
Dalam kurun waktu tahun 2009-2012, capaian IPM Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari 72,1 menjadi 73,36, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.6.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Gambar 2.6
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012

Capaian IPM Jawa Tengah pada tahun 2012 cukup baik apabila dibandingkan dengan nasional, yaitu sebesar 73,29. Sedangkan jika dibandingkan dengan IPM provinsi lain se Jawa – Bali, maka Jawa Tengah menempati urutan ke-4 (empat) setelah DKI Jakarta, DIY dan Bali. Selengkapnya gambaran IPM Jawa Tengah dan provinsi lain serta nasional tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar 2.7.



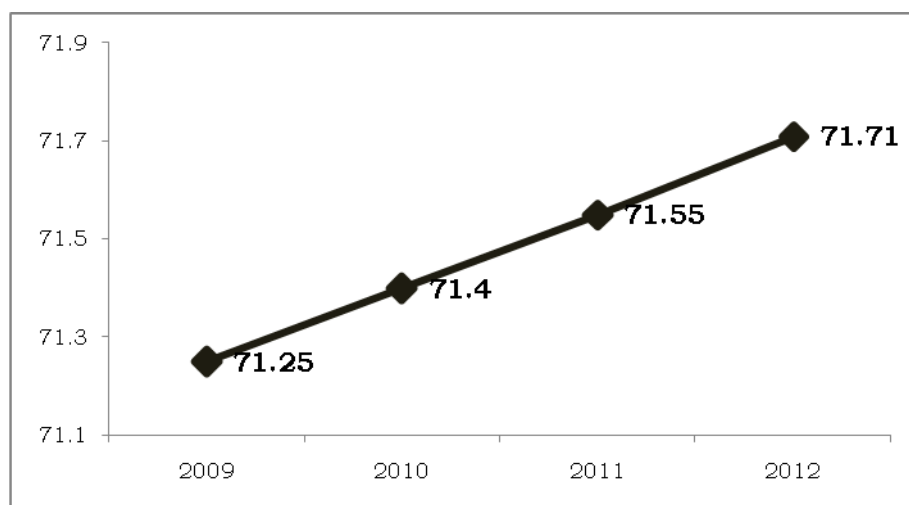
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Gambar 2.7
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi se Jawa – Bali dan Nasional Tahun 2012

Adapun indikator pembentuk IPM secara lengkap dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Usia Harapan Hidup

Dalam kurun waktu Tahun 2009-2012, Usia Harapan Hidup di Jawa Tengah sebesar 71,25 tahun meningkat menjadi 71,71 tahun. Kondisi ini menunjukkan semakin meningkatnya kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Jawa Tengah. Perkembangan UHH masyarakat Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.8.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Gambar 2.8
Perkembangan Usia Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 – 2012 (Tahun)

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian angka provinsi lain di Pulau Jawa dan Bali, dapat diketahui UHH Jawa Tengah pada tahun 2012 menempati urutan ke-3 setelah DKI dan DIY. Perbandingan UHH Jawa Tengah dengan provinsi lain dan nasional dapat dilihat pada Tabel 2.14.

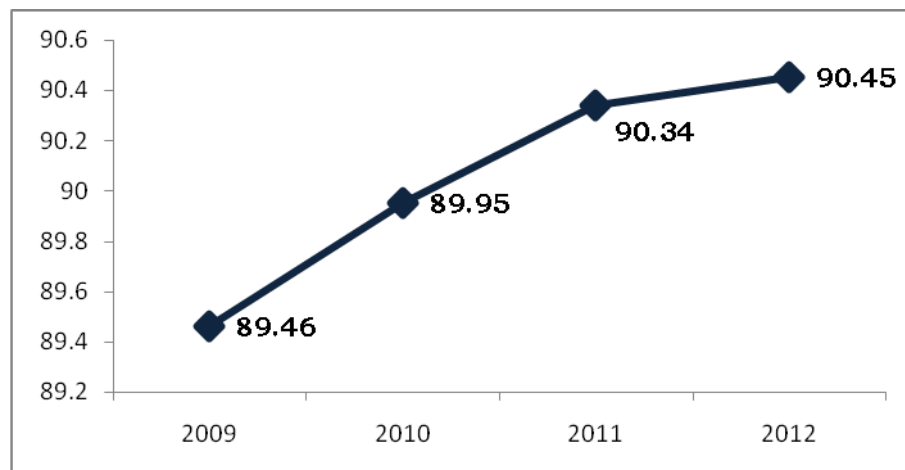
Tabel 2.14.
Usia Harapan Hidup Nasional dan Provinsi se Jawa-Bali
Tahun 2011-2012 (Tahun)

No	Provinsi/Nasional	2011	2012
1	DKI Jakarta	73,35	73,49
2	D.I. Yogyakarta	73,27	73,33
3	Jawa Tengah	71,55	71,71
4	Bali	70,78	70,84
5	Jawa Timur	69,86	70,09
6	Jawa Barat	68,40	68,80
7	Banten	65,05	65,23
	Nasional	69,65	69,87

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

2) Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis terhadap total jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Tengah meningkat dari 89,46% pada tahun 2009 menjadi 90,45% pada tahun 2012, yang dapat dilihat pada Gambar 2.9.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Gambar 2.9
Perkembangan Angka Melek Huruf
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012

Capaian Angka Melek Huruf Jawa Tengah tersebut, apabila dibandingkan dengan provinsi lain di se- Jawa dan Bali, berada pada urutan ke 5 (lima) setelah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan DIY. Sedangkan apabila dibandingkan dengan angka melek huruf nasional, maka angka Jawa Tengah masih berada di bawah angka nasional sebesar 93,25. Lebih lengkap kondisi angka melek huruf di provinsi se-Jawa dan Bali, serta nasional dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.15.

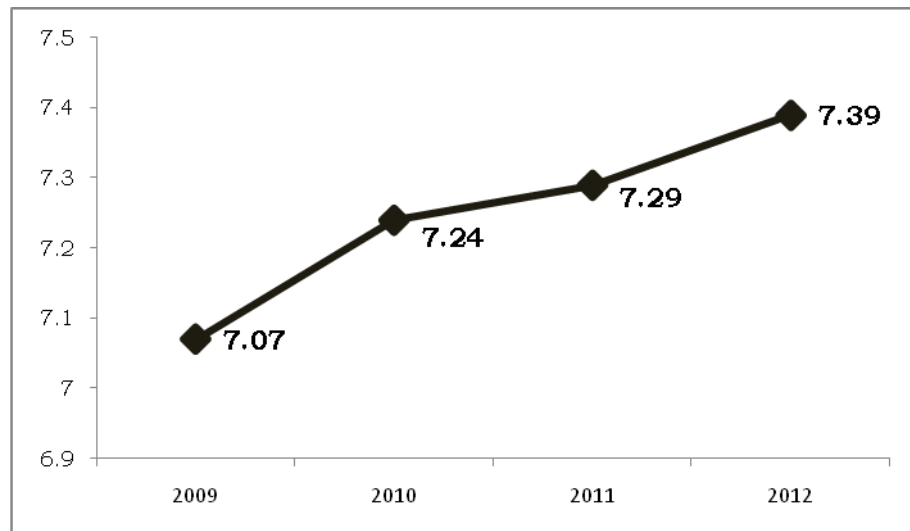
Tabel 2.15.
Angka Melek Huruf Penduduk Berusia 15 tahun ke Atas Menurut
Nasional dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2011-2012

No	Provinsi/Nasional	2011	2012
1.	DKI Jakarta	98,83	99,21
2.	Banten	96,25	96,51
3.	Jawa Barat	95,96	96,39
4.	D.I. Yogyakarta	91,49	92,02
5.	Jawa Tengah	90,34	90,45
6.	Bali	89,17	90,17
7.	Jawa Timur	88,52	89,28
	Nasional	92,81	93,25

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

3) Angka Rata – Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani. Dalam kurun waktu 2009-2012, rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah meningkat dari 7,07 tahun menjadi 7,39 tahun, sebagaimana Gambar 2.10.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Gambar 2.10
Perkembangan Rata – Rata Lama Sekolah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 (Tahun)

Capaian rata-rata lama sekolah Jawa Tengah tahun 2012 apabila dibandingkan dengan provinsi lain se Jawa dan Bali, menempati urutan ke 7 (tujuh), dan masih di bawah capaian rata-rata Nasional sebesar 8,08. Capaian tersebut perlu dipacu peningkatannya, sehingga dapat menyamai atau bahkan melampaui capaian provinsi lain. Data capaian secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 2.16.

Tabel 2.16.
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Menurut
Nasional dan Provinsi se Jawa-Bali
Tahun 2011-2012 (Tahun)

No	Provinsi/Nasional	2011	2012
1.	DKI Jakarta	10,95	10,98
2.	D.I. Yogyakarta	9,20	9,21
3.	Banten	8,41	8,61
4.	Bali	8,35	8,57
5.	Jawa Barat	8,06	8,08
6.	Jawa Timur	7,34	7,45
7.	Jawa Tengah	7,29	7,39
	Nasional	7,94	8,08

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

4) Pengeluaran Per Kapita

Perkembangan pengeluaran perkapita di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2009-2012 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hal ini digambarkan dengan nilai pengeluaran per kapita pada tahun 2009 sebesar Rp. 636,39 ribu menjadi Rp. 643,53 ribu pada Tahun 2012. Sedangkan apabila dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Jawa, pengeluaran perkapita Jawa Tengah tahun 2012 berada pada urutan ke 3 (tiga) dibawah Provinsi Jawa Timur dan DI Yogyakarta tetapi masih diatas capaian nasional sebesar Rp. 641,04 ribu. Perkembangan pengeluaran perkapita di Jawa Tengah selama tahun 2009 – 2012 dan perbandingan dengan provinsi lain di pulau Jawa dan Nasional dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17.
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan
Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2009 - 2012

(Dalam Ribu Rupiah)

No	Provinsi	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1	DIY	644,67	646,56	650,16	653,78
2	Jawa Timur	640,12	643,60	647,46	651,04
3	Jawa Tengah	636,39	637,27	640,41	643,53
4	Jawa Barat	628,71	632,22	635,80	638,90
5	Banten	627,63	629,70	633,64	636,73
6	DKI Jakarta	627,46	628,67	632,17	635,29
	Nasional	631,46	633,64	638,05	641,04

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

10. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Dalam kurun waktu tahun 2009-2013, Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Jawa Tengah untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah cenderung meningkat. Untuk jenjang SD/MI meningkat dari 107,31 menjadi 109,08 dan jenjang

SMP/MTs dari 96,93 menjadi 100,52. Demikian pula untuk jenjang SMA/MA/SMK meningkat dari 54,87 menjadi 70,00. Capaian APK SMA/MA/SMK tersebut masih perlu ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU). Secara lengkap, perkembangan APK Jawa Tengah dan Nasional untuk semua jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009 – 2013

No	Tahun	SD / MI (%)		SMP / MTs (%)		SMA/SMK/MA (%)	
		Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas
1	2009	107,31	116,56	96,93	96,18	54,87	64,28
2	2010	108,00	116,77	99,40	98,11	64,62	69,60
3	2011	114,93	115,33	99,72	98,20	64,93	70,53
4	2012	109,06	115,43	100,50	99,47	67,00	76,40
5	2013	109,08	115,88	100,52	100,16	70,00	78,19

Sumber : Kemdikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2013

11. Angka Partisipasi Murni (APM)

Dalam kurun waktu tahun 2009-2013, capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Jawa Tengah untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah cenderung meningkat. Untuk jenjang SD/MI meningkat dari 95,82 menjadi 98,60 dan jenjang SMP/MTs dari 75,29 menjadi 79,00 serta jenjang SMA/MA/SMK meningkat dari 49,19 menjadi 55,00. Namun demikian, capaian APM SD/MI tersebut perlu dipacu peningkatannya untuk mencapai target MDG's sebesar 100% pada tahun 2015. Demikian pula untuk capaian APM SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, perlu ditingkatkan guna keberlanjutan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun menuju wajib belajar 12 tahun dalam upaya mendukung implementasi Pendidikan Menengah Universal (PMU). Perkembangan APM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional untuk semua jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19.
Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009 – 2013

No	Tahun	SD/MI		SMP/MTs		SMA/SMK/MA	
		Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas
1	2009	95,82	95,14	75,29	73,62	49,19	45,86
2	2010	97,08	95,23	76,87	74,52	50,12	55,73
3	2011	96,04	95,41	78,33	75,64	51,46	56,52
4	2012	98,30	95,55	78,92	77,71	53,00	57,74
5	2013	98,60	95,71	79,00	78,43	55,00	58,25

Sumber : Kemdikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2013

12. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Selama kurun waktu 2009 - 2012 jumlah penduduk yang berpendidikan/lulusan SD/MI relatif tinggi, walaupun kecenderungannya menurun. Pada Tahun 2009 - 2012, APT jenjang SD/MI dari 55,35% menjadi 52,73%. Jenjang SMP/MTs, meningkat dari 16,94% menjadi 17,91%, serta jenjang SMA/SMK/MA dari 20,39% meningkat menjadi 23,73%. Tantangan ke depan adalah upaya meningkatkan jumlah penduduk yang berkualifikasi pendidikan menengah. Dengan kata lain perlu peningkatan Angka Partisipasi SMA/SMK/MA dengan meminimalkan Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.20.

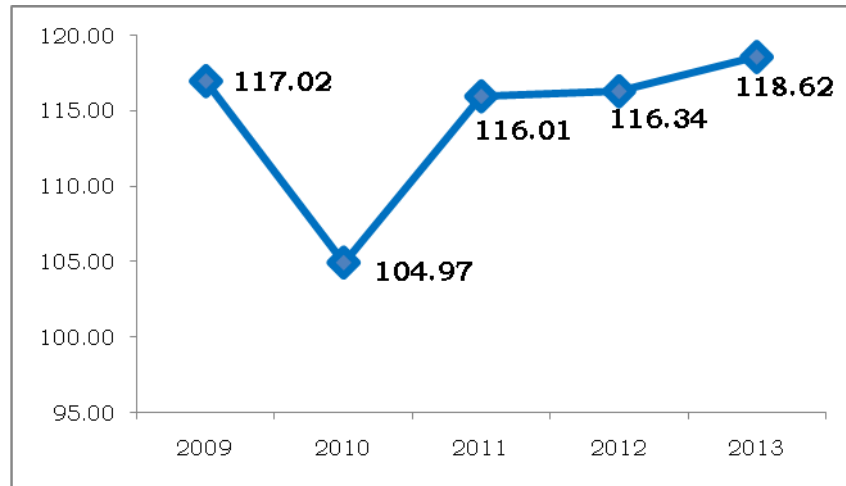
Tabel 2.20.
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan
Berdasarkan Penduduk Usia Kerja (15 -64 Tahun)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2011

Tahun	Jumlah Penduduk AK	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						Jumlah
		SD	APT	SLTP	APT	SLTA +	APT	
2009	17.087.649	9.457.640	55,35	2.893.843	16,94	3.483.899	20,39	15.835.454
2010	16.856.330	9.173.558	54,42	2.993.593	17,76	3.642.296	21,61	15.809.519
2011	16.918.797	9.135.874	54,00	3.048.208	18,02	3.732.053	22,06	15.916.207
2012	17.095.031	9.013.849	52,73	3.061.738	17,91	4.057.303	23,73	16.132.890

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2012

13. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil, bersalin, atau dalam 42 hari pasca persalinan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain. Capaian kinerja AKI di Jawa Tengah Tahun 2013 sebesar 118,62/100.000 KH, mengalami peningkatan negatif bila dibandingkan dengan AKI pada tahun 2012 sebesar 116,34/100.000 KH dan belum mencapai target MDG's tahun 2013 sebesar 80/100.000 KH sehingga membutuhkan upaya keras dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat. Namun demikian, apabila dibandingkan angka nasional (SDKI Tahun 2012) berada di bawah angka nasional sebesar 359/100.000 KH. Perkembangan AKI selama tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Gambar 2.11.

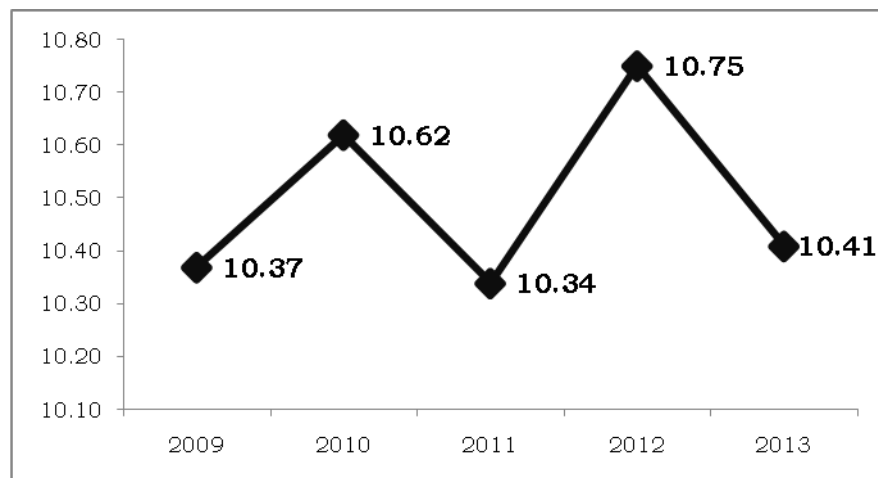


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2014

Gambar 2.11
Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 – 2013

14. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Selama kurun waktu tahun 2009-2013, angka kematian bayi di Jawa Tengah cenderung meningkat, yang ditunjukkan dengan AKB tahun 2009 sebesar 10,37 menjadi 10,41 pada tahun 2013. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi, namun secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Gambaran tentang angka kematian bayi di Jawa Tengah tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Gambar 2.12.

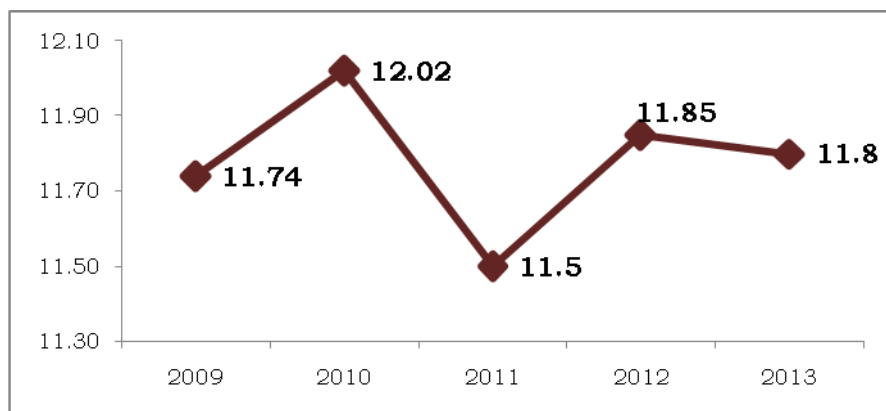


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2014

Gambar 2.12
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013

15. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 kelahiran hidup adalah jumlah kematian anak berusia 0-5 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Selama kurun waktu lima tahun (2009-2013), angka kematian balita di Jawa Tengah cenderung fluktuatif, dengan penurunan yang cukup kecil. Kondisi tersebut dilihat dari AKABA pada tahun 2009 sebesar 11,74 menjadi 11,80 di tahun 2013. Gambaran fluktuasi angka kematian balita di Jawa Tengah tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Gambar 2.13.



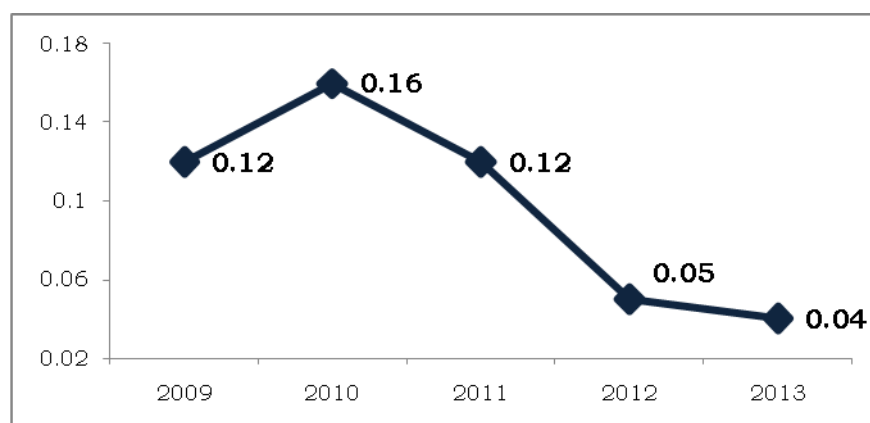
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Gambar 2.13

Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

16. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Prevalensi balita gizi buruk di Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun (2009-2013) cenderung semakin baik, yang ditunjukkan dengan prevalensi balita gizi buruk sebesar 0,12 pada tahun 2009 menjadi 0,08 pada tahun 2013. Hal tersebut menandakan kinerja penanganan balita gizi buruk yang semakin meningkat. Perkembangan kondisi tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.14.



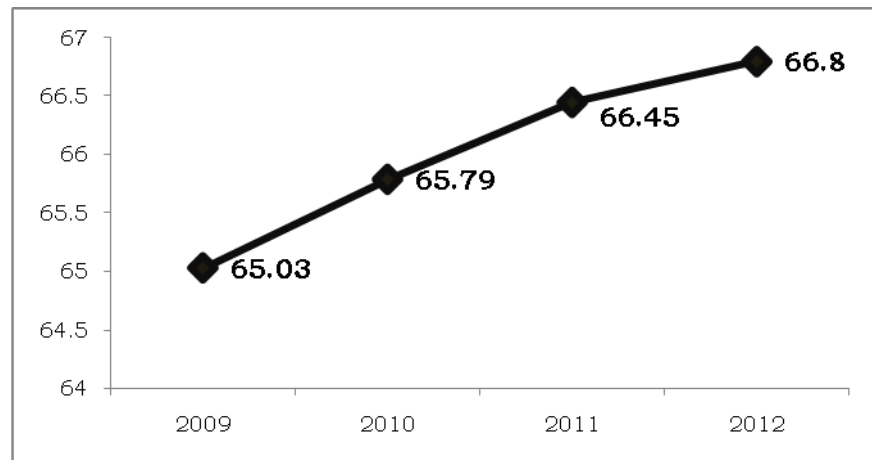
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Gambar 2.14

Prevalensi Balita Gizi Buruk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

17. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dalam dimensi yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, terutama pada indikator pembentuk UHH, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan sumbangan dalam pendapatan kerja. IPG Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada Tahun 2009 sebesar 65,03 meningkat menjadi 66,80 pada Tahun 2012. Peningkatan IPG Tahun 2009 - 2012 dapat dilihat pada Gambar 2.15.



Sumber : Badan Pusat Statistik dan Kementerian PP dan PA RI, 2013

Gambar 2.15
Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012

Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa dan Bali, IPG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 masih lebih baik dibandingkan Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur, namun masih di bawah Provinsi DKI, DIY, Bali dan Nasional. Posisi IPG Jawa Tengah menempati peringkat ke-11 dari 33 provinsi di Indonesia. Perbandingan capaian IPG Jawa Tengah dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa dan Bali serta Nasional dapat dilihat pada Tabel 2.21.

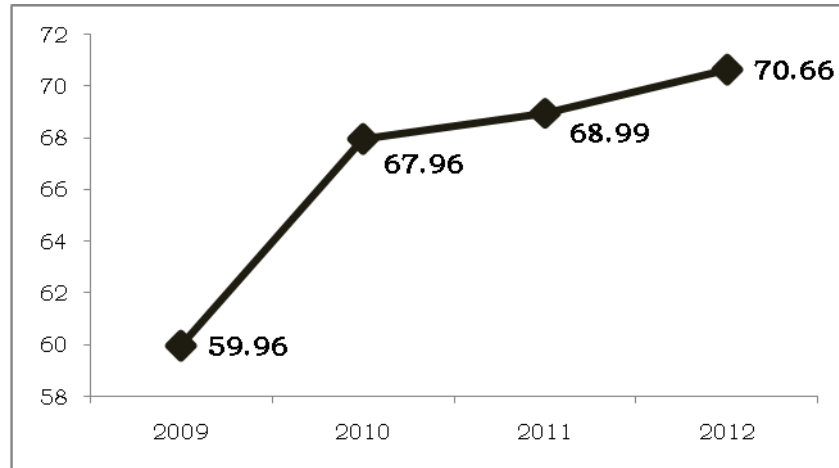
Tabel 2.21.
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Provinsi se Jawa – Bali dan Nasional Tahun 2011-2012

NO.	PROVINSI	2011	2012
1	DKI Jakarta	74,01	74,66
2	D I Yogyakarta	73,07	74,11
3	Bali	68,24	69,02
4	Jawa Tengah	66,45	66,80
5	Jawa Timur	65,61	66,56
6	Banten	63,35	63,93
7	Jawa Barat	63,25	63,68
	Nasional	67,80	68,52

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Kementerian PP dan PA RI, 2013

18. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup keterwakilan perempuan di legislatif (parlemen); posisi perempuan dalam kedudukan manajerial, profesional, administrasi dan teknisi; dan sumbangan dalam pendapatan. Angka IDG Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.16.



Sumber : Badan Pusat Statistik dan Kementerian PP dan PA RI, 2013

Gambar 2.16
Perkembangan IDG Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 – 2012

Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa dan Bali, IDG Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2012 masih lebih baik dibandingkan Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan Bali, tetapi masih di bawah DKI dan DIY. IDG Jawa Tengah juga masih lebih tinggi dari IDG Nasional dan menempai peringkat ke-4 dari 33 Provinsi di Indonesia. Secara keseluruhan perbandingan capaian IPG antar provinsi di Pulau Jawa dan Bali serta Nasional dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Provinsi se Jawa – Bali dan Nasional Tahun 2011-2012

NO.	PROVINSI	2011	2012
1	DKI Jakarta	74,70	76,14
2	D I Yogyakarta	77,84	75,57
3	Jawa Tengah	68,99	70,66
4	Jawa Timur	68,62	69,29
5	Jawa Barat	68,08	68,62
6	Banten	66,58	65,53
7	Bali	55,58	58,49
	Nasional	69,14	70,07

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Kementerian PP dan PA RI, 2013

19. Kebudayaan

Pembangunan bidang kebudayaan dalam kurun waktu 2009-2013 ditunjukkan dengan jumlah kelompok kesenian yang meningkat dari 7.917 kelompok kesenian menjadi 8.162 kelompok kesenian. Jumlah seniman pada kurun waktu 2009-2013 menurun dari 11.695 seniman menurun menjadi 11.269 seniman, sedangkan untuk gedung kesenian tetap sebanyak 8 buah. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23.
Perkembangan Seni dan Budaya
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah kelompok kesenian	7.917	7.917	7.917	9.857	8.162
2	Jumlah seniman	11.695	11.686	11.178	11.269	11.269
3	Jumlah gedung kesenian	8	8	8	8	8

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2014

20. Pemuda dan Olahraga

Perkembangan kinerja pembangunan kepemudaan tahun 2009-2013 cenderung mengalami peningkatan. Pembinaan organisasi kepemudaan mengalami peningkatan dari 55 pada tahun 2009 menjadi 100 pada tahun 2013. Untuk jumlah SP3 yang dibina sebanyak 8 orang meningkat menjadi 40 orang pada tahun 2013. Sedangkan pemuda pelopor cenderung tetap untuk capaian mulai tahun 2009 hingga 2013 yaitu sebesar 15 orang. Peningkatan cukup signifikan terdapat pada jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan, yang semula 60 pada tahun 2009 menjadi 930 pada tahun 2013. Perkembangan kepemudaan di Jawa Tengah tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24.
Perkembangan Kepemudaan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen dan perencanaan program	55	72	72	72	100
2	Jumlah SP3 yang dibina	0	8	33	34	40
3	Jumlah Pemuda Pelopor	15	15	15	15	15
4	Jumlah Pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	60	70	100	295	930

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, 2013

Perkembangan olahraga Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009-2013 cenderung meningkat, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah klub olahraga pada tahun 2009 sebanyak 3.516 menjadi 5.078 pada tahun 2013. Demikian pula untuk jumlah Gedung Olahraga sebanyak 15.550 pada tahun 2009 meningkat menjadi 21.061 pada tahun 2013. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25.
Perkembangan Olahraga
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Klub Olahraga	3.516	3.925	4.230	4.230	5.078
2	Jumlah Gedung Olahraga (GOR, Stadion, lapangan olahraga)	15.550	17.250	19.291	19.291	21.061

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, 2013

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Gambaran kondisi Jawa Tengah pada aspek pelayanan umum dijabarkan dalam Fokus Layanan Wajib dan Layanan Pilihan. Gambaran tersebut di uraikan sebagai berikut.

2.1.4.1. Fokus Layanan Wajib

1. Pendidikan

a. Pendidikan Dasar

1) Angka Partisipasi Sekolah

Selama kurun waktu 2009-2012, capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Jawa Tengah cenderung fluktuatif setiap tahunnya, namun pada tahun 2012 mengalami peningkatan pada semua jenjang pendidikan. Untuk capaian APS SD/MI meningkat dari 98,80% pada tahun 2009 menjadi 98,87% pada tahun 2012. APS SMP/MTs meningkat dari 84,59% menjadi 89,59%, Selengkapnya terdapat dalam Tabel 2.26.

Tabel 2.26.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah
Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2012

No	Jenjang Pendidikan	Tahun (%)			
		2009	2010	2011	2012
1	SD/MI (7-12 th)	98,80	98,95	98,62	98,87
2	SMP/MTs (13-15 th)	84,59	85,33	88,39	89,59

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013

Apabila dibandingkan dengan Provinsi lain se Jawa dan Bali serta Nasional, capaian APS SD/MI Jawa Tengah pada tahun 2012 sebesar 98,87% menempati urutan ke-4 setelah DIY, Bali, DKI dan

di atas rata-rata nasional sebesar 97,95%. Secara rinci terlihat dalam Tabel 2.27.

Tabel 2.27.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI (7-12 th) Menurut Nasional dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2011-2012

No	Provinsi/Nasional	2011 (%)	2012 (%)
1.	D.I. Yogyakarta	99,46	99,77
2.	Bali	98,45	99,20
3.	DKI Jakarta	98,09	98,97
4.	Jawa Tengah	98,62	98,87
5.	Jawa Timur	98,26	98,66
6.	Jawa Barat	97,85	98,34
7.	Banten	98,23	98,29
	Nasional	97,58	97,95

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Sedangkan untuk angka partisipasi sekolah SMP/MTs (usia 13-15 tahun) untuk Jawa Tengah tahun 2012, jika dibandingkan dengan provinsi lain se Jawa dan Bali juga nasional, maka APS Jawa Tengah berada pada urutan ke 6 (enam) dan di bawah nasional. Selengkapnya APS Jawa Tengah dan provinsi lain se Jawa-Bali, serta nasional dapat dilihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs (13-15 th) Menurut Nasional dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2011-2012

No	Provinsi/Nasional	2011 (%)	2012 (%)
1.	D.I. Yogyakarta	97,59	98,32
2.	Bali	92,22	95,15
3.	DKI Jakarta	92,01	93,79
4.	Jawa Timur	90,04	91,70
5.	Banten	88,36	90,97
6.	Jawa Tengah	88,39	89,59
7.	Jawa Barat	85,69	88,51
	Nasional	87,78	89,66

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

2) Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah menunjukkan jumlah sekolah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Selama kurun waktu 2009 - 2012, ketersediaan sekolah untuk SMP/MTs mengalami peningkatan, dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang cenderung fluktuatif. Sedangkan ketersediaan sekolah untuk SD/MI cenderung menurun, dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang juga cenderung menurun.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa rasio ketersediaan untuk SD/MI per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun, selama kurun waktu Tahun 2009-2012 masih cukup

memadai dari 63,28 menjadi 64,07. Sedangkan pada kurun waktu yang sama rasio ketersediaan SMP/MTs per 10.000 penduduk usia 13-15 tahun meningkat dari 23,08 menjadi 26,63. Namun demikian kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah SMP/MTs relatif kurang memadai, karena idealnya mencapai rasio 52,08.

Data selengkapnya terkait jumlah sekolah, penduduk usia sekolah, dan rasio ketersediaan sekolah di Jawa Tengah untuk jenjang pendidikan dasar dapat dilihat pada Tabel 2.29 dan Tabel 2.30.

Tabel 2.29.
Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah
Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2012

No	Uraian	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1	Jumlah SD/MI	23.480	22.874	23.520	23.358
2	Jumlah SMP/MTs	4.324	4.448	4.541	4.679
3	Jumlah penduduk usia 7 s.d 12 th	3.710.248	3.637.446	3.693.871	3.645.929
4	Jumlah penduduk usia 13 s.d 15 th	1.873.746	1.741.098	1.761.901	1.756.919

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013

Tabel 2.30.
Rasio Ketersediaan Sekolah
Terhadap 10.000 Jumlah Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan
SMP/MTs Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012

No	Uraian	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1	Rasio SD/MI per 10.000 penduduk Usia 7 – 12 tahun	63,28	62,88	63,67	64,07
2	Rasio SMP/MTs per 10.000 penduduk Usia 13 – 15 tahun	23,08	25,55	25,77	26,63

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)

3) Rasio Guru dan Murid

Ketersediaan guru terhadap murid di Jawa Tengah untuk jenjang pendidikan SD/MI selama kurun waktu tahun 2009-2012 semakin membaik, ditunjukkan dengan rasio sebesar 16,32 tahun 2009 menjadi 15,18 tahun 2012. Sedangkan rasio untuk jenjang SMP/MTs juga membaik pada kurun waktu yang sama, sebesar 14,90 di tahun 2009 menjadi 14,36 di tahun 2012. Walaupun rasio ketersediaan guru terhadap murid di Jawa Tengah cukup baik, namun permasalahan yang terjadi justru terkait dengan distribusi guru yang tidak merata. Secara lengkap data rasio

ketersediaan guru terhadap murid di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31.
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012

No	Jenjang Pendidikan	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
I SD/MI					
	Jumlah guru	236.126	233.451	225.311	241.749
	Jumlah murid	3.853.288	3.743.925	3.709.232	3.669.968
	Rasio	16,32	16,04	16,46	15,18
II SMP/MTs					
	Jumlah guru	105.653	108.642	112.703	113.174
	Jumlah murid	1.574.741	1.631.457	1.606.619	1.624.843
	Rasio	14,90	15,04	14,25	14,36

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)

4) Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata

Ketersediaan guru terhadap murid per kelas rata-rata dapat ditunjukkan dengan rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata. Untuk jenjang pendidikan SD/MI di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2009-2013 ditunjukkan dengan rasio sebesar 1,20 di tahun 2009 menjadi 1,07 di tahun 2012. Sedangkan pada kurun waktu yang sama untuk jenjang SMP/MTs capaiannya membaik, meningkat dari 2,33 di tahun 2009 menjadi 2,31 ditahun 2012. Selengkapnya kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32.
Rasio Guru dan Murid per Kelas Rata-Rata
Jenjang SD/MI dan SMP/MTs
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012

Jenjang Pendidikan	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
SD/MI				
Jumlah kelas	147.900	147.911	148.277	148.388
Rasio guru/murid per kelas rata-rata	1,20	1,16	1,15	1,07
SMP/MTs				
Jumlah kelas	42.944	44.068	45.835	47.718
Rasio guru/murid per kelas rata-rata	2,33	2,29	2,21	2,31

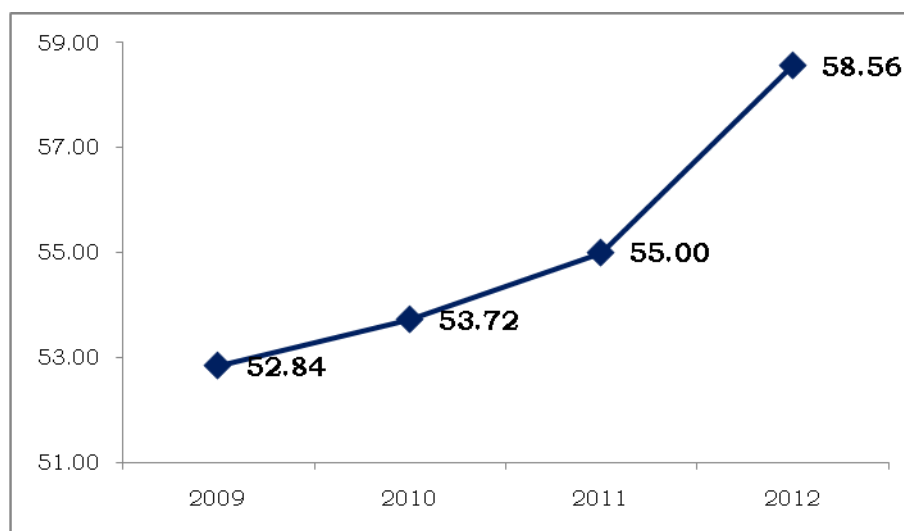
Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 (diolah)

b. Pendidikan Menengah

1) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan menengah di Jawa Tengah masih relatif rendah. Selama kurun waktu tahun 2009-2012, APS penduduk usia 16-18 tahun berturut-turut sebesar 52,84%, 53,72%, 55%, dan 58,56%.

Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang pendidikan menengah yaitu tingginya biaya pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, distribusi lokasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah yang tidak merata, dan jumlah sekolah menengah yang relatif sedikit. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan menengah dapat dilihat pada Gambar 2.17.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Gambar 2.17
Angka Partisipasi Sekolah pada Jenjang Pendidikan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012

Apabila dibandingkan dengan provinsi lain se Jawa dan Bali, maka Angka Partisipasi Sekolah Jawa Tengah tahun 2012 berada di urutan ke-6 (enam), dan lebih rendah dari APS nasional. Selengkapnya APS nasional dan provinsi se-Jawa dan Bali terlihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (16-18 th) Menurut Nasional dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2011-2012

No	Provinsi/Nasional	2011	2012
1.	D.I. Yogyakarta	75,85	80,22
2.	Bali	68,91	70,80
3.	Jawa Timur	58,79	61,68
4.	DKI Jakarta	58,56	60,81
5.	Banten	56,16	58,58
6.	Jawa Tengah	55,00	58,56
7.	Jawa Barat	50,37	55,69
	Nasional	57,85	61,06

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012

2) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk usia 16-18 tahun untuk jenjang pendidikan menengah selama kurun waktu tahun 2009-2013 mengalami peningkatan yaitu dari 14,22 pada

Tahun 2009 menjadi 22,04 pada tahun 2012. Kondisi rasio yang ideal adalah mendekati angka 30, sehingga kondisi di Jawa Tengah tersebut masih perlu ditingkatkan. Perkembangan rasio ketersediaan sekolah di Jawa Tengah jenjang pendidikan menengah dapat dilihat pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34.
Rasio Ketersediaan Sekolah SMA/SMK/MA
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012

Uraian	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
Jumlah SMA/ SMK/ MA	2.309	2.458	2.513	3.407
Jumlah penduduk usia 16-18 th	1.623.463	1.547.110	1.505.602	1.545.555
Rasio SMA/SMK/MA per 10.000 penduduk Usia 16 – 18 tahun	14,22	15,89	16,69	22,04

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)

3) Rasio Guru terhadap Murid

Selama kurun waktu tahun 2009 - 2012 rasio ketersediaan guru per 10.000 murid SMA/SMK/MA di Jawa Tengah cenderung membaik, yaitu dari 13,13 menjadi 10,27. Rasio sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35.
Rasio Guru terhadap Murid SMA/SMK/MA
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012

Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
Jumlah guru	71.173	90.090	101.656	103.187
Jumlah murid	934.743	985.942	1.105.319	1.060.257
Rasio	13,13	10,94	9,99	10,27

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)

4) Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata

Ketersediaan guru terhadap murid per kelas rata-rata untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2009-2013 ditunjukkan dengan rasio sebesar 5,56 di tahun 2009 menjadi 4,17 di tahun 2012, sebagaimana Tabel 2.36.

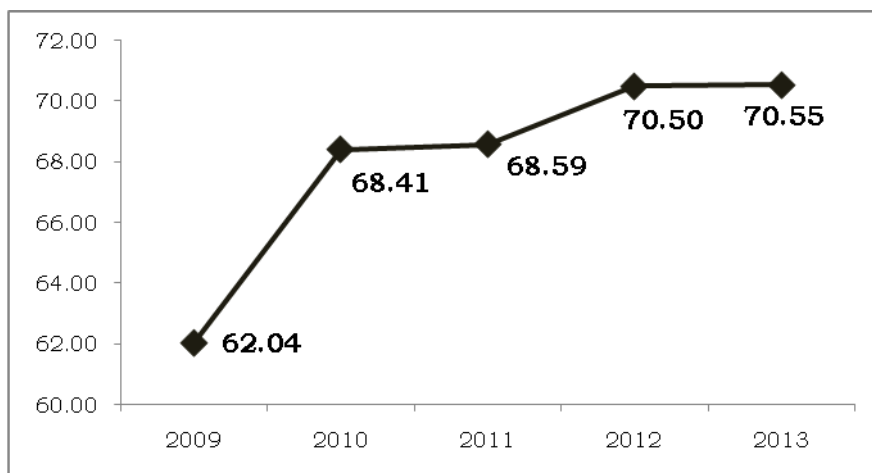
Tabel 2.36.
Rasio Guru dan Murid Jenjang SMA/SMK/MA
per Kelas Rata-Rata di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 – 2012

Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
Jumlah kelas	26.144	26.307	27.966	31.092
Rasio guru/murid per kelas rata-rata	5,56	5,18	4,57	4,17

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 (diolah)

c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Selama kurun waktu tahun 2009-2013, Angka Partisipasi Kasar PAUD Provinsi Jawa Tengah meningkat dari 62,04% pada tahun 2009 menjadi 70,55% pada tahun 2013. Kondisi ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak mulai dari usia dini, sehingga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dan kesiapan memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Selengkapnya kondisi tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.18.



Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Gambar 2.18
Angka Partisipasi Kasar PAUD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013

d. Fasilitas Pendidikan

Persentase ruang kelas sesuai standar mengalami peningkatan dari tahun 2009-2013 pada semua jenjang pendidikan yaitu ruang kelas SD/MI meningkat dari 62% menjadi 94,78%, ruang kelas SMP/MTs meningkat dari 68% menjadi 98,79%, dan ruang kelas SMA/SMK/MA dari 25% menjadi 80,50%. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37.
Kondisi Bangunan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Provinsi Jawa Tengah Dalam Kondisi Baik
Tahun 2009 – 2013 (%)

No	Jenjang	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI/SDLB	62	70	85,38	94,75	94,78
2	SMP/MTs/SMPLB	68	73	82,86	96,76	98,79
3	SMA/SMK/MA	25	30	76,53	80	80,50

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2014

e. Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mengalami penurunan dari tahun 2009-2013 yaitu Angka Putus Sekolah SD/MI turun dari 0,22 pada tahun 2009 menjadi 0,11 pada tahun 2013, Angka putus sekolah SMP/MTs

dari 0,72 menjadi 0,34, dan Angka putus sekolah SMA/SMK/MA turun dari 0,17 menjadi 0,07. Data selengkapnya sebagaimana Tabel 2.38.

Tabel 2.38.
Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No	Jenjang	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI/SDLB	0,22	0,22	0,16	0,12	0,11
2	SMP/MTs/SMPLB	0,72	0,68	0,5	0,38	0,34
3	SMA/SMK/MA	0,17	0,1	0,09	0,08	0,07

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2014

f. Angka Kelulusan

Dalam kurun waktu 2009-2013, Angka Kelulusan pada semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan yaitu untuk Angka Kelulusan SD/MI meningkat dari 95,98% pada tahun 2009 menjadi 99,95% pada tahun 2013, Angka Kelulusan SMP/MTs meningkat dari 93,96% menjadi 99,17%, dan Angka Kelulusan SMA/SMK/MA juga meningkat dari 92,03% menjadi 99,92%. Gambaran selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.39.

Tabel 2.39.
Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No	Jenjang	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI/SDLB	95,98	96,29	98,40	99,95	99,95
2	SMP/MTs/SMPLB	93,96	94,00	99,05	99,15	99,17
3	SMA/SMK/MA	92,03	94,19	95,00	95,59	99,92

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2014

Selanjutnya, capaian Nilai Rata-Rata Ujian Nasional (UN) untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu tingkat SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB dan SMA/SMK/MA mengalami fluktuasi, sebagaimana tertuang pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40.
Nilai Ujian Akhir Nasional
SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Tahun 2009 - 2013

No	Jenjang	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI/SDLB	6,64	7,4	7,31	7,06	7,20
2	SMP/MTs/SMPLB	6,89	7,16	6,75	6,8	6,80
3	SMA/SMK/MA	7,27	7,19	7,72	7,73	7,31

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2014

g. Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan siswa lulusan SD/MI dan SMP/MTs ke jenjang pendidikan lebih tinggi mengalami peningkatan dalam

kurun waktu tahun 2009-2012. Untuk Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs meningkat dari 92,01% menjadi 94,57%. Sedangkan Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA meningkat dari 74,13% menjadi 81,07% untuk kurun waktu yang sama. Gambaran selengkapnya seperti terlihat dalam Tabel 2.41.

Tabel 2.41.
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012

No	Jenjang	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	92,01	92,64	93,78	94,57
2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	74,13	75,62	76,99	81,07

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2013

h. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4

Persentase pendidik yang memiliki kualifikasi S1/D4 dalam tahun 2009-2013 mengalami peningkatan pada semua jenjang pendidikan mulai dari jenjang PAUD, pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kualitas pendidik di Jawa Tengah. Namun demikian, peningkatan capaian kualifikasi S1/D4 untuk pendidik PAUD dan SD/MI/SDLB masih cukup rendah, sehingga perlu dipacu peningkatannya. Kondisi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42.
Persentase Pendidik Berkualifikasi SI/D4 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No	Jenjang	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4	12,00	18,83	20,99	31,01	31,05
2	Pendidik SD/MI/SDLB berkualifikasi S1/D4	25,90	34,11	45,40	51,56	51,58
3	Pendidik SMP/MTs/SMPLB berkualifikasi S1/D4	74,70	76,03	78,01	84,57	85,05
4	Pendidik SMA/SMK/MA berkualifikasi S1/D4	83,20	85,81	88,48	91,85	93,06

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2014

2. Kesehatan

a. Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk

Selama kurun waktu 2009-2012 rasio puskesmas per satuan penduduk di Jawa Tengah cenderung fluktuatif. Pada tahun 2009, rasionya mencapai 1 per 38.528 penduduk, menjadi 1 per 38.110 penduduk di tahun 2012. Kondisi ini masih perlu

ditingkatkan agar sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan RI yaitu satu puskesmas dapat melayani 30.000 penduduk. Secara lengkap rasio tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43.
Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012

Tahun	Jumlah Puskesmas (unit)	Jumlah Penduduk (orang)	Rasio
2009	853	32.864.563	1 : 38.528
2010	864	32.382.657	1 : 37.480
2011	867	32.643.612	1 : 37.651
2012	873	33.270.307	1 : 38.110

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012 (diolah)

b. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Apabila dilihat dari jumlah dokter di Jawa Tengah selama kurun waktu 2009-2012 dapat digambarkan bahwa rasio dokter umum lebih besar dibandingkan dokter spesialis dan dokter gigi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dokter umum yang melaksanakan pelayanan kesehatan lebih banyak dibandingkan dokter spesialis. Data perkembangan rasio dokter dapat dilihat pada Tabel 2.44.

Tabel 2.44.
Perkembangan Rasio Dokter
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012

Tahun	Dokter Umum		Dokter Spesialis		Dokter Gigi	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
2009	3,578	0.109	2,149	0.065	943	0.029
2010	3,605	0.111	2,148	0.066	943	0.029
2011	4,224	0.129	2,343	0.072	1,058	0.032
2012	4,264	0.128	2,157	0.065	1,091	0.033

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)

c. Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk

Tenaga paramedis terdiri dari perawat, bidan, tenaga farmasi, dan tenaga gizi. Selama kurun waktu tahun 2009-2012, keberadaan tenaga paramedis di Jawa Tengah yang ditunjukkan dengan rasio tenaga paramedis per satuan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Secara rinci rasio tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45.
Perkembangan Rasio Tenaga Paramedis
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012

Tahun	Perawat		Bidan		Tenaga Farmasi		Tenaga Gizi	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
2009	24.763	0,753	12.456	0,379	3.633	0,111	1.472	0,045
2010	24.790	0,766	12.456	0,385	3.637	0,112	1.475	0,046
2011	24.472	0,750	13.100	0,401	4.376	0,134	1.549	0,047
2012	27.404	0,824	14.443	0,434	5.347	0,161	1.575	0,047

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)

d. Persentase Balita Usia 0-6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif

Selama kurun waktu tahun 2009-2013, persentase bayi usia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif cenderung meningkat. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya kesadaran ibu bayi untuk memberikan hanya ASI saja, meningkatnya pemanfaatan pojok ASI dan keberhasilan kampanye pemberian ASI eksklusif untuk ibu menyusui baik di masyarakat, instansi pemerintahan dan pabrik-pabrik diseluruh Jawa Tengah. Kondisi tersebut sebagaimana tercantum pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46.
Persentase Balita Usia 0-6 Bulan yang Mendapat ASI Eksklusif
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

Tahun	Jumlah Bayi	Jumlah Bayi yang diberi ASI Eksklusif	Cakupan (%)
2009	340.373	136.862	40,21
2010	488.495	181.600	37,18
2011	247.647	112.338	45,36
2012	577.407	148.059	25,60
2013	263.170	202.165	76,82

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)

e. Kondisi Penyakit Menular yang Terdeteksi

Kondisi penyakit menular di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2009-2013, dapat digambarkan antara lain angka kesakitan DBD yang cenderung mengalami peningkatan, angka kesakitan TB juga meningkat disebabkan karena beban ganda penyakit yang diderita pasien TB, perubahan iklim yang ekstrim dan keterlambatan rujukan penderita ke pelayanan/tenaga kesehatan; dan penemuan kasus HIV/AIDS yang juga mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menjadi perhatian untuk meningkatkan langkah preventif melalui advokasi, dan pemberian pemahaman bagi masyarakat serta pendampingan bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Kondisi penyakit menular yang terdeteksi di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47.
Kondisi Penyakit Menular
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

Tahun	IR DBD per 100.000 penduduk	CFR DBD (%)	CDR TB (%)	CR TB (%)	HIV / AIDS	
					Kasus HIV	Kasus AIDS
2008	59,2	1,19	47,97	83,9	259	170
2009	57,9	1,42	48,15	85,01	143	430
2010	56,8	1,29	55,38	85,15	373	501
2011	15,3	0,93	59,52	82,90	755	521
2012	19,29	1,52	58,45	83,64	607	797
2013	45,52	1,21	58,46	81,39	1.045	993

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)

f. Persentase Rumah Sakit yang Dibina untuk Akreditasi

Jumlah Rumah Sakit (RS) yang dibina untuk akreditasi pelayanan dari Tahun 2009 - 2013 mengalami peningkatan, sehingga pelayanan di tingkat rujukan menjadi lebih optimal. Jumlah RS yang dibina untuk akreditasi tercantum pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48.
Persentase Rumah Sakit yang Dibina Untuk Akreditasi
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

Tahun	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah yang dibina untuk akreditasi	Persentase
2009	227	37	16,30
2010	243	54	22,22
2011	247	44	21,86
2012	263	135	51,33
2013	271	182	67,41

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)

g. Jumlah Penduduk Miskin Yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

Program Jamkesmas dan Jamkesda dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan rendah bagi masyarakat miskin. Program Jamkesda dimulai sejak tahun 2010, dan hingga tahun 2012, persentase penduduk miskin yang terlayani Jamkesda semakin meningkat yaitu 1,75% pada Tahun 2010 menjadi 15,69% pada Tahun 2012. Gambaran jumlah penduduk miskin penerima Jamkesmas dan Jamkesda seperti terlihat pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49.
Jumlah Penduduk Miskin Pemanfaat
Jamkesmas dan Jamkesda
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (PPLS)	Jumlah yang menerima Jamkesmas	%	Jumlah yang menerima Jamkesda	%	Keterangan
2009	12.938.386	11.715.881	90,55	-	-	Blm ada jamkesda
2010	12.801.233	11.715.881	91,52	225.000	1,75	
2011	13.003.805	11.715.881	90,10	2.248.596	17,29	
2012	12.447.383	12.274.134	98,61	1.954.005	15,69	

Sumber : TNP2K dan Kementerian Kesehatan, 2013

3. Pekerjaan Umum

a. Prasarana jalan

Total panjang jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 adalah 30.454,547 km lebih panjang dibandingkan tahun 2012 sepanjang 26.368,792 km. Perubahan panjang jalan tersebut berdasarkan data teknis DAK Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2013 terdapat penyesuaian panjang jalan kewenangan kabupaten/kota dari 22.412,600 km menjadi 26.498,355 km. Adapun panjang jalan nasional 1.390,571 km dan jalan Provinsi sepanjang 2.565,621 km. Kondisi pelayanan prasarana jalan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 sebagai berikut :

1) Jaringan Jalan

Indeks aksesibilitas (persentase panjang jalan eksisting dibandingkan total panjang eksisting ditambah rencana pembangunan jalan) tahun 2013 sebesar 99,87% lebih besar dibandingkan dengan indeks tahun 2012 sebesar 99,85%. Untuk meningkatkan indeks aksesibilitas, diprioritaskan pembangunan ruas jalan Wawar-Tambakmulyo/Ruas Jalan Diponegoro Kabupaten Kebumen (JJLS) sepanjang 38,460 km yang merupakan rencana penanganan infrastruktur strategis nasional di Jawa Tengah.

Indeks mobilitas (rasio panjang jalan eksisting dibandingkan dengan jumlah per 10.000 penduduk) tahun 2012 sebesar 7,926 km/10.000 jiwa mengalami penurunan dibanding tahun 2011 sebesar 8,078 km/10.000 jiwa, dikarenakan peningkatan jumlah penduduk tidak diikuti dengan penambahan panjang jalan. Namun demikian indeks mobilitas Jawa Tengah tahun 2012 tetap lebih besar dibandingkan dengan SPM rasio panjang jalan sebesar 3 km/10.000 jiwa (untuk wilayah dengan kepadatan penduduk 1.000 s/d 5.000 jiwa/km²).

2) Ruas Jalan

Indeks kondisi jalan (rasio panjang jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman, diukur dari kondisi kerataan permukaan jalan) tahun 2013 sebesar 73,92% menurun jika dibandingkan tahun 2012 sebesar 77,08%. Penurunan indeks kondisi jalan disebabkan bertambahnya jalan rusak yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dari 5.941,580 km pada tahun 2011 menjadi 7.865,790 pada tahun 2012. Jalan nasional dalam kondisi rusak pada tahun 2013 sepanjang 70,085 km, berkurang dibanding tahun 2012 sepanjang 93,099 km.

Sedangkan perkembangan kondisi jalan dan jembatan kewenangan provinsi secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.50 dan 2.51.

Tabel 2.50.
Kondisi Jalan Kewenangan Provinsi Tahun 2009 – 2013

Tahun	Kondisi Jalan						Total Panjang (Km)
	Baik		Sedang		Rusak		
	(Km)	%	(Km)	%	(Km)	%	
2009	2.158,745	85,00	371,050	14,61	9,905	0,39	2.539,700
2010	2.190,014	85,36	366,627	14,29	8,980	0,35	2.565,621
2011	2.199,250	85,72	358,417	13,97	7,953	0,31	2.565,621
2012	2.211,052	86,18	347,385	13,54	7,184	0,28	2.565,621
2013	2.224,393	86,70	334,557	13,04	6,671	0,26	2.565,621

Sumber : Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)

Catatan :

- Panjang jalan kewenangan Provinsi sesuai SK Gubernur No. 620/12/2008 : 2.539,700 Km
- Panjang jalan kewenangan Provinsi sesuai SK Gubernur No. 620/12/2010 : 2.565,621 Km

Tabel 2.51.
Kondisi Jembatan Kewenangan Provinsi Tahun 2009 – 2013

Tahun	Kondisi Jembatan						Total Panjang (m)
	Baik		Sedang		Rusak		
	(m)	%	(m)	%	(m)	%	
2009	19.117,790	75,46	5.946,120	23,47	271,090	1,07	25.335,00
2010	19.344,000	76,35	5.722,000	22,59	269,000	1,06	25.335,00
2011	19.642,000	77,53	5.436,000	21,46	257,000	1,01	25.335,00
2012	19.842,372	78,32	5.251,946	20,73	240,683	0,95	25.335,00
2013	20.607,940	79,00	5.245,890	20,11	232,170	0,89	26.086,00

Sumber : Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)

Catatan :

- Panjang jembatan kewenangan Provinsi pada tahun 2013 sesuai Renstra Dinas Bina Marga Prov. Jateng 2013 – 2018 (penyesuaian panjang jembatan pasca perubahan panjang jalan provinsi).

Indeks kecepatan (persentase panjang jalan yang menjamin perjalanan sesuai dengan kecepatan rencana, diukur dari standarisasi lebar jalan minimal 6 m) tahun 2013 sebesar 50,44% (1.294,201 km), karena masih terdapat 27,36% (701,963 km) jalan dengan lebar 5 m dan 22,20% (569,457 km) dengan lebar 4 m.

b. Prasarana Sumber Daya Air

Luas areal layanan Irigasi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 992.455 Ha yang tercakup dalam 9.127 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri atas 39 DI kewenangan pusat, 106 DI kewenangan provinsi dan 8.982 DI kewenangan kabupaten/kota. Untuk mendukung peningkatan produksi beras dan ketahanan pangan regional maupun nasional diperlukan peningkatan kondisi jaringan irigasi baik dan pemenuhan kebutuhan air baku. Hal ini sejalan dengan adanya peningkatan kondisi jaringan irigasi baik kewenangan provinsi dan pemenuhan kebutuhan air baku tahun 2013 masing-masing sebesar 72% (62.101 Ha) dan 50,12%. Gambaran secara rinci kewenangan pengelolaan DI, kondisi jaringan irigasi

kewenangan provinsi dan pemenuhan kebutuhan air baku dapat dilihat pada Tabel 2.52, Tabel 2.53 dan Tabel 2.54.

Tabel 2.52.
Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah

Kewenangan	Luas Area (ha)	%	Jumlah DI
Pusat	346.998	34,96	39
Provinsi	86.252	8,69	106
Kab/Kota	559.205	56,35	8.982
Jumlah	992.455	100	9.127

Sumber : Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, 2012

Tabel 2.53.
Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2009 - 2013

Tahun	Kondisi Jaringan Irigasi					
	Baik (%)	Luas (Ha)	Sedang (%)	Luas (Ha)	Rusak (%)	Luas (Ha)
2009	47	40.539	47	40.538	6	5.175
2010	49	42.263	51	43.989	0	0
2011	61	52.613	38	32.776	1	863
2012	66	56.926	34	29.326	0	0
2013	72	62.101	28	24.151	0	0

Sumber : Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, 2013

Tabel 2.54.
Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kebutuhan Air Baku (juta m ³ /tahun)	714,518	719,734	709,180	714,895	727,925
2	Ketersediaan Air Baku (juta m ³ /tahun)	300,105	317,003	326,210	343,212	364,836
Persentase (%)		40,05	42,00	44,04	46,00	50,12

Sumber : Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)

c. Air Bersih, Sanitasi, dan Persampahan

Pelayanan air bersih dan sanitasi di Jawa Tengah hingga tahun 2013, mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, cakupan pelayanan air bersih untuk perkotaan sebesar 63,99%, meningkat dari tahun 2009 sebesar 37%. Demikian juga, dengan cakupan pelayanan air bersih perdesaan, yang meningkat dari tahun 2009 sebesar 9% menjadi 49,13% tahun 2013. Sementara cakupan pelayanan sanitasi meningkat dari tahun 2009 sebesar 54,73% menjadi 64,5% di tahun 2013. Sedangkan penanganan sampah terangkut di Jawa Tengah belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan prosentase sampah terangkut mengalami

penurunan dari sebesar 77,09% pada tahun 2009, menjadi 41,34% pada tahun 2012. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.55.

Tabel 2.55.
Cakupan Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, dan Persampahan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Air Bersih					
	- Perkotaan (%)	37,00	38,70	38,90	40,60	63,99
	- Perdesaan (%)	9,00	10,40	18,00	20,30	49,13
2	Sanitasi (%)	54,73	57,70	58,40	60,03	64,50
3	Persampahan (%)	77,09	53,33	48,73	41,34	-

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng, dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013

d. Jasa Konstruksi

Pelayanan uji laboratorium jasa konstruksi telah mendapatkan Survailen I, ISO 9001:2008 oleh lembaga sertifikasi IAPMO dan Re-Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2008 oleh KAN pada Tahun 2012. Pelayanan Sertifikasi Hasil Uji (SHU) Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2008-2012 mengalami peningkatan. Tahun 2008 sebanyak 178 sertifikat, Tahun 2009 sebanyak 382 sertifikat, Tahun 2010 sebanyak 357 sertifikat, Tahun 2011 sebanyak 507 sertifikat dan Tahun 2012 meningkat menjadi 573 sertifikat.

4. Perumahan

Pada Tahun 2009 jumlah rumah layak huni di Jawa Tengah sebanyak 5.425.704 unit (69,94%) meningkat menjadi 6.709.038 unit (76,56%) pada tahun 2012, sedangkan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Tahun 2009 sebanyak 2.331.321 unit (30,06%), turun menjadi 2.053.772 unit (23,44%) pada tahun 2012. Perkembangan jumlah rumah layak huni dan RTLH serta rasio rumah layak huni di Jawa Tengah tahun 2009-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56.
Perkembangan Rumah Layak Huni dan
Rumah Tidak Layak Huni
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012

Tahun	Jumlah Rumah (unit)	Rumah Layak Huni		Rumah Tidak Layak Huni	
		Jumlah (unit)	Rasio (%)	Jumlah (unit)	Rasio (%)
2009	7.757.025	5.425.704	69,94	2.331.321	30,06
2010	8.743.590	6.510.358	74,45	2.233.232	25,55
2011	8.529.355	6.539.551	76,67	1.989.804	23,33
2012	8.762.810	6.709.038	76,56	2.053.772	23,44

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013

Sedangkan untuk penanganan permukiman kumuh masih di Provinsi Jawa Tengah, sampai tahun 2012 mencapai seluas 58,75 Ha atau sebesar 6,26% dari luas kawasan kumuh (938,23 Ha), dengan perincian per tahun dapat dilihat pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57.
Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012

Tahun	Jumlah Capaian per Tahun (Ha)	Kumulatif Capaian (Ha)	Presentase Capaian per Tahun	Presentase Capaian Kumulatif
2009	10,78	20,63	1,15	2,20
2010	9,36	30,00	1,00	3,20
2011	12,18	42,17	1,30	4,50
2012	16,58	58,75	1,77	6,26

Sumber : Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah 2013

5. Penataan Ruang

Aspek pelayanan umum pada urusan penataan ruang dapat diindikasikan dengan telah diterbitkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029, yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana rinci tentang kawasan strategis, arahan peraturan zonasi sistem provinsi, yang akan dijadikan pedoman oleh pemerintah dan masyarakat dalam implementasi rencana pembangunan, utamanya untuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya, serta sebagai upaya dalam pengembangan wilayah di Jawa Tengah.

6. Perencanaan Pembangunan

Kinerja Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu Tahun 2009 - 2013 antara lain tercermin di bidang kerjasama perencanaan pembangunan yaitu terselenggaranya forum kerjasama antar daerah di 35 kabupaten/kota dan pada 59 SKPD Provinsi, kesepakatan kerjasama pembangunan wilayah perbatasan Provinsi Jawa Tengah–Jawa Barat Tahun 2009-2013 serta kerjasama pengembangan ekonomi antar daerah meliputi kawasan Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, Kedungsepur, Kedu Plus, Sapta Mitra Pantura dan Pakudjembara.

7. Perhubungan

a. Perhubungan Darat

Pelayanan perhubungan darat meliputi Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), kereta api dan ASDP. Pelayanan angkutan darat berdasarkan kewenangan peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah utamanya pada pemberian izin trayek AKDP dan fasilitasi pengembangan Terminal tipe A dan Tipe B serta penyediaan perlengkapan jalan provinsi. Perkembangan pelayanan angkutan darat selama tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.58 hingga Tabel 2.61.

Tabel 2.58.
Perkembangan Pelayanan Angkutan Darat
di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Izin Trayek Antar Kota Antar Provinsi/AKAP (trayek)	840	840	902	902	902
2	Jumlah Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi/AKDP (trayek)	367	367	367	367	269
3	Angkutan wisata (kendaraan)	1.502	1.791	2.095	2.249	2.809
4	Jumlah bus (unit)	10.174	10.174	10.174	10.490	10.583
5	Mobil Penumpang Umum (unit)	397.667	397.667	397.667	397.667	397.667
6	Jumlah terminal bis Tipe A	16	16	16	17	18

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2014

Tabel 2.59.
Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Rambu Jalan	564	878	2.502	1.902	2.519
2	RPPJ	-	12	65	101	107
3	APILL	-	-	-	-	5
4	Guardrail	-	464	824	904	1.750
5	Marka Jalan	-	23.200	61.785	52.815	122.093

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2014

Tabel 2.60.
Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah penumpang (orang)	8.957.670	9.376.298	7.586.582	9.655.794	N/A ^{*)}
2	Jumlah barang terangkut (ton)	1.748.849	1.796.157	448.788	1.562.214	1.457.417
3	Jumlah stasiun KA	140	140	140	140	140
4	Jumlah Perlintasan KA di Jalan Provinsi	1.427	1.506	1.570	1.614	1.448

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2014

Keterangan : ^{*)} Belum ada data dari DAOP IV

Tabel 2.61.
Perkembangan Pelayanan ASDP di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013 ^{*)}
1	Jumlah penumpang KM. Muria (orang)	8.720	16.350	65.925	65.886	121.360
2	Jumlah penumpang KMC. Kartini I (orang)	13.259	15.977	13.102	13.227	10.539

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2013

Keterangan : ^{*)} data sampai dengan Bulan Agustus

b. Perhubungan Laut

Perhubungan laut Jawa Tengah, didukung dengan 9 Pelabuhan Laut termasuk Pelabuhan Utama Tanjung Emas Semarang yang saat ini dalam pengembangan dan modernisasi pelayanan serta telah dilengkapi dengan fasilitas gudang/lapangan penumpukan peti kemas seluas 352.384 m², Crane sampai dengan 40 ton untuk pelayanan bongkar muat barang dan peti kemas, dan 10 dermaga/tambatan dengan kedalaman sampai dengan minus 10 m; KMC Kartini I untuk melayani lintas Semarang–Jepara–Karimunjawa, serta KMP Muria dan KMP Express Bahari untuk melayani lintas Jepara–Karimunjawa. Perkembangan pelayanan angkutan laut selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62.
Perkembangan Pelayanan Angkutan Laut di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 – 2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah pelabuhan	9	9	9	9	9
2	Pelabuhan Tanjung Emas					
	a. Kunjungan kapal (<i>call</i>)	3.914	2.221	1.919	1.703	4.770
	b. GRT (GT)	17.453.846	12.556.730	14.739.666	12.538.366	21.132.335
	c. Kargo (ton)	7.487.270	7.863.850	11.593.685	5.841.235	5.398.763
	d. Kontainer (<i>Teus</i>)	356.451	384.522	313.480	269.044	496.703
	e. Penumpang (orang)	392.606	449.645	318.527	238.525	502.472
3	Pelabuhan Tanjung Intan					
	a. Kunjungan kapal (<i>call</i>)	2.140	1.249	309	448	1.832
	b. GRT (GT)	21.153.538	21.882.020	2.519.752	3.669.263	24.286.019
	c. Kargo (ton)	37.511.612	23.895.627	1.949.073	5.568.781	5.512.125

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2014

c. Perhubungan Udara

Perkembangan pelayanan perhubungan udara dapat diketahui dengan jumlah penumpang dan barang yang dapat terangkut setiap tahunnya. Dari dua bandara besar di Jawa Tengah yaitu Bandara Ahmad Yani dan Bandara Adi Soemarmo, diketahui bahwa perkembangan jumlah penumpang dan barang yang terangkut cenderung fluktuatif, baik penumpang domestik maupun internasional. Perkembangan jumlah penumpang dan barang yang terangkut di Bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63.
Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah bandara	4	4	4	4	4
2	Bandara Ahmad Yani					
	a. Penumpang domestik (orang)	1.627.706	1.954.901	2.400.686	2.888.087	3.155.714
	b. Penumpang internasional (orang)	23.278	38.603	32.256	114.673	136.362
	c. Barang domestik (kg)	7.944.179	23.862.533	25.062.038	11.037.345	16.167.246
	d. Barang internasional (kg)	1.645.400	1.641.079	1.680.832	598.392	1.332.105
3	Bandara Adi Soemarmo					
	a. Penumpang domestik (orang)	574.453	780.852	970.615	1.200.787	1.357.416
	b. Penumpang internasional (orang)	111.957	119.694	115.522	48.961	71.279
	c. Barang domestik (kg)	1.995.359	2.542.982	3.349.969	4.128.433	7.946.474
	d. Barang internasional (kg)	24.786	75.311	150.723	358.495	861.822

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2014

8. Lingkungan Hidup

Secara geografis wilayah Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 6 ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dikaitkan dengan pengelolaannya meliputi DAS Citanduy, Serayu Luk Ulo - Progo - Bogowonto, Pemali – Comal, Jratun Seluna dan Bengawan Solo serta secara hidrogeologis terbagi menjadi 31 Cekungan Air Tanah (CAT) yakni 6 buah CAT bersifat lintas Provinsi, 19 buah CAT bersifat lintas Kabupaten/Kota, dan 6 CAT lokal dalam satu Kabupaten/Kota.

Tahun 2012 jumlah industri mencapai 651.865 buah, meningkat sebesar 1,03% dari tahun 2008 sejumlah 645.212 buah, dan limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan dari kegiatan industri sebesar 1.159.736.760 m³/Tahun. Sedangkan industri yang potensi hasilkan limbah B3 Tahun 2008 sejumlah 1.160 dan Tahun 2012 menjadi 1.280 buah terjadi peningkatan sebesar 10,34% dengan potensi limbah padat B3 mencapai 91.276,34 ton/Tahun.

Usaha/kegiatan skala kecil/menengah/besar di Jawa Tengah yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan berdasarkan hasil inventarisasi tahun 2012 ± 24.160 dengan prediksi total beban pencemar yang dibuang ke lingkungan untuk parameter BOD = sebesar 47.574 ton/tahun; COD = 139.057 ton/tahun dan TSS = 45.189 ton/tahun.

Volume timbunan sampah yang dihasilkan masyarakat Tahun 2012 mencapai 49.082,82 M³/Hr meningkat dari tahun Tahun 2008 sebesar 48.874,81 M³/Hr, dan asumsi setiap penduduk mengeluarkan sampah ±0,5 Kg/hr akibat jumlah penduduk Jawa Tengah dari Tahun ke Tahun terus bertambah.

Peningkatan kualitas pelayanan lingkungan hidup dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan Permen LH No. 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Permen LH No. 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Gambaran SPM Lingkungan Hidup di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.64.

Tabel 2.64.

Kinerja Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
1	Informasi status mutu air (SPM) sungai	2	3	4	6	6
2	Informasi status mutu udara ambien (SPM) kab/kota	25	35	35	35	35
3	Jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM) %	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, 2014

9. Pertanian

Kinerja persertifikatan bidang tanah di Jawa Tengah dapat ditunjukkan dari data jumlah bidang tanah di Jawa Tengah sejumlah 21.212.403 bidang seluas 3.254.248 ha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.929.926 bidang seluas 1.394.192,79 ha telah terdaftar/bersertifikat, sedangkan sebanyak 11.282.477 bidang seluas 1.860.055,57 ha belum terdaftar/bersertifikat. Saat ini kesadaran masyarakat semakin tinggi dalam pensertifikatan tanah. Berkaitan dengan penanganan konflik-konflik pertanian, tercatat sebanyak 372 kasus pengaduan pertanian yang masuk, dan telah diselesaikan permasalahannya sebanyak 355 kasus (BPN, data sampai dengan Oktober 2013). Gambaran pelayanan pertanian dapat dilihat pada Tabel 2.65.

Tabel 2.65.

Perkembangan Pelayanan Urusan Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

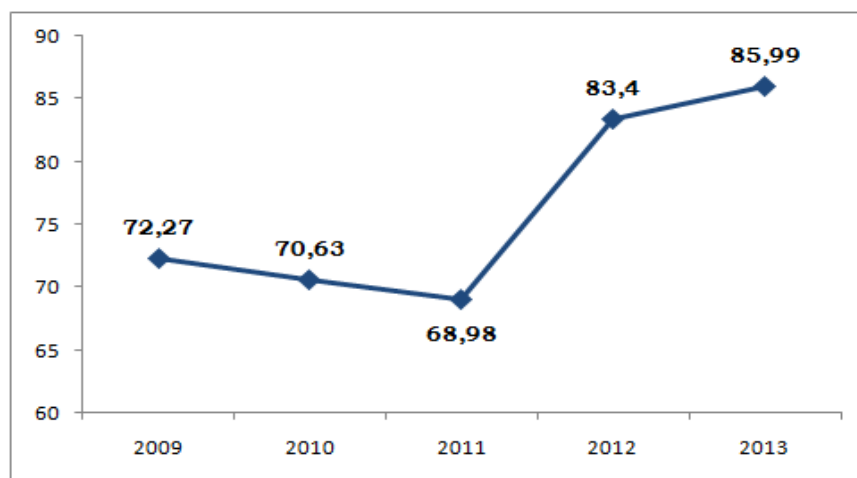
No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Penggantian tanah kas desa					
	Luas semula (ha)	212.079	505.277	345.091	173.550	-
	Luas menjadi (ha)	361.101	665.860	386.436	237.196	-
2	Stimulasi pembuatan sertifikat lahan					
	Kawasan lindung (ha)	1.750	280	98	200	-
	Lahan pertanian pangan berkelanjutan (ha)	0	22	46	124	-

Sumber : Biro Administrasi Tata Pemerintahan, Setda Provinsi Jawa Tengah, 2013

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Kepemilikan dan Rasio/Persentase Penduduk ber KTP

Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2009-2013 kondisinya berfluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari 72,27% Tahun 2009 menjadi 85,99% Tahun 2013. Kenaikan persentase kepemilikan tersebut salah satunya didukung oleh kebijakan penerapan e-KTP (selanjutnya penyebutan e-KTP menjadi KTP-el sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) oleh pemerintah dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Rasio/persentase kepemilikan KTP dari tahun 2009 sampai tahun 2013 sebagaimana terlihat pada Gambar 2.19.

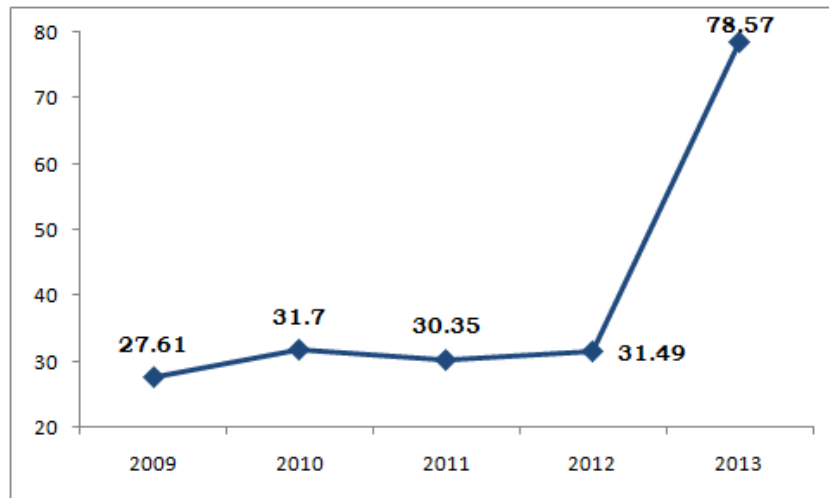


Sumber : Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah, 2014

Gambar 2.19
Persentase Kepemilikan KTP (KTP-el)
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013

b. Persentase Penduduk Berakte Kelahiran

Perkembangan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Akte Lahir di 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2013 meningkat sangat signifikan dari 31,49% (2012) menjadi 78,57% (2013). Hal ini antara lain disebabkan diberlakukannya UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya terkait dengan peran aktif pemerintah dan masyarakat (semula menganut stelsel aktif masyarakat). Perkembangan Kepemilikan Akte Lahir Usia 0 - 18 tahun di Jawa Tengah tahun 2009 - 2013, terlihat pada Gambar 2.20.



Sumber : Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah, 2014

Gambar 2.20

Perkembangan Kepemilikan Akte Lahir Usia 0 - 18 Tahun di Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

c. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Rasio pasangan berakte nikah di Jawa Tengah pada tahun 2013 sebesar 53,61% dari jumlah pasangan menikah sebanyak 18.653.701 orang, mengalami peningkatan dibanding tahun 2012 sebesar 32,28% dari jumlah pasangan menikah sebanyak 17.851.186 orang. Walaupun mengalami peningkatan kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Jawa Tengah.

d. Penduduk Jawa Tengah Berdasarkan Kewarganegaraan Asing

Penduduk Jawa Tengah berdasarkan Kewarganegaraan Asing pada tahun 2010 (hasil Sensus Penduduk Tahun 2010) sejumlah 2.636 orang, dengan jumlah terbanyak dari warga negara Cina sejumlah 803 orang, disusul warga negara Asia sejumlah 364 orang dan warga negara Bangladesh/India/Pakistan sejumlah 329 orang.

e. Kabupaten/Kota mengoperasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara *on-line* telah dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota sejak tahun 2010 dalam rangka mengoptimalkan dan memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara lebih baik kepada masyarakat sehingga perlu di *update* secara periodik melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan peralatan infrastruktur pendukung.

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan Bekerja di Swasta

Peningkatan kualitas hidup perempuan dilakukan diberbagai bidang pembangunan, diantaranya dengan

meningkatkan partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga swasta. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2009 - 2012, persentase rata-rata perempuan yang bekerja di sektor swasta mengalami sedikit penurunan dari 66,05% (tahun 2009) menjadi 65,09% (tahun 2012). Hal tersebut disebabkan antara lain adanya PHK, alih profesi menjadi wirausaha mandiri dan TKI. Upaya yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga swasta antara lain melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja perempuan di berbagai sektor agar dapat bersaing dengan tenaga kerja laki-laki. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.66.

Tabel 2.66.
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012

No	Uraian	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1	Jumlah pekerja perempuan (orang)	6.585.048	6.543.610	6.674.759	6.768.073
2	Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta (orang)	4.349.740	4.368.348	4.368.956	4.405.564
3	Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta (%)	66,05	66,76	65,72	65,09

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Sakernas, 2013

b. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Jawa Tengah berdasarkan data Sakernas menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja perempuan pada tahun 2013 mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk usia kerja perempuan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.67.

Tabel 2.67.
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah penduduk usia kerja perempuan (orang)	12.543.814	12.163.882	12.171.023	12.186.061	12.192.802
2	Jumlah angkatan kerja perempuan (orang)	7.060.659	7.061.590	7.158.371	6.988.421	7.012.227
3	Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk usia kerja (%)	56,29	58,05	58,81	57,35	57,51

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Sakernas, 2014

c. Produk Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Jawa Tengah

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan gender dalam pembangunan yang dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Provinsi Jawa Tengah secara sistematis telah melakukan langkah-langkah pengintegrasian PUG ke dalam dokumen perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD. Dokumen RPJMD Tahun 2013-2018, telah mengintegrasikan isu gender ke dalam penjelasan misi dan kebijakan. Selain itu, perspektif gender telah terintegrasi pada sebagian besar SKPD Provinsi, namun terdapat 10 (sepuluh) SKPD yang tidak mengintegrasikan perspektif gender dalam Renstra SKPD dikarenakan secara tupoksi tidak membedakan peran antara laki-laki dan perempuan.

d. Rasio KDRT

Rasio KDRT dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yaitu tahun 2008 sebesar 0,01%, meningkat menjadi 0,028% pada tahun 2012, dan tahun 2013 meningkat menjadi 0,085%. Peningkatan KDRT terjadi antara lain disebabkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus KDRT kepada lembaga layanan, faktor kemiskinan, globalisasi dan budaya.

e. Jumlah Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap hak perempuan. Kebijakan tersebut antara lain perlindungan bagi korban kekerasan, yaitu terbitnya Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya sebagaimana diamanatkan dalam Perda tersebut telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu (Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 411/91 Tahun 2009) dan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA) dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 411/I03.A tanggal 1 Agustus 2011. Selain itu juga diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2014; Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan pada Layanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, serta Perda tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif. Terdapat 6 (enam) kabupaten

yang telah menerbitkan Perda tentang penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak.

f. Produk Kebijakan terkait Penanganan Tenaga Kerja di Bawah Umur

Keterlibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk utamanya disebabkan oleh faktor kemiskinan dan hedonisme (gaya hidup mewah). Perlindungan anak terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk di Jawa Tengah telah ditetapkan dengan Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak, ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Jumlah penduduk usia 10-17 tahun pada tahun 2012 yang bekerja di Jawa Tengah sebanyak 450.632 anak (9,06% dari jumlah total anak). Perkembangan jumlah anak yang bekerja dan berusia 10-17 tahun selama tahun 2009-2012 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68.
Persentase Anak yang Bekerja Usia 10 – 17 Tahun
Tahun 2009 - 2012

Tahun	Total Anak	Jumlah Anak Yang Bekerja	%
2009	4.825.937	408.412	9,95
2010	4.866.137	382.842	7,87
2011	4.886.741	385.887	7,90
2012	4.972.822	450.632	9,06

Sumber : BPS, Pusdatinaker diolah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013

Persentase anak yang bekerja pada usia 10-14 tahun dan 15-17 tahun di Jawa Tengah periode tahun 2008-2012 menduduki peringkat terbanyak dibandingkan provinsi lain se-Jawa. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi pekerja anak antara lain melalui penarikan anak-anak dari pekerjaan terburuk dengan mengembalikan ke dunia pendidikan formal dan non formal. Jumlah Penduduk Usia 10-14 tahun dan 15-17 tahun yang bekerja Menurut Provinsi se-Jawa dan Nasional sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.69.

Tabel 2.69.
Jumlah Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi se-Jawa dan Nasional Tahun 2012

No	Provinsi / Nasional	Jumlah Penduduk Usia (orang)	
		10 - 14 tahun	15 - 17 tahun
1	Jawa Tengah	79.834	370.798
2	Jawa Barat	51.485	356.964
3	Jawa Timur	70.629	298.321
4	Banten	18.405	134.678
5	DKI Jakarta	7.146	100.168
6	DIY	7.509	28.530
	Nasional	894.404	2.680.426

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

g. Produk Hukum dan Kebijakan Daerah Tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak serta Responsif Anak Skala Provinsi

Penguatan kebijakan daerah tentang kesejahteraan dan perlindungan anak telah tersusun dalam Peraturan Gubernur tentang Pokja Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Nomor 463/105/2006 tanggal 8 Desember 2006, Peraturan Gubernur tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Nomor 42 Tahun 2011 tanggal 21 September 2011, dan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang mengamanatkan perlindungan anak melalui upaya pencegahan, penanganan dan pengurangan risiko kerentanan terhadap anak-anak, yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

h. Rasio Program dan Kegiatan Responsif Gender di SKPD Provinsi

Konsekuensi diterapkannya strategi PUG, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengimplementasikan kebijakan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sejak tahun 2010. Rasio SKPD yang menerapkan kebijakan PUG melalui PPRG tahun 2010 sebesar 30,61%, Tahun 2011 sebesar 30,61% dan sejak tahun 2012 telah mencapai 100%. Walaupun semua SKPD telah menerapkan PPRG, namun belum semua program/kegiatan pada tahun 2013 responsif gender (baru mencapai 35%). Upaya dalam rangka percepatan kesetaraan dan keadilan gender dilakukan melalui peningkatan program/kegiatan SKPD yang berdampak besar terhadap pencapaian IPG dan IDG.

i. Rasio Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Responsif Gender

Rasio Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam RPJMD sampai dengan tahun

2012 baru mencapai 14,28%. Selanjutnya Renstra SKPD dan Renja SKPD yang menerapkan PPRG tahun 2011 sebesar 8,57%, meningkat menjadi 62,85% tahun 2012 dan tahun 2013, dan ditargetkan menjadi 65,99% pada tahun 2015.

j. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Persentase perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2009 - 2012 mengalami peningkatan dari sebanyak 6.086 orang (2009), menjadi 6.215 orang (2012). Namun mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 6.004 orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2013, persentase tertinggi PNS perempuan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berada pada pendidikan lulus Strata 1, yaitu sebesar 41,98%. Meskipun pada pendidikan Strata 2 meningkat dari tahun 2012 sebesar 10,84% menjadi 11,50% pada tahun 2013, namun persentasenya masih rendah. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.70.

Tabel 2.70.
Persentase Perempuan yang Bekerja di Pemerintahan
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2009 - 2013

Tingkat Pendidikan	Persentase Perempuan yang Bekerja di Pemerintahan									
	2009		2010		2011		2012		2013	
	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%
Lulus S-3	1	0,01	2	0,03	2	0,03	1	0,01	2	0,03
Lulus S-2	473	7,77	580	9,19	639	10,07	674	10,84	691	11,50
Lulus S-1	2.091	34,86	2.279	36,83	2.429	39,27	2.436	40,59	2.521	41,98
Lulus D-3	807	29,60	1.017	21,56	1.113	21,74	1.123	21,67	1.284	21,38
Lulus SMA sederajat	1.865	30,64	1.827	28,97	1.647	25,95	1.509	24,27	1.389	23,13
Lulus SMP sederajat	113	1,85	100	1,58	83	1,30	72	1,15	66	1,10
Lulus SD sederajat	71	1,16	72	1,14	63	0,99	55	0,88	51	0,84
Jumlah (Org)	6.086		6.306		6.345		6.215		6.004	

Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014

Pada tahun 2009 jumlah perempuan dalam jabatan eselon II sebanyak 9 orang, mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 10 orang. Hal tersebut terjadi juga pada jabatan eselon III, yaitu dari 104 orang pada tahun 2009 menjadi 116 orang pada tahun 2013. Demikian pula dengan jabatan eselon IV meningkat dari 402 orang pada tahun 2009 menjadi 420 orang pada tahun 2013. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.71.

Tabel 2.71.
Persentase Perempuan yang Bekerja di Pemerintahan
Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Eselonisasi Tahun 2009-2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah perempuan pada jabatan eselon II	9 (13,23%)	7 (10,29%)	9 (13,43%)	10 (14,92%)	10
2	Jumlah perempuan pada jabatan eselon III	104 (23,05%)	106 (23,71%)	111 (24,12%)	119 (26,98%)	116
3	Jumlah perempuan pada jabatan eselon IV	402 (32,05%)	413 (32,77%)	430 (32,77%)	431 (34,89%)	420

Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014

k. Rasio Ketercapaian SPM Layanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta *Trafficking*

Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melindungi Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2014. Pergub tersebut sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang SPM Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana Tabel 2.72.

Tabel 2.72.
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2011 – 2013 (%)

No	Indikator Kinerja	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pengaduan	96,75	99,17	100	100
2	Cakupan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat	7,92	9,91	20,23	34,35
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tata laksana KTP/A dan PPR/PKT rumah sakit	80,97	35,25	35,3	53,8
4	Cakupan layanan rehabilitasi sosial oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam unit pelayanan terpadu	49,33	50,00	28,0	18,7

No	Indikator Kinerja	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
5	Cakupan petugas rehabsos terlatih	56	56	9,2	9,2
6	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100
7	Cakupan petugas yang terlatih dalam melakukan bimbingan rohani	100	100	100	100
8	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus KTP/A	96	96	NA	NA
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	63	91	93,1	78,1
10	Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yg memiliki kemampuan pendampingan KTP/A	-	12,24	26,5	26,5
11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	86,47	84,37	84	88,8
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial	85,09	81,59	81,9	83,5
13	Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial	56	56	56	56

Sumber : BP3AKB Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014

1. Rasio Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan

Jumlah pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan dari tahun 2009 - 2012 mengalami fluktuasi, yaitu sebanyak 2.478 (2009), 3.215 (2010), 2.737 (2011), dan 2.883 (2012). Keseluruhan pengaduan tersebut dalam setiap tahunnya dapat diselesaikan sepenuhnya (100%).

m. Rasio Kabupaten/Kota Menuju Kota Layak Anak

Dalam kurun waktu tahun 2011-2013, kabupaten/kota yang telah mendeklarasikan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) menunjukkan peningkatan, yaitu 10 kabupaten/kota (28,5%) tahun 2011, 17 kabupaten/kota (48,6%) tahun 2012 dan 27 Kabupaten/Kota (77,14%) tahun 2013.

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Peserta KB Aktif*

Jumlah peserta KB aktif dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, walaupun tidak begitu signifikan, yaitu dari 5,08 juta (tahun 2009) menjadi 5,40 juta (tahun 2012), namun mengalami penurunan menjadi 5,38 juta (tahun 2013). Penurunan CPR ini disebabkan banyak peserta KB aktif berganti cara (konversi) dari peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang/MKJP (khususnya IUD dan implant) ke non MKJP. Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan CPR

antara lain melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap program KB pada Keluarga pra KS dan KS I agar bersedia menggunakan MKJP. Perkembangan jumlah peserta KB aktif di Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.73.

Tabel 2.73.
Peserta KB Aktif di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 – 2013

No	Tahun	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif	Persentase
1	2009	6.487.025	5.080.590	78.32
2	2010	6.561.254	5.155.761	78.58
3	2011	6.683.596	5.285.530	79,32
4	2012	6.738.688	5.403.576	80.19
5	2013	6.774.113	5.388.214	79,54

Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014

b. Drop Out (DO) KB

DO peserta KB dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik secara persentase maupun jumlah absolut. Hal ini antara lain disebabkan masih rendahnya komitmen kabupaten/kota terhadap program KB, nomenklatur kelembagaan yang berbeda serta rasio PLKB tidak proporsional dengan jumlah desa/kelurahan, serta sebagian besar akseptor masih menggunakan alat kontrasepsi non MKJP. Upaya yang dilakukan agar dapat menekan DO KB antara lain melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), peningkatan pemahaman masyarakat terhadap program KB pada Keluarga pra KS dan KS I agar bersedia menggunakan MKJP dan peningkatan SDM PLKB. Kondisi peserta DO KB di Jawa Tengah selama Tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.74.

Tabel 2.74.
Peserta DO KB di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2013

No.	Tahun	DO KB	
		Jumlah (orang)	Persentase
1	2009	655.569	11,69
2	2010	829.455	13,11
3	2011	911,924	14,71
4	2012	960.277	15,09
5	2013	1.033.375	16,09

Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014

c. Unmet Need

Perkembangan *unmet need* KB dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, walaupun secara absolut masih tinggi, bahkan pada Tahun 2013 mengalami sedikit peningkatan. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk

ber KB, dikarenakan PUS yang tidak ingin memiliki dan menunda punya anak tetapi tidak mau ber KB. Upaya yang dilakukan agar dapat menekan *unmet need* KB antara lain melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), peningkatan pemahaman masyarakat terhadap program KB, peningkatan SDM PLKB dan kerjasama antar berbagai institusi. Kondisi *unmet need* tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.75.

Tabel 2.75.
Unmet Need KB di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2013

No.	Tahun	Jumlah PUS	Jumlah (orang)	Unmet Need KB (%)
1	2009	6.487.025	758.084	11,69
2	2010	6.561.254	760.704	11,59
3	2011	6.683.596	729.796	10,95
4	2012	6.738.688	691.640	10,26
5	2013	6.774.113	705.992	10,42

Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014

d. Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Layanan KB Mandiri

Peran serta masyarakat dalam layanan KB mandiri sangat diperlukan bagi suksesnya pengendalian penduduk di Jawa Tengah. Pencapaian program pembangunan tidak harus semuanya menjadi beban pemerintah, oleh karena itu peran PUS dari kalangan yang mampu sangat diapresiasi. Pencapaian peserta KB Mandiri cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, namun menurun pada tahun 2013. Upaya yang dilakukan agar dapat meningkatkan kepesertaan KB Mandiri antara lain melalui penyadaran masyarakat kalangan mampu dan masyarakat keturunan untuk mengikuti KB Mandiri. Jumlah peserta KB mandiri di Jawa Tengah tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.76.

Tabel 2.76.
Peserta KB Mandiri di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2013

No	Tahun	Peserta KB Mandiri (orang)
1	2009	2.827.153
2	2010	2.938.270
3	2011	2.903.225
4	2012	2.964.527
5	2013	2.389.891

Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014

e. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1

Persentase Keluarga yang termasuk kategori Pra Keluarga Sejahtera semakin menurun, yaitu dari 31,59% (tahun 2009)

menjadi 28,39% (tahun 2012), mengindikasikan semakin meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga. Kondisi tersebut selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.77.

Tabel 2.77.
Jumlah Keluarga Sejahtera
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012

Tahun	Jumlah KK	Keluarga Pra Sejahtera		Keluarga Sejahtera I		Keluarga Sejahtera II	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2009	9.489.024	2.997.410	31,59	1.813.895	19,12	2.104.910	22,18
2010	9.650.555	2.908.390	30,14	1.855.649	19,23	2.186.248	22,65
2011	9.816.537	2.826.038	28,79	1.886.682	19,22	2.264.023	23,06
2012	9.841.123	2.793.948	28,39	1.905.066	19,36	2.264.309	23,01

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2010-2013

13. Sosial

a. Sarana Sosial

Ketersediaan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi menjadi faktor penting dalam upaya penanganan PMKS. Dalam kaitan ini panti sosial milik pemerintah memiliki peran strategis sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dalam penanganan PMKS melalui sistem kelembagaan serta mendorong munculnya produk-produk operasional pelayanan kesejahteraan sosial.

Selama kurun waktu tahun 2009 - 2012 telah dilakukan peningkatan kualitas sarana prasarana milik pemerintah dengan harapan mampu mendorong peningkatan kualitas layanan sosial, sebagaimana dapat dilihat Tabel 2.78.

Tabel 2.78.
Peningkatan Kualitas Sarpras Panti Sosial
Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012

No	Tahun	Jumlah Panti Sosial	Jumlah Panti Sosial Yang di Rehab	Persentase
1	2009	52	8	15,38
2	2010	52	5	9,62
3	2011	52	5	9,62
4	2012	52	11	21,15

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2013

b. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penanganan PMKS telah diupayakan oleh berbagai elemen yakni pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat, melalui sistem kelembagaan (Balai Rehabilitasi Sosial) dan sistem berbasis masyarakat. Penanganan PMKS di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2009-2012 menunjukkan peningkatan dari 0,10% menjadi 2,37%. Namun demikian capaian kinerja penanganan PMKS tersebut masih sangat rendah apabila dibanding dengan populasi PMKS yang ada di Jawa Tengah. Oleh karenanya ke depan penanganan tersebut perlu ditingkatkan

dengan harapan nantinya PMKS mampu melaksanakan fungsi sosial dan meningkat kesejahteraannya, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.79.

Tabel 2.79.

Penanganan PMKS di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012

No	Tahun	Populasi PMKS	Jumlah Penanganan	Persentase
1	2009	6.584.535	6.260	0,10
2	2010	6.243.091	42.706	0,70
3	2011	6.111.535	118.935	1,95
4	2012	6.090.369	144.217	2,37

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2013

c. Jumlah PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial

Secara garis besar penanganan PMKS dimaksud terbagi ke dalam dua kelompok yaitu PMKS Potensial dan Non Potensial, dengan demikian jumlah penanganan PMKS tidak berbanding lurus dengan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial. Pada tahun 2009 persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial sebesar 0,05% meningkat menjadi 0,11% pada tahun 2013. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.80.

Tabel 2.80.

Jumlah PMKS yang Mendapatkan Bantuan Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No	Tahun	Populasi PMKS (orang)	Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial (orang)	Persentase
1	2009	6.584.535	3.491	0,05
2	2010	6.243.091	3.003	0,05
3	2011	6.111.535	4.426	0,07
4	2012	6.090.369	7.257	0,12
5	2013	5.507.993	6.177	0,11

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2014

d. Jumlah PSKS yang Memperoleh Bimbingan/Pelatihan

Upaya untuk penguatan kapasitas PSKS dilakukan melalui bimbingan/pelatihan guna membantu pemerintah dalam penanganan PMKS. Jumlah PSKS yang mendapatkan bimbingan/pelatihan selama kurun waktu tahun 2009 - 2013 mengalami peningkatan dari 710 PSKS (0,36%) pada tahun 2009 menjadi 2.200 PSKS (1,11%) pada tahun 2013. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.81.

Tabel 2.81.
Penguatan Kapasitas PSKS di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2013

No	Tahun	Populasi PSKS	Penguatan Kapasitas	Persentase
1	2009	197.316	710	0,36
2	2010	197.316	1.067	0,54
3	2011	197.316	1.008	0,51
4	2012	197.316	2.612	1,32
5	2013	197.316	2.200	1,11

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2014

e. Jumlah Panti yang sudah menerapkan Standar Pelayanan

Hingga tahun 2013, Balai Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 27 unit seluruhnya telah menyusun standar pelayanan rehabilitasi sosial sebagai landasan operasional pelayanan rehabilitasi sosial penerima manfaat sistem kelembagaan namun dalam implementasinya belum ditindaklanjuti dengan survei kepuasan masyarakat. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.82.

Tabel 2.82.
Jumlah Balai Rehabilitasi Sosial Yang Menerapkan
Standar Pelayanan (SOP) di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2013

No	Tahun	Balai Resos	Standar Pelayanan
1	2009	27	1
2	2010	27	1
3	2011	27	1
4	2012	27	1
5	2013	27	1

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2014

14. Ketenagakerjaan

a. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Perkembangan rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas periode tahun 2009-2013 terus mengalami peningkatan, dimana tahun 2009 sebesar 64,19% berturut-turut sampai dengan tahun 2013 menjadi sebesar 70,72%. Hal tersebut mengindikasikan semakin banyaknya penduduk yang dapat terserap dalam lapangan pekerjaan, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.83.

Tabel 2.83.
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia
15 Tahun ke Atas di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 – 2013

No	Tahun	Jumlah Penduduk yang Bekerja (orang)	Jumlah Penduduk Usia Kerja (orang)	Rasio Kesempatan Kerja (%)
1	2009	15.835.382	24.669.525	64,19
2	2010	15.809.447	23.874.585	66,22
3	2011	15.916.135	23.905.331	66,58
4	2012	16.132.890	23.933.408	67,41
5	2013	16.986.776	24.020.083	70,72

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014

b. Tingkat Penyelesaian Hubungan Industrial

Kasus Hubungan Industrial (HI) selama periode tahun 2009-2013 menunjukkan jumlah berfluktuatif namun cenderung mengalami penurunan dan dapat terselesaikan 100%. Data selengkapnya sebagaimana Tabel 2.84.

Tabel 2.84.
Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No	Tahun	Jumlah Kasus	Status
1	2009	1.063	100% terselesaikan
2	2010	2.349	100% terselesaikan
3	2011	511	100% terselesaikan
4	2012	4.017	100% terselesaikan
5	2013	522	100% terselesaikan

Sumber : Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014

c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Perkembangan jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah pada Tahun 2009 – 2012 cenderung mengalami peningkatan, diikuti dengan peningkatan TPAK dari 69,27% pada tahun 2009 menjadi 71,43% pada tahun 2012. Namun tahun 2013 sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 70,72% seiring dengan menurunnya jumlah angkatan kerja. Masih tingginya TPAK perlu diikuti dengan perluasan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja atau diarahkan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jumlah angkatan kerja dan TPAK sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.85.

Tabel 2.85.
Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013

No	Tahun	Angkatan Kerja *)	
		Jumlah (orang)	TPAK (%)
1	2009	17.087.649	69,27
2	2010	16.856.330	70,60
3	2011	16.918.797	70,77
4	2012	17.095.031	71,43
5	2013	16.986.776	70,72

Sumber : BPS Provinsi Jateng dan Pusdatinaker, 2010-2014

Ket : *) data per Agustus tahun bersangkutan

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah selama periode tahun 2009 – 2012 terus mengalami penurunan, yang mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya angkatan kerja yang dapat terserap di pasar kerja, namun pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi sebesar 6,02% yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM dan bertambahnya lulusan baru pencari kerja, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.86.

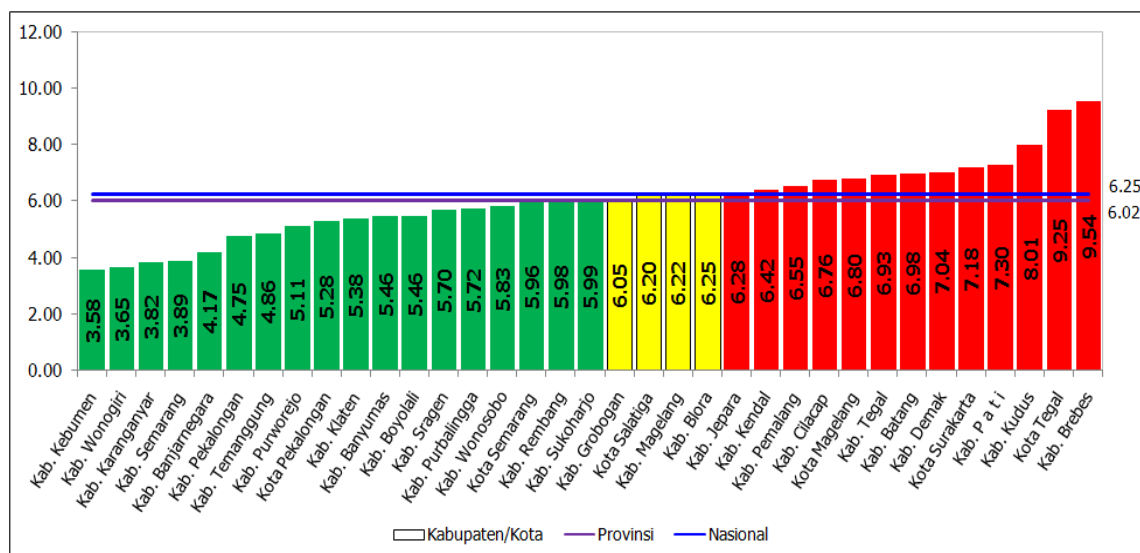
Tabel 2.86.
Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013

No	Tahun	Jumlah Penganggur (orang) *)	TPT (%) *)
1	2009	1.252.267	7,33
2	2010	1.046.883	6,21
3	2011	1.002.662	5,93
4	2012	962.010	5,63
5	2013	1.022.728	6,02

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014

Ket : *) data per Agustus tahun bersangkutan

Posisi relatif sebaran TPT kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2013 dibandingkan dengan rata-rata TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional menunjukkan 13 kabupaten/kota berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional; 4 kabupaten/kota berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan di bawah Nasional; serta 18 kabupaten/kota berada di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.21.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)

Gambar 2.21
Persebaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

e. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Jumlah pencari kerja di Jawa Tengah yang di tempatkan dari Tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan peningkatan, sebagai dampak positif diberlakukannya kewajiban perusahaan melaporkan tenaga kerja yang diterima melalui mekanisme penempatan tenaga kerja. Kondisi jumlah pencari kerja yang ditempatkan dapat dilihat pada Tabel 2.87.

Tabel 2.87.
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010 - 2013

Tahun	Pencari Kerja yang Terdaftar	Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persentase
2010	602.024	88.671	14,73
2011	580.564	242.193	41,72
2012	671.603	219.374	32,66
2013	743.058	324.989	43,74

Sumber : Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah, 2011-2014

f. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah selama periode tahun 2009-2013 mengalami peningkatan cukup signifikan, mengindikasikan bahwa produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah semakin meningkat daya saingnya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.88.

Tabel 2.88.
PDRB ADHK Tahun 2000 per Tenaga Kerja
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No	Tahun	PDRB ADHK 2000 (Juta Rupiah)	Jumlah Tenaga Kerja	PDRB ADHK 2000/Tenaga Kerja (Juta Rupiah)
1	2009	176.673.456,57	15.835.382	11,16
2	2010	186.995.480,63	15.809.447	11,83
3	2011	198.226.349,46	15.916.135	12,45
4	2012	210.848.300,00	16.132.890	13,07
5	2013*)	233.099.000,00	15.964.048	14,60

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014

Keterangan : *) Angka Sangat Sementara

g. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja (yang bekerja)

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja (yang bekerja) di Jawa Tengah selama periode tahun 2009 – 2012 mengalami penurunan yang mengindikasikan semakin meningkatnya pekerja formal di berbagai sektor. Namun pada tahun 2013, proporsi tersebut mengalami peningkatan menjadi 55,91% dibandingkan tahun 2012 sebesar 55,40%. Perkembangan capaian proporsi tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 2.89.

Tabel 2.89.
Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri
dan Pekerja Keluarga Terhadap
Total Kesempatan Kerja (yang bekerja) (%)
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No	Tahun	Proporsi Tenaga Kerja dan Pekerja Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja (%)
1	2009	61,51
2	2010	59,93
3	2011	58,17
4	2012	55,40
5	2013	55,91

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah dan Pusdatinaker, 2010-2014

h. Rasio Rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibanding Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Pencapaian rasio UMK dibandingkan KHL di Jawa Tengah selama periode tahun 2009-2013 terus mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa pendapatan tenaga kerja telah mendekati kebutuhan hidup layak. Perkembangan rasio UMK kabupaten/kota dibandingkan KHL di Jawa Tengah tahun 2009-2013 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.90.

Tabel 2.90.
Rasio Rata - Rata Upah Minimum Kabupaten/Kota
Dibanding Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No	Tahun	UMK (Rp/bln/orang)	KHL (Rp/bln/orang)	Rasio (%)
1	2009	679.083	752.389	90,30
2	2010	734.861	801.210	91,81
3	2011	780.801	830.216	94,09
4	2012	834.255	864.859	96,42
5	2013	914.275,68	940.375	97,31

Sumber : Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014

i. Jumlah Kepesertaan Jamsostek dalam Hubungan Industrial

Jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja yang telah mengikuti program Jamsostek selama periode tahun 2009 - 2012 terus mengalami peningkatan, mengindikasikan bahwa kesadaran perusahaan dan tenaga kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat. Perkembangan jumlah perusahaan dan tenaga kerja secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.91.

Tabel 2.91.
Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja
yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2013

No	Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
1	2009	9.737	643.574
2	2010	18.978	1.330.917
3	2011	19.664	1.966.390
4	2012	21.899	2.186.821
5	2013	22.247	1.249.235

Sumber : Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014

j. Jumlah Pekerja/Buruh Sektor Non Formal yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Jumlah pekerja/buruh sektor non formal yang menjadi peserta program Jamsostek atau yang lebih dikenal dengan Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK) selama tahun 2009 - 2013 berfluktuatif, namun cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran pekerja/buruh sektor non formal terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.92.

Tabel 2.92.
Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal
yang Mengikuti Program Jamsostek
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No	Tahun	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
1	2009	36.954
2	2010	33.107
3	2011	29.969
4	2012	32.784
5	2013	40.983

Sumber : Dinakertransduk Prov. Jateng, 2010-2014

15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
a. Koperasi

Koperasi sebagai salah satu pemegang peran penting dalam perekonomian Jawa Tengah, perlu selalu ditingkatkan kinerjanya agar tetap dalam kondisi aktif dan sehat, terutama pada unit Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Tingkat keaktifan koperasi dalam kurun waktu 2009 - 2013 cenderung meningkat, dari sebesar 79,16% pada Tahun 2009 menjadi sebesar 80,22% pada Tahun 2013. Kondisi ini menunjukkan bahwa sampai dengan Tahun 2013 masih terdapat sebanyak 21,832% koperasi yang tidak aktif. Perkembangan koperasi aktif di Jawa Tengah selama Tahun 2009 - 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.93.

Tabel 2.93.
Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2013

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Koperasi	25.076	25.427	26.346	26.857	27.215
2	Jumlah Koperasi aktif (unit)	19.850	19.617	20.571	21.308	21.832
3	Persentase koperasi aktif (%)	79,16	77,15	78,08	79,34	80,22

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2014

Persentase koperasi sehat di Jawa Tengah selama tahun 2009-2013 menunjukkan peningkatan, yang digambarkan dengan persentase koperasi sehat pada Tahun 2009 sebesar 0,29% menjadi 15,50 % pada Tahun 2013. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam masih sangat rendah, sehingga memerlukan pembinaan khususnya dalam pengelolaan keuangan koperasi. Perkembangan tingkat kesehatan koperasi di Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.94.

Tabel 2.94.
Jumlah Koperasi Sehat KSP/USP di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah koperasi simpan pinjam (KSP/USP)	16.157	19.129	19.881	20.296	21.928
2	Jumlah koperasi sehat (unit)	40	189	116	1.733	3.400
3	Persentase koperasi sehat (%)	0,25	0,99	0,58	8,54	15,50

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2014

b. UMKM

Dalam rangka pemberdayaan UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan pembinaan UMKM. Jumlah UMKM yang telah dibina menunjukkan peningkatan dari sebanyak 65.878 unit pada Tahun 2009 menjadi 90.339 unit pada Tahun 2013. Sedangkan jumlah usaha mikro kecil dan menengah di Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2013 mencapai sebanyak 3.792.071 unit.

UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, di mana penyerapan tenaga kerja dari UMKM meningkat dari sebesar 278.000 orang pada Tahun 2009 menjadi sebanyak 480.508 orang pada Tahun 2013. Selain itu aset UMKM juga meningkat dari sebesar Rp.4.334 Milyar rupiah pada Tahun 2009 menjadi Rp.9.634 Milyar rupiah pada Tahun 2013. Omset juga mengalami peningkatan dari sebesar Rp.10.194 Milyar rupiah pada Tahun 2009 menjadi Rp.20.345 Milyar rupiah pada Tahun 2013. Secara rinci data UMKM binaan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.95.

Tabel 2.95.
Data UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2013

No	Uraian	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah UMKM	unit	65.878	67.616	70.222	80.583	90.339
	Produksi/Non Pertanian	unit	20.682	21.205	23.374	26.171	30.103
	Pertanian	unit	9.385	9.775	10.097	13.242	15.819
	Perdagangan	unit	28.172	28.247	28.362	32.055	33.958
	Jasa	unit	7.639	8.389	8.389	9.115	-
2	Penyerapan Tenaga Kerja	orang	278.000	285.335	293.877	345.622	480.508
3	Asset	Rp. Milyar	4.334	4.448	5.266	6.816	9.634
4	Omzet	Rp. Milyar	10.194	10.463	14.476	18.972	20.345

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2014

Dukungan kredit perbankan menjadi hal yang cukup penting dalam rangka pengembangan UMKM. Penyaluran kredit

bagi UMKM dapat dilihat dari realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Perkembangan realisasi KUR di Jawa Tengah dalam kurun waktu Tahun 2009 - 2013 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, dari sebesar Rp 2.428 Milyar pada Tahun 2009 menjadi sebesar Rp. 18.630 Milyar pada Tahun 2013. Pada kurun waktu yang sama jumlah UMKM yang mengakses KUR juga mengalami peningkatan dari sebanyak 474.188 UMKM menjadi 1.965.795 UMKM. Perkembangan realisasi KUR di Jawa Tengah yang disalurkan melalui 7 bank pelaksana dapat dilihat pada Tabel 2.96.

Tabel 2.96.
Realisasi KUR Menurut Bank Pelaksana di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2013

NO	BANK PELAKSANA	TAHUN									
		2009		2010		2011		2012		2013	
		UMKM	REALISASI (Rp)	UMKM	REALISASI (Rp)	UMKM	REALISASI (Rp)	UMKM	REALISASI (Rp)	UMKM	REALISASI (Rp)
1	BANK MANDIRI	134	32.955.578.260	466	94.753.078.260	844	256.804.121.630	2.019	507.154.121.630	14.718	820.624.589.577
2	BRI	471.710	2.084.642.024.893	902.047	3.873.897.521.800	1.177.574	5.348.223.321.900	1.510.391	8.379.574.423.118	1.849.864	13.524.550.474.729
3	BNI	1.730	182.652.060.835	4.578	273.538.163.800	13.897	628.314.122.962	54.348	1.300.668.773.279	61.167	1.732.815.155.325
4	BANK BUKOPIN	260	70.500.000.100	562	88.238.997.499	842	112.685.540.635	842	112.685.540.635	843	113.934.002.509
5	BANK SYARIAH MANDIRI	112	35.270.100.000	269	79.528.047.459	496	88.310.447.459	3.841	164.731.818.831	7.799	267.565.991.472
6	BTN	242	21.990.072.382	1.419	74.876.809.547	2.443	121.840.274.734	3.394	248.747.091.311	4.111	445.933.609.688
7	BANK JATENG	-	-	5.468	310.970.501.000	12.732	748.500.293.061	20.502	1.246.754.668.061	27.293	1.724.711.991.500
	JUMLAH	474.188	2.428.009.836.470	914.809	4.795.803.119.365	1.208.828	7.304.678.122.381	1.595.337	11.960.316.436.865	1.965.765	18.630.135.814.800

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2014

16. Penanaman Modal

Investasi merupakan salah satu pendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selama Tahun 2009-2013, jumlah investor yang menanamkan modal di Jawa Tengah menunjukkan kondisi fluktuatif. Pada Tahun 2009, jumlah investor yang masuk ke Jawa Tengah sebanyak 30, dan pada Tahun 2013 sebanyak 32. Jumlah investor PMA dan PMDN tertinggi terjadi pada Tahun 2011, sebanyak 43 investor. Perkembangan jumlah investor PMDN dan PMA di Jawa Tengah selama Tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.97.

Tabel 2.97.
Jumlah Investor PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Izin Usaha Tahun 2009 – 2013

Tahun	Jumlah Investor/ Perusahaan		
	PMA	PMDN	Jumlah
2009	3	27	30
2010	9	16	25
2011	16	27	43
2012	13	17	30
2013	14	18	32

Sumber : BPMD Provinsi Jawa Tengah, 2014

Realisasi nilai investasi baik PMA maupun PMDN di Jawa Tengah selama tahun 2009 – 2013 juga mengalami fluktuasi. Realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Tengah dari tahun 2009-2010 mengalami peningkatan dari sebesar Rp.3,510 Trilyun, menjadi sebesar Rp.8,320 Trilyun pada tahun 2010. Namun demikian, terjadi penurunan nilai investasi pada tahun 2011- 2012 menjadi sebesar Rp.6,414 Trilyun pada Tahun 2011 dan Tahun 2012 menjadi Rp.2,993 Triliun. Sedangkan nilai investasi pada Tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 3,088 Trilyun dari tahun 2012. Kondisi fluktuatif ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain ketersediaan lahan, infrastruktur penunjang, kesiapan masyarakat menerima investasi, implementasi regulasi di tingkat pusat/ provinsi/kabupaten/kota. Perkembangan nilai investasi di Jawa Tengah tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.98.

Tabel 2.98.
Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013

Tahun	Persetujuan		Realisasi Izin Usaha Tetap	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Trilyun)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Trilyun)
2009	81	48,037	36	3,510
2010	125	7,242	46	8,320
2011	166	26,698	64	6,414
2012	131	55,808	48	2,993
2013	137	54,257	50	3,088

Sumber : BPMD Provinsi Jawa Tengah, 2014

Daya serap PMA dan PMDN terhadap tenaga kerja di Jawa Tengah selama Tahun 2009 – 2013 cukup baik, walaupun kondisinya cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2009, daya serap tenaga kerja di Jawa Tengah oleh PMA dan PMDN sebesar 230 orang per perusahaan, yang meningkat menjadi 1.448 orang per perusahaan pada Tahun 2013. Namun rasio ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 1.511 orang per perusahaan. Secara lengkap kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.99.

Tabel 2.99.
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA/PMDN	6.885	12.794	19.785	45.322	46.320
Jumlah seluruh PMA/PMDN	30	25	43	30	32
Rasio daya serap tenaga kerja	230	512	460	1.511	1.448

Sumber: BPMD Provinsi Jawa Tengah, 2013

Nilai realisasi PMDN Tahun 2009 – 2013 mengalami kondisi yang fluktuatif, bahkan kondisi Tahun 2013 menurun cukup drastis dari Tahun 2011. Pada Tahun 2009, realisasi PMDN sebesar Rp.2.507,40 milyar, menurun menjadi Rp.859,09 milyar pada Tahun 2013. Selengkapnya kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.100.

Tabel 2.100.
Nilai Realisasi PMDN dan Pertumbuhan Realisasi PMDN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Nilai Realisasi PMDN (Rp.Milyar)	2.570,34	2.825,40	6.430,00	1.633,95	859,09
Pertumbuhan realisasi PMDN (%)	92,34	9,92	127,58	74,59	-47,42

Sumber: BPMD Provinsi Jawa Tengah, 2013

Dalam hal pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penanaman modal, Provinsi Jawa Tengah telah menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari 7 indikator SPM yang ditargetkan untuk dicapai pada Tahun 2014, telah tercapai bahkan melampaui target hingga 2013. Perkembangan capaian target SPM penanaman modal dapat dilihat pada Tabel 2.101.

Tabel 2.101.
Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal
Bidang Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2013

No.	Indikator	Target SPM 2014	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor /Bidang Usaha Unggulan (sektor/ bidang usaha/tahun)	1	-	-	-	1	2
2	Jumlah Fasilitas Kerjasama Kemitraan UMKM dan Koperasi dengan Pengusaha Nasional/Asing (kali/ tahun)	1	3	3	4	6	1
3	Jumlah Promosi Peluang Penanaman Modal provinsi (kali/tahun)	1	3	5	4	6	5
4	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal: Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah provinsi(%).	100	-	-	60	60	100
5	Terselenggaranya bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha (kali/kali)	1	2	2	2	2	2
6	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) (%)	100	-	-	75	75	100
7	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha (kali)	1	2	2	3	3	3

Sumber: BPMD Provinsi Jawa Tengah, 2014

17. Kebudayaan

Pembangunan bidang kebudayaan diarahkan untuk peningkatan dan apresiasi seni dan budaya. Untuk mewujudkannya pada kurun waktu tahun 2009-2013 telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain berupa penyelenggaraan festival seni dan budaya berkisar antara 7 hingga 8 kali penyelenggaraan, dengan jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya relatif sama untuk setiap tahunnya.

Pengelolaan cagar budaya merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun pemerintah provinsi selama kurun waktu tahun 2009-2013 telah melaksanakan pelestarian cagar budaya di 51 lokasi. Jumlah museum yang dilestarikan mengalami peningkatan dari 43 menjadi 48 museum. Berkenaan dengan Tahun Kunjungan Museum, jumlah pengunjung museum pada tahun 2010 sebanyak 379.357 orang meningkat menjadi 1.201.642 orang pada tahun 2013. Perkembangan seni, budaya, dan permuseuman di Jawa Tengah tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.102.

Tabel 2.102.
Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	7 kali	7 kali	8 kali	8 kali	8 kali
2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi
3	Jml cagar budaya (candi, situs)	198	198	198	199	199
4	Jml cagar budaya yang dilestarikan (candi, situs)	13 lokasi	12 lokasi	10 lokasi	12 lokasi	4 lokasi
5	Jumlah Museum	43	43	48	48	48
6	Jumlah Pengunjung Museum	-	379.357	996.320	1.201.642	1.201.642

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2014

18. Kepemudaan dan Olahraga

Pembinaan pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui pembinaan terhadap Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen dan perencanaan program, dengan kondisi cenderung mengalami peningkatan dari 55 pada tahun 2009 menjadi 100 pada tahun 2013. Untuk pelatihan dan pengembangan generasi muda cenderung meningkat dari tahun 2011 dari 3.493 menjadi 3.500 pada tahun 2013. Jumlah kelompok kewirausahaan pemuda juga mengalami peningkatan dari 10 kelompok pada tahun 2010 menjadi 126 kelompok pada tahun 2013. Demikian pula untuk jumlah kegiatan kepemudaan yang cenderung meningkat dari 10 kegiatan pada tahun 2012 menjadi 32 kegiatan pada tahun 2013. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.103.

Tabel 2.103.
Perkembangan Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 – 2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen dan perencanaan program	55	72	72	72	100
2	Pelatihan dan pengembangan generasi muda	5.370	10.000	3.493	3.500	3.500
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	12 keg	9 keg	11 keg	10 keg	32 keg
4	Jumlah Kelompok Kewirausahaan Pemuda	0	10	25	25	126

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, 2014

Pembinaan keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah dilakukan antara lain melalui pembinaan organisasi olahraga. Jumlah organisasi olahraga yang dibina mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebesar 54 menjadi 72 pada tahun 2013. Demikian pula untuk kegiatan olahraga dari tahun 2009 sebanyak 23 kegiatan hingga tahun 2011, dan pada tahun 2012 sebesar 27 kegiatan sampai dengan tahun 2013. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.104.

Tabel 2.104.
Perkembangan Olahraga di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2013

No.	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Organisasi Olahraga	54	54	54	54	72
2	Jumlah Kegiatan Olahraga	23 keg	23 keg	23 keg	27 keg	27 keg

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, 2014

Keberhasilan kinerja pembangunan Urusan Pemuda dan Olahraga antara lain ditunjukkan pada Juara II Tingkat Nasional SP-3; Juara Umum Kejurnas PPLP Cabang Olahraga Atletik dan Juara I Kejurnas PPLP Cabang Olahraga Sepakbola.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri)
a. Kondusivitas Wilayah

Kondisi wilayah Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara umum dapat dikatakan relatif kondusif, meskipun bukan berarti tanpa gangguan sama sekali. Selama tahun 2009-2013 masih terjadi beberapa kali gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain unjuk rasa dan tindak pidana. Kejadian unjuk rasa menunjukkan fluktuasi bahkan pada Tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.105 dan Tabel 2.106.

Tabel 2.105.
Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2013

NO	KELOMPOK MASSA	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Pelajar	45	9	0	0	0
2	Mahasiswa	101	123	80	167	109
3	Buruh	70	51	72	73	89
4	Masyarakat	151	197	174	251	240
JUMLAH		436	367	380	326	438

Sumber : Polda Jawa Tengah, 2014

Tabel 2.106.
Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No.	TUNTUTAN	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Ideologi	2	3	2	0	0
2	Politik	44	72	31	4	290
3	Ekonomi	122	93	103	73	20
4	Sosbud	93	118	137	378	7
5	Hukum dan Keamanan	106	94	53	36	121
JUMLAH		436	367	380	326	438

Sumber : Polda Jawa Tengah, 2014

Indikasi lain yang berkorelasi dengan kondusivitas wilayah adalah kejadian tindak pidana. Selama tahun 2009-2013, jumlah tindak pidana yang terjadi cenderung berfluktuasi walaupun pada tahun 2013 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2012. Jumlah tindak pidana dan tindak pidana menonjol sebagaimana terlihat pada Tabel 2.107.

Tabel 2.107.
Jumlah Tindak Pidana dan Tindak Pidana Menonjol
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana		Tindak Pidana Menonjol	
		Lapor	Selesai	Lapor	Selesai
1	2009	17.391	12.850	7.857	5.246
2	2010	19.645	12.700	8.948	6.117
3	2011	19.764	10.708	8.971	5.186
4	2012	19.094	12.039	9.614	4.926
5	2013	17.444	10.905	8.641	4.443
J U M L A H		93.338	59.202	44.031	26.832

Sumber : Polda Jawa Tengah, 2014

b. Politik

Kondisi politik Jawa Tengah dapat digambarkan melalui pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pilkada yang berjalan tertib dan demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis.

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2008 sebesar 58,46% turun menjadi 55,73% pada tahun 2013. Selanjutnya untuk tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada di kabupaten/kota selama kurun waktu tahun 2008-2012, tertinggi adalah Kota Salatiga 82,06% dan terendah Kabupaten Pemalang 56,74%. Pada tahun 2009 tingkat partisipasi pemilih Pileg DPR/DPRD sebesar 71,26% dan Pilpres sebesar 71,01%. Upaya peningkatan partisipasi pemilih dilakukan melalui pendidikan politik sebagaimana Tabel 2.108.

Tabel 2.108.
Pendidikan Politik Masyarakat
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No.	KEGIATAN	TAHUN (kegiatan)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Pendidikan politik bagi elemen masyarakat	35	6	9	6	3
2	Penguatan sistem dan implementasi kelembagaan parpol	10	3	4	4	3
3	Penguatan budaya dan etika politik masyarakat	6	4	4	4	3
JUMLAH		2	51	13	17	9

Sumber : Badan Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah, 2013

c. Demokrasi

Kondisi demokrasi di Jawa Tengah dapat dilihat dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diukur melalui 3 aspek, yaitu kebebasan sipil (*civil liberty*), hak-hak politik (*political rights*), dan kelembagaan demokrasi (*democratic institution*) terdiri dari 11 variabel dan 28 indikator. Skor IDI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 sebesar 66,45 mengalami penurunan pada Tahun 2010 menjadi 63,42, namun demikian pada Tahun 2011 meningkat menjadi 65,59. Skor IDI Jawa Tengah Tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 1,8 point dari Tahun 2011, yaitu pada Aspek Kebebasan Sipil terutama pada variabel kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan diskriminasi. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.109.

Tabel 2.109.
Indeks Demokrasi Indonesia
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012

No.	Aspek/Variabel	Tahun (Skor)			
		2009	2010	2011	2012
I.	Kebebasan Sipil	86,48	84,83	84,05	75,03
	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	78,75	55,00	51,88	81,88
	2. Kebebasan Berpendapat	50,02	0,00	74,97	47,20
	3. Kebebasan Berkeyakinan	93,22	93,22	86,44	75,22
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	86,93	100,00	93,05	82,75
II.	Hak-Hak Politik	51,85	46,29	46,29	46,29
	1. Hak Memilih dan Dipilih	42,59	42,59	42,59	42,59
	2. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	61,11	50,00	50,00	50,00
III.	Lembaga Demokrasi	64,43	63,70	73,04	77,46
	1. Pemilu yang Bebas dan Adil	94,94	94,94	94,94	94,94
	2. Peran DPRD	69,88	42,60	69,48	41,01
	3. Peran Partai Politik	5,01	57,35	98,06	100,00
	4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	80,30	80,30	80,30	80,30
	5. Peran Peradilan yang Independen	75,00	50,00	32,50	75,00
	Skor IDI	66,45	63,42	65,59	63,79

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

d. Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Dalam rangka pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama kurun waktu 2009-2013 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP sebagaimana Tabel 2.110.

Tabel 2.110.
Pembinaan Terhadap LSM, Ormas, dan OKP
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No.	KEGIATAN	TAHUN (kegiatan)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Sarasehan antar etnis serta akulturasi budaya	6	4	4	4	3
2.	Sarasehan pendayagunaan Ormas	4	2	2	2	2
3.	Sarasehan pengkajian pemeliharaan dan pengembangan kesenian serta budaya daerah	-	2	2	2	1
4.	Peningkatan peran politik Ormas/LSM/Toga/Toma	3	3	4	4	3
	JUMLAH	11	13	11	12	9

Sumber : Badan Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah, 2014

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Kamtramtibum

Pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja. Selama kurun waktu 2009-2012 rasio Polisi Pamong Praja di Provinsi Jawa Tengah meningkat dari 0,75 menjadi 0,78, namun menurun di tahun 2013 menjadi sebesar 0,64. Adapun pelanggaran Peraturan Daerah untuk setiap tahunnya dapat diselesaikan secara tuntas, sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.111 dan Tabel 2.112.

Tabel 2.111.

Rasio Jumlah Polisi PP per 10.000 Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No.	Tahun	Jumlah Polisi PP	Jumlah Penduduk	Rasio
1	2009	2.487	32.864.563	0,75
2	2010	2.508	32.382.657	0,77
3	2011	2.537	32.643.612	0,77
4	2012	2.616	33.270.207	0,78
5	2013	2.229	34.674.870	0,64

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2014

Tabel 2.112.

Penyelesaian Pelanggar Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No.	Tahun	Jumlah Pelanggar Perda	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persentase
1	2009	359	359	100
2	2010	126	126	100
3	2011	2740	2740	100
4	2012	1926	1926	100
5	2013	1758	1758	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2014

b. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Kamtramtibum

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kamtramtibum merupakan salah satu alternatif upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan kurangnya jumlah personil aparat pengamanan. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kamtramtibum dilakukan antara lain melalui perekrutan Linmas dan pemantauan terhadap keberadaan Pos Siskamling. Rasio Linmas per 10.000 penduduk dan rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan ditunjukkan pada Tabel 2.113 dan Tabel 2.114.

Tabel 2.113.
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No.	Tahun	Jumlah Linmas	Jumlah Penduduk	Rasio
1	2009	186.304	32.864.563	56,69
2	2010	264.915	32.382.657	81,81
3	2011	272.280	32.643.612	83,41
4	2012	254.791	33.270.207	76,58
5	2013	272.280	34.674.870	78,52

Sumber : Badan Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2014

Tabel 2.114.
Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No.	Tahun	Jumlah Pos Siskamling	Jumlah Desa/Kel	Rasio
1	2009	4.230	8.574	0,49
2	2010	46.769	8.577	5,45
3	2011	75.413	8.578	8,79
4	2012	103.065	8.578	12,02
5	2013	112.657	8.578	13,13

Sumber : Badan Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2014

c. Hukum dan HAM

Pembangunan bidang Hukum dan HAM dilaksanakan sesuai dengan kewenangan daerah dalam rangka penataan, pengawasan dan penegakan produk hukum daerah. Upaya yang dilakukan meliputi penetapan Perda Provinsi, Evaluasi Raperda dan Klarifikasi Perda Kabupaten/Kota serta penyelesaian sengketa penghormatan HAM. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat telah dilaksanakan penyuluhan dan pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Tabel 2.115.
Penataan, Pengawasan, dan Penegakan Produk Hukum Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013

No	Tahun	Jumlah Perda	Jumlah Klarifikasi Perda Kab/Kota	Jumlah Evaluasi Raperda Kab/Kota	Penyelesaian sengketa
1	2009	12	-	-	-
2	2010	11	119	147	1
3	2011	11	205	130	2
4	2012	12	196	92	17
5	2013	16	100	75	5

Sumber : Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, 2014

d. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum, telah dibentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang disertai pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan dari Gubernur kepada lembaga PTSP. Bidang perizinan dan non perizinan yang dilayani antara lain meliputi bidang penanaman modal, tenaga kerja, koperasi dan UMKM, kesbangpolinmas dan politik, sosial, energi dan sumber daya mineral, sumber daya air, kelautan dan perikanan, kehutanan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, perindustrian dan perdagangan, kesehatan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan, serta keamanan.

e. Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah lain, menyerasikan pembangunan, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerjasama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum.

Bentuk kerjasama daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi peningkatan kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah Dalam Negeri dan luar negeri; fasilitasi peningkatan kerjasama Pemerintah Provinsi Jateng dengan 35 kabupaten/kota dan kerjasama bilateral Jawa Tengah dengan provinsi lain.

f. Administrasi Keuangan Daerah

Pada Tahun 2012 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 35/A/LHP/BPK/XVIII.NG/5/2012.

g. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

Langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengelolaan aset dilaksanakan melalui pengamanan aset, sertifikasi, pemasangan label dan patok batas tanah; kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga termasuk pendayagunaan aset-aset yang *idle*; Inventarisasi dan identifikasi nilai aset serta validasi neraca aset untuk mendukung laporan keuangan pemerintah daerah dan neraca aset daerah.

h. Pengawasan

Selama kurun waktu Tahun 2008 - 2012 telah dilaksanakan pemeriksaan reguler pada obyek pemeriksaan lingkup pemerintah

provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 468 LHP; Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati/Walikota di Jawa Tengah 35 LHP; penanganan dan pemeriksaan khusus 412 kasus; pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan di 35 kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Pada tahun 2013 telah dilaksanakan pemeriksaan reguler pada obyek pemeriksaan lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 499 LHP terdapat 6.015 temuan dengan 6.930 rekomendasi dimana 6.128 rekomendasi (88,43%) telah ditindaklanjuti dan 802 rekomendasi (11,57%) dalam proses; Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati/Walikota di Jawa Tengah sebanyak 35 LHP terdapat 491 temuan dengan 542 rekomendasi dimana 494 rekomendasi (91,14%) telah ditindaklanjuti dan 48 rekomendasi (8,86%) dalam proses; penanganan dan pemeriksaan khusus 421 kasus; pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan kabupaten/kota dan pemerintah desa dengan laporan hasil pemeriksaan sebanyak 344 LHP terdapat 2.727 temuan dengan 3.544 rekomendasi dimana 2.791 rekomendasi (78,75%) telah ditindaklanjuti dan 753 rekomendasi (21,25%) dalam proses.

i. Kepegawaian dan Sumber Daya Aparatur

Langkah-langkah konkrit untuk perbaikan kinerja aparatur pemerintah daerah sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat dilaksanakan melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan secara profesional dan terencana serta adanya kebijakan-kebijakan khusus dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan sebagai penyedia layanan (*service provider*). Peningkatan kapasitas SDM aparatur antara lain dilaksanakan melalui penyelenggaraan diklat aparatur baik teknis, fungsional maupun kepemimpinan; pengiriman tugas belajar dan fasilitasi ijin belajar; pelaksanaan bimbingan teknis dan kursus-kursus keahlian; penilaian prestasi kerja; pembinaan kedisiplinan pegawai; serta kebijakan promosi jabatan struktural secara terbuka.

j. Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi mencakup 8 (delapan) area perubahan di Provinsi Jawa Tengah yaitu Penataan dan penguatan organisasi, Penataan tatalaksana, Penataan sistem manajemen SDM aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penataan perundang-undangan, Pola pikir dan budaya kerja. Beberapa capaian untuk reformasi birokrasi di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.116, Tabel 2.117, dan tabel 2.118.

Tabel 2.116.
Sertifikasi ISO 9001:2008
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No.	Tahun	Jumlah UPP
1	2009	3
2	2010	3
3	2011	2
4	2012	2
5	2013	3
	Jumlah	13

Sumber : Biro Organisasi dan Kepegawaian, Setda Prov Jateng, 2014

Tabel 2.117.
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No	Tahun	Jumlah UPP	Nilai	
			Sangat Baik	Baik
1	2009	-	-	-
2	2010	2	2	-
3	2011	-	-	-
4	2012	48	1	47
5	2013	48	2	46
	Jumlah	50	3	47

Sumber : Biro Organisasi dan Kepegawaian, Setda Prov Jateng, 2014

Tabel 2.118.
Diklat Aparatur Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2013

No.	Diklat	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Teknis	973	552	490	995	995
2.	Fungsional	568	409	260	480	480
3.	Kepemimpinan	532	468	420	676	676
4.	Pemerintah Daerah	290	64	35	40	40
5.	Prajabatan	4.410	4.581	5.917	2.387	2.387

Sumber : Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Jateng, 2013

21. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Empat aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, akses pangan, penyerapan pangan dan aspek stabilitas.

Ketahanan pangan di Jawa Tengah secara umum, semakin baik dan kondusif. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut:

- a. Produksi komoditas pangan strategis menunjukkan pertumbuhan yang positif;
- b. Ketersediaan pangan cukup mantap dan mampu mencukupi kebutuhan bagi seluruh penduduk Jawa Tengah;
- c. Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan yang semakin baik bagi masyarakat;
- d. Peranserta masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan semakin meningkat.

Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dalam kurun waktu 2009-2012 mengalami fluktuasi. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.119.

Tabel 2.119.
Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012

No	Tahun	Jumlah (Orang)
1	2009	5.864.827
2	2010	5.616.529
3	2011	5.376.452
4	2012	5.064.377

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013

Berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) Jawa Tengah dari tahun 2009–2013 diketahui angka ketersediaan energi rata-rata 3.564 kkal/kap/hari dan angka ketersediaan protein rata-rata 92,48 gram/kap/hari. Angka tersebut sudah melebihi angka rekomendasi hasil Widya Karya Pangan dan Gizi (WKNPG) VIII tahun 2004 untuk ketersediaan energi 2.200 kilokalori dan protein 57 gram. Data dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2.120.

Tabel 2.120.
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013

No	Tahun	Energi Per Kapita (Kkal/kap/hari)	Protein Per Kapita (gram/kapita/hari)
1	2009	3.010	80,70
2	2010	3.277	86,28
3	2011	3.886	109,82
4	2012	3.592	92,24
5	2013	4.057	93,36

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2014

Kualitas konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah dari tahun 2008–2013 yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor

Pola Pangan Harapan (PPH) yang merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Jawa Tengah dari aspek konsumsi. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.121.

Tabel 2.121.
Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No.	Kelompok Pangan	Standar	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Padi-padian	25,0	25,0	25,00	25,00	25,00	25,00
2	Umbi-umbian	2,5	2,0	1,93	2,40	2,50	2,19
3	Pangan Hewani	24,0	16,0	12,10	17,88	17,85	17,62
4	Minyak & lemak	5,0	4,6	5,50	4,95	5,00	3,91
5	Buah/biji berminyak	1,0	1,0	1,42	0,97	1,00	0,79
6	Kacang-kacangan	10,0	8,0	9,21	10,00	10,00	10,00
7	Gula	2,5	2,1	1,79	2,27	2,48	1,78
8	Sayur & buah	30,0	25,0	22,67	25,18	26,00	29,06
9	Lain-lain	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Skor PPH Jateng		100,0	83,7	86,02	88,66	89,87	90,35
Skor PPH Nasional			75,7	77,5	77,3	75,4	88,3

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jateng, 2014

Walaupun secara total pencapaian PPH pada Tahun 2013 naik, tetapi indikator pembentuk PPH yang perlu mendapatkan perhatian adalah kelompok pangan hewani, minyak dan lemak, gula serta sayur dan buah.

Perkembangan capaian konsumsi kelompok pangan dan konsumsi energi Tahun 2009-2013 mengarah pada konsumsi ideal sebesar 2.000 kkal/kap/hari dapat dilihat pada Tabel 2.122 dan Tabel 2.123.

Tabel 2.122.
Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No.	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beras (Kg/Kap/Th)	96,93	108,43	102,48	90,49	89,49
2	Umbi-umbian (Kg/Kap/Th)	12,61	21,99	27,52	32,31	24,24
3	Pangan hewani (Kg/Kap/Th)	41,98	21,10	38,44	37,21	36,19
4	Sayur dan buah (Kg/Kap/Th)	87,45	69,43	76,57	73,98	67,70

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2014

Tabel 2.123.
Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No.	Kelompok Pangan	Ideal	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Padi-padian	1.000	1.550,3	1.228,84	1.094,80	1.033,02	1.003,10
2	Umbi-umbian	120	90,7	98,75	100,51	118,89	87,70
3	Pangan Hewani	240	184,0	121,87	178,80	178,52	176,21
4	Minyak & lemak	200	210,1	200	188,10	200,18	156,48

No.	Kelompok Pangan	Ideal	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
5	Buah/biji berminyak	60	45,0	39,99	37,90	40,15	31,55
6	Kacang-kacangan	100	93,0	99,78	137,60	158,99	261,15
7	Gula	100	95,0	97,61	97,80	99,24	71,20
8	Sayur & buah	120	115,0	91,3	100,70	104,12	116,25
9	Lain-lain	60	14,9	14,9	67,30	69,29	101,50
JUMLAH		2000	1.992,6	2.398	2.015	2.003,51	2.005,14

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2014

Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan pada tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.123, meliputi: 1) Ketersediaan dan Cadangan Pangan, 2) Distribusi dan Akses Pangan, 3) Penganekaragaman dan Keamanan Pangan, 4) Penanganan Kerawanan Pangan. Target SPM bidang ketahanan pangan dapat dilihat pada Tabel 2.124.

Tabel 2.124.
Target Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2015

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target SPM				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Penguatan Cadangan Pangan	40 % X 200 ton beras (80 ton beras)	45 % X 200 ton beras (90 ton beras)	60 % X 200 ton beras (120 ton beras)	75 % X 200 ton beras (150 ton beras)	80 % X 200 ton beras (160 ton beras)
2	Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	80 %	90 %	95 %	97 %	100 %
3	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	40 %	50 %	80 %	80 %	80 %
4	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan	35 %	40 %	50 %	55 %	60 %

Sumber :Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2011

Untuk mendukung tercapainya SPM Ketahanan Pangan diupayakan melalui penguatan cadangan pangan; ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan; pengawasan dan pembinaan rawan pangan serta penanganan daerah rawan pangan, yang hingga Tahun 2013 telah melebihi target. Realisasi pencapaian SPM pada Tahun tahun 2012 dan tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.125.

Tabel 2.125.
Target dan Realisasi Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2013

No	Jenis Pelayanan	SPM			
		Target		Realisasi	
		2012	2013	2012	2013
1	Penguatan Cadangan Pangan	80 ton setara beras	120 ton setara beras	141,89 ton setara beras	167,825 ton setara beras
2	Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan	90 %	95%	93,65%	95,19%
3	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	50 %	80%	80 %	80,33%
4	Penanganan Daerah Rawan Pangan	40 %	50%	45%	51,85%

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2014

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K). Jumlah LPMD/K sebagaimana pada Tabel 2.126.

Tabel 2.126.
Perkembangan Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

NO	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K)	8.576	8.576	8.576	8.578	8.578
2.	Jumlah Posyandu Aktif	47.579	48.124	48.124	48.187	48.178
3.	Jumlah PKK Aktif	8.576	8.576	8.576	8.578	8.578
4.	Jumlah UED-SP	10	30	49	34	20
5.	Jumlah BUMDES	-	29	29	29	29
6.	Jumlah Pasar Desa	60	29	39	28	20

Sumber : Bapermasdes Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014

23. Statistik

Pengembangan data/informasi/statistik daerah dilaksanakan guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam kaitan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan data namun yang lebih penting adalah validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor sehingga memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan.

Capaian kinerja sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 antara lain Tersusunnya Buku Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2008 - 2012; Buku PDRB Tahun 2008 - 2012 dan Buku Tinjauan PDRB kabupaten/kota Tahun 2008 - 2012. Selain itu telah dapat diwujudkan kemudahan untuk mengakses data statistik.

24. Kearsipan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tertib pengelolaan arsip menjadi suatu keharusan, bermanfaat sebagai bukti kegiatan dan merupakan wujud dilaksanakannya akuntabilitas instansi/lembaga. Pengelolaan arsip menjadi tanggung jawab dari seluruh instansi penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan Arsip secara baku telah dilaksanakan oleh 59 SKPD di Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana pada Tabel 2.127.

Tabel 2.127.
Pengelolaan Arsip Secara Baku di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2013

No	Tahun	Jumlah SKPD	Jumlah SKPD yang Mengelola Arsip Secara Baku	Rasio
1	2009	60	60	1,00
2	2010	60	60	1,00
3	2011	59	59	1,00
4	2012	59	59	1,00
5	2013	59	59	1,00

Sumber : Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2014

25. Komunikasi dan Informatika

a. Persentase SKPD Provinsi yang Memiliki Website Sendiri

Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat portal *website* milik pemerintah. Dengan adanya *website* diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi hasil pembangunan dan dapat menjadi wadah komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Data jumlah SKPD Provinsi Jateng yang memiliki *website* sebagaimana tabel 2.128.

Tabel 2.128.
Persentase SKPD Provinsi Jawa Tengah Memiliki Website
Tahun 2009-2013

No	Tahun	Jumlah SKPD Provinsi	Jumlah SKPD Provinsi Memiliki Website	Persentase
1	2009	60	27	46
2	2010	60	30	50
3	2011	59	33	55
4	2012	59	35	58
5	2013	59	37	62

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2014

b. Persentase SKPD Provinsi yang Telah Meng-Update Data Di Websitenya

Pembaruan data yang tersaji dalam *website* milik pemerintah akan memberikan gambaran hasil pembangunan kepada masyarakat dan juga investor yang membutuhkan data terbaru, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.129.

Tabel 2.129.
Persentase SKPD Provinsi Jawa Tengah yang Melakukan Update Data Pada Website Tahun 2009 - 2013

No	Tahun	Jumlah SKPD Provinsi Memiliki Website	Jumlah SKPD Provinsi yang Telah Meng-update Data diwebsite	Persentase
1	2009	27	22	81
2	2010	30	25	83
3	2011	33	28	85
4	2012	35	30	85
5	2013	37	32	86

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2014

26. Perpustakaan

Perkembangan capaian kinerja perpustakaan provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan yaitu Jumlah perpustakaan desa dari 356 tahun 2009 menjadi 877 tahun 2013. Demikian pula untuk jumlah koleksi perpustakaan dari 67.127 koleksi pada tahun 2009 meningkat menjadi 203.126 koleksi pada tahun 2013, dan jumlah pengunjung perpustakaan dari 431.377 pengunjung tahun 2009 menjadi 732.050 pengunjung tahun 2013. Namun berbeda untuk jumlah perpustakaan umum provinsi dan jumlah perpustakaan daerah kabupaten/kota yang cenderung tetap. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.130.

Tabel 2.130.
Perkembangan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 – 2013

No	Uraian Data	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Perpustakaan					
	a. Perpustakaan Desa	356	435	521	711	877
	b. Jumlah Perpustakaan Umum Provinsi	1	1	1	1	1
	c. Jumlah Perpustakaan Daerah Kab/Kota	35	35	35	35	35
	d. Jumlah Perpustakaan Keliling	35	35	58	80	80
2	Jml Koleksi Perpustakaan	67.127	171.068	184.568	229.963	203.126
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	431.377	494.665	517.148	595.200	732.050

Sumber Data : Badan Arsip dan Perpustakaan Prov. Jateng, 2014

2.1.4.2. Fokus Layanan Pilihan

1) Pertanian

a. Produksi Pertanian

Urusan Pertanian mencakup sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan. Produksi padi di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil olahan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Tahun 2013 mencapai 10.344.816 Ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan 6.464.475 Ton beras (Angka Sementara).

Pada Tahun 2013 produksi padi sebesar 10.344.816 Ton meningkat 1,09% dibandingkan Tahun 2012 sebesar 10.232.934 Ton; Produksi jagung sebesar 2.930.911 Ton turun 3,64% dari Tahun 2012 sebesar 3.041.630 Ton; Produksi kedelai sebesar 99.318 ton turun 34,83% dari Tahun 2012 sebesar 152.416 ton; belum tercapainya target komoditas di atas karena alih komoditas padi dan produktivitas yang lebih rendah serta pengaruh iklim.

Produksi Tebu sebesar 5.576.736 ton melebihi dari target sebesar 5.025.000 ton dan meningkat dari 4.555.355 ton Produksi Gula pada tahun 2013 sebesar 370.814 ton naik 12,64% dari capaian Tahun 2012 sebesar 329.191 ton. Capaian tersebut di atas target Target Tahun 2013 sebesar 368.000 ton.

Pada Tahun 2013 produksi daging mencapai 266.391.017 kg (ASEM, 2013) naik sebesar 5,62% dibandingkan Tahun 2012, yaitu, sebesar 252.218.874 kg. Produksi telur mencapai 283.149.108 kg (ASEM, 2013) naik 4,17% dibandingkan Tahun 2012 sebesar 271.819.998 kg. Sedangkan penurunan produksi terjadi pada komoditas susu yaitu sebesar 7,57% dari sebesar 105.516.134 liter pada Tahun 2012 menjadi 97.527.340 liter (ASEM, 2013). Penurunan produksi susu disebabkan karena

penurunan populasi ternak sapi perah sebesar 32,78% pada Tahun 2013 menjadi 103.794 ekor (Data Sensus Pertanian 2013) dibandingkan Tahun 2012 sebesar 154.398 ekor. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya penjualan induk sapi perah yang kurang produktif sebagai sapi potong dan belum optimalnya produktivitas sapi perah karena kualitas pakan yang rendah. Produksi dan produktivitas hasil pertanian pada Tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.131 dan Tabel 2.132.

Tabel 2.131.
Produksi Hasil Pertanian Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2013

No.	Jenis	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Padi (ton)	9.600.416	10.110.830	9.391.959	10.232.934	10.344.816*
2	Beras (ton) ^a	5.391.456	5.678.098	5.274.390	5.729.529	6.464.475*
3	Jagung (ton)	3.057.845	3.058.710	2.772.575	3.041.630	2.930.911*
4	Kedelai (ton)	175.156	187.992	112.273	152.416	99.318*
5.	Tebu (ton)	3.216.557	4.118.607	3.516.328	4.555.355	5.576.736
6.	Gula (ton) ^a	227.214	242.660	244.192	329.191	370.814
7.	Daging (kg)	203.841.029	228.189.441	239.459.443	252.218.874	266.391.017*
8.	Susu (lt)	91.762.220	100.149.736	104.141.255	105.516.134	97.527.340*
9.	Telur (kg)	249.804.428	250.226.811	257.175.536	271.819.998	283.149.108*

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013; Dinperten TPH, Dinas Perkebunan, Dinak Keswan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Keterangan : * Angka Sementara

^a Data Hasil Olahan Dinas Pertanian TPH (Beras) dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Gula)

Tabel 2.132.
Produktivitas Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2013

No	Tahun	Produksi per hektar (kw/ha)				
		Padi	Jagung	Kedelai	Ubi	
					Kayu	Jalar
1	2009	55,65	46,21	15,91	192,65	167,77
2	2010	56,13	48,41	16,48	206,10	172,91
3	2011	54,47	53,30	13,69	202,17	196,34
4	2012	57,70	54,97	15,69	217,61	208,72
5	2013 (ASEM)	56,06	55,09	15,21	252,79	183,49

Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, 2014

Keterangan: produktivitas tidak dijumlah, tetap dirata-rata (jumlah produksi/luas areal pada tahun tertentu)

Selanjutnya untuk produksi tanaman hortikultura di Jawa Tengah menunjukkan bahwa produksi cabai merah dan bawang merah sebanyak 145.061 ton dan 419.472 ton pada Tahun 2013 meningkat dari Tahun 2012 sebanyak 130.127 ton dan 381.319 ton. Untuk komoditas kentang sebanyak 273.514 ton melebihi dari target 260.633 ton serta meningkat dari Tahun 2012 sebanyak dari 252.607 ton. Kondisi tersebut dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 2.133.

Tabel 2.133.
Produksi Hortikultura di Jawa Tengah Tahun 2009-2013

No.	Komoditas (Ton)	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Cabai Merah	139.993	134.357	119.130	130.127	145.061
2	Bawang Merah	406.725	506.357	372.256	381.319	419.472
3	Kentang	288.654	265.123	250.402	252.607	273.514

Sumber : Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah, 2014

Sedangkan produksi tanaman perkebunan utama di Jawa Tengah menunjukkan bahwa produksi kopi, kakao, kelapa, cengkeh dan teh pada Tahun 2013 lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2012, dikarenakan adanya penurunan populasi dan produktivitas tanaman belum optimal, serta adanya anomali musim dan peremajaan tanaman yang belum berproduksi. Perkembangan produksi tanaman perkebunan utama di Jawa Tengah selama tahun 2009 – 2013 dapat dilihat Tabel 2.134.

Tabel 2.134.
Produksi Tanaman Perkebunan Utama di Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013

No.	Komoditas (ton)	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kopi	15.010,12	16.224,81	9.837	33.474	19.431
2	Kakao	1.231,28	1.376,62	1.417	1.890	1.819
3	Kelapa	177.714	179.491	180.162	183.048	180.695
4	Karet	795,23	1.187,36	1.401,64	1.580	1.720
5	Cengkeh	6.108,26	6.558,44	4.236,27	7.571	6.246
6	Teh	5.512,06	6.131,58	6.105	6.436	5.481
7	Nilam	15.810,8	17.489,19	13.971	12.487	14,595

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2014

Tahun 2013 dibandingkan dengan Tahun 2012 terjadi penurunan populasi, sapi potong, sapi perah dan kambing. Populasi sapi potong menurun 26,88% yaitu sebesar 1.500.077 ekor (Data Sensus Pertanian 2013) dari 2.051.407 ekor, dikarenakan tingginya harga sapi potong dan tingginya penjualan ke luar Jawa Tengah dalam bentuk ternak hidup. Populasi sapi perah turun sebesar 32,78% menjadi 103.794 ekor (Data Sensus Pertanian 2013) dari 154.398 ekor, dikarenakan harga jual ternak potong yang tinggi sehingga banyak sapi perah yang dijual sebagai ternak potong. Populasi kambing turun sangat sedikit (<0,1%) menjadi 3.889.010 ekor (ASEM, 2013) dari 3.889.878 ekor, dikarenakan banyak ternak yang dikirim ke luar Jawa Tengah dan banyaknya pemotongan kambing dengan umur di bawah 5 (lima) bulan. Kondisi tersebut dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 2.135.

Tabel 2.135.
Populasi Ternak di Jawa Tengah Tahun 2009-2013

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013 ^{*)}
1	Sapi Potong (ekor)	1.525.250	1.554.458	1.937.551	2.051.407	1.500.077
2	Sapi Perah (ekor)	120.667	122.489	149.931	154.398	103.794
3	Kambing (ekor)	3.499.848	3.691.096	3.724.452	3.889.878	3.889.010

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, 2014

Keterangan : ^{*)} Angka Sementara

Dalam rangka mendukung program pembangunan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan diperlukan dukungan penyuluhan yang mantap. Sampai dengan Tahun 2013 telah difasilitasi Balai Penyuluhan sebanyak 338 unit dan Posluhdes sebanyak 3.557 unit. Selain itu untuk meningkatkan kompetensi SDM penyuluh, Tahun 2013 telah dilakukan pelatihan untuk penyuluh sebanyak 1.030 orang (34,01%). Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.136.

Tabel 2.136.
Perkembangan Kelembagaan dan SDM Penyuluh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No	Jenis	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Balai Penyuluhan yang berkualitas	16	53	67	190	338
2	Penumbuhan Posluhdes	-	-	-	3.233 ^{*)}	3.457
3	Persentase penyuluh yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahlian	1,61	8,5	30,2	32,65	34,01

Sumber : Set Bakorluh Provinsi Jawa Tengah, 2014

^{*)} Tahun 2012 dibentuk Posluhdes

^{**)} Jumlah penyuluh yang dilatih

b. Kontribusi Terhadap PDRB

PDRB di Jawa Tengah kurun waktu Tahun 2009-2012 untuk kontribusi sub sektor tanaman pangan, tanaman perkebunan dan cenderung fluktuatif. Kontribusi sub sektor tanaman pangan selalu menurun, hal ini dikarenakan kontribusi sektor lain khususnya industri pengolahan mengalami peningkatan yang jauh lebih tinggi, namun demikian nilai produksi sub sektor tanaman pangan mengalami peningkatan. Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tidak mencerminkan kurang berhasilnya pembangunan pada sektor pertanian, karena yang lebih penting adalah peningkatan nilai produksinya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.137.

Tabel 2.137.
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012

Tahun	ADHB (%)			ADHK (%)		
	Tan. Pangan	Tan. Perkebunan	Peternakan	Tan. Pangan	Tan. Perkebunan	Peternakan
2009	13,92	1,69	2,89	13,53	1,84	2,50
2010	13,70	1,51	2,90	13,15	1,68	2,49
2011	13,31	1,54	2,85	12,39	1,66	2,47
2012*)	13,18	1,47	2,78	12,07	1,62	2,42

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012

Keterangan : *) Angka Sementara

2) Kehutanan

a. Lahan Kritis

Tahun 2013 hutan negara di Jawa Tengah seluas 651.200 ha dan hutan rakyat seluas 742,92 ribu ha, sehingga luas lahan yang berfungsi sebagai hutan seluas 1,394 juta ha. Berdasarkan review lahan kritis yang dilakukan pada tahun 2013, luas lahan kritis di Jawa Tengah seluas 634.601 ha, atau turun dibandingkan tahun 2012 seluas 720.763 Ha.

Dalam rangka menurunkan luas lahan kritis dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Pada tahun 2013 telah dilakukan rehabilitasi seluas 107.095 Ha. Perkembangan upaya penanganan lahan kritis selama tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.138.

Tabel 2.138.
Luas Rehabilitasi Hutan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2013

No.	Luas (Ha)	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Luas hutan (dalam dan luar kawasan)	992.955	1.710.230	1.392.251	1.394.006	1.394.006
2	Luas lahan kritis	697.397	696.797	720.763	720.763	634.601
3	Lahan yang direhabilitasi	43.764	37.306	198.686	119.911	107.095
4	% Lahan yang direhabilitasi	6,27	5,35	27,56	16,63	16,88

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2014

Kerusakan kawasan hutan antara lain terjadi karena pencurian dan kebakaran hutan. Tahun 2013 telah terjadi pencurian kayu sebanyak 11.074 pohon atau seluas 28 Ha dan kebakaran seluas 1.215,31 Ha. Perkembangan data dimaksud selama tahun 2009-2013 dilihat pada Tabel 2.139.

Tabel 2.139.
Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2013

No	Uraian	Tahun (Ha)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Luas pencurian pohon	21,50	14,81	36,24	23,21	28
2.	Luas Kebakaran hutan	5.335,60	160	3.447	5.882	1.215,31
	Total Luas Kerusakan hutan	5.357,10	174,81	3.483,24	5.905,21	1.243,31

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2014

b. Kontribusi Sub Sektor Kehutanan

Terkait pemanfaatan hasil hutan, jumlah industri pengolahan hasil hutan kayu menunjukkan kecenderungan meningkat. Arah pengembangan selanjutnya adalah membentuk industri pengolahan hasil hutan kayu yang mempunyai Sertifikat Verifikasi Legal Kayu (SVLK). Adapun kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Tahun 2012 sebesar 0,50%, menurun dibanding Tahun 2009 sebanyak 0,51%. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.140.

Tabel 2.140.
Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap
PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012

Tahun	ADHB		ADHK	
	Nilai (Juta Rp)	Kontribusi (%)	Nilai (Juta Rp)	Kontribusi (%)
2009	2.032.962,45	0,51	579.230,53	0,33
2010	2.354.617,63	0,53	630.780,66	0,34
2011	2.643.961,51	0,53	652.913,15	0,33
2012 ^{*)}	2.754.602,04	0,50	645.799,07	0,31

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013

Keterangan : *) Angka Sementara

3) Energi dan Sumberdaya Mineral

Kontribusi sektor energi dan sumberdaya mineral di Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2013 relatif tetap. Perkembangan dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2.141.

Tabel 2.141.
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Galian Terhadap PDRB
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

Tahun	ADHB		ADHK	
	Nilai (Milyar Rp)	Kontribusi (%)	Nilai (Milyar Rp)	Kontribusi (%)
2009	3.852,7	0,97	1.952,8	1,11
2010	4.302,5	0,97	2.091,2	1,12
2011	4.726,4	0,95	2.193,9	1,11
2012 ^{*)}	5.239,5	0,94	2.355,8	1,11

Tahun	ADHB		ADHK	
	Nilai (Milyar Rp)	Kontribusi (%)	Nilai (Milyar Rp)	Kontribusi (%)
2013 ^{**})	4.406,2	0,95	1.875,8	1,12

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013, BRS Jawa Tengah, 2014

Keterangan : ^{*}) Angka Sementara

^{**}) Angka Sangat Sementara

Persentase penertiban penambangan liar di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2013 sebesar 86%, meningkat dibandingkan pada Tahun 2012 sebesar 85%. Perkembangan upaya penertiban penambangan liar di Jawa Tengah sejak tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.142.

Tabel 2.142.
Penertiban Area Penambangan Liar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Luas area penambangan liar (ha)	100	92,43	92,43	43,67	96,2
2	Luas area penambangan liar yang ditertibkan (ha)	50	82,21	80,43	37,12	82,74
3	Persentase	50	88,94	87,02	85	86

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2014

Indikator Rasio Elektrifikasi (RE) merupakan pencapaian pembangunan terkait dengan energi yang menunjukkan jumlah KK yang sudah berlistrik. Sampai dengan Tahun 2013, RE Jawa Tengah telah mencapai sebesar 85,29%. Walaupun demikian, data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sebanyak 14,71% rumah tangga yang belum dapat mengakses listrik. Dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi tersebut, telah dilakukan berbagai upaya antara lain dengan pembangunan jaringan listrik pedesaan, dan pengembangan energi baru terbarukan. Perkembangan rasio elektrifikasi dan upayanya selama tahun 2009-2013 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.143.

Tabel 2.143.
Rasio Elektrifikasi dan Upaya Peningkatan Rasio Elektrifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Rasio Elektrifikasi (%)	72,72	73,48	76,63	79,98	85,29
2	Pembangunan jaringan tegangan menengah (JTM)	7	8,77	12,89	22,7	32,228
3	Pembangunan jaringan tegangan rendah (JTR) (kms)	6,49	9,88	13,16	26,32	33,098
4	Pembangunan PLTMH (unit)	3	5	7	9	10
5	Pembangunan PLTS SHS (unit)	559	655	1929	2637	2.865

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
6	Pembangunan Demplot Gas Rawa (unit)	2	3	4	6	7
7	Pembangunan Demplot Biogas	8	16	24	44	55

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2014

4) Pariwisata

Perkembangan jumlah obyek wisata pada kurun waktu 2009 - 2013 cenderung meningkat, sebagaimana tertera pada Tabel 2.144.

Tabel 2.144.
Jumlah Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No.	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Daya Tarik Wisata	257	266	284	385	417
2	Jumlah DTW Alam	120	113	126	132	132
3	Jumlah DTW Budaya	54	67	67	79	88
4	Jumlah DTW Buatan	83	86	91	98	105
5	Jumlah DTW Minat Khusus	N/A	N/A	N/A	10	21
6	Jumlah event dan lain-lain	N/A	N/A	N/A	66	71
7	Jumlah desa wisata (desa)	85	115	119	125	125

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2014

Perkembangan tenaga kerja di bidang pariwisata Jawa Tengah pada kurun waktu 2009 - 2013 cenderung meningkat, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.145.

Tabel 2.145.
Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata dan Pramuwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No.	Uraian	Tahun				
		2009	2009	2010	2012	2013
1.	Jumlah Tenaga Kerja di bidang pariwisata (orang)	19.419	19.807	21.340	21.520	30.486
2.	Jumlah Pramuwisata Madya (orang)	90	117	189	249	380

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2012

Sedangkan perkembangan jumlah, rata-rata lama tinggal wisatawan dan pengeluaran belanja wisatawan di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.146.

Tabel 2.146.
Jumlah, Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan dan
Pengeluaran Belanja Wisatawan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Wisatawan Nusantara (org)	21.515.598	22.275.146	21.838.351	25.240.021	29.430.609
2	Jumlah Wisatawan Mancanegara (org)	273.150	317.805	392.895	372.463	388.143
3	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	2,23	2,25	2,26	2,31	2,34
4	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara (hari)	1,92	1,94	1,96	2,01	2,05
5	Rata-rata belanja wisatawan mancanegara (US dollar per hari)	160	170	284	298	296,85
6	Rata-rata belanja wisatawan nusantara (rupiah per hari)	245.000	275.000	474.000	498.000	514,70

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2014

Perkembangan Pariwisata perlu didorong melalui kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dan asosiasi/lembaga pariwisata. Jumlah kelompok sadar wisata dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan peningkatan dari sebanyak 96 kelompok pada Tahun 2009 menjadi sejumlah 435 kelompok pada Tahun 2013. Namun jumlah kerjasama dengan Asosiasi/ Lembaga Pariwisata pada Tahun 2013 menurun menjadi kerjasama dengan 1 lembaga. Perkembangan jumlah kelompok sadar wisata dan asosiasi/lembaga pariwisata yang bermitra dengan pemerintah dapat dilihat pada Tabel 2.147.

Tabel 2.147.
Jumlah Masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata serta Kerjasama
dengan Asosiasi/Lembaga Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah kelompok sadar wisata (kelompok)	96	89	190	225	435
2	Jumlah kerjasama dengan Asosiasi/ Lembaga Pariwisata (lembaga)	0	2	2	3	1

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2013

Kontribusi sektor pariwisata terhadap total PDRB Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu Tahun 2009-2012 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari 3,24% pada Tahun 2009 menjadi 3,28% pada Tahun 2012. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap kondisi perekonomian Jawa Tengah semakin meningkat. Perkembangan jumlah dan kontribusi sektor pariwisata terhadap total PDRB dapat dilihat pada Tabel 2.148.

Tabel 2.148.
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Total PDRB
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 (Juta rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013*)
1	Hotel	1.362.722,98	1.547.333,66	1.711.438,05	1.898.282,67	1.898.282,67
2	Restoran	11.252.640,99	12.495.126,54	14.137.771,81	15.982.272,76	15.982.272,76
3	Hiburan dan Rekreasi	277.994,35	331.540,12	361.282,19	399.197,41	399.197,41
4	Jumlah Sektor Pariwisata	12.893.358,32	14.374.000,32	16.210.492,05	18.279.752,84	18.279.752,84
5	Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	3,24	3,23	3,25	3,28	3,28

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah).

Ket : *) data sementara, sebelum rilis BPS

5) Kelautan dan Perikanan

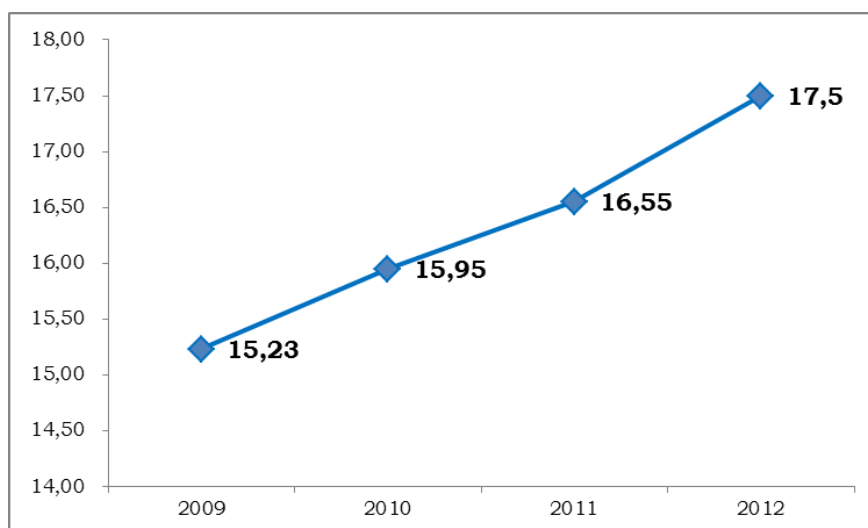
Produksi perikanan tangkap pada Tahun 2013 mencapai 224.178,50 ton lebih besar dibandingkan target sebesar 205.796,29 ton, tetapi lebih rendah dibandingkan dengan capaian Tahun 2012 sebesar 283.957,60 ton karena tempat penangkapan yang tidak bertambah sehingga diperlukan *renewable stocking* di laut. Sedangkan produksi perikanan budidaya Tahun 2013 sebesar 292.862,35 ton melebihi dari target 177.333,80 ton dan mengalami kenaikan 16,62 % dari capaian Tahun 2012 sebesar 251.135,80 ton. Pada Tahun 2013 ekspor produk perikanan mencapai 22.898.187,34 Kg melebihi target 22.818.592,09 kg serta turun dibandingkan Tahun 2012 sebesar 23.791.384,54 kg. Kondisi dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2.149.

Tabel 2.149.
Produksi Perikanan dan Ekspor Produk Perikanan
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No	Jenis Perikanan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Perikanan Tangkap (Ton/Thn)	213.296,80	231.119,20	269.043,20	283.957,60	224.178,50
2	Perikanan Budidaya (Ton/Thn)	145.015,10	189.949,40	244.545,50	251.135,80	292.862,35
3	Ekspor Produk Perikanan (Kg/Thn)	16.596.516,84	16.551.920,24	19.608.246,32	23.791,54	22.898.187,34

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2014

Kondisi tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi ikan semakin meningkat, hal tersebut dapat diketahui dari tingkat konsumsi ikan dalam kurun waktu Tahun 2009-2012 mengalami peningkatan dari sebesar 15,23 kg/kapita/tahun menjadi 17,50 kg/kapita/tahun. Tingkat konsumsi ikan ini dipengaruhi oleh faktor geografis antar kabupaten/kota yang berbeda, sebagian tidak memiliki laut dan kawasan budidaya perikanan; faktor daya beli masyarakat yang masih rendah; dan kesadaran masyarakat tentang nilai gizi ikan yang kurang. Perkembangan tingkat konsumsi ikan dapat dilihat pada Gambar 2.22.



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Gambar 2.22
Tingkat Konsumsi Ikan Per Kapita Penduduk
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 (Kg/Kapita/Tahun)

Pendapatan nelayan (laut dan perairan umum) pada Tahun 2013 sebesar Rp.10.716.485,00 per kapita/tahun melebihi dari target Rp.6.004.780,00 per kapita/tahun dan meningkat 7,16% dari capaian Tahun 2012 sebesar Rp.10.000.000 per kapita/tahun. Sedangkan Pendapatan pembudidaya ikan pada Tahun 2013 sebesar

Rp.18.626.951 per kapita/tahun melebihi target dan meningkat sebesar Rp 3.673.000 per kapita/tahun pada Tahun 2012. Kondisi dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2.150.

Tabel 2.150.
Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Pendapatan nelayan (Rp)	7.144.737,40	7.788.712,80	9.900.000	10.000.000	10.716.485
2	Pendapatan pembudidaya ikan (Rp)	2.044.500	2.535.260	3.372.526	3.673.000	18.626.951

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2014

Terumbu karang di Jawa Tengah sebagai salah satu habitat berbagai macam ikan, saat ini kondisinya semakin menurun. Hal ini dilihat dari kerusakan terumbu karang pada Tahun 2012 mencapai 58 % dari total luasan terumbu karang. Kerusakan terumbu karang tersebut disebabkan oleh penggunaan alat tangkap tidak sesuai standar dan tidak ramah lingkungan. Perkembangan luas terumbu karang di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.151.

Tabel 2.151.
Luas Terumbu Karang Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2012

No	Indikator	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1	Luas terumbu karang (ha)	1.237,43	1.355,61	1.377,18	987,62
2	Luas terumbu karang kondisi baik (ha)	58,60	451,65	430,97	404,95
3	Luas Terumbu Karang Kondisi Sedang (ha)	405,21	76,28	88,51	5,20
4	Luas terumbu karang kondisi rusak (ha)	773,62	827,69	857,71	577,48

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Sedangkan luas hutan mangrove di Jawa Tengah Tahun 2012 sebesar 25.655,22 ha. Kondisi hutan mangrove Tahun 2012 juga banyak mengalami kerusakan, yaitu mencapai sebanyak 3.483,38 ha atau sebesar 13,57%. Perkembangan luas hutan mangrove dapat dilihat pada Tabel 2.152.

Tabel 2.152.
Luas Hutan Mangrove Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2012

No	Indikator	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1	Luas hutan mangrove (ha)	21.450,99	25.819,30	20.153,26	25.655,22
2	Luas hutan mangrove kondisi baik (ha)	14.673,27	15.325,75	14.822,23	17.432,06
3	Luas hutan mangrove kondisi sedang (ha)	4.939,53	6.079,67	2.277,58	4.739,78
4	Luas hutan mangrove kondisi rusak (ha)	1.838,19	4.413,89	3.053,45	3.483,38

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2013

6) Perdagangan

Peran sektor perdagangan terhadap perekonomian Jawa Tengah selama kurun waktu Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 memberikan kontribusi yang positif. Nilai PDRB sektor Perdagangan Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2013 sebesar Rp. 108.947.967,91 juta, yang memberikan kontribusi terhadap total PDRB Jawa Tengah sebesar 17,47%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan usaha dan jasa perdagangan besar dan eceran di Jawa Tengah sangat tinggi seiring dengan kemampuan daya beli masyarakat yang tinggi. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.153.

Tabel 2.153.
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2013 (Juta Rupiah)

No	Kontribusi Terhadap PDRB	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Nilai total PDRB	397.903.943,75	444.666.007,00	498.763.824,16	556.479.872,13	623.749.617,33
2	Nilai Sektor Perdagangan	65.647.179,51	72.954.035,12	82.612.875,54	95.028.163,85	108.947.967,91
3	Kontribusi (%)	16,50	16,41	16,56	17,08	17,47

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Kinerja ekspor non migas Jawa Tengah Tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 361,76 Juta US\$. Ekspor bersih non migas Tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar -359,59 Juta US\$, sedangkan dibanding Tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 420,42 Juta US\$. Pertumbuhan negatif ekspor bersih non migas Jawa Tengah dikarenakan melemahnya pertumbuhan ekonomi global khususnya negara-negara yang menjadi tujuan ekspor Jawa Tengah antara lain Amerika Serikat, Italia, Spanyol, dan negara di Timur Tengah yang diakibatkan belum pulihnya krisis global serta adanya gejolak politik dan keamanan. Nilai impor non migas Tahun 2013

dibandingkan Tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 58,66 Juta US\$, namun demikian nilai capaian masih tinggi yang disebabkan oleh tingginya ketergantungan industri dan sektor usaha terhadap kebutuhan bahan baku dan barang modal serta pola konsumsi masyarakat. Selengkapnya perkembangan nilai ekspor dan impor di Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.154.

Tabel 2.154.
Ekspor Bersih Perdagangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No	Indikator	Nilai				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Nilai ekspor Non Migas (Jt US\$)	2.885	3.674	4.259	4.513	4.874,76
2	Nilai impor non migas (Jt US\$)	2.469	4.071	4.468	5.292	5.233,34
4	Ekspor Bersih Perdagangan (Jt US\$)	416	-397	-209	-779	-358,58

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2014

Aktivitas usaha perdagangan selama kurun waktu lima tahun terus mengalami peningkatan yaitu untuk pemberian Angka Pengenal Impor (API) pada Tahun 2009 sebanyak 77 menjadi 602 pada Tahun 2013. Hal ini mencerminkan masih besarnya kebutuhan impor Jawa Tengah untuk usaha perdagangan dan industri. Sedangkan penerbitan sertifikasi mutu barang untuk ekspor pada Tahun 2013 sebanyak 439 menurun dibanding tahun sebelumnya sebanyak 529 jenis. Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan sertifikasi mutu barang orientasi ekspor tersebut telah dilakukan peningkatan operasional, sarana prasarana pelayanan serta tenaga yang memadai. Jumlah izin usaha perdagangan luar negeri dan jenis barang bersertifikat mutu di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.155.

Tabel 2.155.
Jumlah Izin Usaha Perdagangan Luar Negeri dan Jumlah Jenis Barang Bersertifikat Mutu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No	Jenis Usaha Perdagangan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah izin usaha perdagangan luar negeri (Angka Pengenal Impor - unit)	77	477	334	462	602
2	Jumlah jenis barang bersertifikat mutu (jenis)	632	396	396	529	439

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2014

Selanjutnya upaya pembinaan terhadap Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) di Jawa Tengah menunjukkan peningkatan, Tahun 2009 sebanyak 320.482 unit menjadi 529.688 unit pada Tahun 2013. Demikian juga pada perijinan usaha dagang yaitu SIUP dan TDP mengalami peningkatan selama Tahun 2009 - 2013. Kondisi tersebut selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.156.

Tabel 2.156.
Jumlah Usaha Dagang Kecil dan Menengah dan Izin Usaha Perdagangan
Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No	Jumlah UDKM	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Usaha Dagang Kecil dan Menengah (unit)	320.482	353.965	384.873	415.829	529.688
2	Jumlah izin usaha perdagangan dalam negeri (unit)					
	- SIUP	304.771	329.213	356.999	358.733	378.845
	-TDP	15.711	24.752	27.874	57.096	85.231

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dalam negeri, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama lima tahun menunjukkan peningkatan dan memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu upaya pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di setiap daerah, sampai dengan Tahun 2013 telah terbentuk sebanyak 14 unit dari 2 unit pada Tahun 2009. Untuk pelayanan tera dan tera ulang pada 589 SPBU telah selesai dilaksanakan sepenuhnya. Selengkapnya untuk kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.157.

Tabel 2.157.
Kinerja Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah kabupaten/kota memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK (kab/kota)	2	6	10	14	14
2	Jumlah kabupaten/kota memiliki Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM (kab/kota)	1	4	4	4	4
3	Persentase penyelesaian sengketa Konsumen melalui BPSK kabupaten/kota (%)	-	-	5 kasus (100%)	7 kasus (100%)	26 kasus (100%)
4	Jumlah jenis barang beredar yang dilakukan pengawasan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) (jenis)	300	200	800	946	552
5	Persentase penyidikan terhadap hasil pengawasan yang perlu ditindaklanjuti dengan penyidikan (%)	0	0	0	1 kasus (100%)	1 kasus (60%)
6	Persentase SPBU yang telah dilakukan tera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (%).	100	100	100	100	100 dari 589 SPBU di Jateng

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

7) Perindustrian

a. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Kinerja sektor industri terhadap sumbangan PDRB Jawa Tengah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku untuk sektor industri sebesar Rp.203.104.060,24 juta pada Tahun 2013, dan memberikan kontribusi sebesar 32,56% terhadap total PDRB sebesar Rp.623.749.617,33 Juta. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.158.

Tabel 2.158.
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2013 (Juta Rupiah)

No	Kontribusi Terhadap PDRB	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Nilai total PDRB	397.903.943,75	444.666.007,00	498.763.824,16	556.479.872,13	623.749.617,33
2	Nilai Sektor Industri	130.352.154,42	146.132.837,59	165.850.520,22	182.715.245,06	203.104.060,25
3	Kontribusi (%)	32,76	32,86	33,25	32,83	32,56

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2014

b. Pertumbuhan Industri

Jumlah populasi industri kecil dan menengah serta industri besar di Jawa Tengah selama Tahun 2009-2013 mengalami peningkatan. Industri besar dari 501 unit usaha pada Tahun 2009 menjadi 815 unit usaha pada Tahun 2013. Selanjutnya industri kecil dan menengah sebanyak 320.590 unit usaha pada Tahun 2009, menjadi 422.767 unit usaha pada Tahun 2013. Peningkatan industri besar dipengaruhi oleh masih cukup tersedianya lahan atau kawasan peruntukan industri sesuai RTRW dan terjaminnya kepastian berusaha yang kondusif serta tersedianya tenaga kerja yang terampil khususnya di bidang garmen. Sedangkan pertumbuhan jumlah IKM disebabkan semakin terbukanya peluang usaha industri untuk pemenuhan pasar dalam negeri serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya lokal menjadi produk unggulan daerah. Pertumbuhan industri baik besar, menengah, maupun kecil di Jawa Tengah selama Tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.160.

Tabel 2.159.
Pertumbuhan Industri Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2013

No	Jenis Industri	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Besar	501	495	528	554	815
2	Kecil dan Menengah	320.590	320.770	319.689	335.673	422.767

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2014

c. Pengembangan Klaster Industri

Dalam upaya meningkatkan jejaring dan rantai nilai industri unggulan daerah, telah dilaksanakan model pengembangan usaha industri melalui pendekatan klaster industri. Di Jawa Tengah industri unggulan yang dijadikan sebagai kompetensi inti industri adalah industri mebel, tekstil produk tekstil, makanan ringan, mesin dan perlogaman, komponen otomotif dan kerajinan. Pengembangan industri tersebut diarahkan pada pembentukan kelembagaan klaster industri yang melibatkan antara industri utama, industri pendukung dan usaha terkait. Sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 telah terbentuk kelembagaan klaster industri sebanyak 14 klaster, terdiri dari 3 klaster industri tekstil dan logam, 4 klaster komponen otomotif dan kerajinan, dan 7 klaster makanan ringan dan mebel. Selengkapnya kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.160.

Tabel 2.160.
Pengembangan Klaster Industri di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2013

No	Jenis industri	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Klaster Logam, Mesin, Tekstil	3	2	0	0	3
2	Jumlah Klaster Komponen Otomotif, elektronika & Aneka	1	2	4	0	4
3	Jumlah Klaster agro, kimia & hasil hutan	2	2	3	5	7
4	Pengembangan Klaster Industri	6	6	7	5	14

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2014

d. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Pembinaan terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang dilaksanakan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang inovatif dan terampil, peningkatan kualitas manajemen produksi, peningkatan akses pasar dan bahan baku, peningkatan kualitas dan kapasitas produk. Jumlah

kelompok IKM yang mendapat bantuan sarana prasarana produksi pada Tahun 2013 sebanyak 86 IKM baik dalam skala sentra ataupun Kelompok Usaha Bersama (KUB) berupa paket mesin dan peralatan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.161.

Tabel 2.161.
Jumlah Bina Kelompok Pengrajin Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah kelompok pengrajin yang mendapat bantuan (paket)	73	127	210	230	86

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2014

8) Transmigrasi

Perkembangan pengiriman transmigran dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 mengalami penurunan, walaupun animo masyarakat Jawa Tengah cukup tinggi. Penurunan jumlah transmigran disebabkan kuota yang disediakan oleh Pemerintah Pusat sangat terbatas dan ketidaksiapan lokasi daerah calon penerima transmigran. Capaian pengiriman transmigran dan animo masyarakat Jawa Tengah untuk mengikuti transmigrasi dapat dilihat pada Tabel 2.162.

Tabel 2.162.
Capaian Pengiriman Transmigran
dan Animo Masyarakat Jawa Tengah
Tahun 2009 – 2013

No	Tahun	Jumlah (KK)	Animo (KK)
1	2009	913	4.897
2	2010	593	5.455
3	2011	690	6.306
4	2012	700	5.697
5	2013	471	4.760
Jumlah		3.367	27.115

Sumber : Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki sehingga transmigran mampu mengelola potensi Sumber Daya Alam di lokasi transmigrasi dilaksanakan berbagai pelatihan kepada calon transmigran. Perkembangan pelatihan calon transmigran yang dilakukan Balatrans Penca Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.163.

Tabel 2.163.
Perkembangan Pelatihan Calon Transmigran
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

No	Tahun	Jumlah (KK)
1	2009	590
2	2010	660
3	2011	780
4	2012	475
5	2013	415
Jumlah		2.920

Sumber: Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014

2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Konsumsi makanan penduduk Jawa Tengah tahun 2012 mencapai Rp.255,95 ribu atau 50,49% dari total pengeluaran. Dari total pengeluaran makanan sebesar 17,41% digunakan untuk padi-padian. Pengeluaran makanan terbesar lainnya adalah konsumsi makanan/minuman jadi dan tembakau, masing-masing sebesar 29,32% dan 11,06% dari total pengeluaran konsumsi makanan, sedangkan pengeluaran konsumsi paling sedikit adalah umbi-umbian sebesar 0,47%. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dilihat pada Tabel 2.164.

Tabel 2.164.
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012

No	Kelompok Barang	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
A	Rata-rata pengeluaran Konsumsi (Rp)	188.823	214.180	228.402	255.950
B	Distribusi Pengeluaran konsumsi (%)				
1	Padi-padian	19,35	20,05	17,62	17,41
2	Umbi-umbian	0,61	0,56	0,51	0,47
3	Ikan	4,33	4,16	3,93	3,87
4	Daging	3,32	3,07	3,22	3,3
5	Telur dan Susu	6,57	6,44	5,87	6,16
6	Sayur-sayuran	7,20	8,16	8,31	7,24
7	Kacang-kacangan	5,69	5,11	4,11	4,02
8	Buah-buahan	3,77	3,31	4,68	4,69
9	Minyak dan Lemak	4,03	3,92	4,03	3,83
10	Bahan Minuman	4,23	4,37	4,24	4,18
11	Bumbu-bumbuan	2,39	2,45	2,27	2,1
12	Konsumsi lainnya	3,53	3,34	2,33	2,34
13	Makanan dan Minuman jadi	23,58	24,24	28,58	29,32
14	Tembakau, sirih	11,40	10,82	10,31	11,06
	Jumlah	100	100	100	100

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013

2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Sedangkan pada tahun 2012, pengeluaran untuk konsumsi non makanan sebesar Rp.251,03 ribu atau 49,51% dari total pengeluaran. Pengeluaran tersebut digunakan untuk keperluan perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 34,69%. Pengeluaran konsumsi untuk non makanan dapat dilihat pada Tabel 2.165.

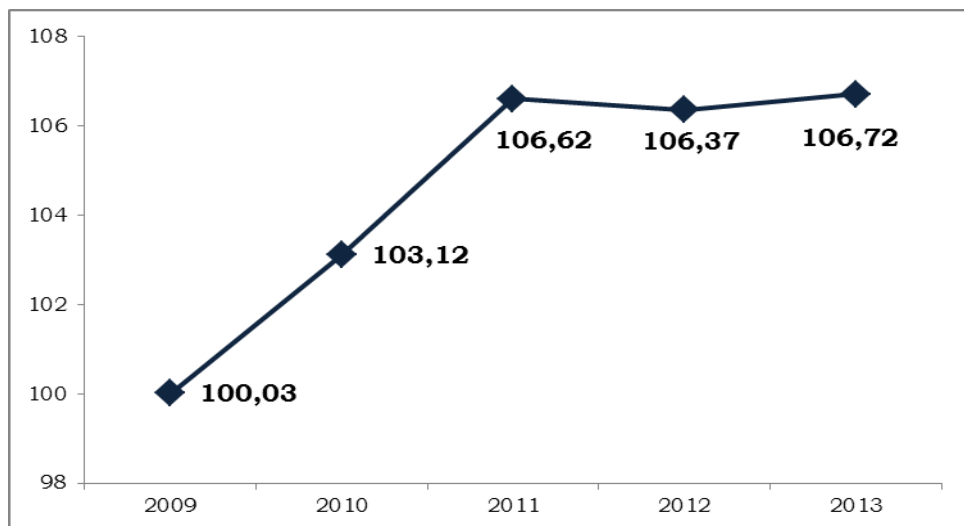
Tabel 2.165.
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012

No	Kelompok Barang	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
A	Rata-rata pengeluaran Konsumsi (Rp ribu)	161.800	180.317	224.438	251,03
B	Distribusi Pengeluaran konsumsi (%)				
1	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	42,91	42,87	35,05	34,69
2	Barang dan Jasa	35,83	36,08	36,74	38,20
3	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	6,47	6,17	6,53	6,02
4	Barang-barang yang tahan lama	9,11	8,95	13,99	13,81
5	Pajak dan asuransi	3,50	3,90	3,21	3,18
6	Keperluan pesta dan upacara	2,18	2,03	4,48	4,10

Sumber : Susenas 2012 Modul Konsumsi BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013

3. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang dan jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi hasil pertanian. NTP dihitung berdasarkan perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) dalam persen. Semakin tinggi nilai NTP, maka relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan dan daya beli petani. Perkembangan NTP di Jawa Tengah Tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Gambar 2.23.



Gambar 2.23
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2013

Mulai bulan Januari 2014, NTP menggunakan Tahun Dasar 2012=100 untuk menyesuaikan perubahan/pergeseran pola produksi pertanian, pola konsumsi rumah tangga pertanian di perdesaan dan perluasan cakupan sub sektor pertanian.

4. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Kondisi panjang jalan yang ada di wilayah Jawa Tengah apabila dibandingkan dengan jumlah kendaraan, maka dapat dilihat bahwa rasionya dari tahun ke tahun semakin kecil. Hal ini terlihat bahwa rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan tahun 2009 sebesar 30,4 menjadi 22,8 pada tahun 2012. Kondisi ini menggambarkan bahwa jumlah kendaraan yang ada di Jawa Tengah, semakin meningkat. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.166.

Tabel 2.166.
Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012

Tahun	Panjang Jalan (km)	Banyak Kendaraan (unit)	Ratio (%)
2009	26.135,19	8.593.911	30,4
2010	26.333,33	9.318.749	28,1
2011	26.533,33	10.481.143	25,3
2012	26.368,79	11.521.288	22,8

Sumber: Jawa Tengah dalam Angka, BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013

5. Sumber Daya Manusia

a. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan dalam kurun waktu 2009 - 2012 terus menurun, pada Tahun 2009 sebesar 52,16%, dan pada Tahun 2012 menjadi sebesar 49%. Data secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.167.

Tabel 2.167.
Rasio Ketergantungan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2012

No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1	Rasio Ketergantungan (%)	52,16	50,31	48,47	49
2	Penduduk (Juta Orang)	32,86	32,38	32,64	33,27
3	Penduduk usia 0-14 tahun (Juta Orang)	8,78	8,52	8,37	8,44
4	Penduduk usia +65 tahun (Juta Orang)	2,48	2,32	2,28	2,46
5	Penduduk usia 15-64 tahun (Juta Orang)	21,60	21,54	21,97	22,37

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013

b. Rasio Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Rasio penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan selama empat tahun terakhir yang paling dominan adalah lulusan SD ke bawah. Secara keseluruhan sejak Tahun 2009 - 2012 rasio lulusan SD ke bawah, SMP, maupun DI/II/III dan Universitas mengalami kondisi yang berfluktuatif, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.168.

Tabel 2.168.
Rasio Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012

No.	Bidang Urusan/Indikator	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1	SD ke Bawah	28,78	25,97	28,00	27,08
2	SMP	8,79	8,80	9,34	9,20
3	SMA	7,94	11,15	8,61	8,96
4	DI/II/III dan Universitas	2,65	2,90	2,82	3,25

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013

c. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama kurun waktu 2009-2012, sektor pertanian memberikan kontribusi paling tinggi dan diikuti sektor perdagangan dan sektor industri. Namun jika dilihat perkembangan tiap tahun, sektor pertanian selama 2009-2012 terus mengalami penurunan dari Tahun 2009 sebanyak 5,86 juta orang dan pada Tahun 2012 menjadi sebanyak 5,06 juta orang. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.169.

Tabel 2.169.
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 (Juta orang)

No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1	Pertanian	5,86	5,62	5,38	5,06
2	Industri	2,66	2,81	3,05	3,30
3	Perdagangan	3,46	3,39	3,40	3,45
4	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	1,84	1,96	2,06	2,17
5	Lainnya (Pertambangan, Listrik, Gas dan Air, Konstruksi, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Lembaga Keuangan, <i>Real Estate</i> dan Usaha Persewaan)	2,02	2,03	2,03	2,16

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013

d. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan

Penyerapan tenaga kerja selama kurun waktu 2009–2012 masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan rendah, yaitu Sekolah Dasar ke bawah dan Sekolah Menengah Pertama. Namun perbaikan kualitas tenaga kerja ditunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dari 0,87 juta orang pada Tahun 2009 meningkat menjadi 1,08 juta orang pada Tahun 2012, sebagaimana data pada Tabel 2.170.

Tabel 2.170.
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta orang)	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
SD ke Bawah	9,46	8,41	9,14	9,01
Sekolah Menengah Pertama	2,89	2,85	3,05	3,06
Sekolah Menengah Atas	2,61	3,61	2,81	2,98
Diploma I/II/III dan Universitas	0,87	0,94	0,92	1,08

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dan Realisasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013

2.2.1. Urusan Wajib

1) Pendidikan

Kinerja pembangunan Urusan Pendidikan ditunjukkan dengan 87 indikator kinerja, dengan capaian seperti tertuang dalam Tabel 2.171.

Tabel 2.171.
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
I	Program Pendidikan Anak Usia Dini							
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	65	%	70,50	70,42	70,55	70,55	●
2	Prosentase Sarana Prasarana PAUD layak	70	%	60	70	71	71	●
3	Rasio jumlah pendidik dengan peserta didik PAUD	1:20		1:30	1:30	1 : 20	1 : 20	●
4	Dokumen tentang pedoman pengelolaan PAUD		ada/tidak	ada	ada	Ada	Ada	●
II	Program Pendidikan Dasar							
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	98	%	98,30	98,83	98,6	98,6	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
6	APK Wajar Dikdas (SMP/MTs)	98	%	100,50	100,49	100,52	100,52	●
7	Nilai rata-rata Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI	7		7,06	7,49	7,2	7,2	●
8	Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) SMP/MTs	6,78		6,8	6,78	6,8	6,8	●
9	Angka naik kelas SD/MI	98	%	99	100	99,15	99,15	●
10	Angka putus sekolah SD/MI	0,12	%	0,12	0,12	0,11	0,11	●
11	Angka putus sekolah SMP/MTs	0,22	%	0,38	0,22	0,34	0,34	▼
12	Angka lulus SD/MI	98	%	99,95	99,5	99,95	99,95	●
13	Angka lulus SMP/MTs	93	%	99,15	99,5	99,17	99,17	●
14	Prosentase Ruang kelas SD sesuai standar nasional pendidikan	90	%	94,75	90	94,78	94,78	●
15	Prosentase Ruang kelas SMP sesuai standar nasional pendidikan	90	%	96,76	90	98,79	98,79	●
16	Prosentase SD yang memiliki laboratorium IPA dan komputer sesuai standar nasional pendidikan	2,42	%	1283 SD/MI	4,82	5,48	5,48	●
5,46								
17	Prosentase SMP yang memiliki laboratorium IPA dan komputer sesuai standar nasional pendidikan	30	%	47,87	43	47,88	47,88	●
18	Prosentase SD yang memiliki perpustakaan	35	%	70,95	35	70,99	70,99	●
19	Prosentase SMP yang memiliki perpustakaan	80 (60)	%	70,50	80	73,22	73,22	▼
20	Prosentase SD/MI terakreditasi	100	%	99,93	100	100	100	●
21	Prosentase SMP/MTs terakreditasi	100	%	99,78	100	100	100	●
22	Prosentase SD/MI yang melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mencapai 100%	100	%	100	100	100	100	●
23	Prosentase SMP/MTs yang melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mencapai 100%	100	%	100	100	100	100	●
24	Prosentase SD/MI dan SMP/MTs melaksanakan pembinaan kesiswaan	100	%	100	100	100	100	●
25	Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki minimal 1 (satu) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) jenjang SD	100	%	48,5	88	48,5	48,5	▼
26	Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki minimal 1 (satu) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) jenjang SMP	100	%	100	100	100	100	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
III	Program Pendidikan Menengah							
27	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	70	%	67	70	70	70	●
28	Rasio siswa SMK : SMA	70:30	%	67:33	70:30	70 : 30	70 : 30	●
29	Prosentase Ruang kelas SMA/SMK sesuai standar nasional pendidikan	40	%	80	80	90	90	●
30	Angka Putus Sekolah SMA/SMK	0,07	%	0,08	0,07	0,07	0,07	●
31	Prosentase SMA/SMK memiliki perpustakaan sesuai standar nasional pendidikan	90	%	87	90	90	90	●
32	Satuan pendidikan SMA/SMK memiliki laboratorium sesuai standar nasional pendidikan	75	%	80	80	90	90	●
33	Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terdapat 1 (satu) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMA	100	%	100	100	100	100	●
34	Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terdapat 1 (satu) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMK	100	%	100	100	100	100	●
35	Satuan pendidikan SMA menerapkan Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) Based Learning	50	%	50,02	50	55	55	●
36	Nilai rata-rata Ujian Nasional SMA/MA/SMK sebesar 7,1	7,1	%	7,73	7,75	7,31	7,31	●
37	Satuan pendidikan SMK yang memiliki bengkel	50	%	75,5	75	86,2	86,2	●
38	Mata pelajaran SMK yang memiliki buku sesuai Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebanyak 30 mapel	100	%	100	100	100	100	●
39	Satuan pendidikan SMA yang menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mencapai 100%	100	%	100	100	100	100	●
40	Satuan pendidikan SMK yang menerapkan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)	100	%	100	100	100	100	●
41	Satuan pendidikan SMA/SMK/MA yang terakreditasi	100	%	100	100	100	100	●
42	Jumlah Satuan pendidikan SMA menerapkan Internasional Standar Operational (ISO) Manajemen versi 9001-2000	6,82	%	7,28	7	7,41	7,41	●
43	Prosentase SMA / SMK melaksanakan MBS dengan baik	50	%	100	50	100	100	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
44	Jumlah Satuan pendidikan SMK menerapkan International Standar Operational (ISO) Manajemen versi 9001-2000	11,93	%	38,75	13,42	40,47	40,47	●
45	Prosentase SMA/SMK melaksanakan pembinaan kesiswaan	100	%	100	100	100	100	●
IV	Program Pendidikan Non Formal dan Informal							
	• Pendidikan Kesetaraan							
46	Prosentase Pendidikan kesetaraan mendukung capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar	7	%	6,0	7	7	7	●
47	Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A	97	%	95,32	98	94,47	94,47	▼
48	Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B	95	%	96,03	95	90,8	90,8	▼
49	Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C	90	%	98,08	91	75,2	75,2	▼
50	Prosentase usia dewasa yang belum bersekolah terlayani pendidikan kesetaraan	60	%	56,07	60	60,15	60,15	●
	• Pendidikan Masyarakat							
51	Prosentase angka buta aksara usia >45	<1	%	0,15	<1	0,14	0,14	●
52	- Prosentase desa di Jawa Tengah memiliki Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	15	%	13,6	15	15	15	●
	• Kursus dan Kelembagaan							
53	Prosentase Pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup	5	%	5,31	5	5,47	5,47	●
54	Prosentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi	10	%	11,7	10	11,75	11,75	●
55	Setiap Kabupaten/Kota memiliki 1 (satu) model layanan Pendidikan Non Formal Unggulan	100	%	100	100	100	100	●
V	Program Pendidikan Khusus							
56	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Khusus	40	%	51,74	40	52	52	●
57	Angka Naik Kelas Pendidikan Khusus	98	%	100	99	100	100	●
58	Angka Lulus pendidikan khusus	100	%	100	100	100	100	●
59	Ruang kelas pendidikan khusus yang sesuai standar nasional pendidikan	70	%	70	70	73	73	●
60	Sarana dan prasarana pendidikan khusus sesuai standar nasional	40	%	67,83	66,94	70	70	●
61	Satuan pendidikan khusus yang terakreditasi	100	%	100	100	100	100	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
VI	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Tenaga Kependidikan							
	Pendidik Jawa Tengah berkualifikasi S1/D4 mencapai:							
62	Prosentase Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4	30	%	31,01	30	31,05	31,05	●
63	Prosentase Pendidik SD/SDLB berkualifikasi S1/D4	45	%	51,56	50	51,58	51,58	●
64	Prosentase Pendidik SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4	85	%	84,57	85	85,05	85,05	●
65	Prosentase Pendidik SMA/SMALB dan SMK berkualifikasi S1/D4	93	%	91,85	93	93,06	93,06	●
66	Prosentase Pendidik Pendidikan Kesetaraan A, B dan C berkualifikasi S1/D4	35	%	34	35	35,05	35,05	●
	Pendidik Jawa Tengah bersertifikat pendidik mencapai :							
67	Prosentase Pendidik PAUD bersertifikat pendidik	16	%	14,02	16	15	15	▼
68	Prosentase Pendidik SD/SDLB bersertifikat pendidik	45	%	46,9	45	47	47	●
69	Prosentase Pendidik SMP/SMPLB bersertifikat pendidik	94	%	54,5	94	55	55	▼
70	Prosentase Pendidik SMA/SMALB dan SMK bersertifikat pendidik	95	%	50,18	95	51	51	▼
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jawa Tengah bersertifikat sesuai bidang keahlian:							
71	Prosentase Pengawas TK/SD/SDLB bersertifikat pengawas	35	%	32,5	35	34	34	▼
72	Prosentase Pengawas SMP bersertifikat pengawas	40	%	32,5	40	37,5	37,5	▼
73	Prosentase Pengawas SMA/SMK bersertifikat pengawas	50	%	97,2	50	97,2	97,2	●
74	Prosentase Laboran pada satuan pendidikan SMP bersertifikat laboran	45	%	36	45	45,05	45,05	●
75	Prosentase Laboran pada satuan pendidikan SMA/SMK bersertifikat laboran	30	%	39,67	30	40	40	●
76	Prosentase Instruktur kejuruan bersertifikat kompetensi keahlian	10	%	10	10	10,5	10,5	●
77	Prosentase Pustakawan pada SMP bersertifikat pustakawan	40	%	36,70	40	40,5	40,5	●
78	Prosentase Pustakawan pada SMA/SMK bersertifikat pustakawan	35	%	40,94	37	41	41	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKP 2013	Capaian Tahun 2013		
79	Prosentase Pendidik/ instruktur kursus kejuruan bersertifikat bidang keahlian	40	%	36	40	40,25	40,25	●
VII	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan							
80	Prosentase lembaga PAUD memiliki tatakelola dan citra yang baik	40	%	34	40	40,1	40,1	●
81	Prosentase SD/MI yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	15	%	28	20	30	30	●
82	Prosentase SMP/MTs yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	30	%	49	30	50	50	●
83	Satuan pendidikan SMA/SMK/MA yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan Baik	50	%	100	50	100	100	●
84	Penerapan Sistem Manajemen Mutu versi 9001-2000 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	100	%	100	100	100	100	●
VII I	Program Fasilitas Pendidikan Tinggi							
85	Prosentase Perguruan Tinggi di Jawa Tengah yang bermitra dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembangunan pendidikan	25	%	40	25	40	40	●
IX	Program Pendidikan Berkelanjutan							
86	Prosentase Satuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah yang mengembangkan pembinaan wawasan kebangsaan	75	%	85	75	85	85	●
87	Prosentase Satuan pendidikan SD/SMP/SMA/SMK di Jawa Tengah yang mengembangkan kurikulum Bahasa Jawa	100	%	100	100	100	100	●

Keterangan :

● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/Ujaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pendidikan, terlihat bahwa dari sebanyak 87 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, sebanyak 76 target indikator berstatus telah tercapai, dan sejumlah 11 target indikator berstatus belum tercapai.

Target indikator yang belum tercapai tersebut antara lain Angka Putus Sekolah SMP/MTs, % SMP/MTs yang memiliki perpustakaan, Kab/Kota yang memiliki SD RSBI, Angka Lulus pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C, % Pendidik bersertifikat pada jenjang PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, serta % Pengawas TK/SD/SDLB dan SMP bersertifikat.

Capaian indikator Angka Putus Sekolah SMP/MTs belum mencapai target 0,22% karena adanya mutasi siswa SMP/MTs ke provinsi lain tanpa laporan kelanjutan pendidikannya, faktor budaya dan tingkat ekonomi keluarga meskipun telah ada subsidi pemerintah berupa bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS). Untuk indikator % SMP/MTs yang memiliki perpustakaan belum tercapai karena keterbatasan lahan guna penambahan ruang perpustakaan dan peningkatan kualifikasi perpustakaan sesuai SNP. Sedangkan, belum tercapainya indikator Angka Lulus pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C disebabkan karena belum semua warga belajar pendidikan kesetaraan memiliki kesadaran untuk menyelesaikan pendidikannya dan mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, untuk capaian indikator Kab/Kota yang memiliki SD RSBI, % Pendidik bersertifikat pada jenjang PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, serta % Pengawas TK/SD/SDLB dan SMP bersertifikat, sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pusat. Kebijakan terkait RSBI sudah dihentikan sejak tahun 2011 serta penetapan kuota sertifikasi baik sertifikasi pendidik maupun pengawas ditentukan oleh Pusat sehingga capaian target Provinsi tersebut sangat tergantung pada kebijakan Pusat.

2) Kesehatan

Kinerja pembangunan Urusan Kesehatan ditunjukkan dengan 94 indikator kinerja, dengan capaian pada Tabel 2.172.

Tabel 2.172.
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja th 2008 - 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
1	Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit							
1	<i>Cakupan UCI</i>	100	%	98,05	100	n/a		
2	<i>Presentase kab/kota dengan kelengkapan laporan surveilans</i>	lebih atau sama dengan 90	%	99,10	lebih atau sama dengan 90	100	100	●
3	<i>Presentase kab/kota dengan ketepatan laporan surveilans</i>	lebih atau sama dengan 80	%	97,30	lebih atau sama dengan 80	100	100	●
4	<i>Meningkatnya persentase kab/kota dengan Non Polio AFP > 2/100.000 anak usia <15 th</i>	Meningkat	%	95,00	Meningkat	100	100	●
5	<i>Meningkatnya Persentase Kab/kota dengan penemuan kasus AFP dan pengambilan spesimennya < 14 hari sesuai SOP</i>	Meningkat	%	100	Meningkat	100	100	●
6	<i>Tertanganinya KLB kurang dari 24 jam</i>	100	%	100	100	100	100	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja th 2008 - 2012	Capaian Kinerja RKPd Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPd 2013	Capaian Tahun 2013		
7	Menurunnya kematian karena kasus DBD	<1		0,07	<1			
8	Menurunnya jumlah penderita DBD	2	Per 10.000 pddk	1,02	2/10.000	1,929	1,929	●
9	Menurunnya angka kesakitan malaria (API)	1	Per 1.000	0,075	1/1.000	0,04	0,04	●
10	Menurunnya angka kesakitan Diare	8 - 10	%	51,43	8 - 10			
11	Menurunnya angka kematian diare	<1	%	0,01	<1			
12	Meningkatnya penemuan kasus HIV/AIDS	Meningkat	%	111,51	Meningkat	730/649		
13	Menurunnya kematian akibat HIV/AIDS	Menurun	%	18,70	Menurun			
14	Meningkatnya penemuan kasus TB paru atau CDR (Case Detection Rate)	70	%	58,45	70	18,93	18,93	▼
15	Meningkatnya angka kesembuhan TB Paru	lebih dari atau sama dengan 85	%	88,64	lebih dari atau sama dengan 85	n/a		
16	Menurunnya kecacatan dan kematian akibat kecelakaan dan cedera	Menurun	%	67,80	Menurun	50,72	50,72	●
17	Menurunnya Pneumonia balita	8 - 10	%	12	8 - 10			
18	Meningkatnya kab/kota yang melaksanakan sosialisasi PTM	50	%	100	50	100	100	●
19	Meningkatnya kab/kota yang melaksanakan surveilans dan pengendalian faktor resiko PTM	25	%	100	25	100	100	●
20	Meningkatnya kab/kota yang melaksanakan surveilans kesakitan dan kematian PTM	100	%	100	100	100	100	●
21	Meningkatnya kab/kota yang melaksanakan deteksi dini PTM	25	%	75	25	100	100	●
22	20-30% penderita gangguan jiwa terlayani pada RSJD Prov.Jateng	100	%	100	100	100	100	●
2	Program Sumber Daya Kesehatan							
23	Melakukan pemerataan tenaga kesehatan di daerah pedesaan	100	%	100	100	100	100	●
24	Bertambahnya SDM kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis kesehatan	10	%	10	10	20	20	●
25	Terakreditasinya pelatihan bidang kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jateng	20	%	76	20	85	85	●
26	Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan tingkat provinsi dan kabupaten/kota	100	%	100	100	100	100	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja th 2008 - 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
27	Memantapkan koordinasi dan sinkronisasi dalam evaluasi pembangunan kesehatan di tingkat provinsi maupun kab/kota	100	%	100	100	100	100	●
28	Tenaga kesehatan yang mengetahui keberadaan dan peran MTKP Jawa Tengah	70	%	100	70	100	100	●
29	Institusi pendidikan tenaga kesehatan yang terakreditasi	80	%	91,46	80	95	95	●
30	Bertambahnya tenaga kesehatan yang terakreditasi	80	%	85	80	87	87	●
31	Adanya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan	100	%	100	100	100	100	●
32	Tertanganinya masalah kesehatan di lintas batas dan Provinsi anggota MPU (mitra Praja Utama).	100	%	100	100	100	100	●
33	Semua Kab/Kota di Jawa Tengah menerapkan JPKM	100	%	100	100	100	100	●
34	Terdistribusinya tenaga kesehatan strategis pada sarana pelayanan kesehatan di daerah sesuai kebutuhan	100	%	119	100	100	100	●
35	Pemanfaatan sistim informasi kesehatan terpadu di lingkungan Dinas Kesehatan Prov Jateng	100	%	100	100	100	100	●
36	Pemanfaatan sistim informasi kesehatan antara jejaring Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota	70	%	100	70	100	100	●
37	Peningkatan informasi SPM bidang kesehatan dan tersediannya profil kesehatan	100	%	100	100	100	100	●
38	Pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar kebijakan dan pelaku program kesehatan	60	%	100	60	100	100	●
39	Meningkatnya persentase pengawasan keuangan dan pencapaian retribusi pada Dinas Kesehatan dan UPT	100	%	100	100	100	100	●
40	Meningkatnya mutu pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan dan UPT	100	%	100	100	100	100	●
41	Meningkatnya kompetensi tenaga medis dan non medis yang bersertifikat di RS sesuai dengan standar yang berlaku	100	%	100	100	100	100	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja th 2008 - 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
42	Meningkatnya jumlah tenaga medis dan non medis sesuai dengan kebutuhan RS	100	%	100	100	100	100	●
43	Terpenuhinya tenaga kesehatan (dokter spesialis jiwa)	100	%	100	100	100	100	●
3	Program Perbaikan Gizi Masyarakat							
44	Menurunnya jumlah gizi buruk pada balita. Prevalensi Gizi buruk balita	0,82	%	0,05	0,82			
45	Menurunnya jumlah KEK	<20	%	7,30	20			
46	Menurunnya kasus anemia pada ibu hamil dan nifas	33,5	%	4,60	33,5			
47	Meningkatnya cakupan pemberian Vit A pada balita	100	%	98,34	100			
48	Balita yang ditimbang secara teratur di Posyandu	80	%	81,4	80			
49	Balita Gizi buruk GAKIN yang ditangani sesuai standar	100	%	100	100	100	100	●
50	Ibu menyusui Asi Eksklusif	65	%	41,90	65			
51	Balita GAKIN 6-24 bulan mendapat MP ASI	80	%	100	80	100	100	●
52	Bayi, Balita, bumil dan bufas yang mendapat suplemen zat gizi mikro	80	%	91,03	80			
53	Keluarga mengkonsumsi garam beryodium.	80	%	81,90	80			
54	Surveillance gizi termasuk sistim kewaspadaan dini KLB Gizi Buruk di Puskesmas	100	%	100	100	100	100	●
4	Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat							
55	Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan	100	%	100	100	100	100	●
56	Tercapainya usia harapan hidup	71	thn	N/A	71	N/A		
57	Menurunnya angka kematian Ibu melahirkan	102	Per 100.000 KH	116,34	102	515 kasus		
58	Meningkatnya persalinan oleh tenaga kesehatan	95	%	97,14	95	59,94	59,94	▼
59	Penanganan komplikasi normal Neonatal 79% dari kasus yang ditemukan	79	%	66,38	79	39,42	39,42	▼
60	Meningkatnya kunjungan nifas	90	%	95,63	90			
61	Cakupan pemanfaatan buku KIA	90	%	100	90	100	100	●
62	Semua desa melaksanakan P4K	100	%	100	100	100	100	●
63	Puskesmas Poned berfungsi optimal 2 Puskesmas Kab./ Kota	100	%	100	100	100	100	●
64	Penurunan angka kematian bayi	9,8	Per 1000 KH	10,75	9,8	3,759 kasus		

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja th 2008 - 2012	Capaian Kinerja RKPd Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPd 2013	Capaian Tahun 2013		
65	Penurunan angka kematian balita	12	Per 1.000 KH	11,85	12	4,254 kasus		
66	Balita Sakit ditangani dengan MTBS/ balita yang berkunjung di Puskesmas	90	%	90	90			
67	Cakupan SDIDTK 95 %	95	%	95	95			
68	Puskesmas PKPR 20 % setiap Kab/ Kota	20	%	82,80	20			
69	Puskesmas KTA 25 % setiap kab/kota	25	%	82,85	25			
70	Tersedianya sarana dan prasarana peralatan alat kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan produk unggulan RS	100	%	100	100	100	100	●
71	Terlaksananya sistem rujukan rumah sakit	Terlaksana	-	terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	●
5	Program Pengembangan Lingkungan Sehat							
72	Meningkatnya kab/kota dengan Tempat Usaha penjamah Makanan (TUPM) memenuhi syarat 80%	80	%	86	80	89	89	●
73	Meningkatnya kab/kota dengan cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan 75%	75	%	86	75	87	87	●
74	Meningkatnya kab/kota dengan keluarga yang telah menggunakan air bersih 85%	85	%	86	85	88	88	●
75	Meningkatnya kab/kota dengan keluarga yang telah menggunakan jamban sebesar 80%	80	%	87	80	89	89	●
76	Meningkatnya kab/ Kota dengan cakupan institusi yang dibina 80%	80	%	80	80	85	85	●
77	Terwujudnya pengelolaan sampah perkotaan 95%	95	%	96	95	98	98	●
78	Terwujudnya pengelolaan sampah pedesaan 65 %	65	%	68	65	71	71	●
79	Meningkatnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah	17,8	%	25	17,8	27	27	●
80	Meningkatnya inspeksi kesehatan pada Tempat-Tempat Umum (TTU) 80%	80	%	80	80	82	82	●
6	Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan							
81	Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan obat publik dan perbekalan kesehatan lainnya di pelayanan kesehatan	60	%	74,89	60	80	80	●
82	Meningkatnya pelayanan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan	100	%	100	100	100	100	●
83	Meningkatnya cakupan pembinaan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasim alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga	100	%	100	100	100	100	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja th 2008 - 2012	Capaian Kinerja RKPd Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPd 2013	Capaian Tahun 2013		
	(PKRT)							
84	Meningkatnya fasilitasi pembinaan makanan minuman kepada Kab/Kota	60	%	85,34	60	100	100	●
85	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan obat tradisional dalam pelayanan formal	80	%	100	80	100	100	●
86	Meningkatnya pemanfaatan laboratorium makanan dan minuman dalam menjamin mutu dan keamanan produk makanan dan minuman	100	%	100	100	100	100	●
7	Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat							
87	50% kab/kota menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPK)	50	%	100	50	100	100	●
88	Kab/kota melaksanakan kampanye kesehatan melalui media promosi kesehatan (cetak elektronik, outdoor, indoor dan penyuluhan langsung)	100	%	100	100	100	100	●
89	Kab/kota mengembangkan desa/kelurahan siaga	100	%	100	100	100	100	●
90	Kab/kota yang mempunyai kebijakan dalam mendukung peningkatan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan	35	%	100	35	100	100	●
91	Kab/Kota mencapai rumah tangga sehat (rumah tangga ber PHBS)	50	%	75	50	80	80	●
92	Menurunnya angka penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza	15	Kab/kota	15	15	55	55	●
93	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa	100	%	100	100	100	100	●
94	Meningkatnya pemanfaatan fasilitas kesehatan jiwa oleh masyarakat.	100	%	100	100	100	100	●

Keterangan :

● : Telah Tercapai; ▲ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kesehatan, dapat diketahui bahwa dari sebanyak 94 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, sejumlah 66 indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 3 indikator belum tercapai, dan sebanyak 25 indikator belum diketahui capaiannya.



3) Pekerjaan Umum

Kinerja Urusan Pekerjaan Umum ditunjukkan dalam 28 indikator, dengan capaian pada Tabel 2.173.

Tabel 2.173.
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum


No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan							
	<i>Lancarnya aksesibilitas transportasi dari dan ke terminal baru Bandara A. Yani.</i>	<i>Lancar</i>						
1	Pembangunan jalan akses menuju terminal baru Bandara A. Yani	1,15	Km	1,15 km.	0	0	1,15	●
	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan							
2	Meningkatnya waktu tempuh rata-rata menjadi 45 Km/jam dan terfasilitasinya penanganan jalan dan jembatan.							●
	• Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan provinsi sepanjang 2.539,70 km	2.539,70	Km	2.651,30	2.472,971	2.463,68	2.651,30	
	• Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan jembatan provinsi sepanjang 24.135 m.	24.135 Km	M	25.335	25.326,23	24.554	25.335	
	Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan							
3	Meningkatnya kondisi jalan baik sebesar 86,54%	86,54	%	86,18	86,54	86,48	86,48	●
4	Meningkatnya kondisi jembatan baik 79%	79	%	78,32	79	78,89	78,89	●
	Meningkatnya efektivitas dan pembangunan jaringan Jalan Lintas Selatan (JLS)	Meningkat						
5	Tersedianya sebagian lahan bebas dan tertanganinya sebagian fisik	Tersedianya sebagian lahan dan fisik	Km	Tersedianya sebagian lahan bebas seluas 2.216.204 m ²	Pembebasan lahan 5,24 Km, seluas 111.429 m ²			

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
	ruas jalan JJLS di Kab. Cilacap, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo dan Kab. Wonogiri.	ruas JJLS.		dan pembangunan fisik sepanjang 28,19 km.				
6	Terhubungnya aksesibilitas yang aman lancar dan memadai antara lain Kota Pekalongan- Kab. Pekalongan- Kab. Banjarnegara- Kab. Wonosobo- Kab. Kebumen; Kab. Pemalang- Kab. Purbalingga- Kab. Purwokerto- Kab. Cilacap dan Kab. Kendal (Weleri) – Kab. Temanggung	40	Km	Tercapainya aksesibilitas yang aman, lancar dan memadai antara lain Kab. Pekalongan- Kab. Banjarnegara, Kab. Wonosobo- Kab. Kebumen; Kab. Pemalang- Kab. Purbalingga- Purwokerto- Kab. Cilacap dan Kab. Kendal (Weleri)- Kab. Temanggung sepanjang 40,69 KM	11,00 (efektif)			
7	Membaiknya kondisi prasarana jalan dan jembatan dalam mendukung kelancaran arus transportasi wilayah diantaranya kawasan Blok Cepu, pariwisata, perbatasan antar provinsi maupun perbatasan antar kabupaten / kota, daerah rawan bencana dan kawasan pengembangan perekonomian wilayah.	180	Km	Membaiknya kondisi prasarana jalan dan jembatan dalam mendukung kelancaran arus transportasi wilayah diantaranya kawasan Blok Cepu, pariwisata, perbatasan antar provinsi maupun perbatasan antar kabupaten/ kota, daerah rawan bencana dan kawasan pengembangan perekonomian wilayah, sepanjang 222,89 Km	78,18 Km (efektif)			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.							
8	<i>Optimalnya kinerja fungsi jalan dan jembatan Provinsi Jawa Tengah</i>		<i>Jalan dan jembatan berfungsi</i>	Tercapainya kondisi jalan dan jembatan berfungsi baik. (Leger	<i>Jalan dan jembatan berfungsi dengan baik (LHR</i>	<i>Jalan dan jembatan berfungsi dengan baik</i>	Tercapainya kondisi jalan dan jembatan berfungsi	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
			<i>dengan baik</i>	82,65 Km, LHR 543 Pos, aspal 5.390 drum, pengadaan bahan 13 jenis 5.695 buah, terpeliharanya alat berat 211 49 jenis, alat laboratorium 23 jenis 75 buah/unit)	100 Pos, pengadaan aspal 815 drum, perbaikan alat berat 16 jenis 110 buah, pengadaan bahan 4 jenis 2.300 buah, pengadaan alat berat 2 jenis 4 buah)	(LHR 86 Pos, aspal 815 drum, perbaikan alat berat 16 jenis 90 buah, pengadaan bahan 4 jenis 2.300 buah, alat berat 2 jenis 4 buah)	baik. (Leger 82,65 Km, LHR 629 Pos, aspal 6.205 drum, pengadaan bahan 17 jenis 7.995 buah, terpeliharanya alat berat 213 53 jenis, alat laboratorium 23 jenis 75 buah/unit)	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya							
	Meningkatkan kondisi fisik jaringan irigasi kewenangan Pemerintah dari kondisi baik sebesar 79% menjadi 89%, kewenangan provinsi dari 41% menjadi 72 % dan kewenangan kabupaten/kota dari 35% menjadi 60% melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi, dengan:							
9	<i>Meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi kewenangan provinsi dari 41% menjadi 72%</i>	72	%	66	72	72	72	
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku							
10	<i>Pemenuhan kebutuhan air baku sampai dengan 10% (dari 40% menjadi 50%)</i>	50	%	48	50	50	50	

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya.							
11	Penanganan konservasi di 35 DAS Kritis	35	DAS kritis	28	7	7	7	●
12	Pembuatan sumur resapan percontohan dengan pemberdayaan masyarakat di 6 Balai PSDA.	6	Balai PSDA	6	-	-	6	●
13	Pembangunan embung-embung atau tampungan air sebanyak 5 buah embung	5	Buah	5	-	-	5	●
14	Terbentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) Bodri Kuto dan Dewan Sumber Daya Air Provinsi	<i>Terbentuknya TIM</i>		<i>sudah terbentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) Bodri Kuto dan Dewan Sumber Daya Air Provinsi</i>	-	-	<i>sudah terbentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) Bodri Kuto dan Dewan Sumber Daya Air Provinsi</i>	●
15	Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air pada 7 Wilayah Sungai (WS) kewenangan pusat dan 2 WS kewenangan kabupaten	<i>Terlaksananya Kerjasama</i>		<i>Sudah terlaksana Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air pada 7 Wilayah Sungai (WS)</i>	-	-	<i>Sudah terlaksana Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air pada 7 Wilayah Sungai (WS)</i>	●
16	Terbentuknya forum masyarakat peduli terhadap konservasi sumber daya air	<i>Terbentuknya Forum</i>		<i>Terbentuknya forum masyarakat peduli terhadap konservasi sumber daya air</i>	-	-	<i>Terbentuknya forum masyarakat peduli terhadap konservasi sumber daya air</i>	●
	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai							
	Terpenuhinya operasi dan pemeliharaan, peningkatan, rehabilitasi prasarana dan sa-							

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
	rana sistem pengendalian banjir pada 10 sungai di wilayah sungai Bodri Kuto dan mengupayakan pengurangan luas rawan genangan banjir dari 199.427 Ha menjadi 167.000 Ha, pada 7 WS kewenangan Pemerintah, 1 WS kewenangan Provinsi dan 2 WS kewenangan Kabupaten dengan:							
17	<i>Berkurangnya luas genangan dari 199.427 Ha menjadi 167.000 Ha</i>	167.000	Ha	173.485	167.000	167.000	167.000	●
18	Terlaksananya Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya forum</i>	-	<i>Sudah terlaksana Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah</i>	-	-	<i>Sudah terlaksana Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah</i>	●
19	<i>Berkurangnya pantai kritis dari 157 Km menjadi 110 km</i>	110	Km	120	110	110	110	●
20	Terbentuknya forum masyarakat peduli banjir di 10 sungai pada wilayah sungai Bodri Kuto dan wilayah sungai lainnya.	<i>Terbentuknya forum</i>	-	<i>Sudah terbentuk</i>	-	-	<i>Sudah terbentuk</i>	●
	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Pedesaan							
21	<i>Berkurangnya kesenjangan pembangunan sarana dan prasarana antar wilayah Pantura-Tengah-Pansela sesuai dengan</i>	<i>Meningkat</i>	<i>lokasi</i>	<i>- 21 lokasi pembangunan prasarana dan sarana Agropolitan. - 11 lokasi revitalisasi kawasan ku-</i>	<i>3 lokasi pembangunan jalan poros desa Agropolitan di Kab. Cilacap, Kab. Purworejo</i>	<i>8 kel/ desa peningkatan Sarpras PKN : Kt. Smg, Kt. Surakarta</i>	<i>- 24 lokasi pembangunan prasarana dan sarana Agropolitan. - 19 lokasi revitalisasi</i>	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
	<i>karakteristik potensi dan kesesuaian dengan RTRW melalui peningkatan kualitas kerjasama pembangunan kawasan strategis, peningkatan peran dan fungsi perkotaan, percepatan dan peningkatan pembangunan perdesaan dan peningkatan cakupan dan sistem infrastruktur wilayah</i>			<i>muh sebagai fungsi PKN dan PKW. - 23 lokasi pembangunan prasarana dan sarana perumahan penunjang kawasan wisata dan revitalisasi tradisional/cagar budaya. - 4 lokasi penanganan penataan kawasan perbatasan.</i>	<i>dan Kab. Pekalongan. 8 kel/desa di PKN : Kota Smg, Kota Solo. PKW : Kab. Kudus, Kebumen, Wonosobo, Klaten, Blora, Kota Pkln 3 Lokasi Pemb jalan poros desa Agropolita n di Kab Purworejo, Kab Pekalongan, Kab Cilacap 7 lokasi Sarpras penunjang kawasan wisata, tradisional (Cagar Budaya) Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Wonosobo, Klaten, Karanganyar, Kota Solo. DED Tugu Batas Jateng-Jabar di Kab. Cilacap dan Penyusunan RTBL Kawasan Perbatasan Jateng-DIY di Kab. Purworejo.</i>	<i>PKW : Kab Kudus, Kebumen, Wonosobo, Klaten, Blora, Kota Pkln 3 Lokasi Pemb jalan poros desa Agropolita n di Kab Purworejo, Kab Pekalongan, Kab Cilacap 7 lokasi Sarpras penunjang kaw wisata dan revitalisasi kawasan tradisional/cagar budaya : Kab Mglg, Byll, Wnsb, Klaten, Krganyar, Blora, Srkarta DED Penataan Kaw Jateng – Jabar ; Dok RTBL Kaw Prbtsan Jateng-DIY</i>	<i>kawasan kumuh sebagai fungsi PKN dan PKW. - 30 lokasi pembangunan prasarana dan sarana perumahan penunjang kawasan wisata dan revitalisasi tradisional/cagar budaya. - 6 lokasi penanganan penataan kawasan perbatasan.</i>	
22	<i>Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan</i>	<i>Meningkat</i>	<i>lokasi</i>	<i>21 lokasi prasarana dan sarana Agropolitan</i>	<i>7 Lokasi sarpras penunjang kawasan wisata tradisional (cagar budaya) Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Wonosobo, Klaten, Karanganyar, Kota Solo.</i>	<i>22 lokasi prasarana dan sarana permukiman</i>	<i>21 lokasi prasarana dan sarana Agropolitan 22 lokasi prasarana dan sarana permukiman</i>	

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi							
	<i>Meningkatnya pelayanan air bersih, sanitasi dan persampahan terutama bagi masyarakat RTM di perkotaan maupun perdesaan</i>	Meningkat	%					
23	Cakupan pelayanan air bersih							●
	- perkotaan	Meningkat	%	40,60	63,50	42,69	42,69	
	- perdesaan	Meningkat	%	20,30	38,20	21,50	21,50	
24	Cakupan pelayanan sanitasi	Meningkat	%	60,03	66	64,50	64,50	●
	Program Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung serta pengembangan jasa konstruksi							
25	<i>Meningkatnya pemahaman NSPM para konsultan dan kontraktor serta para pihak yang terkait dengan pembangunan publik.</i>	Meningkat	-	Sosialisasi/ bintek kepada konsultan/ kontraktor, pembangunan Gedung Despra dan penataan kawasan tugubatas.	RTBL Kawasan Perbatasan Jateng – DIY di Kab Purworejo	585 orang pelaku Jaskon	Sosialisasi/ bintek kepada konsultan/ kontraktor, pembangunan Gedung Despra dan penataan kawasan tugubatas	●
26	<i>Meningkatnya penyelenggaraan, pembinaan dan sosialisasi jasa konstruksi</i>	Meningkat	orang	Terselenggaranya pembinaan dan sosialisasi jaskon kepada 587 orang	70 orang (35 Kab/Kot)	80 orang pengguna jasa	Terselenggaranya pembinaan dan sosialisasi jaskon kepada 667 orang	●
27	<i>Bertambahnya perusahaan jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi dan memiliki sertifikasi kompetensi baik terhadap badan usahanya (SBU) maupun terhadap SDM-nya</i>	Meningkat	Sertifikasi Badan Usaha	Perusahaan yang memiliki SBU sebanyak 62.140 perusahaan.	-	-	Perusahaan yang memiliki SBU sebanyak 62.140 perusahaan.	●
			Sertifikasi ketrampilan kerja	32.349 SKTK	220 pekerja kons. Tersertifikasi.		32.569 SKTK	
28	<i>Meningkatnya jumlah gedung yang berkualitas sesuai NSPM baik dari segi kualitas maupun kinerja pe-</i>	Meningkat	Mutu pelayanan laboratorium uji	Meningkat Mutu pelayanan laboratorium uji	Meningkatnya pemahaman NSPM para konsultan & kontraktor serta	Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO/IEC 17025:2008	Meningkat Mutu pelayanan laboratorium uji	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
	<i>ngelolaan semakin tinggi.</i>				para pihak yang terkait dg pembangunan publik; Meningkatnya jumlah gedung yg berkualitas sesuai NSPM baik dari segi kualitas maupun kinerja pengelolaan semakin tinggi.	Survailence ISO 9001:2008 oleh IAPMO (Lembaga Sertifikasi)		
		Meningkat pengelolaan gedung	-	5 pkt peserta pembinaan penyel. BGN	Meningkatnya pengelolaan gedung melalui Bintek kepada 170 peserta sosialisasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan pembangunan BGN dan Rumdin			

Keterangan :

● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

** : Target RPJMD telah tercapai dan target 2013 merupakan peningkatan cakupan indikator.

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pekerjaan umum, dapat diketahui bahwa dari sebanyak 28 indikator RPJMD tahun 2008-2013, sejumlah 25 indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 3 indikator belum diketahui capaiannya.

4) Perumahan

Kinerja Urusan Perumahan di tunjukkan dalam 8 indikator, dengan capaian pada Tabel 2.174.

Tabel 2.174.
Capaian Kinerja Urusan Perumahan

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
1	Program Pembangunan Perumahan							
1	Terbangunnya rumah baik oleh pengembang, pemerintah/pemerintah daerah dan swadaya masyarakat	Meningkat	Paket/Lokasi	19	3	8	27	●
			Paket/LokasiKasibalasiba	19	6	6	25	
2	Meningkatnya kualitas perumahan	Meningkat	Paket pendampingan	26	6	6	32	●
3	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan lahan kawasan perumahan/perumahan/permukiman kualitas perumahan;	Meningkat	Twin block	65,5	3	3	68,5	●
4	Terfasilitasinya MBR di pedesaan dan perkotaan untuk memiliki rumah yang layak	Terfasilitasi	Rumah Tangga Miskin/RTM	2.890	700	700	3590	●
2	Pemberdayaan Komunitas Perumahan							
5	Meningkatnya pengetahuan kesadaran, partisipasi masyarakat pedesaan dan MBR dalam peningkatan kualitas hunian	350	Unit RTM	2.890	700	700	3.590	●
6	Meningkatnya Pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat dlm pengurangan resiko bencana	Meningkat	Kab/Kota	Sosialisasi kpd Masy penerima manfaat tentang penggunaan material bahan bangunan yang akan diberikan pd masy rentan bencana Kab. Pematang-	Sosialisasi kpd Masy penerima manfaat tentang penggunaan material bahan bangunan yang akan diberikan pada masy Rentan Bencana Kab Purwokerto, Pematang, Banjarnegara, Temang-	Sosialisasi Bintek Perbaikan Rumah Pasca Bencana Alam di Kab Wnsb, Pmlg, Tmngg dan Tegal	Sosialisasi kpd Masy penerima manfaat tentang penggunaan material bahan bangunan yang akan diberikan pd masyrentan bencana Kab. Pematang, Brebes, Bnjng, Banyumas dan Sosialisasi Bintek Perbaikan Rumah Pasca	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
				Brebes, Bjngr, Banyumas	gung		Bencana Alam di Kab Wnsb, Pmlg, Tmngg dan Tegal	
7	<i>Meningkatnya sinergitas komunitas perumahan dlm pengelolaan dan pemeliharaan serta sharing pembangunan dan pembiayaan perumahan</i>	Meningkat	Lokasi	Pemb PSD Rusunawa Kota Smg, Skrta, Skhj, Kr.anyar, Clp, Kota Pkl, Kudus, Jpr, Kab. Pkl	Pemb PSD Rusunawa di 3 lokasi (Kab Pematang, Klaten, Kota Tegal)	Pemb PSD Rusunawa di 3 lokasi (Kab Pematang, Klaten, Kota Tegal)	Pemb PSD Rusunawa di 12 kab/kota (Kota Smg, Skrta, Skhj, Kr.anyar, Clp, Kota Pkl, Kudus, Jpr, Kab. Pkl, Kab Pematang, Klaten, Kota Tegal).	●
8	<i>Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan/ permukiman</i>	Meningkat	Lokasi sarpras Ds. Kumuh, Ds. Nelayan, dan Ds. Miskin	101 desa Sarpras Kumuh	28 Desa sarpras kumuh desa nelayan & tradisional di Kab Semarang, Brebes, Sragen, Pati, Blora, Pematang, Kab Tegal, Wonogiri, Kota Semarang, Kab Klaten, Temanggung, Boyolali, Rembang, Purworejo, Banjarnegara, Kendal, Wonosobo, Karanganyar, Banyumas, Pekalongan, Batang, Magelang	27 desa sarpras kumuh desa nelayan & tradisional di Kab Smg, Brbs, Srgn, Pati, Blora, Pmlg, Kota Smg, Rmbg, Purworejo, Grbg, Klaten, Boyolali, Kranyar, Tegal, Kendal, Temanggung, Wonogiri, Pekalongan, Btg, Wnsb, Mglg, Bjngr, Byms.	128 desa Sarpras Kumuh	●
		Meningkat	Lokasi	27 lokasi di Kab Pkl, Kdl, Grbg, Srg, Tmng, Smg, Kbm, Kr.anyar, Wnsb, Brbs, Pmlg, Blora	8 lokasi pengembangan KTP2D di Kab Sukoharjo, Sragen, Brebes, Blora, Pematang, Karanganyar	8 lokasi pengembangan KTP2D di 6 Kab : Sukoharjo, Sragen, Brebes, Blora, Pematang, Kranyar	35 lokasi di Kab Pkl, Kdl, Grbg, Srg, Tmng, Smg, Kbm, Kr.anyar, Wnsb, Brbs, Pmlg, Blora.	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
		Meningkat	Lokasi	Penataan lingkungan permukiman di 5.691 lokasi	Penataan lingkungan permukiman di 1.454 lokasi	Penataan lingkungan permukiman di 2.453 lokasi	Penataan lingkungan permukiman di 8.144 lokasi	●

Keterangan :

● : Telah Tercapai; ▲ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

**): Target RPJMD telah tercapai dan target 2013 untuk peningkatan cakupan.

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan perumahan rakyat, dapat diketahui bahwa dari sebanyak 8 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, semuanya berstatus telah tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja penyelenggaraan pembangunan urusan perumahan rakyat memiliki kinerja yang baik.

5) Penataan Ruang

Kinerja Urusan Penataan Ruang di tunjukkan dalam 9 indikator, dengan capaian seperti Tabel 2.175.

Tabel 2.175.
Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
1	Program Perencanaan Tata Ruang							
1	RTRW Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang	Tersedia RTRW Prov. Jateng sesuai dengan UU 26/2007	dok	Perda RTRW Prov Jateng 2009-2029	-	-	Perda RTRW Prov Jateng 2009-2029	●
2	Fasilitasi Penyesuaian RTRW kab/kota sesuai UU 26/2007 tentang Penataan Ruang	Terfasilitasi Penyesuaian RTRW kab/kota sesuai UU 26/2007	dok	RTRW Perda=34; Evaluasi gub=1; RDTR Kab/Kota sudah dibahas 6	Terselesaikannya RTRW 35 kab/kota di Jateng, terbitnya rekomendasi gub RDTR kab/kota	RTRW Perda 1	Perda RTRW = 35	●
3	Tersusunnya rencana rinci Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah	Tersedianya Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah	Dokumen	Seluruh capaian 2008-2012	RTR Kawasan Strategis Kawasan Kebun Raya Baturraden, Kawasan Petanglong, Ka-	Tersusunnya RTR Kaw Kebun Raya Baturraden; Tersusunnya RTR Kaw Petanglong;	RTR Kawasan Strategis Kawasan Kebun Raya Baturraden, Kawasan Petanglong, Kawasan	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
					wasan Purwomang-gung(Perkotaan Magelang dan sekitarnya), kawasan Perkotaan Cepu, Pembinaan Fasilitas Penyusunan /Review RTR kab/kota, RDTR dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Kota Tegal	dan Tersusunnya RTR Kaw Koridor Perbatasan Purworejo-Kulonprogo (Purwokulon); Tersusunnya RTR Kaw Perkotaan Cepu; RTR Kawasan Masjid Agung Demak dan Kadilangu	Purwomang-gung(Perkotaan Magelang dan sekitarnya), kawasan Perkotaan Cepu,Pembinaan Fasilitas Penyusunan /Review RTR kab/kota, RDTR dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Kota Tegal dan Tersusunnya RTR Kaw Koridor Perbatasan Purworejo-Kulonprogo (Purwokulon); Tersusunnya RTR Kaw Perkotaan Cepu; RTR Kawasan Masjid Agung Demak dan Kadilangu	
2	Program Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang							
4	Monitoring dan pembaharuan data spasial	Data spasial yang akurat dan terkini	Dokumen	9	-	-	9	●
5	Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.	Meningkat	-	Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan Masyarakat melalui Penyusunan & Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prov Penyertaan Diklat peserta PPNS bidang Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan Masyarakat melalui Penyusunan & Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan Masyarakat melalui Penyusunan & Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan Masyarakat melalui Penyusunan & Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPDP Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPDP 2013	Capaian Tahun 2013		
6	Berkurangnya pelanggaran pemanfaatan ruang	Berkurang	-	Berkurangnya pelanggaran melalui Penyusunan & Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prov Penyertaan Diklat peserta PPNS bidang Penataan Ruang	Tersedianya alat pengendalian dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang melalui penyusunan arahan pemberian insentif dan disinsentif Provinsi Jawa Tengah	Tersedianya alat pengendalian dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang melalui penyusunan arahan pemberian insentif dan disinsentif Provinsi Jawa Tengah	Tersedianya alat pengendalian dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang melalui penyusunan arahan pemberian insentif dan disinsentif Provinsi Jawa Tengah	●
7	Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang	Meningkat	-	Meningkatnya kesadaran Aparatur melalui penyusunan & Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prov; Penyertaan Diklat peserta PPNS bidang Penataan Ruang	Terpadunya pemahaman yang benar & penyelesaian permasalahan pemanfaatan ruang sesuai peraturan yang berlaku melalui fasilitasi penyelesaian permasalahan pemanfaatan ruang	Terpadunya pemahaman yang benar & penyelesaian permasalahan pemanfaatan ruang sesuai peraturan yang berlaku melalui fasilitasi penyelesaian permasalahan pemanfaatan ruang	Terpadunya pemahaman yang benar & penyelesaian permasalahan pemanfaatan ruang sesuai peraturan yang berlaku melalui fasilitasi penyelesaian permasalahan pemanfaatan ruang	●
8	Meningkatnya kesadaran aparat dalam pengendalian ruang	Meningkat		Meningkatnya kinerja melalui Rakor Pokja Pengendalian pemanfaatan Ruang BKPRD Prov. Jateng di 35 Kab/ Kota Meningkatkan kesadaran aparat melalui penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatnya kinerja melalui Rakor Pokja Pengendalian pemanfaatan Ruang BKPRD Prov. Jateng di 35 Kab/Kota	Terfasilitasinya kinerja pokja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang BKPRD	Meningkatnya kinerja melalui Rakor Pokja Pengendalian pemanfaatan Ruang BKPRD Prov. Jateng di 35 Kab/ Kota dan BKRD	●
9	Peningkatan kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, (BKPRD) dalam memfasilitasi	Meningkat		Meningkatnya kinerja melalui Rakor Pokja Pengendalian pemanfaatan Ru-	Meningkatnya kinerja melalui Rakor Pokja Pengendalian pemanfaatan Ru-	Meningkatnya kinerja melalui Rakor Pokja Pengendalian pemanfaatan Ru-	Meningkatnya kinerja melalui Rakor Pokja Pengendalian pemanfaatan Ru-	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPd Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPd 2013	Capaian Tahun 2013		
	pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang.			ang BKPRD Prov. Jateng di 35 Kab/Kota	an Ruang BKPRD Prov. Jateng di 35 Kab/Kota	ang BKPRD Prov. Jateng di 35 Kab/Kota	ang BKPRD Prov. Jateng di 35 Kab/Kota	

Keterangan :

● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan penataan ruang, dapat diketahui bahwa dari sebanyak 9 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, semuanya berstatus telah tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pembangunan urusan penataan ruang tergolong baik.




6) Perencanaan Pembangunan


Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan di tunjukkan dalam 10 indikator, dengan capaian seperti Tabel 2.176.



Tabel 2.176.

Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPd Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPd 2013	Capaian Tahun 2013		
I	Program Peningkatan kerjasama pembangunan							
1	<i>Terselenggaranya forum kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota dan propinsi dalam perencanaan pembangunan</i>		SKPD Prov. Kab/ Kota	59 35	59 35	59 35	59 35	●
II	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan							
2	<i>Terwujudnya akselerasi perkembangan dan pertumbuhan wilayah perbatasan - % Program/ Kegiatan hasil kesepakatan antar wilayah perbatasan yang terakomodir dalam RKPd</i>		% (persen)	100	100		100	●
III	Program Perencanaan Pengembangan wilayah Strategis dan cepat tumbuh							

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
3	<i>Berkembangnya wilayah strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan di Propinsi Jawa Tengah</i>	<i>Berkembang</i>	Dokumen	-	1 (Dokumen kajian Tipologi Tingkat Perkembangan Wilayah, Konsep Penanganan	1 (Dokumen kajian Tipologi Tingkat Perkembangan Wilayah, Konsep Penanganan	1 (Dokumen kajian Tipologi Tingkat Perkembangan Wilayah, Konsep Penanganan	
IV	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar							
4	<i>Terkendalinya pengembangan kota-kota Besar dan Menengah di Jawa Tengah</i>	<i>Terkendali</i>	Dokumen	-	Rencana Induk Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh	Rencana Induk Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh	Rencana Induk Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh	
V	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah							
5	<i>Tersedianya sumber daya aparatur perencanaan pembangunan daerah, tersusun dan terlaksananya kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan</i>	<i>Terse-dia</i>						
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas SDM Perencana 		Paket	FGD : 26 kali; Pembinaan 34 kali; Penilaian angka kredit fungsional perencana 4 kali; fasilitasi pengembangan jabatan fungsio-	FGD : 3 kali; Pembinaan 4 kali; Penilaian angka kredit fungsional perencana 4 kali; fas pengembangan jabatan fungsional 1 kali.	FGD: 3 kali; Pembinaan 2 kali; penilaian angka kredit fungsional 10 kali; fas pengembangan jabatan 1 kali	FGD : 29 kali; Pembinaan 36 kali; Penilaian angka kredit fungsional perencana 14 kali; fasilitasi pengembangan jabatan fungsio-	

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
				nal 1 kali.			nal 2 kali.	
	• Evaluasi IPM		Dokumen	1	1	1	2	
	• Identifikasi Program/ Kegiatan APBD		Dokumen	5	1	1	6	
	• Identifikasi Program/ Kegiatan APBN		Dokumen	5	1	1	6	
	• Penyusunan Laporan Konsolidasi Triwulanan		Dokumen	20	4	4	24	
	• Penyusunan dan Pengendalian serta Evaluasi Hasil-hasil Pembangunan Jawa Tengah: (1) Evaluasi RKPD dan (2) Evaluasi Paruh Waktu RPJMD		Buku Monev	5	1	1	6	
				5	1	1	6	
				3	1	1	4	
	• Penelitian Bidang ekonomi		Rekomendasi	24	0	3	24	
	• Penelitian Bidang pemerintahan dan sosial budaya		Rekomendasi	17	0	3	14	
	• Penelitian Bidang prasarana wilayah		Rekomendasi	16	0	3	15	
	• Penelitian Berbagai Bidang dan sektor pembangunan		Rekomendasi	112	0	31	137	
	• Penelitian Bidang pengembangan dan penerapan IPTEK		Kegiatan	48	0	29	61	
	• Fasilitas penelitian kawasan terpadu		Kegiatan	14	0	5	21	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah							
6	<i>Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan seperti Renja SKPD, Renstra SKPD, RKPD, RPJMD, dan RPJPD</i>	<i>Terse-dia</i>						
	• Dokumen RPJMD		Perda RPJMD	1 Perda RPJMD 2008-2013	1 draft Perda RPJMD 2013 -	1 draft Perda RPJMD 2013 -	1 Perda RPJMD 2008-2013	

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPd Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPd 2013	Capaian Tahun 2013		
					2018	2018	dan 1 draft Perda RPJMD 2013 – 2018	
	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKPd 		Pergub RKPd	5 Pergub RKPd	1 Pergub RKPd 2014	1 Pergub RKPd 2014 dan 1 Pergub Perubahan RKPd 2014	6 Pergub RKPd dan 1 Pergub Perubahan RKPd 2014	
VII	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi							
7	<i>Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah :</i>	<i>Terse-dia</i>						
	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Perencanaan Pengembangan Perekonomian 		Doku- men	8	2	2	10	
	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Pengembangan Sumber Daya Alam & Pertanian 		Doku- men	10	3	3	13	
VIII	Program perencanaan pembangunan sosial dan budaya							
8	<i>Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat serta bidang pemerintahan dan kependudukan</i>	<i>Terse-dia</i>						
	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat 		Doku- men	21	4	5	26	
	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi & Koordinasi Perencanaan Pembangunan 		Doku- men	33	5	4	37	

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPDP Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPDP 2013	Capaian Tahun 2013		
	Bidang Pemerintahan & Kependudukan							
IX	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam							
9	<i>Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam.</i>	<i>Terse-dia</i>						●
	• Laporan Fasilitas & Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.		Doku- men	29	5	5	34	
	• Laporan Pendampingan Koordinasi Pembaharuan Kebijakan Perencanaan dan Pengelolaan Sektor Pengairan dan Irigasi (WISMP).		Doku- men	13	3	4	17	
	• Laporan Koordinasi Pelaksanaan <i>Participatory Irrigation Sector Project</i> (PISP).		Doku- men	8	1	1	9	
X	Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana							
10	<i>Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana</i>	<i>Terse-dia</i>	Doku- men	2	0	2	4	●

Keterangan :

● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan, dapat diketahui bahwa dari sebanyak 10 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, capaian kinerja sampai dengan tahun 2013 semuanya berstatus telah tercapai.

7) Perhubungan

Kinerja Urusan Perhubungan di tunjukkan dalam 36 indikator, dengan capaian pada Tabel 2.177.

Tabel 2.177.
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

NO	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
I	Program Pengembangan Perhubungan Darat							
	<i>Peningkatan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kelaikan jalan kendaraan bermotor, kualitas pelayanan, kualitas pengawasan dan pengendalian, meningkatnya disiplin, manajemen dan rekayasa untuk mewujudkan keselamatan jalan raya melalui:</i>	Meningkat	Pkt Sarana Prasarana Lalu Lintas	46	10	10	56	●
1	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	Peningkatan koord dan konsultasi Bid Hubkominfo	Kegiatan Rakor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5	1	1	6	●
2	• Terfasilitasinya pembangunan terminal tipe A dan B.	Terfas. Pemb. Terminal kelas A dan B	Terminal	4	1	1	5	●
3	• Terbangunnya jembatan timbang 4 buah dan meningkatnya kapasitas timbang serta integrasi jaringan inter koneksi sebanyak 17 buah	Meningkatnya kapasitas timbang	Paket	4	1	1	5	●
4	• Terfasilitasinya pembangunan BRT di 3 kota (Semarang, Surakarta dan Purwokerto).	3	Kota	3	1	1	4	●
5	• Meningkatnya jumlah fasilitas perlengkapan jalan.	Meningkatnya	Rambu (buah)	6.081	1.902	2.519	8.600	●
		Meningkatnya	RPPJ (buah)	218	101	107	325	
		Meningkatnya	APILL (unit)	1	1	5	6	
		Meningkatnya	Guadrail (meter)	2.552	1.626	1.760	4312	
		Meningkatnya	Marka (meter)	137.800	212.600	122.093	4.312	

NO	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPd Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPd 2013	Capaian Tahun 2013		
6	• Meningkatnya unjuk kerja jalur alternatif dan perintis.	Meningkat	kab./kota	6	0	0	259.893	●
7	• Meningkatnya kinerja pelayanan bis AKDP dan AKAP (Perijinan)	Meningkat	UPP	10	10	10	10	●
8	• Terbangunnya <i>Area Traffic Control System (ATCS)</i> di 2 Kab./Kota.	2	kab./kota	6	1	1	20	●
9	• Peningkatan SDM bidang LLAJ, ASDP dan KA di 35 lokasi.	35	lokasi	35	35	35	35	●
10	<i>Terfasilitasinya revitalisasi jalur-jalur non operasi KA terutama di Kedungjati-Tuntang, Magelang-Bedono, Magelang, Semarang-Demak-Kudus-Rembang, Kudus-Jepara, Rembang-Blora.</i>	Kegiatan fasilitasi	Paket	5	1	1	6	●
11	• Terfasilitasinya pengoperasian KA terutama lintas Klaten-Solo-Sragen, Pekalongan - Semarang.	Kegiatan fasilitasi	Paket	5	1	1	6	●
12	• Terfasilitasinya pengoperasian KA Komuter terutama lintas Semarang-Tegal-Purwokerto-Kutoarjo-Jogja-Solo-Semarang.			5	1	0	5	●
13	• Terfasilitasinya pembangunan <i>double track</i> lintas Tegal-Pekalongan-Semarang-Cepu dan angkutan kereta api perkotaan di Solo. (61 MSP)	Kegiatan fasilitasi	MSP	151	30	65	216	●
14	• Peningkatan keselamatan: pembinaan/ sosialisasi, penertiban, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pembangunan perlintasan sebidang di 22 kab/kota.	22	kab./kota	35	14	14	49	●

NO	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
15	• Terfasilitasinya pengembangan KA wisata Tuntang-Ambarawa – Bedono, Borobudur dan sekitarnya.	Fasilitasi pengembangan lintasan	lintasan	1	1	1	1	●
16	• Terfasilitasinya peningkatan frekuensi KA lintas Tegal- Semarang, Semarang-Solo-Sragen, Semarang – Cepu, dan Solo-Wonogiri	Fas. Pengembangan lintasan	lintasan	4	3	3	4	●
17	• Terfasilitasinya <i>dry port</i> Kali-jambe, Purwokerto Gombong							
18	• Terfasilitasinya dan pendampingan pembangunan pelabuhan penyeberangan Kendal.	Fas Pengembangan dan Penanganan	%	60	100	100	100	●
19	• Pembangunan transportasi 8 waduk (Malahayu, Sempor, Wadas lintang, Kedungombo, Gajah Mungkur, Cacaban, Rawa Pening dan Mrica)	8	waduk	8	2	2	10	●
20	• Terfasilitasinya pengoperasian kapal penyeberangan lintas Kendal-Kumai dan terfasilitasinya pengoperasian <i>coastal ferry</i> Lampung-Banten-DKI-Jabar-Kendal-Jatim-Bali-NTB, NTT	Kegiatan Fasilitasi	Paket	1	1	1	1	●
21	• Pengembangan transportasi ASDP di 3 lokasi.	3	lokasi	3	2	2	5	●
22	Terfasilitasinya kegiatan yang berkaitan dengan kelancaran angkutan pada saat musim haji lebaran, natal dan tahun baru	5	Fasilitasi	5	1	1	6	●
II	Program Pengembangan Perhubungan Laut							

NO	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
23	<i>Terfasilitasinya pemeliharaan alur dan kolam di 4 lokasi (Rembang, Jepara, Brebes, dan Karimun Jawa).</i>	4	lokasi	5	2	2	7	●
24	<i>Pengoperasian KM Kemojan di Karimun Jawa.</i>	Beroperasinya KM Kemojan	kegiatan	1	1	1	1	●
25	<i>Terfasilitasinya peningkatan dan pengembangan sarpras pelabuhan di 9 lokasi (Tanjung Emas, Tanjung Intan, Tegal, Batang, Juwana, Rembang, Karimun Jawa, Jepara dan Brebes).</i>	Fas Peningkatan Sarpras 9 lokasi	lokasi	9	9	9	9	●
26	• Tersedianya fasilitas keselamatan pelabuhan (SBNP) di perairan Jawa Tengah	Fas Keselamatan	Paket	4	1	1	5	●
27	• Meningkatnya usaha bidang angkutan laut di 7 lokasi (Tanjung Emas, Tanjung Intan, Tegal, Juwana, Rembang, Karimun Jawa, dan Brebes)	7	Pelabuhan	5	5	Na	5	●
28	• Terfasilitasinya pembangunan fasilitas pendukung di Pelabuhan Tanjung Emas.	Fasilitasi	kegiatan	1	1	1	1	●
29	• Peningkatan SDM bidang perhubungan laut	Meningkat	kegiatan rakor bidang perhubungan laut	2	1	1	3	●
3.	Program Pengembangan Perhubungan Udara							
30	• Terfasilitasinya pengembangan fasilitas Bandar Udara dan Keselamatan Penerbangan di 4 lokasi (Bandara A. Yani Semarang, Adisumarmo Surakarta, Tunggul Wulung Cilacap dan Dewadaru Karimun Jawa Jepara).	Fasilitasi Pengembangan 4 lokasi	lokasi	4	4	4	4	●
31	• Peningkatan SDM bidang perhubungan udara	Meningkat	kegiatan rakor perhubungan udara	5	1	1	6	●
			kegiatan bintek	4	1			

NO	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPDP Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPDP 2013	Capaian Tahun 2013		
			keselamatan perhubungan udara					
32	Terfasilitasinya pengoperasian dan pengembangan bandara Ngloram Cepu			2	0	0	2	●
IV	Program Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR							
33	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian postel dan frekuensi	Peningkat Pelayanan	Perusahaan postel	160	150	151	160	●
34	• Terlaksananya koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan KPU/USO.	<i>Terlaksana koordinasi</i>	kegiatan	5	1	17	22	●
35	• Terlaksananya kegiatan siaran radio tetap dan bergerak	<i>Pelaksanaan Kegiatan</i>	event	15	3	4	19	●
36	• Terlaksana publikasi informasi cuaca dan iklim			2	0	Na	2	●
37	• Terlaksananya uji-an ORARI dan RAPI di 5 lokasi	5	Lok	10	0	Na	10	●
38	• Peningkatan SDM bidang Pos dan Telekomunikasi			5	0	Na	5	●

Keterangan :

- : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras
 **): Target RPJMD telah tercapai dan target 2013 untuk peningkatan cakupan

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan perhubungan, dapat diketahui bahwa dari sebanyak 38 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, capaian kinerja sampai dengan tahun 2013 semuanya berstatus telah tercapai.

8) Lingkungan Hidup

Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di tunjukkan dalam 21 indikator, dengan capaian seperti terlihat pada Tabel 2.178.

Tabel 2.178.
Capaian Kinerja Lingkungan Hidup

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPDP Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPDP 2013	Capaian Tahun 2013		
I.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan							

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
1	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap sumber-sumber pencemaran 10 kluster UMKM, 500 usaha dan/atau kegiatan menengah/besar dan 50 obyek domestik	500	Usaha dan/atau kegiatan	622	150	138	760	●
2		50	obyek domestik	57	9	31	88	●
3		10	kluster	32	19	6	38	●
4	Terlaksananya perbaikan kinerja pengelolaan B03 dan limbah B03 pada 300 usaha dan/atau kegiatan disesuaikan dengan PP yang Berlaku	300	usaha dan/atau kegiatan	877	159	144	1.021	●
5	Terlaksananya pengawasan dan penegakan hukum pada 100 usaha dan/atau kegiatan	100	usaha dan/atau kegiatan	96	18	33	129	●
6	Terkurangnya penyimpangan aspek lingkungan dalam pemanfaatan ruang sebesar 17% di 6 Daerah	17	%	57,14	Sesuai permohonan pengajuan ijin lingkungan	0	57,14	
		6	Daerah	3		0	3	
II.	Program Pengembangan Jasa Lingkungan Kawasan Kawasan Konservasi Laut dan Hutan							
7	Meningkatnya fungsi kawasan lindung sebesar 5% dari luasan 222.759 ha di 31 Kabupaten/Kota dan sebesar 10% tangkapan sumber air dapat terpelihara serta tertanamnya 360 jenis tanaman langka di sejumlah daerah;	5% dari luasan 222.759 Ha (11.137,95) di 31 Kab/Kota dan sebesar 10% tangkapan sumber air dapat terpelihara	Ha	2.799,47	500	1.028,43	3.827,90	

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
8		360	Jenis tanaman langka	390	50	27	417	
III	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam							
9	<i>Terlaksananya penanganan kawasan lahan kritis dengan komoditas perkebunan 350 ha per tahun;</i>	1.750	Ha	7.820	100	890	8.710	
10	<i>Meningkatnya penerapan intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi dan civil teknis serta integrasi perkebunan ternak pada lahan kritis, DAS, dan tangkapan waduk</i>	0	unit (sumur resapan)	82	3	70	152	●
		0	unit (PAH)	31	6	10	41	
		0	unit (sumur rombong)	200	0	0	200	
		0	unit (dam parit)	1	0	2	3	
		0	unit (bangunan pencegah longsor)	6	0	6	12	
IV	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)							
11	<i>Terlaksananya perluasan dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau sebesar 20% di 10 daerah</i>	20% di 10 daerah (205,41 Ha)	% Ha	65,02	48,67	58,00	123,02	●
		205,41	Ha	133,56	100	119,13	252,7	
V	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Caddangan Sumberdaya Alam							
12	<i>Tersusunnya hasil kajian penghitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan pada 6 DAS/Sub DAS Jawa Tengah</i>	6	DAS (Daya Tampung)	6	1	1	7	●
		6	DAS (Daya Dukung)	2	4	4	6	

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPDP Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPDP 2013	Capaian Tahun 2013		
13	Tertanganinya kerusakan lingkungan hutan dan lahan sebesar 10% dari seluruh area ekosistem DAS di 6 Sub DAS Jawa Tengah.	10% dari seluruh area ekosistem DAS di 6 Sub DAS Jawa Tengah.	%	0,69	0,12	15,49	16,18	●
14	Terbangunnya sabuk pantai di wilayah pesisir Jawa Tengah sepanjang 3.000 m	3000	Meter	2.410	650	1.312,25	3.722,25	●
15	Terbentuknya Ekosistem mangrove seluas 200 Ha	200	Ha	221,75	40	55,75	277,5	●
VI	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup							
16	Terfasilitasinya pembelajaran 350 orang aparat pengelola lingkungan hidup, 500 anggota kelompok masyarakat, 100 orang guru dan 400 pelajar	350	orang aparat	460	15	40	500	●
17	Terfasilitasinya pelaksanaan program adiwiyata di 10 sekolah	500	orang anggota kelompok masyarakat	9.982	728	2.980	12.962	●
18		100	orang guru	290	0	190	480	●
19		400	orang pelajar	420	0	0	420	●
20		10	Sekolah	18	10	13	31	●
VII	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup							
21	Tersusun dan terpublikasikannya dokumen statistik lingkungan, status lingkungan hidup daerah dan informasi lingkungan melalui media cetak dan							●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
	<i>elektronik setiap tahun</i>							
	buku SLHD		Buku SLHD	330	100	60	390	
	buku SLH		Buku SLH	430	100	0	430	
	buletin warta lingkungan		Eksemplar	3000	200	400	3.400	

Keterangan :

● : Telah Tercapai; ▲ : Akan Tercapai

** : Target RPJMD telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk peningkatan cakupan.

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan lingkungan hidup, dapat diketahui bahwa dari sebanyak 21 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, telah sesuai bahkan ada yang melebihi target akan tetapi jika capaian kinerja tahun 2013 dibandingkan dengan target RKPD tahun 2013 terdapat 3 indikator yang tidak sesuai target hal ini disebabkan karena pengendalian sumber pencemaran dari obyek domestik dan kluster diprioritaskan untuk memenuhi permintaan masyarakat, pengawasan diprioritaskan bagi usaha/kegiatan yang betul-betul berpotensi besar menimbulkan pencemaran B-3 dan pemilihan jenis tanaman berdasarkan pada kelangkaan jenis tanaman.

Pada Tahun 2015 urusan lingkungan hidup diarahkan pada pencapaian SPM lingkungan hidup; peningkatan kinerja perusahaan/kegiatan terhadap penataan Peraturan Perundang-undangan di Bidang LH dan penanganan sengketa lingkungan, Penanganan Sumber Pencemar dari usaha/kegiatan menengah/besar dan industri kecil, Perbaikan kinerja pengelolaan B3 dan limbah B3 pada usaha / kegiatan dan peningkatan pelaksanaan AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL; koordinasi penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan serta koordinasi penanganan kerusakan lingkungan di kawasan dataran Tinggi Dieng; peningkatan dan pengendalian aspek lingkungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan; penanganan kerusakan dan pelestarian kawasan tambak/permukiman masyarakat pada ekosistem pesisir pantai utara; penanganan Mitigasi, Adaptasi dan Pencegahan Pencemaran serta Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana/Gangguan lingkungan dan Pemanasan Global, pembangunan sumur pantau; peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan, warga sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup serta penyediaan data dan informasi lingkungan bagi masyarakat.

9) Pertanian

Kinerja Urusan Pertanian di tunjukkan dalam 8 indikator, dengan capaian pada Tabel 2.179.

Tabel 2.179.
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

NO	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
1	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah							
1	<ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya kasus pelanggaran penggunaan tanah. 	Berkurang	-	<ul style="list-style-type: none"> Pertanian di 2 kawasan cepat DAS Bengw Solo DAS Gotri DAS Serayu DAS Comal 	Identifikasi Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Kawasan Lindung DAS Jratunseluna, Identifikasi Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan pada Kawasan Pertanian di Kab Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen dan Purworejo	Identifikasi Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Kawasan Lindung DAS Jratunseluna dan Kawasan Pertanian di Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen dan Purworejo	<ul style="list-style-type: none"> Pertanian di 6 kawasan dan, DAS Bengw Solo DAS Gotri DAS Serayu DAS Comal DAS Jratunseluna 	●
2	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Bidang tanah yang terpetakan. 	Terpetakan	Bidang					●
	<ul style="list-style-type: none"> CSR-HGU 	Terpetakan	bidang	15	15	0	15	
	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi HGU 	Terpetakan	bidang	48	0	0	48	
	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi HGB 	Terpetakan	bidang	35	0	0	35	
	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi HP 	Terpetakan	bidang	55	0	0	55	
3	<ul style="list-style-type: none"> Terselesaikannya konflik-konflik pertanahan 	Terselesaikan	Kasus	86	10	0	86	●
4	<ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya sistem informasi pertanahan 	Terbangun	Unit	3 Unit Sistem informasi lahan	1 Unit Sistem informasi lahan	1 Unit Sistem informasi lahan	4 Unit Sistem informasi lahan	●
5	<ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya konversi lahan pertanian ke non pertanian 	Berkurang	M2	Dari 1.514.469 menjadi 2.001.379	Dari 195.300 menjadi 220.400	Na	Dari 1.514.469 menjadi 2.001.379	●

NO	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPd Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPd 2013	Capaian Tahun 2013		
6	• Meningkatkan kualitas tertib administrasi pertanahan			Sertifikasi tanah; Sosialisasi MPBM	Sertifikasi tanah; Sosialisasi MPBM	Na	Sertifikasi tanah; Sosialisasi MPBM	●
7	• Tersosialisasi dan diterapkannya Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM)	150 Desa pada 29 Kab	Desa	80	70	70	150	●
8	• Tersertifikasi nya tanah masyarakat potensi sawah lestari dan kawasan lindung	Sertifikasi	Dokumen	15.179	1.500	1.500	16.679	●

Keterangan :

● : Telah Tercapai; ▲ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pertanahan sampai dengan tahun 2013, dapat diketahui bahwa dari sebanyak 8 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, semuanya berstatus telah tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan urusan pertanahan sangat baik.

10) Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ditunjukkan dengan 4 indikator, seperti pada tabel 2.180.

Tabel 2.180.
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPd Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status Capaian
					Target RKPd 2013	Capaian Tahun 2013		
A	Program Pengembangan dan Keresian Kebijakan Kependudukan/ Penataan Administrasi Kependudukan							
1	<i>Tercapainya peningkatan keterpaduan & sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil.</i>	35	Kab/kota	35	35	0	35	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status Capaian
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
2	Terwujudnya pengelolaan. Informasi dengan sistem informasi kependudukan (SIK) secara On line di Jateng.	35	Kab/kota	35	35	0	35	●
3	Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil yang valid sesuai dengan perkembangan di lapangan.	100	%	100	100	0	100	●
4	Tersedianya berbagai bentuk laporan hasil pengolahan data kependudukan dan pencatatan sipil	24	Laporan	24	4	1	25	●

Keterangan :

● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil sampai dengan tahun 2013, dapat diketahui bahwa dari sebanyak 4 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, semuanya berstatus telah tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil sangat baik.

11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan dalam 49 indikator, seperti Tabel 2.181.

Tabel 2.181.
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan							
1	<i>Berbagai kebijakan dan program yang mendorong peningkatan kualitas perempuan dan anak masuk dalam dokumen perencanaan (RPJP, RPJM, RKPD, RKA).</i>	- RPJPD	Dok	1	-	0	1	●
		- RPJMD	Dok	1	-	0	1	
		- RKPD	Dok	4 Dok RKPD	1 Dok. RKPD Tahun 2014	1 Dok. RKPD Tahun 2014	5 Dok. RKPD	

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPd Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPd 2013	Capaian Tahun 2013		
		- RKA SKPD responsif gender	SKPD	47	49	49	49	
2	<i>Terwujudnya peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik dalam rangka menuju quota 30 % perempuan di legislative</i>	30	%	19	19	21	21	▼
3	<i>Terwujudnya Perda Perlindungan Anak</i>	1 Perda Perlindungan Anak	Perda	1 Draf Perda Perlindungan Anak	1 Perda Perlindungan Anak	1 Perda Perlindungan Anak; Sosialisasi Perda; dan Tersusunnya draft Peraturan Gubernur tentang Tata Laksana Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Perda dan Sosialisasi tentang Perda	●
4	Peningkatan kualitas SDM Aparatur yang responsif perempuan dan anak	Kab/kota		35	35	35	35	●
5	<i>Terwujudnya kebijakan yang mendorong meningkatnya partisipasi politik perempuan dan pelibatan partisipasi anak.</i>	RAD Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan	RAD	1 RAD	0	0	1	●
		SE Gub ttg Pembentukan Forum Anak	SE Gub	1	0	0	1	●
6	<i>Adanya kebijakan penilaian kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender</i>	Kebijakan penilaian kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender	Dok	0	1	0	1	●
	Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak							
7	<i>Peningkatan Pemahaman dan Komitmen tentang kekerasan dan keadilan gender serta hak anak pada seluruh pelaksanaan Pembangunan</i>		Kab./ Kota	35	0	Na	35	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPd Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPd 2013	Capaian Tahun 2013		
8	SKPD Prov. melakukan PUG 10 Kab./Kota dengan GDI rendah	30 % SKPD Prov. Melakukan PUG - 10 Kab./Kota dengan GDI rendah	%	100	100	100	100	●
9				18 Kab/Kota GDI rendah	6 Kab	Na	18	●
	Terwujudnya kelembagaan responsive gender dan anak:							
10	- 30% perencana SKPD	- 30% Perencana SKPD	%	100	100	100	100	●
11	- Seluruh PSW/G Jateng	- 100 % (PSW/G Jateng)	%	100 (25 PSW/G)	100% (25 SW/G)	100	100	●
12	- 5 lembaga keagamaan di provinsi	5	lembaga	5	5	5	5	●
13	- 1 Jaringan LSM	1	LSM	1	1	1	1	●
14	- 1 Jaringan organisasi perempuan	1	Jaringan	5	5	5	5	●
15	-Terwujudnya KLA di Kab./Kota	10	Kab/Kota	17	5	5	22	●
16	Kab/ Kota Membentuk POKJA Penanganan ABH	50% Kab/kota	Kab/Kota	18	6	Na	18	●
17	- Adanya draft indicator SIGA	1 Provinsi	Draf	1	0	0	1	●
18	- Adanya WEB SIGA di Jawa Tengah	1 provinsi	Unit	1	1	1	1	●
19	- Adanya WEB SIGA di Kab/Kota	5	Kab/Kota	4	1	10	14	●
20	Terfasilitasinya pembentukan P2TP2A di 8 Kab yang terintegrasi dengan Program Penanggulangan Kemiskinan	8 Kab/kota	Kab/Kota	7	5	3	10	●
21	Meningkatkan kualitas SDM dan anggaran yang responsif gender dan anak		orang	680	225	339	1.019	●
22	Adanya komitmen Kab/Kota melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan berbasis gender dan anak			35	35	35	35	●
23	Terbentuknya Jejaring Kelembagaan Masyarakat dlm PUG dan PUHA		kab/kota	12	4	3 Kab 1 Prov	15	●
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak							
24	Meningkatnya jumlah kelompok integrasi pelestarian buta aksara perempuan dan BKB/Posyandu		Klp	2	0	Na	2	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
25	Terwujudnya kerangka kebijakan yang responsif gender dan hak anak untuk memberikan dukungan bagi	30% SKPD Prov. melakukan PUG	%	100	100	100	100	●
26	berikan dukungan bagi penguatan kelembagaan melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan responsif gender dan hak anak, pada 30% SKPD dan di 10 Kabupaten/ Kota dengan GDI rendah	10 Kab./Kota dengan GDI rendah		18 Kab/ Kota GDI rendah	6 Kab/ Kota GDI rendah	6 Kab/ Kota GDI rendah	18 Kab/ Kota GDI rendah	●
27	Meningkatnya jumlah perempuan pada tiap jenjang pendidikan (APK Perempuan)	SD/MI		103,49		109,08	109,08	● APK belum terpilah
		SMP/MTs		102,4		100,5	100,5	APK belum terpilah
		SMA/MA/S MK		68,44		70	70	APK belum terpilah
28	Meningkatnya kemampuan sesuai dengan keahlian yang dimiliki perempuan, sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja	-	orang	280	390	400	400	●
29	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kehamilan sehat dan persalinan aman, serta hak reproduksi di 10 Kabupaten/ Kota dengan kematian ibu tinggi	-	Kab/ Kota	35	35	35	35	●
30	Meningkatnya cakupan pemberian ASI eksklusif 10% melalui Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB)	65	%	65	70	57,65	57,65	▼
31	Meningkatnya jumlah kec. sayang ibu dan bayi di 10 kab/ kota dengan AKI Tinggi	10	Kab/ Kota	15	1	5	20	●
32	Meningkatnya penguasaan ilmu dan teknologi jaringan usaha menengah dan koperasi serta pemahaman kewirausahaan yang dikelola perempuan	-	orang	280 perempuan di 4 Kab	390 perempuan di 4 Kab	400 di 4 kab	400 di 4 kab	●
33	Meningkatnya jumlah Desa Prima di 10 Kab dg GDI rendah	10 Desa di 10 Kab/kota baru dan lanjutan	Kab/ Kota	9	6	9	10	●
34	Meningkatnya akses 5 klp perempuan pelaku usaha mikro kecil pada sumber daya ekonomi	5 Kelompok	Kelompok	7	12	7	12	●
35	30% Kab./ Kota Mengapresiasi Model Restoratif Justice (RJ)							●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPDP Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPDP 2013	Capaian Tahun 2013		
	<i>Dalam Penanganan ABH</i>							
	• <i>Sosialisasi</i>		<i>Kab/ Kota</i>	35	0	0	35	
	• <i>Inisiasi</i>	-	<i>Kab/ Kota</i>	17	0	0	17	
	• <i>Implementasi</i>	-	<i>Kab/ Kota</i>	2	2	2	4	
36	<i>Jumlah kasus kekerasan terhadap anak menurun, jumlah anak sejahtera meningkat, meningkatnya perlindungan anak secara luas termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus (anak korban bencana, korban penelantaran, korban perlakuan salah, korban tindak kekerasan, dan anak yang berhadapan dengan hukum)</i>	<i>100 % tertangani</i>	<i>100 % tertangani</i>	<i>3.567 kasus (100 % tertangani)</i>	<i>100 % tertangani</i>	<i>975 kasus (100% tertangani)</i>	<i>4.542 kasus (100% tertangani)</i>	●
37	<i>Berkembangnya model keadilan restoratif untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum</i>		<i>Kab</i>	2	2	2	2	●
38	<i>Meningkatnya cakupan akte kelahiran.</i>	-	%	68	100	70,42	70,42	● Data yang dilaporkan adalah cakupan akte pada anak usia 0-15 th, data cakupan akte kelahiran anak usia 15-18 th blm dilaporkan
39	<i>Berkembangnya metode dan pola pembinaan anak terlantar yang responsif anak</i>	-	<i>Model SBA</i>	1	1	1	1	●
40	<i>Tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan perlind. Perempuan dan anak korban kekerasan dan TPPO</i>							●
41	<i>a. Perda Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Jawa Tengah</i>	1	<i>Dok</i>	1 Perda 2 Pergub	0	0	1 Perda 2 Pergub	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKP 2013	Capaian Tahun 2013		
42	<i>b. RAD Traficking</i>	1		1	0	0	1	●
	- Sosialisasi RAD	-	Kab/Kota	35	0	0	35	
	- Implementasi RAD	-	Kab/Kota	35	35	0	35	
43	<i>c. SPM Pelayanan terpadu korban Kekerasan</i>	1 Dokumen		1 Pergub No 60/2012	1 Rencana Pencapaian SPM	0	1 Pergub No 60/2012	●
44	<i>d. SOP Penanganan kekerasan</i>	1	SOP	1	0	0	1	●
	- Sosialisasi SOP	1	Kegiatan	1	1	1	1	
	- Implementasi SOP	1	Kegiatan	1	1	1	1	
45	<i>Menguatnya kapasitas kelembagaan pelayanan terpadu dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan anak termasuk trafficking di: Provinsi (PPT Provinsi Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA)) dan 15 Kab/Kota</i>			100	100	100	100	●
	- Provinsi (PPT Provinsi dan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA))	2	KPK2BGA	2	2	2	2	
	- Kab/Kota	15	Kab/Kota	35	35	35	35	
46	<i>Meningkatnya kapasitas kelembagaan PPT di Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>	1 15	Prov Kab/ Kota	1 35	1 35	1 35	1 35	●
47	<i>Terlindunginya setiap perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor</i>	100	% korban yang melapor	100	100	100	100	●
	<i>Menguatkan kerjasama antar Provinsi di 10 Prov. MPU dan 5 Prov luar Jawa daerah transit dan tujuan trafficking</i>	Kerjasama 10 Prov.	Prov. MPU	10	10	10	10	
48	<i>a. Kerjasama 10 Prov. MPU</i>							●
	- Draft Kerjasama MPU		Dok	1	0	0	1	
	- Penandatanganan MoU		MoU	1	0	0	1	
	- Implementasi		Prov. MPU	10	10	10	10	
49	<i>b. Kerjasama dengan 5 Prov. Jawa daerah transit dan tujuan</i>							●
	- Penandatanganan MoU	5 Provinsi	Provinsi	5	5	5	5	
	- Implementasi		Provinsi	5	5	1	6	

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
						Kerjasama dengan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman		
50	Meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan dan tertangani	100 %		12.861 (100% tertangani)	100% tertangani	2.153 (100% tertangani)	15.014 (100% tertangani)	●
	Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan							
51	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,8	IDG	68,99	67,96	Na	70,66	● Data dari Kementerian PP PA tahun 2013, IDG tahun 2012 adalah 70,66
52	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)	65,9	IPG	66,45	65,90	Na	66,80	● Data dari Kementerian PP PA tahun 2013, IDG tahun 2012 adalah 70,66
53	Terlatihnya aparatur pemerintah tentang peningkatan peran serta anak dan kesetaraan dan keadilan gender	30%	%	100	100	100	100	●
54	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran serta anak dan kesetaraan serta keadilan gender		Kab/ Kota	13	3	3	16	●
55	Meningkatkan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan	35	Kab/ Kota					●
	- Pembentukan Forum Anak		Kab/ Kota	35	0	0	35	
	- Pembentukan		Kab/ Kota	35	-	-	35	
	- Penguatan		Kab/ Kota	35	35	35	35	

Keterangan :

● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sampai dengan tahun 2013, dapat diketahui bahwa dari sebanyak 55 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, sebanyak 50 target indikator berstatus telah tercapai, 2 target indikator belum tercapai, dan 2 indikator belum diketahui capaiannya.

12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ditunjukkan dalam 35 indikator, seperti Tabel 2.182.

Tabel 2.182.

Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPd Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPd 2013	Capaian Tahun 2013		
1	Program Pelayanan Keluarga Berencana							
1	Menurunnya tingkat DO peserta KB dari 10% menjadi 9%	9	%	15,09	9	16,09	16,09	▼
2	Menurunnya Unmedneed hingga 7%	7	%	10,26	7	10,42	10,42	▼
3	Total Fertility Rate dari 2,3% menjadi 2,1%	2,1	%	2,5	2,1	2,5	2,5	▼
4	Meningkatnya jumlah dan kualitas penyuluh/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) PPKBD, sub PPKBD di Kab/kota							●
	• PLKB	Meningkat	PLKB	3.355	3.239	3.732	3.524	
	• PPKBD	Meningkat	PPKBD	8.729	8.836	8.735	8.741	
	• Sub PPKBD	Meningkat	Sub PPKBD	51.646	51.695	51.455	51.570	
5	Meningkatnya sarana mobilitas Tim KB keliling di Kab/Kota	Meningkat	Unit	7.209	8.577	7,047	7,047	●
6	Meningkatnya Peran Serta Masy dalam ber KB	Meningkat	Kab/Kota	35	35	35	35	●
	• Jumlah Kelompok UPPKS terdaftar pada direktori data basis online UPPKS	Meningkat	Kelompok	42.222	29,983	31.418	42.222	
	• Jumlah kelompok UPPKS yang dapat akses modal	Meningkat	Kelompok	546.333	9.251	31.418	546.333	
7	Tersedianya alat kontrasepsi jangka panjang (IUD dan implant) yg dpt menjangkau seluruh masyarakat termasuk alat kontrasepsi untuk pria	Tersedia	Unit	71.540	85.140	110.154	141.117	●
8	Memperluas cakupan dan jangkauan kualitas pelayanan KB	Meningkat						●
	Jumlah Peserta KB Baru			1.028.969	1.031.230	1.014.986	1.014.986	
	- IUD	Meningkat	orang	94.782	84.147	98.112	98.112	
	- MOW	Meningkat	orang	24.722	23.219	22.811	22.811	
	- Implant	Meningkat	orang	128.539	32.695	132.180	132.180	

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPd Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPd 2013	Capaian Tahun 2013		
	- Suntik	Meningkat	orang	555.352	464.331	542.571	542.571	
	- Pil	Meningkat	orang	170.974	252.220	171.399	171.399	
	- MOP	Meningkat	orang	2.227	4.158	1.206	1.206	
	- Kondom	Meningkat	orang	52.380	70.458	46.707	46.707	
2	Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)							
9	<i>Meningkatnya kelompok KRR di seluruh Kab/Kota</i>	Meningkat	Klp	1.305	1.310	1.436	1.436	●
	• Jumlah PIK KRR Kategori Tumbuh	Meningkat	Klp	966	953	1.052	1.052	
	• Jumlah PIK KRR Kategori Tegak	Meningkat	Klp	235	255	272	272	
	• Jumlah PIK KRR kategori Tegar	Meningkat	Klp	104	101	112	112	
10	<i>Meningkatnya peran Kelompok KRR dalam penyebarluasan reproduksi remaja</i>	Meningkat	PIK KRR	1.305	1.310	1.436	1.436	●
11	<i>Kesehatan Reproduksi menjadi muatan lokal dalam bidang pendidikan</i>	Meningkat	Kab/kota	35	35	35	35	●
12	<i>Meningkatnya penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV AIDs dengan indikator capaian</i>	Meningkat	Kab/kota	35	35	35	35	Tercapai ●
13	<i>Meningkatnya pengetahuan remaja tentang bahaya narkoba dan PMS dan termasuk HIV/AIDs</i>	Meningkat	Kab/kota	35	35	35	35	● ●
14	<i>Berkurangnya remaja yang menjadi korban bahaya narkoba dan PMS termasuk HIV/AIDs</i>	Meningkat	Kab/kota	35	35	35	35	● ●
15	<i>Meningkatnya generasi muda penerus yang sehat jasmani rohani dan sosial</i>	Meningkat	Kab/kota	35	35	35	35	●
16	<i>Meningkatnya jumlah instansi masyarakat dan penyelenggaraan penanggulangan HIV AIDs</i>	Meningkat	Kab/kota	35	35	35	35	●
3	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD							
17	<i>Terbentuknya model BKB, Posyandu dan PAUD.</i>	Terbentuk	Kab/Kota	6	8	8	32	●
18	<i>Meningkatnya kualitas Posyandu dalam BKB dan PAUD.</i>	Meningkat	Kab/Kota	35	35	35	35	●
19	<i>Meningkatnya kapasitas kader pendamping kelompok bina keluarga di kabupaten/kota.</i>		Kab/Kota	35	35	35	35	●
20	<i>Tersedianya kader Posyandu dan PAUD dalam melakukan BKB dan PAUD.</i>	-	Kab/Kota	35	35	35	35	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPd Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPd 2013	Capaian Tahun 2013		
21	<i>Makin banyak BKB dan PAUD yang terbina.</i>	-	Kab/ Kota	35	35	35	35	●
22	<i>Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam ber KB dan KS.</i>	-	Kab/ Kota	35	35	35	35	●
23	<i>Terwujudnya layanan informasi dalam pelaksanaan KB-KS.</i>	-	Kab/ Kota	35	35	35	35	●
24	<i>Terlaksananya fasilitasi TMKK, Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan, Bhayangkara KB Kesehatan dan Harganas</i>	-	Kodim	Penca- nangan TMKK di 2 Ko- dim, Pe- nilaian TMKK di 5 Kodim	Penca- nangan TMKK di 2 Ko- dim, Pe- nilaian TMKK di 5 Ko- dim	Penca- nangan TMKK di 1 Ko- dim, Pe- nilaian TMKK di 5 Kodim	Penca- nangan TMKK di 1 Ko- dim, Pe- nilaian TMKK di 5 Kodim	●
		-	Polres	Penilai- an Bha- yang- kara KB Kes di 6 Polres	Penilai- an Bha- yangka- ra KB Kes di 6 Polres	Penilai- an Bha- yangka- ra KB- Kes di 6 polres	Penilai- an Bha- yangka- ra KB- Kes di 6 polres	
		-	Kab/ Kota	Penilai- an PKK KB Kes Kategori Kab/ Kota	Penilai- an PKK KB Kes Kategori Kab/ Kota	Penilai- an PKK KB-Kes kategori Kab/ Kota di 6 Kab dan 3 Kota	Penilai- an PKK KB-Kes kategori Kab/ Kota di 6 Kab dan 3 Kota	
		-	Kab/ Kota	Bhakti Sosial Pelayan- an KB dalam rangka Harlah Muslimat NU di 6 Kabupa- ten	Bhakti Sosial Pelayan- an KB dalam rangka Harlah Muslimat NU di 6 Kabupa- ten	Bakti So- sial Pelay- anan KB da-lam rangka Harlah Muslimat NU di 6 Kabupa- paten	Bakti So- sial Pelay- anan KB dalam rangka Harlah Muslimat NU di 6 Kabupa- paten	
		-	Kab/ Kota	Bakti Sosial pelayan- an KB dlm rangka Milad Aisyiyah di 6 Kab/ Kota	Bakti Sosial pelayan- an KB dlm rangka Milad Aisyiyah di 6 Kab/ Kota	Bakti So- sial Pelay- anan KB dalam rangka Milad 'Aisyiyah di 6 Ka- bupaten/ Kota	Bakti So- sial Pelay- anan KB dalam rangka Milad 'Aisyiyah di 6 Ka- bupaten/ Kota	Peringat- an Hari Keluarga tingkat Provinsi Jawa Te- ngah dan Nasional

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPd Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPd 2013	Capaian Tahun 2013		
25	Meningkatnya peran kelompok Bina Keluarga, Bina Balita, Bina Remaja dan Bina Lansia.	Meningkat	Klp	18.689 Kelompok BKB	18.198 kelompok	18,776	18.776	●
			Klp BKR	7.868	7.696	8,319	8.319	
			Klp BKL	10.143	8.934	10,828	10.828	
4	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri.							
26	Menurunnya angka drop out KB bagi masyarakat melalui kesertaan KB Mandiri	Menurun	%	15,09	9	16,09	16,09	●
27	Terwujudnya KB Mandiri oleh masyarakat yang akan menekan angka unmet need	Meningkat	akseptor	691.640	496.000	2.389.891	2.389.891	●
28	Meningkatnya partisipasi dan kesertaan masyarakat dalam pelayanan KB mandiri termasuk KB pria	Meningkat	akseptor	547.308	496.000	2.568.776	2.568.776	●
29	Meningkatnya jumlah peserta KB pria	Meningkat	akseptor	70.301	75.445	178.885	178.885	●
30	Meningkatnya jumlah masyarakat miskin untuk memperoleh akses dalam memperoleh pelayanan KB	Meningkat	akseptor	479.948	480.500	2.389.891	2.389.891	●
5	Program Promosi Kesehatan Ibu-Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita.							
31	Terbinanya kelompok-kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita hingga tingkat desa.	-	Kelompok BKB	22.256	18.198	18,776	22.256	●
32	Makin tersebarannya informasi kesehatan ibu-bayi hingga menjangkau wilayah perdesaan	35	Kab/Kota	35	35	35	35	●
33	Terselenggaranya KIE untuk menunjang Kesehatan Ibu-Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita.	35	Kab/Kota	35	35	35	35	●

Keterangan :

● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sampai dengan tahun 2013 dapat diketahui bahwa dari sebanyak 33 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, sebanyak 30 target indikator berstatus telah tercapai, dan 3 target indikator berstatus belum tercapai.


13) Sosial

Kinerja pembangunan Urusan Sosial ditunjukkan dengan 21 indikator kinerja, dengan capaian seperti Tabel 2.183.

Tabel 2.183.
Capaian Kinerja Urusan Sosial

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008-2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.							
1	<i>Terlaksananya pelatihan ketrampilan keluarga rawan sosial ekonomi (PKRSE) dan WRSE sebesar 7.900 orang</i>	7.900	Orang	9.986	6000	3,500	13,486	●
2	<i>Meningkatnya keterampilan dan taraf hidup warga KAT melalui Stimulan UEP 500 orang</i>	500	Orang	435	250	200	635	●
3	<i>Terfasilitasinya kesejahteraan bagi PK dan Veteran/keluarganya serta meningkatnya kelangsungan hidup bagi warakawuri</i>	1.390	Orang	1.032	397	395	1,427	●
4	<i>Terperuhnya sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin.</i>	Terpenuhi		Ada	Ada	Ada	Ada	●
5	<i>Menurunnya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah</i>	Menurun	%	14,98	11,88	Na		●
6	<i>Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS sebesar 5%</i>	333.050	PMKS	314.943	18.107	Na		●
7	<i>Meningkatnya jumlah dan ketrampilan tenaga yang menanganani PMKS</i>	Meningkat	-	32.711 Karang taruna, 180.214 PSM, 4.868 Usaha	Karang taruna, PSM , Dunia Usaha	7.050 KT, 36.478 PSM, 1.239 Dunia Usaha		●
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial							
8	<i>Meningkatnya kualitas pembinaan penanganan penyandang cacat 1.000 orang, eks penyandang kronis 1.150, penderita penyakit menahun terlan-tar 1.100 orang, penyandang cacat bibir sumbing dan katarak 500 orang dan penyandang cacat lewat BLK 800 orang.</i>	4.550	orang	3.020	1700	1.720	4.740	●
9	<i>Meningkatnya sarana dan prasarana panti-panti sosial</i>	Meningkat	Unit	37	14	7	34	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008-2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
10	Tersusunnya standar operasional pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Tersusun	Dokumen	12	3	3	15	●
11	Tersosialisasinya standar operasional pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Tersosialisasi	-	Ada		Ada	Ada	●
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)							
12	Terdatanya eks penyandang penyakit sosial (eks napi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Terdata		Terdata	0	Terdata	Terdata	●
13	Meningkatnya kegiatan pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks PGOT 500 orang, eks napi 500 orang, eks PSK dan penyandang HIV AIDS 1.000)	2000		5.450	550	1,865	7.315	●
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial							
14	Teridentifikasinya potensi dan sumber kesejahteraan sosial diseluruh Kab/Kota	Teridentifikasi		Teridentifikasi	Teridentifikasi	Teridentifikasi	Teridentifikasi	●
15	Meningkatnya kualitas penanganan dan kapasitas lembaga yang menangani PMKS	Meningkat						●
	• Meningkatkan aktivitas PSM dalam ikut membantu penanganan PMKS		PSM	1.754	350	376	2.130	
	• Meningkatkan aktivitas Karang Taruna dalam ikut membantu penanganan PMKS		Orang	1.716	1.120			
	- Karang Taruna 221 unit		unit	136	35	700	836	
	- Anggota Karang Taruna 1825 Orang		Orang	1.710	1.120	1.050	2.760	
16	Meningkatnya kesetiakawanan sosial masyarakat dalam rangka untuk membantu penanganan PMKS	Meningkat		28.370	6.300	6,300	34.670	●
17	Meningkatnya kerjasama Dunia Usaha dalam penanganan PMKS	Meningkat	DU	1.530	665	500	2.030	●
	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana							
18	Meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana	Meningkat						●
	• Terlatihnya aparaturnya dan Relawan dalam penanggulangan bencana melalui Gladi Manajemen Bencana	Terlatih	Orang	720	150	120	840	

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008-2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
	• Tersusunnya Peta Risiko Bencana di Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah	Tersusun	Kab/Kota	25	4	5	30	
	• Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap Budaya Sadar Bencana	Meningkat	Orang	1125	1000	3 kali	1.128	
	• Terfasilitasinya Pengembangan Desa Siaga Bencana	Fasilitasi	Desa	24	2	2	26	
	• Teridentifikasinya dan tersosialisasinya Daerah Rawan Bencana di Jawa Tengah	Identifikasi dan Sosialisasi	Kab/Kota	35	35	2	37	
	• Terfasilitasinya Kegiatan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah dari masyarakat profesional	Terfasilitasi	Orang	5	5	5	10	
	• Terselenggaranya Fasilitasi Pedoman dan Kebijakan Penyelenggaraan Bencana di Provinsi Jawa Tengah	Terselenggaranya Fasilitasi	Orang	150	150	50	200	
	• Terselenggaranya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi oleh aparat Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah	Terselenggaranya koord & sinkronisasi kpd aparat	Orang	100	100	2	102	
	• Tersusunnya dokumen Perencanaan umum Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah	Tersusunnya	Dokumen	6	4		6	
	• Terjalinya Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana dengan pemerintah desa	Terjalinya kerjasama	Desa	4	4	1	5	
	• Tersedianya Pengembangan Pusat Informasi Bencana di Jawa Tengah	Pengembangan PIB	Unit	2	1		2	
19	<i>Meningkatnya penyelamatan dan evakuasi terhadap korban bencana, penanganan pengungsi dan pemulihan sarpras vital untuk masyarakat</i>	<i>Meningkat</i>						
	• Terpenuhinya Kebutuhan dasar (pangan) bagi korban bencana (dinsos)		paket	5	1	1	6	
	• Terpenuhinya Kebutuhan dasar (pangan) bagi korban bencana (BPBD)		Orang	950	700		950	
	• Terselenggaranya Kegiatan Operasional SATKOR-LAK Bencana di Jawa Tengah	Penyelenggaraan Operasional	Orang	90	90		90	
	• Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana di Jawa Tengah	Penyelenggaraan Koordinasi	Orang	10	10		10	

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008-2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
	• Tersusunnya Evaluasi, Pemantauan dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat Bencana di Jawa Tengah	Monev	Kab/Kota	35	35	35	70	
	• Terselenggaranya Posko dan Penanganan Darurat Bencana Jawa Tengah	Posko dan penanganan darurat	Unit	4	1	1	5	
20	<i>Meningkatnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan</i>	<i>Meningkat</i>						●
	• Terselenggaranya fasilitas dan koordinasi teknis penanggulangan bencana di Jawa Tengah	Peny Fasilitas dan Koordinasi	Orang	320	100	90	410	
	• Terselenggaranya Pelatihan Teknis Penilaian <i>Damage and Losses Assessment</i> (Pelatihan Penghitungan Secara Cepat dan Akurat Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana)	Pelatihan Teknis DALLA	Orang	160	100	40	200	
	• Terselenggaranya Fasilitas dan Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jawa Tengah	Peny Fasilitas dan Koordinasi	Kali	6	3	2	8	
	• Terselenggaranya Fasilitas dan Koordinasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jawa Tengah	Peny Fasilitas dan Koordinasi	Kali	2	3	0	2	
21	<i>Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana, peralatan dan logistik bencana</i>	<i>Meningkat</i>						●
	• Tersedianya Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah	Penyediaan peralatan dan Logistik	Paket	5	1	1	6	
	• Terselenggaranya Fasilitas, Koordinasi, Konsolidasi Logistik dan Peralatan Bencana	Fasilitas & Koordinasi logistik peralatan bencana	Kab/kota	35	35	35	35	

Keterangan :

● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

* : Target 2013 merupakan upaya pemenuhan target RPJMD

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan sosial, sampai dengan tahun 2013 dapat diketahui bahwa dari sebanyak 21 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, semuanya berstatus telah tercapai.

14) Ketenagakerjaan

Kinerja pembangunan Urusan Ketenagakerjaan ditunjukkan dengan 39 indikator kinerja, seperti tabel 2.184.

Tabel 2.184.
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan

NO	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status Capaian
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
I	Program Peningkatan Kesempatan Kerja							
1	AKL	100.000	Orang	202.168	35.000	66.098	268.266	●
2	AKAD	75.000	Orang	120.051	16.000	16.686	136.737	●
3	AKAN	336.000	Orang	318.909	103.605	105.985	424.894	●
4	Penempatan tenaga kerja melalui BKK, JMF, BKO	12.500	lowongan/ BKK/ JMF	259.500	11.000	149.708	409.208	●
5	Terbentuknya 350 BKK	350	BKK	908	35	35	943	●
6	Terbinanya 500 BKK	500	BKK	490	35	60	550	●
7	JMF, diikuti 350 perusahaan dan menghasilkan 12.000 lowongan kerja	12.000	lowongan kerja	30.569	4.900	21.551	52.120	●
8	Tersebarinya informasi pasar di 35 Kabupaten/Kota	35	Kab	35	35	35	35	●
II	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja							
9	Peningkatan kompetensi 52.000 tenaga kerja	52.000	Orang	217.712	92.500	95.669	313.381	●
10	Tercapainya 1.100 lembaga Penyelenggara pelatihan kerja berperan aktif dalam peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja	1.100	lembaga	1.214	1.210	1.314	1.314	●
11	Terfasilitasinya 10.000 tenaga kerja dan 250 instruktur	10.000	tenaga kerja	217.712	95.000	95.669	313.381	●
12		250	Instruktur	370	40	50	420	●
13	Tercapainya revitalisasi 5 UPTD BLK			5	5	5	5	●
14	Peningkatan kompetensi 500 instruktur dan 250 pengelola LPK	500	Instruktur	415	30	85	500	▼
15		250	Pengelola LPK	447	210	210	657	●
16	Tercapainya penempatan 500 org pemagangan dalam negeri dan 3.000 orang pemagangan luar negeri.	500	Pemagangan dalam negeri (Orang)	2.244	120	960	3.204	●
17		3.000	Pemagangan luar negeri (Orang)	1.335	200	301	1.636	▼
18	Tersusunnya 25 program pelatihan CBT dan 100 modul pelatihan CBT	25	Program pelatihan	28	25	25	53	●
19		100	Modul	276	50	50	356	●

NO	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status Capaian
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
20	Terbentuknya 25 Tempat Uji Kompetensi	25	TUK	38	3	4	42	●
21	Terakreditasinya 250 lembaga pelatihan kerja	250	lembaga	138	40	52	190	▼
22	Tercapainya peningkatan produktifitas	2.500	Naker	5.490	690	1.000	6.490	●
23	2.500 naker dan 1.000 perusahaan	1.000	Perusahaan	2.654	40	60	2.714	●
III	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan							
24	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Penetapan UMK dengan pencapaian 100 % KHL s/d 2013		(Rp) Rata-rata UMK 35 Kab/Kota	834,255,3	914.278,68	914.278,68	914.278,68	
	2009 sebesar 90,10 %							
	2010 sebesar 92,57 %							
	2011 sebesar 95,05 %							
	2012 sebesar 97,51 %							
	2013 sebesar 100 %	100	%	96,42%	97,31%	97.31	97.31	▼
25	Penambahan peserta jamsostek luar hubungan kerja dari jumlah pekerja informal sebanyak 10% dari 14.799.001 orang	10	%	128.281		40.983	201.552	▼
26	Terbentuknya koperasi karyawan sebanyak 1.200 perusahaan	1.200		1.297	25	10	1.307	●
27	Tersedianya fasilitas kesejahteraan pekerja di 3.705 perusahaan	3075	perusahaan	6307	0	3.345	9.652	●
28	Adanya pengupahan dalam bentuk struktur dan skala upah perusahaan		perusahaan	105	0	10	115	●
	Meningkatnya kualitas materi PP dan PKB							
29	Perusahaan yang wajib membuat PP 5.840 perusahaan	5.840	PP	3.062	50	470	3.532	
30	Serikat pekerja yang dapat membuat PKB 1.446 SP/SB	1.446	PKB	3.885	50	782	4.667	
	Tertanganinya kasus-kasus ketenagakerjaan di Jateng	100	kasus	236	45	21	257	
31	• PHI 50% dari (11.971 kasus)	5.986	kasus	8.034	650	522	8.556	
32	• TKI 50 % dari 4.519 kasus	2.260	kasus	4.598	70	570	5.168	●
33	Peningkatan profesionalisme 129 mediator se-Jateng konsiliator dan arbiter	129	Orang	122	122	129	129	●
34	Revitalisasi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan di 35 kab/kota	35	Kab/kota	35	35	35	35	●
35		15	PPTKIS	44	5	5	49	●
36		500	cabang PPTKIS	648	100	145	793	●

NO	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status Capaian
					Target RKPDP 2013	Capaian Tahun 2013		
37		212	pegawai pengawas	146	142	150	150	●
38		16.897	Perusahaan	23.803	0	8.798	32.601	●
39	Meningkatkan peran dan fungsi pembentuk P2K3	0	P2K3	62	25	32	94	●
	Tercapainya jaminan perlindungan tenaga kerja dan terwujudnya kondisi hubungan industrial yang harmonis melalui:							
40	a. Terbentuknya 2.500 SP di tingkat perusahaan	2.500	SP	2.594	50	87	2.681	●
41	b. Terbentuknya 660 LKS BIPARTIT	660	LKS BIPARTIT	1.382	50	73	1.455	●
42	c. Revitalisasi 36 organisasi pengusaha untuk mendukung kondisi HI di Jateng	36	Organisasi	36	5	36	36	●
	d. Revitalisasi peran 36 LKS Tripartit dlm memberikan pertimbangan ketenagakerjaan kepada pimpinan daerah	36	LKS	36	36	36	36	●

Keterangan :

● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan ketenagakerjaan, sampai dengan tahun 2013 dapat diketahui bahwa dari sebanyak 43 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, sejumlah 38 target indikator berstatus telah tercapai, sebanyak 3 target indikator akan tercapai dan 2 target indikator berstatus belum tercapai.

15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kinerja pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditunjukkan dengan 19 indikator kinerja, dengan capaian pada tabel 2.185.

Tabel 2.185.

Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPDP 2013	Capaian Tahun 2013		
1	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM							
	Menguatnya kapasitas kelembagaan dan usaha Koperasi dengan sasaran:							

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
1	• 5.000 Koperasi berkualitas dari 12.290 Koperasi aktif	5.000	Koperasi	4.848	160	160	5.008	●
2	• Fasilitasi pendirian dan perubahan BH/AD 250 Koperasi	250	Koperasi	289	40	32	321	●
3	• KSP/USPKoperasi yang sehat di tiap kecamatan 1 KSP/USP	Tiap kecamatan 1 KSP/USP	KSP/USP	2.078	98	2,418	4.496	●
4	• Pemeriksaan dan Pengawasan KSP/USP	200	KSP/USP	1.102	335	252	1.354	●
2	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui Penguatan dan Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Sistem Distribusi /Jaringan Usaha serta Peningkatan Daya Saing							
	<i>Meluasnya pangsa pasar produk Koperasi dan UMKM melalui:</i>							
5	<i>Promosi, pameran, kontak dagang, pasar rakyat, temu usaha sebanyak 100 event</i>	100	Event	91	17	18	109	●
	<i>Jaringan usaha sektor riil bidang Kop. Wisata Kopinkra dan Kop Pasar, meliputi:</i>							
6	• Menguatnya usaha bidang ritel di 300 waserda dan 67 senkuko	300	Waserda	290	35	10	300	●
		67	Senkuko	67	35	35	102	●
7	HKI 150 sertifikat	150	Sertifikat	154	20	20	174	●
8	Ijin kesehatan usaha 3.000 UMKM	3.000	UMKM	3.080	350	350	3430	●
9	Pengembangan 590 KUD/Kop sektor agribisnis	590	KUD/Koperasi sektor agribisnis	794	15	150	944	●
3	Program Penguatan dan Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha KSP/USP – Koperasi							
10	Fasilitasi sertifikat tanah 1.750 UMKM	1750	UMKM	3.885	50	2,200	6.085	●
11	Pelaksanaan linkage program 566 KSP/USP	566	KSP/USP	1.944	70	510	2.454	●
12	Bintek permodalan 1500 KSP/USP	1.500	KSP/USP	1.781	375	900	2.681	●
13	Pendampingan 115 sentra	115	Sentra	104	35	35	139	●
4	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha							
14	Bantuan peralatan 2.000 UMKM	2.000	UMKM	2.808	165	300	3108	●
15	Bintek Produksi 4.500 UMKM	4.500	UMKM	3.202	1.433	1,860	5062	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
16	Workshop bagi 1.500 UMKM	1.500	UMKM	1.514	161	165	1679	●
5	Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM							
17	Peningkatan pengetahuan kemampuan dan ketrampilan SDM 8.700	8.700	Orang	10.150	50	925	11.075	●
18	Kompetensi SDM KUMKM 750 org	750	Orang	737	125	90	827	●

Keterangan :

● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

* : Target 2013 merupakan upaya pemenuhan target RPJMD

** : Target RPJMD telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk peningkatan cakupan.

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan koperasi dan UKM, sampai dengan tahun 2013 dapat diketahui bahwa dari sebanyak 18 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, semuanya berstatus telah tercapai.

16) Penanaman Modal

Kinerja pembangunan Urusan Penanaman Modal ditunjukkan dengan 18 indikator kinerja, dan dapat dilihat pada Tabel 2.186.

Tabel 2.186.
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Realisasi Capaian 2008 s.d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
1	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi							
	<i>Meningkatnya kualitas dan kuantitas informasi investasi yang dapat disampaikan ke calon investor, dan tercapainya realisasi investasi meliputi:</i>							
1	- profil 6 sektor usaha	6	Sektor usaha	6	6	5	5	●
2	- event promosi dan temu usaha tingkat nasional 5 kali	5	Kali	14	4	6	20	●
3	-event promosi dan temu usaha internasional 10 kali	10	Kali	10	3	2	12	●
4	- updating website 10 kali	10	Kali	28	1	1	29	●
	<i>Meningkatnya jumlah kerjasama investasi:</i>							
5	- Kerjasama dalam negeri dengan prov. Potensial	20	Provinsi	17	3	3	20	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Realisasi Capaian 2008 s.d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
6	- Kerjasama luar negeri di 5 negara	5	Negara	6	0	0	6	●
2	Program peningkatan iklim dan realisasi investasi							
7	Tersusunnya sebuah perda penanaman modal dan empat aturan pelaksanaannya	1	Perda	1 perda	0	0	1	●
		2	Pergub	2 pergub	0	0	2	●
		2	Perka	2 Perka	0	1	3	●
8	Menurunnya gangguan keamanan investasi	35	Kab Kota	35	35	0	35	●
9	Meningkatnya perse-tujuan realisasi investasi 2008 : 4,016 T 2009 : 4,257 T 2010 : 4,512 T 2011 : 4,783 T 2012 : 5,070 T 2013 : 5,374 T	28,012 Trilyun	Persetujuan dan Realisasi PMA	500 proyek	-	103 proyek	603 proyek	●
				Rp 13,246 Trilyun dan US\$ 10.497,24 juta (Rp103,5 Trilyun)	Rp.5,01 Trilyun	Rp 3,265 Trilyun	Rp 16,511 Trilyun	
			Persetujuan dan Realisasi PMDN	281 proyek	-	84 proyek	365 proyek	
				56,848 Trilyun dan US\$ 2,30 juta (Rp0,022 Trilyun)	Rp12,56 Trilyun	Rp 5,85 Trilyun	Rp 62,698 Trilyun	
			Rp70,094 Trilyun dan US\$ 10.499,54 juta (Rp103,522 Trilyun)					
10	Meningkatnya kerjasama Pemprov. Dengan Kab/Kota Jateng dalam menarik investasi	35	kab/kota	35	35	35	35	●
11	Terjadinya sinergitas perencanaan pengembangan investasi antara pusat, provinsi dan kab/kota		Forum RKPPMD	4	1	1	1	●
			Forum KP3MR	4	1	1	1	
			Forum KP3MN	5	1	1	1	
3	Program penyiapan Potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah							
12	Meningkatnya jumlah dan kualitas infrastruktur pendukung investasi melalui peningkatan kualitas jalan akses ekonomi dari desa ke kota	35	Kab/kota	35	35	0	35	●
13	Peningkatan kualitas pelabuhan untuk ekspor/impur, dan dermaga peti kemas	2	Pelabuhan	2	2	0	2	●
14	Peningkatan kualitas bandara	5	Bandara	5	0	0	5	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Realisasi Capaian 2008 s.d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPDP 2013	Capaian Tahun 2013		
15	Peningkatan energi, telekomunikasi, air dan fasilitas kesehatan terkait investasi	35	Kab/Kota	35	35	0	35	●
16	Tersedianya sarana prasarana dan tersedianya lahan 9 kawasan industri	9	kawasan industri	8	1	0	9	●
17	Meningkatnya jumlah tenaga kerja terdidik/trampil mendukung investasi di 35 kab/kota	35	kab/kota	35	35	0	35	●
18	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menerima investasi di 35 kab/kota	35	kab/kota	35	35	0	35	●

Keterangan :

● : Telah Tercapai; ▲ : Akan Tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan penanaman modal, sampai dengan tahun 2013 dapat diketahui bahwa dari sebanyak 18 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, semuanya berstatus telah tercapai. Kondisi tersebut menggambarkan kinerja yang cukup baik selama periode tahun 2008 – 2013.

17) Kebudayaan

Kinerja pembangunan Urusan Kebudayaan ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja, dengan capaian pada Tabel 2.187.

Tabel 2.187.
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPDP 2013	Capaian Tahun 2013		
1	Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan Nilai Kekeayaan dan Keragaman Budaya							
1	Meningkatnya pembinaan nilai-nilai etika, moral, budaya dan keagamaan Indonesia kepada masyarakat melalui berbagai media.							●
	- Jumlah masyarakat yang terbina terhadap nilai-nilai etika, moral dan budaya melalui peningkatan budi pekerti	Meningkatnya	orang	680	200	120	800	
2	Meningkatnya penanaman nilai-nilai etika, moral dan keagamaan melalui organisasi so-							●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
	<i>sial keagamaan di berbagai lapisan dengan berbagai sosialisasi dan media.</i>							
	- Jumlah masyarakat yang memahami nilai-nilai moral melalui Jelajah Budaya	Meningkatnya	orang	360	250	240	600	
3	<i>Meningkatnya penanaman dan sosialisasi etika, moral dan nilai keagamaan dikalangan para remaja dan organisasi pemuda</i>							●
	- Jumlah remaja yang tertanam budi pekerti dan memahami keaneka ragam budaya melalui Kemah Budaya untuk siswa SLTA	Meningkatnya	orang	1.595	900	900	2.495	
4	<i>Tersusunnya database ragam budaya daerah Jawa Tengah</i>							●
	- Revitalisasi program aplikasi data permuseuman dan kepurbakalaan	Tersusunnya	Keg/data	4/13	1/2	1/2	1/2	
5	<i>Meningkatnya upaya-upaya perlindungan dan promosi budaya daerah di tingkat nasional dan internasional</i>							●
	- Jumlah museum daerah yang dibina	Meningkatnya	lokasi	12	9	7	19	
	- Pameran Bersama Per museuman dan Kepurba kalaan Tk. Regional/MPU dan Internasional	Terselenggaranya	kali	6	1	0	6	
	- Pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB)	Meningkatnya	lokasi	15	4	4	19	
2	Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa							
6	<i>Meningkatnya jumlah dan jenis lembaga pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap kepercayaan yang dianut</i>							●
	Jumlah generasi muda penghayat dan SDM pelaku budaya spiritual yang dibina	Meningkatnya	orang	2.450	120	120	2.670	

Keterangan :

● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kebudayaan, sampai dengan tahun 2013 dapat diketahui bahwa dari sebanyak 6 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, semuanya berstatus telah tercapai.

18) Pemuda dan Olahraga

Kinerja pembangunan Urusan Pemuda dan Olahraga ditunjukkan dengan 12 indikator kinerja, dengan capaian sebagaimana Tabel 2.188.

Tabel 2.188.

Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
I	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda							
1	<i>Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan</i>	Meningkat						
	- Pembinaan SP3	Meningkat	Org	75	40	40	115	●
2	<i>Meningkatnya kuantitas dan kualitas kewirausahaan pemuda</i>	Meningkat						
	- Kewirausahaan Pemuda	Meningkat	Org	566	300	930	1.496	●
3	<i>Meningkatnya wawasan dan rasa kebangsaan generasi muda serta Tumbuhnya kesadaran & kewajiban bela negara</i>	Meningkat						
	- Pelatihan dan pengembangan Generasi Muda	Meningkat	Org	26.548	2.165	3.500	30.048	●
4	<i>Berkembangnya budaya lokal</i>	Berkembang						●
	- Pelatihan kependidikan		Org	235	40	40	275	
5	<i>Meningkatnya kesadaran terhadap bahaya narkoba, pornografi dan pornoaksi</i>	Meningkat						●
	- Penanggulangan bahaya merokok, HIV/AIDS dan Narkoba bagi pemuda		Org	1.385	350	350	1.735	
II	Program Pemberdayaan Lembaga/ Organisasi Kepemudaan							
6	<i>Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan kepemudaan dalam memecahkan permasalahan pemuda di 35 Kab/Kota</i>	Meningkat	org					●
	- Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Meningkat	OKP	315	75	100	415	
	- Paskibraka dan TUB/BB	Meningkat	org	1.125	225	225	1.350	
III	Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemaduan serta Pemasarakan Olahraga							
7	<i>Munculnya 5 cabang olahraga unggulan baru</i>	5	cabor baru	5	5	0	5	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
8	Munculnya 50 atlet olahraga baru yang berprestasi	50	atlet baru	72	72	0	72	●
9	Meningkatnya kualitas dan kemampuan atlet olahraga di Jateng	Meningkat						●
	- PPLPD		atlet	468	120	120	588	
	- Kompetisi Olahraga Pelajar		org	28.425	6.500	6.235	34.660	
	- Pengembangan Olahraga Unggulan		Atlet	875	175	175	1.050	
10	Meningkatnya motivasi dan partisipasi masy dalam kegiatan olahraga & kesegaran jasmani	Meningkat						●
	- Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Kesegaran Jasmani		org	40.358	10.000	10.000	50.358	
	- Pemassalan Olahraga Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat		org	8.035	6.000	21.000	29.035	
IV	Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/Organisasi Olahraga							
11	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan olahraga	Meningkat						●
	Peningkatan kualitas SDM		Pelatih	1.650	500	250	1.900	
	Peningkatan mutu dan manajemen organisasi olahraga		Orang	520	245	245	765	
V	Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga							
12	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga	Meningkat	-	Sarpras ASEAN PARA-GAMES; Stadion Sriwedari, Stadion Manahan, Gedung Wanita, Kolam Renang, Wisma Haji Donohudan, dan Penataan Lingkungan		7	7	●
	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras OR		Klub olahraga pelajar dan PPLP	719 Klub olahraga pelajar, 18 PPLP	18 PPLP & 105 Klub olahraga pelajar			

Keterangan :

● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pemuda dan olahraga, sampai dengan tahun 2013 dapat diketahui bahwa dari sebanyak 12 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, semuanya berstatus telah tercapai.


19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kinerja pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ditunjukkan dengan 8 indikator kinerja, dengan capaian seperti Tabel 2.189.

Tabel 2.189.
Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
I	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan							
1	<i>Menurunnya gangguan keamanan dan meningkatnya kenyamanan lingkungan di masyarakat</i>	<i>Menurun</i>						●
	Fasilitasi pembinaan tranmas		Orang	630	210	70	700	
II	Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal							
2	<i>Menurunnya tingkat gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat</i>	<i>Menurun</i>						●
	Pengendalian dan penanganan tram-tibbum di Jateng		Kab/kota	35	35	35	35	
III	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan							
3	<i>Meningkatnya wawasan kebangsaan bagi masyarakat</i>	<i>Meningkat</i>						●
	Peningkatan Kesadaran Bela Negara		kali/orang	19/1.560	7/300	3/210	22/1.770	
	Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatuan Masyarakat Serta Akulturasi Budaya		keg./orang	24/1.545	4/240	2/120	26/1.665	
IV	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan							
4	<i>Bertambahnya jumlah kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dengan LSM dan masyarakat untuk pengembangan wawasan kebangsaan.</i>	<i>Meningkat</i>						●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
	Pendayagunaan potensi Ormas		keg./orang	11/720	3/180	2/120	13/840	
	Penguatan penghayatan ideology Pancasila bagi aparatur dan elemen masyarakat		keg./orang	8/475	5/250	3/225	11/700	
	Peningkatan Etika, budaya, politik dalam kerangka penguatan Etika, Budaya Politik Dalam Kerangka Penguatan Wasbang dan ideologi Negara bagi pemuda dan pelajar		keg./orang	25/2045	5/300	2/200	27/2.245	
V	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Kertiban dan Keamanan							
5	<i>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan</i>	<i>Meningkat</i>						●
	Fasilitasi pemberdayaan FKDM		kali	55	12	11	66	
	Peningkatan Kapasitas masy. Sipil dalam penyelesaian konflik sosial		kali/orang	7/355	3/150	2/105	9/460	
VI	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat							
6	<i>Menurunnya tingkat penyalahgunaan Napza, Miras, dan penyakit masyarakat (Pekat) lainnya</i>	<i>Menurun</i>						●
	Koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama penegakan hukum, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN)		paket	5	0	0	5	
VII	Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat							
7	<i>Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada</i>	<i>Meningkat</i>						●
	Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Toma/ Toga Ormas/ LSM		kali/orang	16/1.185	5/390	3/225	19/1.410	
	Pendidikan Politik Bagi Elemen Masyarakat		kali/orang	22/2.045	6/600	3/300	25/2.345	
VII I	Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat(LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH)							

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
8	<i>Meningkatnya partisipasi Linmas dan Ratih</i>	<i>Meningkat</i>						
	Fasilitasi Pembinaan dan Pengerahan Hansip/ Linmas Kab/Kota se Jawa Tengah		kali/orang	9/3995	4/1370	1/875	10/4.870	
	Peningkatan Ketrampilan Pam Lingk. Bagi Komandan SatLinmas		kali/orang	6/310	1/50	2/100	8/410	

Keterangan :


 : Telah Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, sampai dengan tahun 2013 dapat diketahui bahwa dari sebanyak 8 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, semuanya berstatus telah tercapai.


20) Otonomi daerah

Kinerja pembangunan Urusan Otonomi daerah ditunjukkan dengan 15 indikator kinerja, dengan capaian seperti Tabel 2.190.




Tabel 2.190.
Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
I	Program Penaatan Peraturan Perundang-undangan							
1	<i>Tercapainya koordinasi dan sinergitas penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, meningkatkannya kesadaran dan kepatuhan hukum serta meningkatkannya kemampuan teknis dalam penerapan dan penegakan Hukum /HAM</i>	<i>Tercapai</i>						
	• Penyusunan Peraturan Daerah		Raperda	38	6	5	43	
	• Koordinasi Antar lembaga Dalam Bidang Bantuan Hukum		Perkara	2.151	350	250	2.401	
	• Sosialisasi Produk-produk Hukum Terkait Dengan Pemda		Perda	11	2	2	13	

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum							
2	<i>Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelayanan publik: OSS, pelayanan haji, pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan</i>	<i>Meningkat</i>						●
	• Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, sertifikasi ISO		Unit Pelayanan Publik (UPP)	58	4	2	60	
			UPP	13	2	2	15	
	• SKPD Prov Jateng yang telah mempunyai Standar pelayanan publik (SPP/SOP)		SKPD	57	0	0	57	
	Penyusunan LAKIP		SKPD	59	59	59	118	
	Pengiriman Petugas Haji							
	• Provinsi		Orang	81	0	0	81	
	• Kab./Kota		Orang	1.027	0	0	1.027	
	• Fasilitasi dan penilaian kinerja 35 kab/ kota		Kab/kota	34	0	0	34	
	• Penyusunan LKPJ		SKPD	59	59	59	118	
	• Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan		Kab/kota	35	0	35	70	
	• Bintek Kepala Desa		Orang	1.776	0	0	1.776	
	• Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat		Kegiatan	16	3	3	19	
	• Pengkajian dan pengembangan diklat		Kegiatan	3	4	2	5	
	• Reformasi Kediklatan		Kegiatan	4	1	1	5	
	• Standarisasi dan profesionalisme Widyaiswara		Kegiatan	5	2	0	5	
	• Penerbitan Warta Diklat, Leaflet dan kalender		Eksemplar	25 edisi, 6100 leaflet, 4600 kalender, 500 buku	5 edisi, 200 leaflet, 300 kalender	4 edisi Warta Diklat	29 edisi, 6100 leaflet, 4600 kalender, 500 buku	
	• Terwujudnya sarana informasi melalui system aplikasi yang tepat guna		Kab/kota	35	0	35	35	

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan		Paket	8	0	0	8	
	Terwujudnya tata kelola adm. Penataan dan pemetaan wilayah							
	• Penanganan Pilar Batas							
	❖ Pembangunan		buah	5 (Jateng-DIY)	0		5 (Jateng-DIY)	
	❖ Perapatan		Buah	50 Jateng-DIY dan Jateng-Jatim			50 Jateng- DIY dan Jateng-Jatim	
	❖ Perawatan		Buah	153 Jateng-DIY, Jateng-Jatim & Jateng-Jabar	0		153 Jateng-DIY, Jateng-Jatim & Jateng-Jabar	
	• Penyusunan basis rupa bumi/topomini Jateng			<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi dan penetapan nama-nama rupa bumi wilayah administrasi kecamatan Sosialisasi dan penetapan nama-nama rupa bumi unsur alami 			<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi dan penetapan nama-nama rupa bumi wilayah administrasi kecamatan Sosialisasi dan penetapan nama-nama rupa bumi unsur alami 	
III	Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah							
3	Tercapainya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah	<i>Meningkat</i>						
	• Terselenggaranya Pemilukada di 35 Kab/Kota		Kab/kota	35	7	7	35	

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPd Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPd 2013	Capaian Tahun 2013		
	• Pelantikan KDH dan Wakil KDH 35 KDH/ WKDH		KDH/ WKDH	35	4	4	35	
	• Terfasilitasinya penanganan permasalahan Pilkada di Jateng di 35 Kab/Kota		Kab/ Kota	35	7	7	35	
	• Tersusunnya LPPD dan Draft LPPD		Dokumen/ buku	5/420	1/80	1 / 80 set	6 / 500	
	• Terfasilitasinya penerapan dan capaian target SPM pada 6 urusan wajib di SKPD		SKPD	12	0	12	24	
	• Pelaksanaan Norma- Standar- Prosedur - dan Kriteria (NSPK) di Prov dan Kab/kota 27 NSPK.		NSPK	34	0	34	34	
IV	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi							
4	<i>Meningkatnya jumlah pengguna teknologi informasi</i>	Meningkat						●
	Pelayanan Jateng ONLINE		Kegiatan	8	1	4	12	
	Pemanfaatan LPSE dalam pengadaan Barang dan Jasa		Paket	2570	0	3.495	6.065	
	Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah		Unit	2	0	1	3	
V	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah							
5	<i>Meningkatnya kesepakatan MoU dan tindak lanjut kerjasama dengan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Provinsi, Pusat dan Luar Negeri</i>	Meningkat		509	51	190	699	●
	• Fasilitasi peningkatan kerjasama Pemprov. Jateng dgn 35 Kab/ Kota dan Kerjasama bilateral Jateng - Prov lain 3 provinsi		Kab/ kota	35	35	35	35	
VI	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah							

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
6	Tercapainya sinergitas dan sinkronisasi regulasi/ peraturan pengelolaan keuangan daerah dalam mengimplementasikan dan optimalisasi tertib administrasi keuangan daerah	Tercapai		Tercapai (50 SKPD dan 35 Kab/Kota)	-	-	Tercapai (50 SKPD dan 35 Kab/Kota)	
	• Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP		WTP	-	-	WTP	
	• Waktu Penetapan Perda APBD	Tepat Waktu		Tepat Waktu	-	-	Tepat Waktu	
7	Tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan sumber pendapatan lainnya	Meningkat	Juta Rupiah	11.693.998	0			
VII	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah							
8	Tercapainya peningkatan pengelolaan aset daerah	Meningkat						
	• Ganti rugi tanah jalan masuk dari jalan Jolotundo MAJT (semarang)			Terselesaikannya ganti rugi tanah jalan masuk dari jalan Jolotundo MAJT (semarang)	0	0	Terselesaikannya ganti rugi tanah jalan masuk dari jalan Jolotundo MAJT (semarang)	
	• Pembelian/ganti rugitanah untuk kantor Badan Kesbangpolinmas			Pembelian / ganti rugi tanah untuk kantor Badan Kesbangpolinmas Jl. A. Yani No160 Semarang	0	0	Pembelian/ ganti rugi tanah untuk kantor Badan Kesbangpolinmas Jl. A. Yani No160 Semarang	
	• Optimalisasi pemanfaatan aset daerah		Obyek	78	0	26	104	
	• Penyusunan database aset		SKPD	25	0	0	25	
	• Penyelesaian kasus/ sengketa aset		Kasus	9	0	1	10	
VIII	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah							
9	Tercapainya penurunan tingkat penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Tercapai						

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
	Pengawasan internal secara berkala		Obrik	468	95	119	587	
	Penanganan kasus dan pemeriksaan khusus		Kasus	412	0	35	447	
	Pemeriksaan Bantuan Keuangan 35 kab/ kota		kab/ kota	35	35	24	59	
IX	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan							
10	<i>Terwujudnya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang profesional</i>	<i>Terwujud</i>						●
	• Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		kegiatan	29	4	3	32	
X	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah							
11	<i>Tercapainya peningkatan profesionalisme dan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</i>	<i>Tercapai</i>						●
	• Penyusunan dan pembahasan Raperda dan Raperda Inisiatif		Raperda	61	22	28	89	
	• Penyiapan, pengkajian dan penelaahan per UU an		keg	35	0	16	51	
XI	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH							
12	<i>Tercapainya pelaksanaan urusan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	<i>Tercapai</i>	paket	8	0		8	●
XII	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah							
13	<i>Tercapainya peningkatan kualitas penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah</i>	<i>Peningkatan</i>						
	• Kegiatan Pengadaan CPNSD Jateng		Provinsi (orang)	2.372	500	-	2.372	
			Kab./ Kota (orang)	34.064	11.275	-	34.064	
	• Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pem. Prov. Jateng dan fasilitasi ujian		UDIN (orang)	7.412	1.400	-	7.412	
			UKPPI	7.403	1.350	3.994	11.397	

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
	kedinasan PNS Kab / Kota / BUMD dan Instansi lainnya		(orang)					
	• Kegiatan Tes Kompetensi pejabat struktural Pem. Prov. Jateng dan fasilitasi pejabat Pem. Kab / Kota		Prov Pejabat	1.136	384	288	1.424	
			Kab./ Kota Pejabat	579	108	78	657	
	• Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Struktural		Pejabat	4.450	894	797	5247	
	• Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional		JFK	15.108	1.500	900	16.008	
			JFU	24.640	7.100	6.139	30.779	
	• Kegiatan Penganugerahan tanda jasa kepada PNS Pem. Prov. Jateng dan fasilitasi penganugerahan tanda jasa kepada PNS Kab / Kota		Prov. (Orang)	4.209	500	425	4.634	
			Kab/ Kota (Orang)	36.707	5.000	5.005	41.712	
	• Kegiatan Penyelesaian Kasus pelanggaran disiplin PNS		Kali sidang	37	10	6	43	
	• Kegiatan Pengembangan aplikasi simpeg pada SKPD Pem. Prov. Jateng		SKPD	59	59	59	118	
	• Kegiatan Fasilitasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Pem. Prov. Jateng		Pelamar	85	20	10	95	
			TB S2 Orang	42	20	15	57	
			IB S2 Orang	169	55	-	169	
			IB S1 & D3 Orang	192	35	-	192	
	• Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Teknis		Orang	3.845	630	22	3.867	
	• Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Fungsional		orang	2.264	480	0	2.264	
	• Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan		orang	2.363	440	326	2.689	
	• Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah		orang	639	0	28	667	
	• Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan		orang	18.395	0	0	18.395	
XIII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah							

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
14	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Peningkatan	SKPD	59	59	59	59	●
XIV	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah							
15	Terwujudnya aparatur pemerintahan daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya melalui Diklat, Bintek serta Sosialisasi	Tercapai						●
	• Bimbingan Teknis Pegawai		SKPD	59	59	59	59	

Keterangan :

● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sampai dengan tahun 2013 dapat diketahui bahwa dari sebanyak 15 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, semuanya berstatus telah tercapai.

21) Ketahanan Pangan

Kinerja pembangunan Urusan Ketahanan Pangan ditunjukkan dengan 27 indikator kinerja, dengan capaian yang dapat dilihat pada Tabel 2.191.

Tabel 2.191.
Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
I	Program Peningkatan Ketahanan Pangan							
1	Meningkatnya produksi padi 1,5 % per tahun.	1,5 % per tahun	ton %	3,06 % per tahun	10.295.253	10.344.816*	2,67 % per tahun	●
2	Jagung	1,5 % per tahun	Ton %	3,62 % per tahun	3.198.426	2.930.911*	2,17% per tahun	●
3	Kedelai	10 % per 5 tahun	Ton	7,47% per 4	199.497	99.318*	-5,47 % per tahun	▼

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
			%	tahun				
4	Kacang tanah	3% per tahun	Ton	-3,16% per tahun	204.972	128.030*	-4,70 % per tahun	▼
			%					
5	Kacang hijau	1 % per tahun	Ton	10,13% per tahun	103.565	64.277*	-1,40 % per tahun	▼
			%					
6	Ubi kayu	3 % per 5 tahun	Ton	16,24% per 4 tahun	4.045.388	4.089.635 *	4,50 % per tahun	●
			%					
7	Meningkatnya penggunaan benih padi bermutu dari 35.000 ton per tahun menjadi 45.000 ton per tahun	45.000	ton	62.484	65.480	65.861	65.861	●
9	Terbentuknya sistem distribusi pangan yg efisien & mudah terjangkau oleh masyarakat	123	Gapoktan (APBN)	139	15	15	154	●
10	Mempertahankan ketersediaan energi perkapita minimal 2.200 Kkal/Kap/Hari dan penyediaan protein perkapita minimal 57 gr/kap/hr sesuai WNPG VIII tahun 2004	2200	Kkal/Kap/Hr	3.592,02	2.200	4.057	4.057	●
		57	Gr/Kap/Hr	92,24	57	93,36	93,36	●
11	Tercapainya skor PPH sebesar 90 dari target skor ideal 100 pada tahun 2020 dengan sasaran tahunan	90		89,87	90	90,35	90,35	●
12	- Konsumsi beras turun 1 % per-tahun	95	Kg/Kap/Th	-2,24% per tahun	95	89,49	-2,01 % per tahun	●
		-1	%/tahun					
13	- Konsumsi umbi-umbian naik 1 % per-tahun	24	Kg/Kap/Th	20,52% / tahun	24	24,24	11,42 % per tahun	●
		1	% / tahun					
14	- Konsumsi pangan hewani naik 2% per-tahun	175	Kkal/Kap/Hr	9,86% per tahun	175	176,21	7,62 % per tahun	●
		2	% / tahun					
15	- Konsumsi sayur dan buah naik 1% per-thn	115	Kkal/Kap/Hr	0,04% per tahun	115	116,25	3,93 % per tahun	●
		1	% / tahun					
16	Meningkatnya konsumsi energi minimal 2000 Kkal/Kap/Hari sesuai	2.000	Kg/Kap/Th	2.002,39	2.000	2.005,14	2.005,14	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
	<i>rekomendasi WNPB VIII tahun 2004</i>							
17	<i>Terwujudnya 210 unit Desa Mandiri Pangan pada tahun 2013</i>	210	Desa	281	4	4	285	●
18	<i>Meningkatnya produksi tebu</i>	10% pertahun	ton %	6,44% per tahun	5.025.000	5.576.736	9,63%	●
19	<i>Gula</i>	<i>Meningkat</i>	Ton	329.191	368.000	370.814	370.814	●
20	<i>Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan atau pengelolaan lahan kering atau tegalan 100 hektar per tahun di bidang perkebunan.</i>	1.750	ha	3.120	890	1.440	1.440	▼
21	<i>Meningkatnya penyediaan dan penggunaan sarana produksi :pupuk organik 10 persen, dan penerapan asas 6 tepat.</i>		ton	60.247	0			
22	<i>Terkendalinya ekspansi OPT utama pada sentra komoditas pangan di Jawa Tengah.</i>		%	0,50	0,50	0,50	0,50	●
23	<i>Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan di 29 Kabupaten.</i>	29	<i>Peta tingkat kecamatan</i>	29	29	29	29	●
24	<i>Tersedianya peta kekeringan /rawan banjir di 35 Kabupaten/Kota</i>	35	<i>Peta tingkat Kab/Kota</i>	35	35	35	35	●
II	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan							
25	<i>Berkembangnya diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dimasyarakat</i>	888	Desa	681	207	772	1.453	●
III	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan							
26	<i>Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pangan yang aman dan bermutu sesuai dengan standar mutu pangan.</i>	60	Warung sekolah	42	30	30	72	●
27	<i>Tersertifikatnya produk PRIMA 3</i>	17	Komoditas	16	3	3	19	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPd Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPd 2013	Capaian Tahun 2013		
	<i>(aman dikonsumsi) untuk 17 komoditas di 29 Kabupaten.</i>							

Keterangan :

● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

* : ASEM (Angka Sementara)

** : Target RPJMD telah tercapai dan target RKPd 2013 untuk peningkatan cakupan.

Berdasarkan tabel capaian kinerja ketahanan pangan, sampai dengan tahun 2013 dapat diketahui bahwa dari sebanyak 27 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, sebanyak 20 indikator berstatus telah tercapai, 3 indikator berstatus belum tercapai, dan 4 indikator tidak sesuai dengan target RKPd 2013 yaitu kagung, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau dikarenakan alih komoditas padi serta produktivitas lebih rendah karena pengaruh iklim.

Pada Tahun 2015 urusan ketahanan pangan diarahkan pada kegiatan pencapaian SPM ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat serta pengembangan kawasan Agropolitan dan usaha agribisnis pedesaan pengembangan pemanfaatan pekarangan dan pengenalan konsumsi pangan B2SA, pengembangan diversifikasi, pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal, pembinaan mutu dan keamanan pangan, serta pengembangan sertifikasi dan pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada produk pangan segar.

22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan dengan 25 indikator kinerja, dengan capaian sebagaimana tabel 2.192.

Tabel 2.192.

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPd Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPd 2013	Capaian Tahun 2013		
I	Program fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa.							
1	<i>Terlatihnya Kader Pemberdayaan Masyarakat</i>	600	Orang	965	70	70	1.035	●
2	<i>Terlatihnya peningkatan aparatur</i>	350	Orang	1.168	140	70	1.238	●
3	<i>Tersusunnya dokumen desa/kel</i>	567	dokumen	1.038	35		1.038	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPd Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPd 2013	Capaian Tahun 2013		
4	Terpilihnya 30 desa & 30 kel berprestasi	60	Desa/ kel	51	9	9	60	●
5	Meningkatnya jumlah bantuan yang dikelola oleh 7807 desa untuk penanganan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	7807	Desa	7.810	7.809	476	8.286	●
II	Program peningkatan partisipasi masyarakat							
6	Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong di Jawa Tengah	8.574	Desa/ kel	8.578	8.576	8.578	8.578	●
	Penerapan TTG	150	Desa/ kel	122	28	28	150	
7	Sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat	35	Kab/ kota	35	35	35	35	●
8	Meningkatnya status tingkat perkembangan unit posyandu dari status mandiri ke posyandu model	15.000	Unit	11.838	4000	4.000	15.838	●
9	Tertanamnya Nilai Budaya Damai pada kader AIMDAMAI	5.000	Orang	2.955	2045	2.100	5.055	●
10	Sosialisasi UU 23 / 2002 ttg PA	3.000	Orang	1.950	1050	1.050	3.000	●
11	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian kemampuan kader adat terpencil		Orang	35	35	35	35	●
12	Lokasi kegiatan peningkatan kesadaran, kepedulian, kemampuan kader adat terpencil.	35	Kab/ kota	35	35	35	35	●
13	Lokasi kegiatan peningkatan peran dan fungsi Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) terhadap pelaksanaan distribusi minyak tanah, konversi LPG dan Raskin di 35 Kabupaten/ kota.	35	Kab/ kota	35	35	35	35	●
14	Tersusunnya dokumen-dokumen program pemberdayaan masyarakat di Jawa Tengah		Dok	50	10	11	61	●
III	Program penguatan kelembagaan masyarakat							
15	Meningkatnya peran dan fungsi 90 UED SP	90	UED SP	155	20	20	175	●
16	Meningkatnya peran dan fungsi 90 Pasar tradisional / pasar desa	90	Pasar tradisional/ pasar desa	178	20	20	198	●
17	Meningkatnya peran dan fungsi 116 CPPD	116	CPPD	34	82	82	116	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPd Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPd 2013	Capaian Tahun 2013		
18	Optimalnya peran dan fungsi TKPKD dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah	35	TKPKD	35	35	35	35	●
19	Bantuan langsung masyarakat PNPM PPK sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat	29	Kab	29	29	29	29	●
20	Meningkatnya kinerja TK PNPM PPK kab, kec dan desa	29	Kab	29	29	29	29	●
21	Meningkatnya status gizi anak SD	10.000	orang	2.867	7.133	7.120	9.987	●
22	Meningkatnya kemampuan kader P2M PMTAS	500	kader	465	70		465	●
23	Meningkatnya peran 200 lembaga UP2K se-Jawa Tengah.	200	UP2K PKK	192	140	140	332	●
IV	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa							
24	Meningkatnya kapasitas dan kelembagaan pemerintahan desa			1168	140			●
25	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa dan penyusunan peraturan pemerintahan desa			90	0			●

Keterangan :

● : Telah Tercapai; ▲ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

* : Target 2013 merupakan upaya pemenuhan Target RPJMD 2008 - 2013

** : Target RPJMD 2008 – 2013 telah tercapai dan target RKPd 2013 untuk meningkatkan cakupan

Kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dikategorikan dalam kondisi yang baik, dari sebanyak 25 indikator yang telah ditetapkan kesemuanya dalam kondisi status telah tercapai.

23) Statistik

Kinerja pembangunan Urusan Statistik ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja, dengan capaian pada tabel 2.193.

Tabel 2.193.
Capaian Kinerja Urusan Statistik

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 sd 2012	Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013	Kinerja 2008 s/d 2013	Status
1	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah							
1	<i>Tersedianya data statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan</i>	<i>Tersedianya Data Statistik</i>						●
1	Penyusunan Jateng Dalam Angka		Buku	2.950	600	600	3.550	
2	Penyusunan PDRB Jateng		Buku	2.650	450	450	3.100	
3	Penyusunan Tinjauan PDRB Kab./Kota		Buku	1.000	150	250	1.250	
4	Penyusunan Data Input-Output		Buku	200	-	-		
5	Penyusunan Data Potensi Daerah		Kab/ Kota	35	35	35	35	
2	<i>Terwujudnya kemudahan mengakses data statistik</i>	<i>Terwujud (publikasi data Statistik pada website Bappeda Prov.)</i>	Paket	10	2	2	12	●
3	<i>Meningkatnya kesadaran petugas akan pentingnya data</i>	<i>Meningkat (Penyelenggaraan Rakor Data)</i>	Rakor	10	2	2	12	●

Keterangan :

● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Kinerja urusan statistik dapat dikategorikan dalam kondisi baik, terlihat dari 3 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 seluruhnya telah tercapai. Tiga indikator Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah dengan status telah tercapai yaitu: Tersedianya data statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan; Terwujudnya kemudahan mengakses data statistik; dan Meningkatnya kesadaran petugas akan pentingnya data.

24) Kearsipan

Kinerja pembangunan Urusan Kearsipan ditunjukkan dengan 4 indikator kinerja, dengan capaian sebagaimana Tabel 2.194.

Tabel 2.194.
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
I 1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan							
	Terselenggaranya Sistem Kearsipan	Terselenggaranya						●
	Melaksanakan Pembinaan Kearsipan Desa		Desa	1.550	125	170	1.720	
	Penyusunan Pedoman Kearsipan		Pedoman	6	1	2	8	
	Pembinaan kearsipan Prov.Jateng:							
	- UPPD/UPTD		Instansi	75	20	50	125	
	- Perangkat			5	0	100	105	
	- Kab/Kota		Kab/Kota	15	0	100	115	
	- Kab (@ kab; 4 desa)		desa	16	0			
	SKPD		SKPD	47	45			
	Terpeliharanya dan terpasangnya sistem jaringan kearsipan		SKPD	30	43	49	49	
	Bintek Pengelola Kearsipan Desa (Sekdes)		orang	2650	250	250	2.900	
	Melaksanakan Evaluasi Pengelolaan Kearsipan Pemd		desa	232	116	116	348	
	Lomba Tertib Arsip Desa		desa	29	29	29	29	
	Lomba Arsiparis Teladan		orang	58	100	100	100	
Bintek Pengelola Kearsipan (UPPD/UPTD/Kab/Kota)		orang	220	100	100	320		
II	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Terpeliharanya						
2	<i>Terpeliharanya Dokumen/arsip daerah</i>							●
	Penyelamatan dan Pelestarian arsip (penyelamatan, pelestarian dan penyusutan)		berkas	196.500	75.000	75.000	271.500	
	Meningkatkan kerjasama pengelolaan kearsipan		instansi	15	3	4	19	
	Menyelamatkan arsip/dokumen Instansi/BUMD		Instansi	35	10	27	62	
	Meningkatkan kualitas arsip udara, arsip prestasi Jateng dan arsip Gubernur Jateng :							
	- Foto udara,		berkas	400	200	200	600	

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
	- Peta,		berkas	300	0			
	- PU Belanda,		berkas	5.700	2.000	2.000	7.700	
	- Gubernur Jateng		berkas	750	0			
	- Prestasi		berkas	300	0			
	- Foto		berkas	1.950	1.000	1.000	2.950	
	- Kearsitekturan		berkas	1.150	1.000	1.000	2.150	
	Penyimpanan dan pelestarian arsip statis :							
	Melaksanakan penyimpanan dan perawatan arsip		Kab / Kota	20	5	8	28	
	Laminasi arsip kertas		lembar	2.985	450	450	3.435	
	Menyelamatkan Informasi sejarah Kab/Kota		Kab/ Kota	5	1	2	7	
	Alih media arsip Statis :							
	Arsip tekstual,		record	10.742	1.000	2.500	13.242	
	Arsip Foto,		record	16.337	2.000	2.000	18.337	
	Video		judul	188	25	25	213	
	Audio		file	750	100	150	900	
III	Program Peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat	Terselenggaranya						
3	<i>Terselenggaranya pameran dan sosialisasi kearsipan</i>							●
	Menyelenggarakan pameran kearsipan		kali	23	5	10	33	
IV	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi							
4	<i>Terwujudnya pelayanan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat</i>	Terwujudnya						●
	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap arsip tentang sejarah batik dan pahlawan		keping CD	7	2	2	9	

Keterangan :

● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Capaian kinerja urusan kearsipan menunjukkan kondisi yang baik, terlihat bahwa dari sebanyak 4 indikator kinerja yang ditargetkan dalam RPJMD tahun 2008-2013, semuanya berstatus telah tercapai.

25) Komunikasi dan Informatika

Kinerja pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan dengan 4 indikator kinerja, dengan capaian sebagaimana tabel 2.195.

Tabel 2.195.
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPDP Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPDP 2013	Capaian Tahun 2013		
I	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa							
1	<i>Tersedianya sarana dan prasarana urusan komunikasi dan informasi sesuai kebutuhan dan terwujudnya peran dan fungsi KPID sesuai dengan UU No. 32 tahun 2008 ttg Penyiaran melalui :</i>	<i>Tersedianya</i>						●
	Desiminasi Peraturan dan Proses Perijinan		Keg	14	8	2	16	
	Pembuatan Peta Digital Lembaga Penyiaran Jateng 1 paket/ peta		paket/ peta	1	1	1	2	
	Pengawasan isi siaran lembaga penyiaran		Kab/ Kota	35	20	23	58	
			LP	619	60	124	743	
	Pelayanan Perijinan Lembaga Penyiaran		Lembaga Penyiaran	428	60	70	498	
	Dialog Interaktif ttg isu penyiaran		Publikasi	183	30	29	212	
II	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media							
2	<i>Terjalinnnya kerjasama informasi dengan mass media melalui :</i>	<i>Terjalinnnya</i>						●
	Dialog interaktif/ siaran langsung		Paket	519	155	130	649	
	Dialog interaktif ttg PUG		Paket	7	2	2	9	
	Blow Up PUG		Paket	9	2	0	9	
	Dialog Interaktif ttg Cukai		Paket	139	23	0	139	
	Spot televisi ttg Cukai		Paket	61	6	0	61	
	Spot radio ttg Cukai		Paket	138	0	0	138	
	Feature televisi ttg Cukai		Paket	12	0	0	12	
	Blow up ttg Cukai		Paket	68	6	0	68	
	Editorial Roundtable Discusion		Paket	2	0	0	2	
	Rubrik dan kolom khusus		Paket	575	192	174 Naskah	749	

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPd Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPd 2013	Capaian Tahun 2013		
	Forum Kehumasan		Kegiatan	6	2	2	8	
	Fasilitasi FK-METRA		Kab/Kota	10	3	3	13	
	Inventarisasi/ pengembangan LKM		Unit	28	2	2	30	
III	Program Pengkajian dan Penelitian Bid. Informasi dan Komunikasi							
3	<i>Tersedianya hasil kajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Melalui</i>	<i>Tersedianya</i>						●
	Analisis berita & pendapat umum serta diskusi hasil		Naskah	658	100	3 kegiatan diskusi hasil analisa, 251 klipping berita, 878 berita	3 kegiatan diskusi hasil analisa, 251 klipping berita, 878 berita	
	Bidang pengembangan dan penerapan IPTEK		Kajian	10	5	5	15	
IV	Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika							
4	<i>Tersedianya SDM bidang Kominfo profesional</i>	<i>Tersedianya</i>	Orang	400	0	200	600	●
	Pemberdayaan Media cetak Mingguan/bulanan		Berita media	87	87			

Keterangan :

● : Telah Tercapai; ▲ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika, terlihat sebanyak 4 target indikator RPJMD Tahun 2008-2013 berstatus telah tercapai. Kondisi ini menunjukkan kinerja urusan komunikasi dan informatika tergolong sangat baik.

26) Perpustakaan

Kinerja pembangunan Urusan perpustakaan ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja, dengan capaian seperti Tabel 2.196.

Tabel 2.196.
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
A	Program Pengembangan Budaya Baca							
1	<i>Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan</i>	Meningkat	Orang	2.438.064	531.700	619.452	3.057.516	●
B	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan							
2	<i>Meningkatnya Presensi Perpustakaan semua Jenis Perpustakaan dan memiliki sarana prasarana lengkap</i>	Meningkat	unit	150.570	152.200	150.640	150.640	●
3	<i>Meningkatnya dan Terpeliharanya Koleksi Perpustakaan</i>	Meningkat	Eks	202.668	11.500	235.363	235.363	●
	• Stock opname koleksi perpustakaan 200.000 Eks		Eks	293.000	30.000	20.000	313.000	
4	<i>Meningkatnya Jumlah Perpustakaan masyarakat</i>	Meningkat						●
	• Pengembangan perpustakaan desa		unit	1.675	105	210	1.885	
	• Peningkatan layanan Perpustakaan keliling		unit	79	33	76	155	
5	<i>Meningkatnya Jumlah Pengelola Perpustakaan/ Pustakawan</i>	Meningkat						●
	• Pembinaan organisasi perpustakaan dan kepustakawanan 600 orang		orang	760	150	150	910	
	• Pendidikan masyarakatan perpustakaan rumah ibadah 280 orang		orang	245	70	35	280	
	• Bintek pengelola perpustakaan 880 orang		orang	1.515	245	210	1.725	
C	Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan							
6	<i>Meningkatnya Persentase Koleksi Penting Bernilai Sejarah Yang Terselamatkan</i>	Meningkat						●
	• Karya Cetak dan Karya Rekam		Judul	3.495	1.000	1.200	4.695	
	• Transliterasi koleksi bahan pustaka kuno		halaman	2.845	130	400	3.245	

Keterangan :

● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan perpustakaan, terlihat dari sebanyak 6 target indikator RPJMD Tahun 2008-2013, semuanya berstatus telah tercapai.

2.2.2. Urusan Pilihan

Evaluasi kinerja kewenangan Urusan Pilihan adalah sebagai berikut :

1) Pertanian

Kinerja pembangunan Urusan Pertanian ditunjukkan dengan 67 indikator kinerja, dengan capaian seperti pada Tabel 2.197.

Tabel 2.197.
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
I	Program Pengembangan Agribisnis							
1	Meningkatnya penggunaan pupuk organik di lahan sawah.	2	Ton/ha	60.728	70.000	165.308	165.308	●
2	Menurunnya kehilangan padi dari 11,58% menjadi 11,50%	11,5	%	10,39	10,30	10,37	10,37	●
3	Tersedianya informasi OPT dan iklim di 6 laboratorium hama dan penyakit di Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Tengah (BTPPH).	6	Lab Hama dan Penyakit	6	6	6	6	●
4	Meningkatnya produksi hortikultura unggulan daerah dan meningkatnya konsumsi sayuran dan buah buahan dari 35 kg/kap/thn menjadi 45 kg/kap/thn pada akhir tahun 2013.							●
	Mangga		Ton	350.049	272.920	403.843	403.843	
	Durian		Ton	67.344	100.611	69.549	69.549	
	Salak		Ton	288.477	178.260	451.664	451.664	
	Pisang		Ton	866.705	965.000	552.962	552.962	
	Cabai Merah		Ton	124.738	95.733	145.061	145.061	
	Bawang Merah		Ton	409.312	285.170	419.472	419.472	
	Kentang		Ton	263.987	260.633	273.514	273.514	
5	Terlaksananya promosi, pasar lelang dan pasar tani di 10 sub terminal agribisnis (STA).	10	STA	10	10	10	10	●
6	Tersedianya data informasi pasar 25 unit di 23 kabupaten/kota (harian, mingguan, bulanan, tahunan).	25	unit	25	25	25	25	●
7	Berkembangnya perkeayaan alsintan: power mower 10 unit/tahun, power weeder 10 unit/tahun, dan ripper 10 unit/tahun.	30 unit/tahun	unit	955	58	270	1.225	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPd Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPd 2013	Capaian Tahun 2013		
	<i>Berkembangnya luas areal, rehabilitasi dan intensifikasi komoditas prospektif untuk peningkatan produksi : kelapa, kakao, karet, kopi, nilam, wijen, mete, teh, tembakau, cengkeh dan aren</i>							
8.	<i>Kelapa</i>		Ha	233.0105	233.015	234.344	234.344	●
9.	<i>Kakao</i>		Ha	5.562	5.562,30	6.702	6.702	●
10.	<i>Karet</i>		Ha	5.250	5.250,49	9.423	9.423	●
11.	<i>Kopi</i>		Ha	35.865	35.864,75	37.816	37.816	●
12.	<i>Nilam</i>		Ha	3.645	3.645,02	2.763	2.763	●
13.	<i>Wijen</i>		Ha	293	160	96	96	▼
14.	<i>Mete</i>		Ha	26.033	25.966	25.400	25.400	▼
15.	<i>Teh</i>		Ha	5.127	5.247	5.035	5.035	●
16.	<i>Tembakau</i>		Ha	44.698	41.500	42.679	42.679	●
17.	<i>Cengkeh</i>		Ha	38.353	42.177	41.651	41.651	●
18.	<i>Aren</i>		Ha	2.700	2.637	2.828	2.828	●
9	Peningkatan Produksi:							
19.	<i>Kelapa</i>		ton	179.075	183.000	180.695	180.695	▼
20.	<i>Kakao</i>		ton	1.400	2.000	1.819	1.819	●
21.	<i>Karet</i>		ton	1.139	3.000	1.720	1.720	●
22.	<i>Kopi</i>		ton	17.768	16.550	19.431	19.431	●
23.	<i>Nilam</i>		ton	14.444	17.000	14.595	14.495	●
24.	<i>Wijen</i>		ton	113	0	36,49	36,49	●
25.	<i>Mete</i>		ton	9.332	8.700	11.364	11.364	▼
26.	<i>Teh</i>		ton	5.953	7.000	5.481	5.481	●
27.	<i>Tembakau</i>		ton	31.267	24.600	32.931	32.931	●
28.	<i>Cengkeh</i>		ton	6.069	6.400	6.246	6.246	▼
29.	<i>Aren</i>		ton	3.919	4.600	3.490	3.490	●
30.	<i>Meningkatnya kualitas penggunaan sarana produksi : pupuk sesuai asas 6 tepat (waktu, jenis, jumlah, mutu, tempat dan harga) dan fasilitas alsinbun</i>							●
	• Penggunaan pupuk		Ton	114.668	18.000	18.167	132.835	
	• Fasilitas Alsinbun		Unit	5.228	420	528	5.756	
31	<i>Terselenggaranya fasilitasi agropolitan dan cluster di Jateng.</i>	4	Agropolitan	4	4	4	4	●
		3	Cluster	3	3	3	3	●
32	<i>Terlaksananya fasilitasi promosi produk perkebunan dan pelayanan informasi harga di sentra produksi</i>		promosi (kali)	32	8	7	39	●
			Informasi harga pasar (kabupaten)	31	31	31	31	
33	<i>Terlaksananya pembinaan, penggunaan, Peningkatan, produksi serta pengawasan peredaran benih/bibit bersertifikat</i>	1.250.000	Bibit bersertifikat (label)	5.327.527	1.250.000	3.116.066	8.443.593	●
34	<i>Tercapainya peningkatan mutu hasil produk perkebunan</i>	150	sample	195	35	52	247	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPd Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPd 2013	Capaian Tahun 2013		
35	Terlaksananya pemeliharaan dan peningkatan kinerja 32 (tiga puluh dua) kebun dinas Perkebunan dan 44 Kebun Dinas Pertanian	32	Perkebunan	32	32	32	32	●
		44	Pertanian	44	44	44	44	
36	Peningkatan produksi dan produktivitas kebun dinas sehingga PAD meningkat 10%	10	%	16.37	10	10	33,09	●
37	Tercapainya penyediaan sarana pengendalian OPT berupa agensia pengendali hayati (APH) dan pestisida nabati serta penyebarannya		APH (kg)	16.758	7.500	7.500	24.258	●
			Pesnab (lt)	660	500	500	1.160	●
38	Meningkatnya produksi semen beku sapi	20% per tahun	Dosis	17.50%	472.650	495.544*	21,38	●
						36,93		
39	Meningkatnya produksi semen beku kambing	10% per tahun	Dosis	79.66%	22.000	62.444*	59,52	●
						283,83		
	Meningkatnya populasi ternak:							
40	- Sapi potong	2 % per tahun	%	9.55%	2.015.828	1.500.077*	2,27	●
41	- Sapi perah	0.6 % per tahun	ekor	7.20%	151.736	103.794*	-0,80	▼ Capaian berdasarkan Sensus Pertanian Tahun 2013
42	- Kambing	10 % per tahun	ekor	3.77%	4.781.985	3.889.010*	3,01	▼
			%					
	Meningkatnya produksi hasil-hasil peternakan:							
43	- Daging	7% per tahun	kg	8.28%	265.148.307	266.391.017*	7,75	●
			%					
44	- telur	2.3% per tahun	kg	9.80%	268.036.393	283.149.108*	8,67	●
			%					
45	- susu	3% per tahun	liter	9.60%	109.436.320	97.729.480*	6,20	●
			%					
46	-Terlaksananya pemeliharaan pejantan bull sapi	30 ekor/ thn	ekor	37	44	46	40	●
47	-Terlaksananya pemeliharaan pejantan kambing	15 ekor/ thn	ekor	18	19	21	20	●
48	-Terlaksananya replacement bull	8 ekor/ 2 thn atau 20 ekor/ 5 tahun	ekor	41	6	12	14	●
49	-Tersedianya bibit ternak ruminansia besar sapi perah ;	20 ekor/ thn	ekor	75	55	158	233	●
50	-Tersedianya bibit ternak ruminansia besar	80 ekor/	ekor	240	169	374	614	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPd Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPd 2013	Capaian Tahun 2013		
	<i>sapi potong ;</i>	tahun						
51	- ruminansia kecil kambing	400 ekor/ tahun	ekor	447	420	639	1.086	●
52	-Tersedianya produksi susu	20.000 ltr/thn	liter	31.196	25.000	31.354	31.354	●
53	- Meningkatkan produksi pakan konsentrat pabrik pakan mini	10% per tahun	ton	23.71%	155	172,32	21,20	●
		%						
54	-Tersedianya bibit ternak ayam buras ;	1.500 ek/thn	ekor	13.754	15.000	14.217	14.217	●
55	-Tersedianya bibit ternak itik;	3.000 ek/thn	ekor	13.548	15.000	23.310	23.310	●
56	-Tersedianya bibit ternak kelinci;	720 ekor/ thn	ekor	1.582	1.300	2.367	2.367	●
57	-Tersedianya produksi telur ayam	159.999	butir	150.363	250.000	214.507	214.507	●
58	-Tersedianya produksi telur itik	340.000	butir	212.811	320.000	221.761	221.761	●
59	-Terlaksananya surveylans penyakit hewan	3.000	sampel	32.841	30.000	34.358	34.358	●
60	-Menurunnya angka kesakitan ternak besar	< 9 % per tahun	%	7,16	<9	6,01	6,93	●
61	-Menurunnya angka kesakitan ternak kecil	< 15 % per tahun	%	12,09	<15	12,29	12,13	●
62	-Menurunnya angka kesakitan ternak unggas	< 20 % per tahun	%	17,17	<20	16,89	17,11	●
63	-Menurunnya angka kematian ternak besar	< 3 % per tahun	%	2,39	<3	1,98	2,3	●
64	-Menurunnya angka kematian ternak kecil	< 5 % per tahun	%	4,05	<5	3,60	3,96	●
65	-Menurunnya angka kematian ternak unggas	< 10 % per tahun	%	5,11	<10	4,08	4,9	●
66	Terselenggaranya fungsi bengkel alsinbun Sura-karta dalam pengembangan alsinbun dan menyumbang PAD	1	bengkel	1	1	1	1	●
67	Berkembangnya rekayasa/ prototype alsinbun 20 unit per tahun dan peningkatan fasilitasi pengujian mutu hasil perkebunan	100	unit	158	0	50	208	●
68	Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan bahan baku tembakau dan cengkeh		Pembinaan (org)	13.323	0	0	13.323	●
69	Tersusun dan tersedianya database. sistem informasi dan statistik perkebunan	1	dokumen	1	1	1	1	●
70	Tersusunnya perencanaan. pedoman-pedoman teknis pelaksanaan pembangunan perkebunan	3	dokumen	3	3	3	3	●
71	Terlaksananya fungsi	4	dokumen	4	4	4	4	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
	<i>monitoring. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan perkebunan dari berbagai sumber pendanaan</i>							
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani							
72	<i>Terlaksananya kemitraan kelompok tani padi organik dengan swasta dari 10 kelompok menjadi 50 kelompok.</i>	50	Kelompok tani	50	4	21	71	●
73	<i>Terbinanya Gapoktan yang memperoleh alokasi anggaran PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) dalam manajemen usaha pertanian di pedesaan dari 10 Gapoktan menjadi 50 Gapoktan.</i>	50	Gapoktan	50	5	15	65	●
74	<i>Terbentuknya lembaga pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kawasan serta agroekosistem</i>		Kawasan Agropolitan	16	0	6	6	●
75	<i>Meningkatnya fungsi kelembagaan dan unit usaha pertanian. usaha pelayanan jasa alsin (UPJA) lumbung distribusi pangan masyarakat (LDPM) rice mill</i>	93	Lumbung pangan	232	25	65	297	●
76	<i>Meningkatnya pembinaan Gabungan kelompok tani (Gapoktan) dari 904 menjadi 955. dan terfasilitasinya pemberian penghargaan terhadap prestasi kelembagaan petani (pelaku utama) dan pelaku usaha.</i>	51	Gapoktan	600	1.200	300	900	●
	<i>Semakin mantapnya kelembagaan penyuluhan baik di tingkat kabupaten, kota, tingkat kecamatan dan desa. melalui:</i>							
77	<i>-Terbentuknya Kelembagaan Penyuluhan di setiap Kab./Kota.</i>	34	Kab./Kota	34	34	0	34	●
78	<i>- Terbentuknya Balai Penyuluhan Model (Kecamatan) dan Posluhdes (Desa)</i>	245	BP Model	328	10	10	338	●
		490	Posluhdes	266	244	224	490	●
79	<i>Tersusunnya program penyuluhan. terwujudnya Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan metoda Penyuluhan.</i>	500	buku	500	100	100	600	●
80	<i>- Tersedianya sarana prasarana penyuluhan</i>							●
	➤ Soil test kit		Unit	668	100	133	801	

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPDP Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPDP 2013	Capaian Tahun 2013		
	➤ pH meter		Unit	540	60	70	610	
	➤ <i>Moisture tester</i>		Unit	147	158	0	147	
	➤ Bagan warna daun		Unit	8.498	200	0	8.498	
	➤ Radio		unit	1	0		1	
	➤ Cyber		unit	250	10	0	250	
	➤ GPS		unit	40	0	0	40	
	<i>Meningkatnya penyelenggaraan penyuluhan yang terintegrasi, efektif dan efisien di setiap tingkatan</i>							
81	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh PNS.	3.590	Orang	4.321	1030	1.030	5.351	●
82	<i>Meningkatnya motivasi dan sumberdaya manusia petani melalui kegiatan pelatihan, magang kerja, bintek dan pemberdayaan kelompok : 900 petani (kelapa, kopi, kakao, karet dan tebu) per tahun</i>	4.500	Petani	15.873	900	2.150	18.023	●
83	Peningkatan SDM petani peternak di pedesaan		Orang	4.100	0	1.500	5.600	●
84	<i>Terlatihnya ketrampilan pengolahan hasil pertanian pada kelompok wanita tani</i>		Orang	345	100	30	375	●

Keterangan :

● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Kera.

* : ASEM (Angka Sementara)

** : Target RPJMD telah tercapai dan Target RKPDP 2013 untuk peningkatan cakupan.

***: Minat petani menurun (karena harga fluktuatif).

Tabel capaian kinerja urusan pertanian diatas menunjukkan bahwa dari sebanyak 84 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD tahun 2008-2013, sejumlah 75 indikator berstatus telah tercapai, sebanyak 8 indikator berstatus belum tercapai, dan sebanyak 1 indikator belum diketahui status capaiannya.

Pada Tahun 2015 urusan pertanian diarahkan pada kegiatan peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan untuk mendukung ketersediaan pangan di masyarakat dan pengembangan komoditas unggulan daerah serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM penyuluh dan pengembangan Balai Penyuluhan Model dan Pos penyuluhan Pedesaan.

2) Kehutanan

Kinerja pembangunan Urusan Kehutanan ditunjukkan dengan 16 indikator kinerja, dengan capaian seperti pada Tabel 2.198.

Tabel 2.198.
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
I	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan							
1	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan 25.000 hektar per tahun (Total 125.000 Ha)	125.000	ha	316.914	25.000	107.095	424.009	●
2	Hutan rakyat di lahan kritis bertambah	125.000	ha	293.475	706.455	744.292	1.037.767	●
II	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan							
3	Meningkatnya jumlah perusahaan industri hasil hutan yang tertib 10 %/th	10% per tahun	%	19,79	10	10,15	17,86	●
III	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan							
4	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan 10% per tahun	10% per tahun	%	26,36	10	26,36	26,36	●
	- Getah (ton)		ton					
	- Kayu putih (ton)		ton					
	- Kopal (ton)		ton					
	Total HHBK							
	Jumlah standing stok hasil hutan kayu meningkat (Ha)		ha					
	- Produksi Hutan negara (m3)		m3					
	- Produksi Hutan rakyat (m3)		m3					
5	Meningkatnya kontribusi bagi hasil produksi hasil hutan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan 10% berdasar perkiraan bagi hasil tahun 2008	10	%	24,46% per tahun	21	17,95	23,15	●
	• Penerimaan PSDH (Rp)		Rp	40.743.729.936		27.745.452.929	32.941.011.508	
	• Pendapatan daerah dan masyarakat meningkat		Rp	16.700.000.000		6.700.000.000	13.551.985.904	
IV	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan							
6	Meningkatnya kualitas data & informasi sumber daya hutan dan sistem perencanaan pembangunan kehutanan dan pengembangan kehutanan	Tersedianya dokumen data dan informasi SDA 4 judul		Tersedia sesuai target 4 dok/thn		Buku Statistik	Buku Statistik	●
				Buku Database. Buku		Buku Database, Buku	Buku Database, Buku	

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
				Informasi. Buku NSDH		Informasi, Buku NSDH	Informasi, Buku NSDH	
V	Program Rehabilitasi. Perlindungan dan Konservasi Hutan							
7	<i>Terwujudnya pemantapan kawasan hutan berupa tata batas sepanjang 25 km per tahun. dan meningkatnya fungsi konservasi kawasan hutan.</i>	125	km	185.1	25	25,32	210,42	●
VI	Rehabilitasi & Pemulihan Cadangan Devisa Sumber Daya Alam							
	<i>Terwujudnya Pengelolaan hutan sesuai dengan fungsinya. terkendalinya bencana alam dari kawasan hutan. terkelolanya hutan yang bersertifikat lestari melalui:</i>							
8	<i>- Sertifikasi hutan (hutan negara dan hutan rakyat)</i>	10	unit	8	1	2	10	●
9	<i>- Pemulihan Hutan lindung yang rusak</i>	5	unit	11	2	2	13	●
10	<i>- Kawasan Konservasi meningkat fungsinya 1 unit per tahun</i>	5	unit	6	1	1	7	●
11	<i>- Paduserasi tata guna hutan dan tata ruang 4 kabupaten per tahun</i>	20	kab	22	4	4	26	●
VII	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam							
12	<i>Berkurangnya gangguan keamanan hutan 10% per tahun dan terkendalinya serangan organisme pengganggu tanaman.</i>	-10	%	20.85	-10	-41,97	-21,12	●
	• Pencurian hasil hutan (pohon)		pohon			11.074		
	• Kerugian Pencurian hasil hutan (Rp.)		Rp			7.026.314.000		
	• Kerugian Perambahan hutan		Rp			0		
	• Luas Kebakaran hutan (Ha)		ha			1.215,31		
	• Kerugian Kebakaran hutan (Rp)		Rp			2.818.783		
VIII	Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Sumber Daya Hutan							
13	<i>Terkendalinya pemanfaatan hasil hutan. flora dan fauna.</i>	Terkendali	Kab/ Kota	27	5	5	5	●
14	<i>Tersedia data pere-</i>	Tersedia	Doku	5	1	1	1	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPd Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPd 2013	Capaian Tahun 2013		
	<i>daras hasil hutan. flora dan fauna</i>		men					
	• Penangkar Rusa		unit			71	71	
	• Pengusaha TSL		unit			39	39	
	• Lembaga Konservasi		unit			23	23	
15	<i>Tertib tebangan di hutan produksi dan hutan rakyat</i>	tertib		Tertib		Tertib		●
	• Penggunaan dokumen SKSKB (set)		set			500		
	• Penggunaan dokumen SKAU (set)		set			-		
	• Penggunaan dokumen FA-KB (Pht) (set)		set			-		
IX	Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan							
16	<i>Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan secara lestari disekitar kawasan hutan Total 1.765 LMDH</i>	1.702	Unit	1.923	1.923	1.930	1.930	●

Keterangan :

● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Tabel capaian kinerja urusan kehutanan diatas menunjukkan bahwa dari sebanyak 16 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD tahun 2008-2013, capaian sampai dengan tahun 2013 semua indikator berstatus telah tercapai.

Pada Tahun 2015 urusan kehutanan diarahkan pada kegiatan rehabilitasi dan penanganan DAS serta pengembangan usaha hutan rakyat dan aneka usaha kehutanan; pemantapan pengendalian penatausahaan hasil hutan dan pemanfaatan hutan serta pengembangan pengelolaan hasil hutan, pemasaran hasil hutan dan restrukturisasi industri kehutanan; perencanaan, pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan; pengendalian pengelolaan kawasan konservasi, hutan lindung dan perlindungan serta pengamanan hutan serta pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat.

3) Energi dan Sumberdaya Mineral

Kinerja pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan dengan 27 indikator kinerja, dengan capaian seperti terlihat pada Tabel 2.199.

Tabel 2.199.
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
1	Program Peningkatan SDM Bidang Energi Sumberdaya Mineral							
	<i>Meningkatnya SDM Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</i>	<i>Meningkat</i>						
1	Penyertaan diklat teknis bagi 55 Orang		orang	502	300	176	678	●
II	Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah							
	<i>Meningkatnya perijinan usaha pertambangan dan air tanah, pembangunan demplot reklamasi lahan bekas pertambangan, penyusunan profil mineral unggulan, penyelenggaraan pameran pertambangan, penerapan teknologi tepat guna dan sumur bor pada daerah rawan kering</i>	<i>Meningkat</i>						
2	• Pembangunan 30 unit sumur bor	30	Sumur	63	3	7	70	●
3	• Penerapan teknologi tepat guna bagi 12 kelompok penambang	12	kelompok	13	6	6	19	●
4	• Penerbitan 140 Rekomendasi Wilayah Ijin Usaha Pertambangan dan ijin usaha pertambangan Khusus pengangkutan/penjualan	140	IUP/SI PD	155	5	8	163	●
5	• Pelaksanaan 12 kali pameran produk pertambangan	12	Kali	19	4	4	23	●
6	• Penyusunan 20 jenis profil mineral Unggulan	20	Jenis	24	0	0	24	●
7	• Penerbitan ijin pengambilan air tanah di 250 obyek	250	Obyek	2.426	0	0	2.426	●
III	Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas							
	<i>Meningkatnya Rasio Elektrifikasi (RE) Jateng dan optimalnya Pemanfaatan energi alternatif kurangnya penyimpangan distribusi migas bersubsidi</i>	<i>Meningkat</i>						
8	• Peningkatan Rasio elektrifikasi 10% (RE 67,19)	77,19	RE	79,98	79,97	85,29	85,29	●
		10	%	12,79	4,02	5,31	18,1	
9	• Pembangunan JTM 30 kms	30	Kms	22,7	11	9,528	32,228	●
10	• Pembangunan JTR 20 kms	20	Kms	26,32	1	6,778	33,098	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
11	• Pembangunan 8 unit PLTMH	8	Unit	9	1	1	10	●
12	• Pembangunan 1.400 unit PLTS SHS	1.400	Unit	2.637	200	228	2.865	●
13	• Pembangunan 3 unit PLTS komunal	3	Unit	4	2	2	6	●
14	• Identifikasi panas bumi di 5 komplek	5	Komplek	5	1	1	6	●
15	• Identifikasi potensi air di 9 lokasi	9	lokasi	6	4	3	9	●
16	• Identifikasi gas rawa di 11 lokasi	11	Lokasi	15	4	4	19	●
17	• Identifikasi biogas di 12 lokasi	12	Lokasi	36	6	11	47	●
18	• Identifikasi biomassa di 3 lokasi	3	Lokasi	1	2	2	3	●
19	• Identifikasi DME di 18 desa	18	Desa	49	13	13	62	●
20	• Demplot gas rawa di 5 lokasi	5	Lokasi	6	1	1	7	●
21	• Demplot biogas di 12 lokasi	12	Lokasi	44	10	11	55	●
22	• Desa Berlistrik 100 %	100	%	100	100	100	100	●
4	Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi							
	Tersedianya peta update potensi rawan longsor, peta rawan vulkanik, potensi rawan tektonik/ tsunami, geologi tata lingkungan,	Tersedia						
23	• Pemetaan Geologi Tata Lingkungan di 15 Kab./Kota	15	Kab/kota	15	0	0	15	●
24	• Update peta rawan longsor di 21 Kab/Kota	21	Kab/kota	27	0	0	27	●
25	• Pemetaan daerah rawan vulkanik di 4 Kab.	4	Kab/kota	8	7	5	13	●
26	• Sosialisasi mitigasi bencana alam geologi di 50 lokasi	50	Lokasi	54	9	9	63	●
27	• Pemetaan daerah rawan tektonik di 10 Kab.	10	Kab/kota	5	6	6	11	●

Keterangan :

● : Telah Tercapai; ▲ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

** : Target RPJMD telah tercapai dan Target RKPD 2013 untuk peningkatan cakupan.

Kinerja pembangunan urusan Energi dan Sumberdaya Mineral dapat dikategorikan dalam kondisi yang baik, terlihat dari sebanyak 27 indikator kinerja yang ditargetkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 semuanya berstatus telah tercapai.

Pada Tahun 2015 urusan energi dan sumber daya mineral diarahkan pada kegiatan pengawasan dan penertiban usaha

pertambahan di Jawa Tengah serta penyusunan zona pemanfaatan dan konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Jawa Tengah; pembangunan jaringan listrik pedesaan; pemetaan daerah lahan rawan bencana tanah longsor; serta pembangunan PLTS SHS, pengembangan Desa Mandiri Energi, pembangunan PLTMH, penyusunan *Detail Engineer Design* (DED) PLTMH, serta kajian potensi Energi Baru Terbarukan (EBT).

4) Pariwisata

Kinerja pembangunan Urusan Pariwisata ditunjukkan dengan 12 indikator kinerja, dengan capaian pada Tabel 2.200.

Tabel 2.200.
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
I	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata							
	<i>Peningkatan jumlah Kunjungan Wisatawan, rata-rata lama tinggal dan pengeluaran belanja wisarawan</i>							
1	Wisatawan Nusantara	Meningkat 5%/tahun	Orang	107.122.223	20.117.239	29.430.609	136.552.322	●
				12,38		46,29	27,47	
2	• Wisatawan Mancanegara	Meningkat 2%/tahun	% Orang	5,82 1.694.659		16,41 388.143	22,90 2.082.802	●
3	• Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	2,3	Hari	2,31	2,30	2,33	2,33	●
4	• Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	2,0	Hari	2,01	2	2,05	2,05	●
5	• Rata-rata pengeluaran belanja wisatawan mancanegara	200	US \$ per kunjungan	284,14	200	296,86	296,86	●
6	• Rata-rata pengeluaran belanja wisatawan nusantara	336.000	Rp/kunjungan	473.604	336.000	514,170	514,170	●
II	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata							
7	<i>Kualitas produk dan jasa pariwisata semakin meningkat:</i>	Meningkat		465	475	525	525	●
	• Biro Perjalanan		Buah	439	446	575	575	
	• Agen Perjalanan wisata		Buah	26	29	64	64	
8	<i>Kualitas jumlah sarana dan prasarana pariwisata serta Daya Tarik wisata semakin meningkat:</i>	Meningkat		3.434	3.052	3.250	3.250	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Targ et RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPd Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPd 2013	Capaian Tahun 2013		
9	<i>Kualitas sumber daya manusia pengelola obyek dan daya tarik wisata, pramuwisata dan para pelaku pariwisata lainnya meningkat</i>	<i>Meningkat</i>		21.769	21.773	18.749	18.749	●
	• tenaga kerja dibidang pariwisata		Orang	21.520	21.650	28.731	28.731	
	• Pramuwisata Madya		Orang	249	123	123	123	
	Program Pengembangan Kemitraan							
10	<i>Sinergi pengembangan pariwisata antara pemerintah, dunia usaha & masyarakat semakin meningkat</i>							●
	• Keterpaduan program Pembangunan Bidang Kebudayaan & Pariwisata antar Pemerintah Pusat-Provinsi- Kab./Kota & Antar Pelaku Pariwisata serta dengan Prov. Anggota MPU	35	Kab/kota	35	35	35	35	
	• Rencana dan kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Prov. dng Kab./Kota dlm rangka pemanfaatan aset pariwisata milik Pemda Jateng		Kab/kota	7	-	7	7	
11	<i>Peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan potensi pariwisata daerah semakin meningkat</i>		<i>Kelompok sadar wisata</i>	225	210	35	245	●
12	<i>Forum dan klaster pariwisata, lembaga/asosiasi / paguyuban pelaku pariwisata & kel. Masyarakat peduli pariwisata semakin kuat dan mandiri</i>			13	14	13	13	●
	Jumlah Forum/Klaster Masyarakat peduli pariwisata		Forum/Klaster	10	10	10	10	
	Jumlah Asosiasi/Lembaga Pariwisata		Asosiasi/Lembaga Pariwisata	3	4	3	3	

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ▲ : Akan Tercapai ; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pariwisata, dapat diketahui bahwa dari sebanyak 12 indikator yang ditargetkan pada RPJMD Tahun 2008-2013, semuanya berstatus telah tercapai.

5) Kelautan dan Perikanan

Kinerja pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan ditunjukkan dengan 16 indikator kinerja, dengan capaian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.201.

Tabel 2.201.
Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
I	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir							
	<i>Meningkatnya usaha:</i>							
1	<i>Petambak garam 250 orang,</i>	250	Orang	300	100	100	400	●
2	<i>Wanita pesisir 800 orang</i>	800	Orang	400	405	405	805	●
3	<i>Taruna pesisir 275 orang</i>	275	Orang	217	60	60	277	●
II	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan							
4	<i>Beraktifitasnya 21 kelompok kelembagaan masyarakat di bidang pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan</i>	21	Kelompok	100	1	1	101	●
5	<i>Terbentuknya 30 kelompok baru</i>	30	Kelompok	94	1	1	95	●
6	<i>Terlaksananya 50 kali operasi pengawasan</i>	50	Kali	60	5	5	65	●
III	Program Pengembangan Perikanan Tangkap							
7	<i>Meningkatnya Produksi Perikanan tangkap sebesar: 1% per tahun</i>	1	%/tahun	10,33% per tahun	205.796,29	224.178,50*	5,81	●
8	<i>Pendapatan nelayan (laut dan perairan umum) sebesar:</i>	0,93	Rp/ka pita/th	8.142.451	6.004.780	10.716.485*	13,17	●
IV	Program Pengembangan Perikanan Budidaya							
9	<i>Meningkatnya : Produksi perikanan budidaya sebesar:</i>	6,62	% per tahun	18,77% per tahun	177.333,8	292.862,35*	12,87	●
10	<i>Pendapatan pembudidaya ikan sebesar :</i>	6,59	Rp/ka pita/th	2.738.094	2.838.740	18.626.951*	94,41	●
V	Program Optimalisasi Pengolahan dan pemasaran Produksi Perikanan							
11	<i>Meningkatnya konsumsi makan ikan</i>	2,4	% per tahun	3,86% per tahun	17,82			
12	<i>Ekspor Produk Perikanan sebesar</i>	5,1 %/Tahun	Kg	8,20% per tahun	22.818.592,09	22.898.187,34*	5,81	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
6	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan perikanan							
	<i>Meningkatnya kualitas ekosistem vital di Pesisir/laut dengan :</i>							
13	<i>Penanaman pohon 1.017.500 biji/batang,</i>	1.017.500	biji/batang	991.510	323.000	304.250	1.295.760	●
14	<i>Terumbu karang buatan 225 unit</i>	225	unit	516	0	0	516	●
15	<i>Transplantasi karang 265 unit</i>	265	unit	222	60	60	282	●
16	<i>Penebaran benih ikan di kawasan konservasi/ calon kawasan konservasi</i>	1.017.500	ekor	2.921.450	246.000	400.000	3.321.450	●

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ▲ : Akan Tercapai ; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

* : ASEM (Angka Sementara)

** : Target RPJMD telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk peningkatan cakupan.

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan, dapat diketahui dari sebanyak 16 indikator yang ditargetkan pada RPJMD Tahun 2008-2013 semuanya berstatus telah tercapai.

Pada Tahun 2015 urusan kelautan dan perikanan diarahkan pada kegiatan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar pesisir, pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, pengembangan perikanan tangkap dan budidaya, optimalisasi pengolahan Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan serta Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

6) Perdagangan

Kinerja pembangunan Urusan Perdagangan ditunjukkan dengan 9 indikator kinerja, dengan capaian seperti Tabel 2.202.

Tabel 2.202.
Capaian kinerja Urusan Perdagangan

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
I	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor (2009-2013). Program Pengembangan Ekspor (2008)							
1	<i>Kegiatan ekspor non migas dengan pertumbuhan 8%-8,5% per tahun.</i>	Rata-rata 8-8,5% per tahun	(Juta US \$) %	10,13%	4.989	2.853	2.853	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPDP Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKPDP 2013	Capaian Tahun 2013		
2	Jumlah komoditas ekspor meningkat 15 jenis komoditas	15 jenis	Komoditi	28	2	2	30	●
3	Sertifikasi mutu barang 350 jenis	350	jenis	2.304	350	439	2.743	●
II	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional (2009-2013) / Program Pengembangan Ekspor (2008)							
4	Pengembangan kerjasama, misi dagang, kontrak dagang, dan promosi di 10 negara tujuan ekspor utama.	10	Event	16	2	2	18	●
III	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri (2009-2013) / Program Pemberdayaan dan Petaan Basis Produksi dan Distribusi (2008)							
5	Pembinaan terhadap pelaku usaha sebanyak 5000 UU	5.000	Unit usaha	4.508	697	1.320	5.828	●
6	pembangunan sarana pasar 25 unit	25	unit pasar	53	2	2	55	●
IV	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (2009-2013).							
7	Tera dan tera ulang 50.000 buah	50.000	buah	79.401	5.000	4.981	84.382	●
8	Pengawasan barang beredar pada pelaku usaha 2.500 UU	2500	UU	2.518	2.500	412	2.930	●
V	Program Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah (2009-2013) / Program Perluasan dan Penguatan Lembaga Pendukung UKM (2008)							
9	Pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha perdagangan sebanyak 5.000 UU.	5000	IKM	7.917	2.200	1.320	9.237	●

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ► : Akan Tercapai ; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

* : Target 2013 merupakan upaya pemenuhan Target RPJMD 2008 - 2013

** : Target RPJMD 2008 – 2013 telah tercapai dan target RKPDP 2013 untuk meningkatkan cakupan

Kinerja pembangunan urusan Perdagangan dapat dikategorikan dalam kondisi yang baik, terlihat dari sejumlah 9 indikator RPJMD tahun 2008-2013, semuanya berstatus tercapai.

7) Perindustrian

Kinerja pembangunan Urusan Perindustrian ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja, dengan capaian seperti Tabel 2.203.

Tabel 2.203.
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d th 2013	Status Capaian
					Target RKPD 2013	Capaian Tahun 2013		
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berbasis pada Sumber Daya Lokal (2009-2013)							
	Program Perluasan dan Penguatan Lembaga Pendukung UKM (2008)							
1	Pengembangan produk unggulan daerah 35 jenis produk.	35	jenis produk	30	6	6	36	●
2	Penurunan kandungan bahan baku impor pada IKM 20%-40%.	20-40	%	32	40			
2	Program Pengembangan Sentra/Klaster Industri Potensial (2009-2013)							
	Pengembangan klaster industri penghela 6 klaster dan klaster pendukung lainnya.	6	klaster	14	6	6	20	●
3	Program Penataan Struktur Industri (2009-2013)							
	Pembinaan terhadap IKM sebanyak 1.500 Unit	1.500	IKM	17.651	2.938	2.048	19.699	●
4	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri (2009-2013)							
	Pembinaan dan bimbingan teknis terhadap 1.000 UU IKM.	1.000	IKM	903	330	330	1.233	●
5	Program Peningkatan SDM, Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri							
	Pendidikan dan latihan terhadap 3.000 unit usaha IKM dan penyaluran bantuan peralatan	3.000 0	IKM KUB	24.708 755	1.030 84	3.235 128	27.943	●

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ▲ : Akan Tercapai ; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

* : Target 2013 merupakan upaya pemenuhan Target RPJMD 2008 - 2013

** : Target RPJMD 2008 - 2013 telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk meningkatkan cakupan

Kinerja pembangunan urusan perindustrian dapat dikategorikan dalam kondisi yang baik, terlihat dari sebanyak 6 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 berstatus telah tercapai.

8) Transmigrasi

Kinerja pembangunan Urusan Transmigrasi ditunjukkan dengan 5 indikator kinerja, sebagaimana Tabel 2.204.

Tabel 2.204.
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2008-2013	Satuan	Kinerja 2008 s/d 2012	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013		Kinerja 2008 s/d 2013	Status
					Target RKP 2013	Capaian Tahun 2013		
A	Pengembangan wilayah transmigrasi							
1	Terwujudnya koordinasi & sinkronisasi antar wilayah dalam penyelenggaraan transmigrasi di 19 Provinsi lokasi transmigrasi di luar Jawa	19	Provinsi	19	8	10	29	●
2	Nota kesepakatan kerjasama antar wilayah dalam pengembangan kawasan transmigrasi	19	Provinsi / naskah KSAD	19/349	8/81	10/83	19/432	●
3	Tercapainya pengiriman Transmigran 7500 KK	7.500	KK	3.796	560	471	4.267	▼
4	Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan dan pelayanan transmigran	35	Kab/Kota	25	35	35	35	●
5	Tercapainya 7.500 KK calon transmigran mendapatkan Pelatihan Dasar Hukum (PDU)	2500	KK	3.064	650	415	3.475	●

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ► : Akan Tercapai ; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Kinerja pembangunan urusan ketransmigrasian dapat dikategorikan dalam kondisi yang baik, terlihat dari sebanyak 5 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 berstatus telah tercapai.

2.3. Evaluasi Capaian MDG's

Selain memperhatikan gambaran umum kondisi daerah yang telah diuraikan di atas, perlu juga untuk memperhatikan capaian MDG's hingga Tahun 2013. Berikut hasil capaian MDG's di Provinsi Jawa Tengah pada setiap tujuan/Goal.

1) Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan

Tujuan ini terdiri dari 3 target dan 10 indikator yang harus dicapai hingga Tahun 2015. Capaian tahun 2013, dari 10 indikator, 4 indikator telah tercapai; 3 indikator akan tercapai; dan 3 indikator perlu perhatian.

Indikator yang perlu perhatian adalah : (1) persentase penduduk miskin; (2) proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum 1.400 Kkal/kapita/hr; dan (3) proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum 2.000 Kkal/kapita/hr.

Tabel 2.205.
Capaian Indikator MDG's Tujuan 1

NO	INDIKATOR	Tahun 2011	Tahun 2012		Tahun 2013		Target MDGs 2015	Status
			T	R	T	R		
Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015								
1.1	Tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional.							
	Persentase	16,21	13,44	14,98	11,88	14,44 (Sept)	8,75	▼
1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,579	2,17	2,388	2,03	2,209 (Maret)	1,77	▶
Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda								
1.3	Laju PDRB per tenaga kerja	5,30%	3,25% - 3,6%	4,96%	3,58%- 4,05%	4,96 (2012)	4,25% - 4,95%	●
1.4	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	66,58%	67,43%	67,38%	68,44%	66,46% (Agst 2013)	70,38%	▶
1.5	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	53,93%	57,45%	54,93% (Feb 2012)	56,74%	44,99% (Agst 2013)	55,35%	●
Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015								
1.6	Prevalensi balita dgn berat badan rendah / kekurangan gizi	12,13%	15,04%	12,13% (2011)	14,71%	12,13% (2011)	14,05%	●
1.6a	Prevalensi balita gizi buruk	0,13%	2,84%	0,05%	2,61%	0,05% (2012)	2,15%	●
1.6b	Prevalensi balita gizi kurang	9,87%	12,20%	6,80%	12,10%	6,80% (2012)	11,90%	▶
1.7	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkatKonsumsi minimum:							
	- 1.400 Kkal/kapita/hr	18,87%	12,98%	18,87% (2011)	11,86%	19,58% (2012)	8,50%	▼
	- 2.000 Kkal/kapita/hr	70,11%	51,10%	70,11% (2011)	45,84%	69,27% (2012)	35,32%	▼

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ▶ : Akan Tercapai ; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

2) Tujuan 2. Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua

Tujuan ini terdiri dari 1 target dan 4 indikator yang harus dicapai hingga Tahun 2015. Capaian tahun 2013, dari 4 indikator tersebut, 4 indikator akan tercapai.

Tabel 2.206.
Capaian Indikator MDG's Tujuan 2

NO	INDIKATOR	Tahun 2011	Tahun 2012		Tahun 2013		Target MDGs 2015	Status
			T	R	T	R		
Target 2 A : Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar								
2.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI sederajat (%)	96,04	98,25	98,30	98,83	98,60	100	▶
2.2	Proporsi murid kelas 1 yg berhasil menamatkan SD/MI.	99,78 (2010)	99,87	99,78 (2010)	99,91	-	100	▶
2.3	Angka Melek Huruf penduduk usia 15 – 24 th perempuan dan laki-laki							
	- Laki-laki	100	100	100	100	99,40 (2012)	100	▶
	- Perempuan	100	100	100	100	99,55 (2012)	100	▶

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ▶ : Akan Tercapai ; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

3) Tujuan 3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Tujuan ini terdiri dari 1 target dan 7 indikator yang harus dicapai hingga Tahun 2015. Capaian tahun 2013, dari 7 indikator tersebut, 2 indikator telah tercapai, 4 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu perhatian. Indikator yang perlu perhatian adalah kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian.

Tabel 2.207.
Capaian Indikator MDG's Tujuan 3

NO	INDIKATOR	Tahun 2011	Tahun 2012		Tahun 2013		Target MDGs 2015	Status
			T	R	T	R		
Target 3 A : Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015								
3.1	Rasio Perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar menengah dan tinggi.							
	Rasio APM perempuan/laki-laki SD/MI/Paket A	98,13	99,61	98,13 (2011)	99,75	99,98 (2012)	100	▶
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	105,95	102,38	105,95 (2011)	101,47	105,57 (2012)	100	▶
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	100,82	98,91	100,82 (2011)	99,28	92,91 (2012)	100	▶
	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	90,34	114,93	90,34 (2011)	109,95	90,34 (2011)	100	▶
3.2	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun.	100,01	100	100,01 (2011)	100	100,16 (2012)	100	●

NO	INDIKATOR	Tahun 2011	Tahun 2012		Tahun 2013		Target MDGs 2015	Status
			T	R	T	R		
3.3	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian.	42,56	66,11	42,56 (2011)	66,31	42,56 (2011)	Meningkat	▼
3.4	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD.	21,00%	14,75%	21,00% (2011)	14,75	21,00% (2011)	Meningkat	●

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ► : Akan Tercapai ; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

4) Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak

Tujuan ini terdiri dari 1 target dan 6 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015. Capaian Tahun 2013, dari 6 indikator tersebut, 3 indikator telah tercapai dan 3 indikator akan tercapai.

Tabel 2.208.
Capaian Indikator MDG's Tujuan 4

NO	INDIKATOR	Tahun 2011	Tahun 2012		Tahun 2013		Target MDGs 2015	Status
			T	R	T	R		
Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak								
Target 4 A : Mengurangi 2/3 angka kematian balita dalam kurun waktu 1990 dan 2015								
4.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	10,34	9	10,75	11,95	10,75 (2012) 3.759 kasus (Tw III 2013)	8,5	►
	- Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1).	98,01	92	99,56	85,00	99,56 (2012)	96,00	●
	- Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi.	94,14 (2010)	96	96,95	8,9	96,95 (2012) 61,02 (Tw III 2013)	98,00	►
4.2	Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 kelahiran hidup.	11,50	12	11,85	93,00	11,85 (2012) 4.254 kasus (Tw III 2013)	11,85	●
	- Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.	81,02	83	81,02 (2011)	97,00	81,02 (2011)	90,00	►
4.3	Proporsi anak berusia 1 tahun diimunisasi campak.	94,58%	95%	94,58% (2011)	95%	94,58% (2011)	95%	●

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ► : Akan Tercapai ; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

5) Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu

Tujuan ini terdiri dari 2 target dan 6 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015. Capaian tahun 2013, dari 6 indikator tersebut, 1 indikator sudah tercapai, 3 indikator akan tercapai, dan 2 indikator perlu perhatian. Indikator yang perlu perhatian tersebut adalah : (1) angka kematian ibu, dan (2) *unmetneed* KB.

Tabel 2.209.
Capaian Indikator MDG's Tujuan 5

NO	INDIKATOR	Tahun 2011	Tahun 2012		Tahun 2013		Target MDGs 2015	Status
			T	R	T	R		
Target 5A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga perempat dalam kurun waktu 1990 – 2015								
5.1	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	116,01	90	116,34	80	116,34 (2012) 515 kasus (Tw III 2013)	60	▼

NO	INDIKATOR	Tahun 2011	Tahun 2012		Tahun 2013		Target MDGs 2015	Status
			T	R	T	R		
5.2	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (%)	96,79	99	97,14	100	97,14 (2012)	100	▶
Target 5B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015								
5.3	Angka pemakaian kontrasepsi/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun (Cara Modern)	79,32	67,9	79,92	69,2%	79,92 (2012)	70,60	●
5.4	Tingkat kelahiran pada remaja (per 1.000 perempuan usia 15 - 19 tahun)	25,30 (2010)	24,2	25,30 (2010)	23,7%	25,30 (2010)	22,92	▶
5.5	Cakupan pelayanan antenatal (K4)	93,70	93	92,99	94	92,99 (2012)	95	▶
5.6	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	10,95	8,40	10,50	7,00	10,50 (2012)	4,1	▼

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ▶ : Akan Tercapai ; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

6) Tujuan 6 : Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya

Tujuan ini terdiri dari 3 target dan 12 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015. Capaian tahun 2013, dari 12 indikator tersebut, 6 indikator telah tercapai, 3 indikator akan tercapai, dan 3 indikator perlu perhatian.

Indikator yang perlu perhatian adalah : (1) penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi; (2) proporsi penduduk usia 15 – 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS; dan (3) proporsi kasus TB.

Tabel 2.210.
Capaian Indikator MDG's Tujuan 6

NO	INDIKATOR	Tahun 2011	Tahun 2012		Tahun 2013		Target MDGs 2015	Status
			T	R	T	R		
Tujuan 6 : Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya								
Target 6A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS pada tahun 2015								
6.1	Prevalensi HIV pada penduduk usia 15 – 24 tahun	0,29	0,4	0,29 (2011)	0,45	0,29 (2011)	<0,5	●
6.2	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi	33%	45%	37,60%	55%	37,60% (2012)	70%	▼
6.3	Proporsi penduduk usia 15-24 th yang memiliki pengetahuan komprehensif ttg HIV/AIDS	32%	70%	21,25%	75%	21,25% (2012)	85%	▼
Target 6B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV / AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015								

NO	INDIKATOR	Tahun 2011	Tahun 2012		Tahun 2013		Target MDGs 2015	Status
			T	R	T	R		
6.4	Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral	88,99%	80%	88,52%	85%	88,52% (2012)	95%	
Target 6C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya (Tuberculosis) hingga tahun 2015								
6.5	Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/100.000 penduduk/tahun)	117	101	82,56	96	82,56 (2012)	88	
6.6	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	119	228	119	226	119 (2012)	219	
6.7	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 pend)	2,25	<4,5	1,96	<4	1,96 (2012)	<3	
6.8	Proporsi kasus TB yang ditemukan melalui DOTS	59,52%	75%	58,45%	80	58,45% (2012) 18,93 (Tw III 2013)	90%	
6.9	Proporsi kasus TB yg disembuhkan melalui DOTS (cure rate)	90,13%	87%	88,64%	88	88,64% (2012) 81,64% (Tw III 2013)	90%	
6.10	Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk	0,106	0,025	0,77	0,02	0,77 (2012)	0,01	
	Penyakit Menular Lainnya: DBD **)							
6.11	Angka Kesakitan DBD (per 100.000 penduduk)	15,27%	50%	19,29%	45	19,29% (2012) 38,30 (Tw III 2013)	35%	
6.12	Angka Kematian DBD	0,93	1	0,07	1	0,07 (2012)	1	

Keterangan :

: Telah Tercapai ; : Akan Tercapai ; : Perlu Perhatian/Upaya Keras

7) Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Tujuan ini terdiri dari 4 target dan 9 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015. Capaian tahun 2013, dari 9 indikator tersebut semuanya akan tercapai.

Tabel 2.211.
Capaian Indikator MDG's Tujuan 7

NO	INDIKATOR	Tahun 2011	Tahun 2012		Tahun 2013		Target MDGs 2015	Status
			T	R	T	R		
Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup								
Target 7A : Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang								
7.1	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	32% (2010)	32,20%	32% (2010)	32,60%	32% (2010)	33%	▶
7.2	Jumlah emisi karbondioksida (CO2)	30.718 Gg CO2e (2008)	31.000 Gg CO2e	30.718 Gg CO2e (2008)	31,150 Gg CO2e	30.718 Gg CO2e (2008)	Berkurang 2% pada th 2029 atau 31.500 Gg CO2 e (2015) dgn tutupan lahan sama dgn kondisi th 2010	▶
7.3	Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO)	28,4 ton (2010)	27,83 Ton	28,4 ton (2010)	27,56 ton	28,4 ton (2010)	Jumlah konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) menjadi 27,01 ton	▶
7.4	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	102,3 (2008)	101,38	102,3 (2008)	100,92%	102,3 (2008)	100	▶
Target 7B : Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010								
7.5	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	22,34% (2010) (kawasan hutan terdiri dari hutan rakyat dan hutan Negara)	22,34% (2010) (kualitas tutupan pepohonan ditargetkan sebesar 2% melalui pelestarian keanekaragaman hayati dengan penanaman 30 jenis tanaman langka dan perbaikan kawasan lindung di luar kawasan Hutan seluas 270 Ha)	22,34% (2010) (Peningkatan kualitas tutupan pepohonan melalui pelestarian keanekaragaman hayati dengan penanaman 62 jenis tanaman langka dan perbaikan kawasan lindung di luar kawasan hutan seluas 599,49 Ha)	22,34% Tutupan pohon pada kawasan lindung meningkat 3% dari tahun 2010	22,34% (2010) (Peningkatan kualitas tutupan pepohonan melalui pelestarian keanekaragaman hayati dengan penanaman 62 jenis tanaman langka dan perbaikan kawasan lindung di luar kawasan hutan seluas 599,49 Ha)	22,34% (tetap), tutupan pohon pd kaw lindung meningkat 5% dari th 2010	▶

NO	INDIKATOR	Tahun 2011	Tahun 2012		Tahun 2013		Target MDGs 2015	Status
			T	R	T	R		
7.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	0,000093 % (2010)	Luas kaw konservasi bertmbh Krg Jeruk, Kab Tegal 52 ha) dan kualitas kaw lindung meningkat 2% dr th 2010	0,000093 % (2010)	Kualitas kawasan lindung meningkat 3% dari tahun 2010	0,000093% (2010)	Meningkat 0,032% dg bertambah nya luasan kawsn lindung perairan Ujung Negro Batang seluas 49,425 ha	▶
Target 7C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015.								
7.7	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	46,61%	-	46,61% (2011)	-	-	57,72%	
	Perkotaan	38% (2010)	62,50%	38,90%	63,50%	63,99% (2013)	75%	▶
	Perdesaan	16,3% (2010)	23,60%	18%	38,2%	49,13% (2013)	52,80%	▶
7.8	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar, perkotaan dan perdesaan	58,40%	63%	60,50%	66%	64,50%	72%	▶
Target 7D : Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020								
7.9	Proporsi rumahtangga kumuh perkotaan	3,70%	4,89%	3,70% (2011)	4,85%	4,81% (2013)	4,76%	▶

Keterangan :

● : Telah Tercapai ; ▶ : Akan Tercapai ; ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

2.4. Lingkungan Strategis

1. Internal

a. Kekuatan (*Strength*)

1) Geo-Strategis

Letak Jawa Tengah yang berada di antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur menjadi salah satu kekuatan strategis dalam mendukung pembangunan daerah Jawa Tengah. Selain itu juga, Jawa Tengah termasuk dalam jalur transportasi utama yang menghubungkan antar pusat-pusat pertumbuhan dan sebagai jalur distribusi barang dan jasa yang strategis di Pulau Jawa.

Keragaman hayati yang didukung dengan potensi sumberdaya alam yang beragam, menjadikan wilayah Jawa Tengah cukup strategis sebagai wilayah penyangga kehidupan

di Pulau Jawa. Dengan didominasi oleh potensi pertanian yang tersebar di hampir seluruh wilayah Jawa Tengah, menjadikan Jawa Tengah memiliki kekuatan geostrategis sebagai basis utama politik pertanian nasional.

Kekuatan lainnya yang dimiliki adalah kondisi topografi yang terdiri dari daratan yang terbentang di sepanjang pantai utara dan selatan, serta pegunungan yang terbentang di daerah tengah. Karakter topografi inilah yang membentuk pola hidrologi dan iklim yang sangat baik, dan mendukung pengembangan pertanian sebagai sektor utama pembangunan Jawa Tengah, serta menjadi penyeimbang bagi lingkungan di wilayah provinsi sekitar sebagai satu kesatuan *bio region* Pulau Jawa.

2) Sumber Daya Manusia

Salah satu kekuatan besar yang dimiliki Jawa Tengah dalam mendukung pembangunan adalah jumlah penduduk yang cukup banyak (urutan ke-4 terbanyak secara nasional), yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Bukan hanya jumlah penduduk yang besar, namun didukung dengan kualitas dan kapasitas penduduk yang baik, yang ditunjukkan dengan IPM yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dapat menjadi kekuatan strategis untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Tengah.

Kekuatan lain yang dimiliki masyarakat Jawa Tengah adalah karakter masyarakat yang kuat dan berbudaya, mengedepankan tenggang rasa, *tepo seliro*, gotong royong, dan pekerja keras, serta tetap melestarikan kearifan lokal yang beragam warisan nenek moyang. Kekuatan ini dapat menjadi modal dasar pada pembentukan masyarakat Jawa Tengah yang berbudaya menuju pada cita-cita pembangunan Jawa Tengah yang berkepribadian dalam kebudayaan.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1) Kependudukan

Jumlah penduduk Jawa Tengah yang cukup besar, tetapi tidak diiringi dengan penyebaran penduduk secara merata dan tingkat pendidikan yang masih rendah, dapat menjadi kelemahan yang dimiliki Jawa Tengah dalam proses pembangunan ke depan. Kondisi ini dapat dilihat dengan tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata pada 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah dan tingkat pendidikan tenaga kerja masih didominasi penduduk lulus SD. Selain itu penyebaran penduduk yang lebih terfokus di daerah perkotaan, juga menjadi kendala dalam proses pembangunan Jawa Tengah. Situasi tersebut dapat menggambarkan tumbuhnya

kantong-kantong ekonomi yang tidak seimbang antara perkotaan dan pedesaan.

Masih tingginya jumlah penduduk miskin dan penganggur di Jawa Tengah menjadi tugas rumah yang cukup besar untuk segera diselesaikan dalam proses membangun Jawa Tengah ke depan. Hingga Tahun 2013, jumlah penduduk miskin Jawa Tengah mencapai 4,704 juta orang atau 14,44% dari total penduduk Jawa Tengah. Selain itu, angka pengangguran juga masih cukup tinggi yaitu sebesar 1,022 juta orang atau 6,02% dari total angkatan kerja.

Kondisi ini berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah secara ekonomi maupun sosial yang berada di bawah standar hidup layak, serta keterbatasan akses masyarakat pada sumber-sumber penghidupan yang lebih baik. Hal ini merupakan kelemahan Jawa Tengah yang harus segera dilakukan penyelesaian strategis agar percepatan pembangunan menuju masyarakat sejahtera dapat terwujud.

2) Kesenjangan Wilayah

Kesenjangan wilayah digambarkan dengan Indeks Williamson yang menunjukkan angka mendekati 1, yang artinya kesenjangan wilayah di Jawa Tengah masih cukup tinggi dan menjadi kelemahan dalam proses pembangunan Jawa Tengah ke depan. Kesenjangan wilayah di sini, ditunjukkan dengan ketidakmerataan penyebaran penduduk, sumber-sumber ekonomi, infrastruktur, serta sarana sosial yang mendukung kehidupan masyarakat seperti sarana pendidikan dan kesehatan.

Hal ini juga terjadi disebabkan oleh luasnya wilayah Jawa Tengah, tetapi tidak didukung dengan kebijakan pembangunan wilayah yang adil, hingga ke pelosok daerah. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam upaya pengembangan wilayah sebagai upaya pengurangan kesenjangan wilayah, terutama kesenjangan wilayah antara Pantura dan Pansela, serta wilayah timur dan barat. Untuk itu, perlu penyikapan yang baik dan konsisten guna memberikan solusi terbaik, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan Jawa Tengah untuk masyarakat secara adil dan merata.

3) Birokrasi

Disharmonis kebijakan pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi kendala besar dalam proses membangun Jawa Tengah. Di era otonomi daerah, masih terdapat kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang tidak sinergis. Hal ini antara lain disebabkan belum kewenangan penanganan untuk beberapa urusan pembangunan pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Selain itu kualitas sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai menjadi salah satu penyebab produk kebijakan pemerintah yang kurang efektif. Disisi lain penetapan kebijakan anggaran yang kurang proporsional dan belum sepenuhnya mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat, menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan hakiki dari pelaksanaan pembangunan.

2. Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

1) Ekonomi Global

Terbukanya pasar bebas di era globalisasi baik regional maupun internasional, seperti *ASEAN Economic Community* (AEC) dan *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA), menjadi potensi dan peluang untuk meningkatkan perekonomian nasional dan daerah. Peluang akses pasar untuk produk-produk Indonesia termasuk Jawa Tengah terbuka cukup besar, terutama ke Cina, yang berpenduduk lebih besar dari Eropa. Sementara dengan diberlakukannya AEC 2015, maka peluang kerja-sama perdagangan serta pintu pasar dengan negara-negara ASEAN juga semakin terbuka bebas.

Dengan semakin terbukanya peluang dan pangsa pasar global, serta diiringi kebutuhan akan produk-produk yang hanya dihasilkan di Indonesia, maka peluang Jawa Tengah untuk meningkatkan nilai tambah pada produk lokal dan khas juga semakin tinggi. Peluang inilah yang harus bisa ditangkap dan dimanfaatkan oleh Jawa Tengah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

2) Perkembangan Teknologi

Teknologi saat ini telah menguasai dunia. Dengan teknologi yang semakin maju dan tak terbatas, terutama teknologi informasi, menjadikan akses informasi ke seluruh belahan dunia mudah didapatkan. Hal ini menjadi peluang besar bagi Indonesia dan Jawa Tengah pada khususnya, guna mempromosikan produk barang dan jasa lokal ke seluruh mancanegara.

Selain itu, sejalan dengan kemajuan teknologi di berbagai bidang pembangunan lainnya, juga merupakan peluang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas serta produktivitas produk-produk lokal, sehingga mampu memberikan nilai tambah dan mengembangkan varian produk-produk lokal yang mampu bersaing di pasar global.

b. Ancaman (*Threat*)

1) Globalisasi

Globalisasi sebagai sebuah bentuk proses interaksi antar individu dan negara tanpa dibatasi wilayah teritorial

administratif, tidak hanya membuka peluang positif bagi relasi Indonesia dengan negara-negara lainnya di dunia, tetapi juga memberikan akses negatif bagi perkembangan karakter dan budaya bangsa. Selain itu, globalisasi kerap menjadi sumber pemiskinan ekonomi suatu negara, apabila tidak dibarengi dengan proteksi yang kuat dari negara tersebut.

Kondisi yang terjadi saat ini, krisis Eropa belum menemui titik terang serta perekonomian AS belum sepenuhnya pulih. Hal ini akan berdampak pada ekonomi dunia yang semakin sulit diprediksi.

Disamping itu, dengan berlakunya AEC perlu diwaspadai dampak negatif yang mungkin muncul, antara lain membanjirnya produk-produk negara-negara anggota ASEAN. Jika hal ini tidak disikapi dengan upaya-upaya pengamanan dan perlindungan produk dalam negeri secara bijak, maka tidak menutup kemungkinan AEC dapat mengancam perekonomian Indonesia terutama di daerah.

2) Perubahan Iklim

Fenomena perubahan iklim merupakan fenomena global yang dapat mengancam penghidupan dan kehidupan manusia. Perubahan iklim yang terjadi di Indonesia umumnya ditandai adanya perubahan temperatur rerata harian, pola curah hujan, tinggi muka laut, dan variabilitas iklim (misalnya *El Niño*, *La Niña* dan *Indian Dipole*). Perubahan ini memberi dampak serius terhadap berbagai sektor di Indonesia, misalnya kesehatan, pertanian, perekonomian dan lain-lain.

Anomali cuaca tersebut mempengaruhi produksi dan produktivitas pertanian, yang berdampak pada upaya meningkatkan dan memantapkan ketersediaan pangan. Selain itu di wilayah pesisir, fenomena perubahan iklim menjadi ancaman hebat karena berpengaruh terhadap kenaikan suhu air laut dan tinggi rata-rata permukaan air laut.

Kejadian bencana banjir dan tanah longsor juga menjadi indikasi tingginya ancaman kehidupan di Jawa Tengah. Dari tahun ke tahun, frekuensi kejadian bencana tersebut semakin meningkat. Tidak hanya diakibatkan oleh alam, namun bencana ini lebih banyak akibat ulah manusia yang memberikan andil pada terjadinya fenomena perubahan iklim di dunia. Ancaman ini harus diwaspadai dengan menerapkan mitigasi dan adaptasi yang baik terhadap perubahan iklim terutama untuk Indonesia yang rawan terhadap dampak perubahan iklim dunia.

2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan berdasarkan hasil gambaran umum kondisi daerah dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, serta mendasarkan pada hasil evaluasi RKPD Tahun 2013. Hasil proses identifikasi permasalahan ini kemudian dikerucutkan menjadi isu strategis daerah dengan memperhatikan capaian MDGs dan lingkungan strategis daerah.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta dengan memperhatikan hasil evaluasi RKPD Tahun 2013, capaian MDG's dan lingkungan strategis, maka **permasalahan pembangunan daerah** Jawa Tengah yang teridentifikasi dilihat dari aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, lingkungan hidup, dan pemerintahan adalah :

- 1) Masih cukup tingginya jumlah penduduk miskin;
- 2) Cukup banyaknya jumlah pengangguran yang disebabkan terbatasnya lapangan kerja, jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja, dan pendidikan tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan pasar kerja;
- 3) Belum optimalnya upaya pemenuhan kesejahteraan pekerja terkait dengan pemenuhan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), jaminan sosial tenaga kerja, dan perlindungan tenaga kerja;
- 4) Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan;
- 5) Masih cukup rendahnya derajat kesehatan masyarakat terutama terkait kematian ibu dan bayi, balita dengan gizi buruk, dan penyakit menular;
- 6) Belum optimalnya penanganan PMKS;
- 7) Masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta belum optimalnya strategi pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam sistem birokrasi dan semua pranatanya;
- 8) Kecenderungan semakin mudarnya nilai adiluhung Jawa sebagai karakter dalam pembentukan kepribadian, dan dalam kehidupan sehari-hari;
- 9) Masih tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat dan kesenjangan antar wilayah;
- 10) Masih cukup tingginya kecenderungan ketergantungan terhadap energi fosil, serta pelayanan jaringan listrik untuk masyarakat yang belum optimal;
- 11) Belum optimalnya upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat secara berdaulat, baik dari ketersediaan, distribusi, maupun diversifikasi;
- 12) Belum optimalnya upaya peningkatan investasi yang disebabkan kurangnya informasi dan promosi investasi; serta kepastian dan kemudahan pengurusan perijinan, regulasi dan waktu pengurusan;

- 13) Keberadaan koperasi dan UMKM yang belum optimal dalam perannya sebagai salah satu penyangga dan penggerak perekonomian daerah, terkait dengan kelembagaan, SDM, akses pasar dan modal, serta kualitas produk;
- 14) Belum optimalnya pengembangan pariwisata, terutama terkait pengembangan daya saing obyek wisata daerah, dan SDM;
- 15) Masih belum optimalnya pengelolaan aset daerah, yang ditunjukkan dengan masih banyaknya *asset idle*, serta kontribusi aset yang belum signifikan dalam peningkatan pendapatan daerah;
- 16) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mendukung perwujudan reformasi birokrasi;
- 17) Masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, serta masih belum optimalnya peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat terutama pemilih pemula;
- 18) Masih perlunya peningkatan peran pemerintah bersama masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah;
- 19) Belum optimalnya kualitas pelayanan infrastruktur yang sejalan dengan dinamika aktivitas kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya, politik dan pengembangan wilayah;
- 20) Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang ditandai dengan meningkatkan kerusakan ekosistem teresterial dan pesisir-laut, serta meningkatnya pencemaran lingkungan hidup;
- 21) Belum optimalnya upaya-upaya penanggulangan bencana baik untuk pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana, serta belum meratanya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.

2.6. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Jawa Tengah, serta dengan memperhatikan lingkungan strategis daerah, maka dapat dirumuskan **isu strategis pembangunan Jawa Tengah tahun 2015** sebagai berikut :

1. Pengurangan Kemiskinan

Isu kemiskinan hingga saat ini masih tetap menjadi isu yang belum teratasi hingga tuntas. Fenomena empiris secara historis mengemuka bahwa akar kemiskinan terletak dalam hubungan-hubungan kekuasaan (*power relations*) yang terbentuk dari cara produksi – konsumsi manusia terhadap sumberdaya strategis, antara lain berupa tanah, air, dan udara; akses pembangunan seperti keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik; serta ruang dan waktu.

Selain itu, kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui pelibatan atau dukungan seluruh pemangku kepentingan. Mengingat jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah masih cukup banyak dan progres penurunannya cenderung lambat, maka upaya penanggulangan kemiskinan perlu lebih dipacu melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan. Sejalan dengan hal tersebut perlu dilakukan pula pemberdayaan ekonomi masyarakat, perkuatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan pendayagunaan sumber daya potensial, pengembangan jejaring kemitraan, serta peningkatan kemampuan dan ketrampilan agar penduduk miskin mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri.

2. Pengurangan Pengangguran

Isu pengangguran di Jawa Tengah hingga saat ini juga perlu mendapat perhatian mengingat pengangguran berkaitan dengan kemiskinan. Memperhatikan kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah saat ini, terjadi fenomena pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke non pertanian seperti sektor industri pengolahan dan perdagangan.

Dengan melihat kondisi tersebut, maka penanganan pengangguran di Jawa Tengah berfokus pada upaya perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan kelompok petani (buruh tani dan petani penggarap), nelayan, masyarakat terkena PHK, anak putus sekolah dan sektor UMKM. Selain itu, perlu diupayakan perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha, peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas prasarana sarana dan pengelola Balai Latihan Kerja (BLK), pendidikan yang berorientasi pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja, serta pengembangan wirausaha baru sektor UMKM berbasis sumber daya lokal termasuk kewirausahaan di kalangan pemuda.

Upaya penanganan pengangguran dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang pada akhirnya aspek-aspek produktif tersebut diharapkan mampu menjamin keberlanjutan pasar tenaga kerja.

3. Pembangunan Infrastruktur

Meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah, baik secara regional, nasional maupun internasional, membuat semakin tinggi dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Selain itu, infrastruktur juga terkait erat dengan

koneksitas regional dan nasional, yang mendukung penguatan posisi Jawa Tengah secara regional dan nasional. Dalam hal ini tidak terbatas pada infrastruktur fisik namun juga terintegrasi dengan infrastruktur non fisik dan teknologi informasi, sehingga ke depan partisipasi, transparansi dan ketepatan manfaat akan menjadi lebih baik. Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi serta masih adanya kesenjangan antar wilayah, memerlukan pengembangan infrastruktur secara terpadu, integral dan lintas sektor yang sinergis dengan rencana tata ruang

Belum optimalnya kondisi infrastruktur di Provinsi Jawa Tengah dalam mengimbangi dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta wilayah, berimplikasi pada beban masyarakat dalam penyediaan produksi dan mobilisasi sumberdaya, baik di lingkup regional Jawa Tengah maupun nasional. Permasalahan lainnya adalah adanya kesenjangan antar wilayah terutama antara wilayah pantai utara dan pantai selatan Jawa Tengah yang memerlukan pembenahan infrastruktur secara massif, agar memberikan dampak positif pada pengurangan beban mobilisasi sumber-sumber produksi di wilayah penghubung antar kabupaten/kota di wilayah pantai utara dan pantai selatan Jawa Tengah. Selain itu, pengembangan dan pembenahan sarana transportasi publik juga menjadi hal penting guna mengurangi beban arus distribusi dan akan berefek domino pada koneksitas antar wilayah yang semakin kuat.

Kondisi lain yang perlu diperhatikan adalah rasio elektrifikasi di Jawa Tengah, mengingat terutama di wilayah perdesaan masih belum sepenuhnya terlayani pasokan listrik. Untuk itu pembangunan infrastruktur energi perlu ditingkatkan melalui pembangunan jaringan listrik pedesaan serta pengembangan sumber energi alternatif berupa energi baru terbarukan seperti mikro hidro, *solar cell*, dan panas bumi.

Pembangunan infrastruktur sumberdaya air diarahkan untuk mewujudkan air sebagai *collective goods*. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk kepentingan produksi dan konsumsi secara efektif dilakukan melalui perlindungan terhadap kawasan resapan air di daerah hulu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber-sumber air tersebut. Selain itu, pembangunan jaringan irigasi yang menunjang peningkatan produktivitas pertanian juga menjadi hal penting untuk tetap dilakukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan di Jawa Tengah.

Pengembangan infrastruktur teknologi informasi juga menjadi hal penting dalam mendukung perwujudan desa berdikari, karena melalui teknologi informasi yang mampu menjangkau hingga tingkat desa, maka komunikasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan lebih terbuka dan intensif.

Hal terpenting yang menjadi perhatian dalam pembangunan infrastruktur adalah upaya meningkatkan peran dan penanganan infrastruktur dalam keterbatasan kewenangan dan kemampuan penanganan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, seperti upaya penanganan rob, pembangunan pelabuhan, bandar udara, transportasi massal dan pembangunan infrastruktur yang memerlukan pembebasan tanah. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan *soft power* melalui peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; peningkatan *Public Private Partnership* (PPP) dan penguatan kapasitas partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang komprehensif.

Pertumbuhan dan kegiatan sosial ekonomi juga perlu mempertimbangkan kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat menjamin keutuhan lingkungan hidup guna menjaga keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan akan datang. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan hidup melalui upaya rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam.

4. Kedaulatan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi hal penting dalam keberlanjutan kehidupan bagi masyarakat. Saat ini, situasi pangan di Jawa Tengah berada pada tataran konstruksi ketahanan pangan, walaupun secara statistik Jawa Tengah berada pada surplus komoditas pangan dan merupakan kontributor pangan nasional. Namun yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa tata kelola produksi pangan justru membuka ruang yang sangat luas bagi pemilik modal dan industri besar untuk memproduksi pangan secara massal, sehingga produsen pangan kecil menjadi tidak berdaya dan rakyat menjadi tergantung pada produk pangan massal. Sehingga dalam konteks ini, persoalan terbesar pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat adalah pada ketidakberdayaan masyarakat dan pemerintah dalam membangun kemampuan pangan lokal berdaulat, yang didukung dengan regenerasi petani, penyediaan alat produksi serta tanah di pedesaan.

Kedaulatan pangan menjadi isu penting dalam pembangunan Jawa Tengah ke depan. Kedaulatan pangan adalah hak rakyat dan pemerintah Jawa Tengah sebagai bagian dari NKRI, untuk menentukan sendiri kebijakan dan strategi produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang sehat dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya lokal, dengan tetap memperhatikan metode yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memberikan perlindungan serta dukungan terutama untuk mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil dan rakyat miskin

yang rawan pangan. Kedaulatan pangan ini akan menjadi strategi alternatif untuk mencapai ketahanan dan keamanan pangan sejati.

Kedaulatan pangan di Jawa Tengah diwujudkan melalui empat pilar, yaitu : 1) reformasi agraria dengan melindungi dan menata ulang sumber-sumber produksi pangan; 2) mewujudkan pertanian berkelanjutan melalui pemeliharaan dan pengembangan pertanian berbasis bahan baku, sumberdaya dan kearifan lokal; 3) menciptakan cadangan pangan dari surplus produksi pangan serta melakukan perdagangan pangan yang adil, yang mampu memberikan penghasilan lebih pada produsen pangan kecil; dan 4) mengembangkan pola konsumsi dan diversifikasi produk aneka pangan lokal, dan tidak hanya tergantung pada bahan pangan eksternal.

5. Kedaulatan Energi

Kebutuhan energi saat ini menjadi hal yang cukup penting untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun yang terjadi adalah meningkatnya ketergantungan energi baik pada level nasional maupun daerah yang bersumber pada energi fosil.

Gambaran kebutuhan energi di Jawa Tengah juga memiliki kecenderungan dan pola yang sama dengan nasional. Ketergantungan terhadap sumber energi fosil yang masih cukup tinggi di Jawa Tengah ditunjukkan dengan bekerjanya rantai ekonomi energi dalam moda transportasi, listrik, maupun industri yang menggunakan pasokan energi fosil. Sementara pemanfaatan potensi sumber energi non fosil, terutama sumber EBT di Jawa Tengah masih belum optimal. Sedangkan potensi sumberdaya yang dimiliki Jawa Tengah yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi alternatif baru cukup besar seperti panas bumi, air, serta potensi lahan yang cukup luas sebagai area pengembangan sumber energi baru terbarukan.

Isu inilah yang juga menjadi salah satu kunci kebijakan pemerintah Jawa Tengah, untuk menemukan terobosan baru dalam pengadaan energi, yang didukung dengan pengembangan teknologi tepat guna sehingga secara berangsur-angsur ketergantungan terhadap energi fosil terutama di Jawa Tengah dapat tereduksi dan menggeser paradigma pemanfaatan energi tak terbarukan menjadi pemanfaatan energi baru terbarukan.

Upaya penanganan isu strategis kedaulatan energi ini bukan merupakan upaya jangka pendek maupun menengah, tetapi merupakan upaya jangka panjang yang harus dirintis sejak saat ini, sebelum ketergantungan terhadap energi fosil semakin tak terkendali. Upaya kunci yang dapat dilakukan guna memenuhi kebutuhan energi di Jawa Tengah adalah dengan mengembangkan energi alternatif berbasis gas, sumberdaya energi baru terbarukan, maupun bahan bakar nabati, yang dikelola secara mandiri di level

lokal, sesuai dengan kapasitas sumberdaya yang dimiliki Jawa Tengah.

6. Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah

Pemerintahan yang bersih dan baik saat ini menjadi isu nasional yang juga terjadi di Jawa Tengah. Sebagai salah satu upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik menjadi syarat utama yang harus dipenuhi.

Berkenaan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 15 Januari 2014, maka dalam rangka reformasi birokrasi sebagai bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, daerah perlu mengantisipasi dengan melakukan langkah-langkah konkrit utamanya terkait pemantapan sistem manajemen kepegawaian meliputi sistem perencanaan, pengembangan karier, penggajian dan batas usia pensiun pegawai aparatur sipil negara.

Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam mewujudkan demokrasi bernegara yang baik. Namun tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan proses demokrasi seperti keikutsertaan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta pengambilan keputusan kebijakan pembangunan yang bersifat strategis melalui forum *rembug*.

Kondusivitas daerah juga masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga mampu membuka peluang investasi di wilayah Jawa Tengah dan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

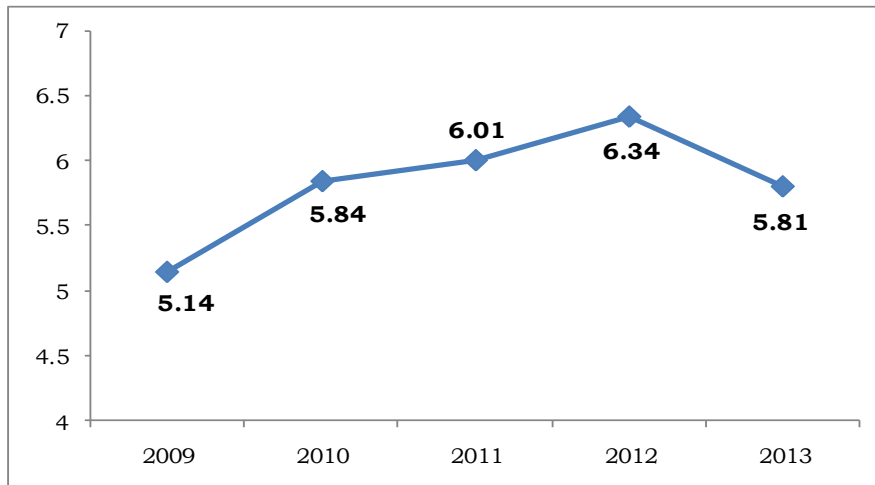
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian dunia sampai dengan awal Tahun 2014 diperkirakan masih belum menguat yang disebabkan dampak krisis ekonomi global yang terjadi di wilayah Eropa dan Amerika, dan diprediksikan masih akan terus berlanjut di tahun mendatang. Hal tersebut secara tidak langsung berpengaruh pula pada situasi perekonomian nasional dan regional.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2009 – 2013) laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah telah menunjukkan kecenderungan yang meningkat, walaupun mengalami penurunan pada Tahun 2013. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2009-2013

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB Jawa Tengah selama kurun waktu 2012 – 2013 mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada Tahun 2012 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp.556.479 Milyar meningkat menjadi Rp.623.749 Milyar pada Tahun 2013. Berdasarkan harga konstan nilai PDRB meningkat dari Rp.210.848 Milyar menjadi Rp.223.099 Milyar.

Distribusi sektor ekonomi Jawa Tengah masih didominasi tiga sektor utama yang memiliki kontribusi dominan pada PDRB Jawa Tengah, yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pertanian, masing-masing memberikan kontribusi sebesar

32,56%; 20,73%; dan 18,30%. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, beberapa sektor mengalami peningkatan peranan yaitu pertambangan dan penggalian, listrik, gas, dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real estate dan jasa perusahaan. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan peranan yaitu sektor pertanian dan industri pengolahan. Secara lengkap, nilai dan laju, serta kontribusi sektor pada PDRB Jawa Tengah tahun 2012-2013 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2.

Tabel 3.1
Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2012-2013

No	Lapangan Usaha	ADHB (Milyar Rupiah)		ADHK (Milyar Rupiah)		Laju Pertumbuhan (%)	
		2012 ^{*)}	2013 ^{**)}	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
1	Pertanian	104,311	114,142	36,712	37,514	3,71	2,0
2	Pertambangan & Penggalian	5,239	5,980	2,355	2,505	7,38	9,0
3	Industri Pengolahan	182,715	203,104	69,012	73,092	5,46	7,3
4	Listrik, Gas & Air Bersih	5,648	6,599	1,820	1,973	6,38	7,7
5	Konstruksi	33,352	37,196	12,573	13,449	6,98	7,9
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	112,908	129,303	46,719	50,209	8,25	5,6
7	Angkutan dan Komunikasi	32,951	37,611	11,486	12,238	7,90	2,9
8	Keu, Real Estt & Jasa Perh.	19,993	23,280	8,206	9,730	9,36	11,3
9	Jasa-jasa	59,359	66,530	21,961	23,044	7,32	2,1
	PDRB	556,479	623,749	210,848	223,099	6,34	5,81

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2012 dan Berita Resmi Statistik (BRS), 2014

Keterangan : ^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Tabel 3.2
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2012-2013

No	Lapangan Usaha	2012 ^{*)} (%)	2013 ^{**)} (%)
1	Pertanian	18,74	18,30
2	Pertambangan & Penggalian	0,94	0,96
3	Industri Pengolahan	32,83	32,56
4	Listrik, Gas & Air Bersih	1,02	1,06
5	Konstruksi	5,99	5,96
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	20,29	20,73
7	Angkutan dan Komunikasi	5,92	6,03

No	Lapangan Usaha	2012 ^{*)} (%)	2013 ^{**)} (%)
8	Keuangan, Real Estat & Jasa Perh.	3,59	3,73
9	Jasa-jasa	10,67	10,67
	PDRB	100	100

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2012 dan Berita Resmi Statistik (BRS), 2013

Keterangan : ^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Selanjutnya apabila dilihat dari distribusi PDRB menurut sisi penggunaan pada Tahun 2013, maka komponen penggunaan untuk konsumsi rumah tangga masih memberikan sumbangan terbesar pada PDRB Jawa Tengah sebesar 63,94%. Secara lengkap distribusi PDRB menurut penggunaan dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Distribusi PDRB Jawa Tengah
Menurut Jenis Penggunaan Tahun 2012 – 2013

No	Komponen Penggunaan	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
1	Konsumsi Rumah Tangga	63,95	63,94
2	Konsumsi Lembaga Non Profit	1,43	1,47
3	Konsumsi Pemerintah	11,06	11,17
4	PMTB	19,63	20,00
5	Perubahan Stok	1,22	1,36
6	Ekspor Barang dan Jasa	46,79	47,67
7	Impor Barang dan Jasa	46,79	45,61
	PDRB	100	100

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2012 dan Berita Resmi Statistik (BRS), 2013

Keterangan : ^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

PDRB per kapita merupakan PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada Tahun 2013, PDRB per kapita Jawa Tengah ADHB mencapai Rp. 18.751,3 ribu. Secara lengkap PDRB per kapita Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
PDRB per Kapita Jawa Tengah Tahun 2012 - 2013

No	Uraian	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
1	PDRB per Kapita ADHB (ribu rupiah)	16.863,808	18.751,323
2	PDRB per Kapita ADHK (ribu rupiah)	6.389,598	6.706,882

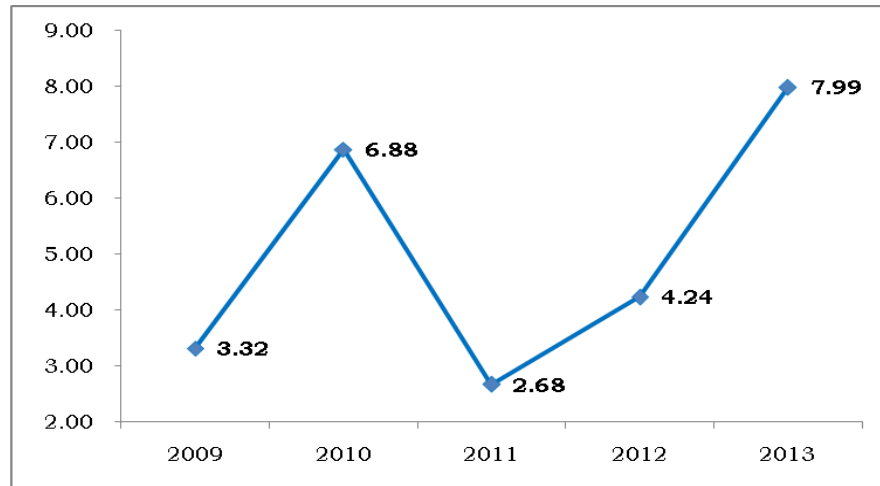
Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2012 dan Berita Resmi Statistik (BRS), 2014

Keterangan : ^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

c. Inflasi

Perkembangan inflasi di Jawa Tengah cenderung fluktuatif, yang dipengaruhi oleh harga bahan pokok di pasar, dan faktor eksternal lainnya. Angka inflasi Jawa Tengah Tahun 2013 sebesar 7,99%, meningkat cukup tinggi dibandingkan Tahun 2012. Perkembangan inflasi Jawa Tengah dari tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2010-2014

Gambar 3.2
Inflasi Jawa Tengah Tahun 2009-2013

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Krisis ekonomi global diperkirakan masih akan berpengaruh pada perekonomian Indonesia, termasuk banyaknya bencana alam yang terjadi di belahan dunia yang akan berakibat pada semakin tingginya biaya produksi dan meningkatnya tekanan inflasi.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia oleh *Asian Development Bank* (ADB) pada Tahun 2014 diprediksikan akan mencapai 5,7% dan pada Tahun 2015 akan naik menjadi 6%, karena didukung investasi yang semakin membaik khususnya di bidang infrastruktur serta menguatnya perdagangan dunia. Prediksi pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah dibandingkan prediksi pemerintah pada APBN Tahun 2014 sebesar 6% dan Tahun 2015 sebesar 5,5 - 6,3%. Upaya pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut dilakukan melalui : perbaikan iklim investasi, mendorong berkembangnya sektor riil, mendorong ekspor, dan mengurangi ketergantungan bahan baku impor. Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, prediksi pertumbuhan ekonomi Tahun 2014 akan berada pada kisaran 5,9-6,4% dan pada Tahun 2015 diharapkan dapat mencapai 6,0-6,5%.

Perkuaatan infrastruktur ekonomi terus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan pemerataan kekuatan ekonomi pada semua wilayah dan sektor usaha.

Kondisi Jawa Tengah Tahun 2015 masih terpengaruh oleh kondisi perekonomian dunia dan nasional, dengan **tantangan** terhadap perekonomian Jawa Tengah daerah adalah :

- Dampak terbukanya perdagangan bebas dan berlakunya *ASEAN Economic Community* (AEC) 2015;
- Pembangunan infrastruktur strategis belum sesuai dengan peran Jawa Tengah terhadap perekonomian nasional;
- Dukungan pemerintah Pusat belum sesuai dengan peran Jawa Tengah terhadap perekonomian nasional tersebut;
- Semakin meningkatnya kebutuhan terhadap barang impor bahan baku industri;
- Dampak pengurangan subsidi BBM;
- Kebutuhan infrastruktur perekonomian daerah semakin meningkat;
- Koordinasi pembangunan antar sektor belum optimal;
- Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam daerah;
- Dampak terjadinya bencana alam global, nasional dan regional;
- Keterlambatan penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis;
- Pemanfaatan fungsi lahan tidak sesuai peruntukan.

Peluang yang dapat dimanfaatkan Jawa Tengah antara lain meliputi :

- Terbukanya peluang pasar ekspor;
- Meningkatnya dukungan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
- Kebijakan pengembangan infrastruktur;
- Meningkatkan pelayanan investasi;
- Tersedianya produk unggulan Jawa Tengah yang berdaya saing;
- Relatif lebih tingginya upah buruh di provinsi lain;
- Jawa Tengah sebagai penyangga pangan nasional;
- Meningkatnya pengembangan sumberdaya energi baru terbarukan;
- Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas;
- Komitmen dukungan pengembangan potensi wilayah;
- Rencana adanya relokasi industri;
- Mulai beroperasinya infrastruktur pendukung transportasi.

Berdasarkan kondisi perekonomian Jawa Tengah saat ini, serta memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka perekonomian Jawa Tengah Tahun 2015 dan 2016 dapat diprediksikan sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2013,
Target Tahun 2014 dan Prediksi Tahun 2015 - 2016

No	Indikator	2012	2013	2014*)	2015**)	2016**)
1.	PDRB :					
	Atas dasar harga berlaku (Trilyun Rp)	556,479	623,749	603,317	638,219	673,120
	Atas dasar harga konstan (Trilyun Rp)	210,848	223,099	221,005	228,599	236,192
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,34	5,8 - 6,2	5,9 - 6,4	6,0 - 6,5	6,1 - 6,6
3.	Inflasi (%)	4,24	7,99	5 ± 1	5 ± 1	4,5 ± 1
4.	PDRB/Kapita atas dasar harga konstan (Juta Rp)	6,49	6,81	7,12	7,44	7,75
5.	Kebutuhan investasi (Trilyun Rp.)	110,805	114,401	119,500	124,88	130,48
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,63	6,02	5,31-4,77	4,93 - 4,62	4,66 - 4,43
7.	Kemiskinan (%)	14,98	14,44	11,58-11,37	9,05 - 8,75	8,60 - 8,35
8.	NTP	106,37	108,67	102,14	102,36	102,63

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2012 dan Berita Resmi Statistik (BRS), 2013

*Keterangan : *) Target RKPD Tahun 2014*

****) Target RPJMD Prov. Jateng Tahun 2013 - 2018*

Dalam rangka mencapai target pembangunan tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, yang ditujukan untuk “Meningkatkan Infrastruktur dan Kualitas Pelayanan Dasar menuju Kemandirian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat”, maka **kebijakan ekonomi daerah** Tahun 2015 diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah, dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, sehingga diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif. Upaya yang dilakukan antara lain melalui :

1. Pengembangan Infrastruktur untuk mendorong aksesibilitas wilayah;
2. Mendorong realisasi investasi pada sektor yang menyerap banyak tenaga kerja;
3. Pengembangan sektor unggulan daerah sebagai penyumbang terbesar pada pertumbuhan PDRB;
4. Meningkatkan kualitas serta kuantitas produk UMKM yang berdaya saing tinggi dan berbasis ekspor;
5. Menjaga stabilitas harga pada kelompok kebutuhan masyarakat.

Dengan terjaganya tingkat pertumbuhan ekonomi yang konstan serta stabilitas dan ketersediaan barang modal produksi, diharapkan akan membuka berbagai lapangan kerja, sehingga dapat menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2015 menjadi 4,93 - 4,62% dari total jumlah angkatan kerja, persentase penduduk miskin menjadi 9,05 - 8,75%, dan NTP dapat mencapai 102,36.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kinerja keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 diperkirakan akan mengalami peningkatan, karena adanya peningkatan pendapatan daerah yang diprediksikan sebesar Rp.15.852.473.882.000,-, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.10.480.331.310.000,- dana perimbangan sebesar Rp.2.595.435.922.000,-; dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp.2.776.706.650.000,-. Sumber pendapatan utama PAD Provinsi Jawa Tengah berasal dari Pajak Daerah yaitu Pajak kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Secara rinci perkembangan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	Jumlah (Rp. 000,-)				
		R.2012	R. 2013 ^{*)}	2014 ^{**)}	2015 ^{***)}	2016 ^{****)}
1.	PAD	6.629.308.010	8.212.800.640	8.347.874.665	10.480.331.310	11.532.744.564
1.1.	Pajak Daerah	5.590.597.156	6.716.170.095	7.097.094.340	9.066.079.853	9.894.960.536
1.2.	Retribusi Daerah	68.250.252	69.970.595	78.031.283	86.546.011	89.928.185
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	238.231.932	263.267.978	279.440.000	307.078.988	359.841.133
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	732.228.668	1.163.391.971	893.309.042	1.020.626.458	1.188.014.710
2.	Dana Perimbangan	2.318.806.099	2.467.814.628	2.606.901.162	2.595.435.922	2.468.854.087
2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	751.282.698	714.432.749	723.804.733	791.504.733	797.994.718
2.2.	DAU	1.516.892.951	1.670.859.369	1.803.931.189	1.803.931.189	1.670.859.369
2.3.	DAK	50.630.450	82.522.510	79.165.240	-	-
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.746.365.589	2.662.743.057	2.782.382.356	2.776.706.650	2.776.706.650
3.1	Dana Penyesuaian	2.694.197.224	2.615.274.862	2.750.306.650	2.750.306.650	2.750.306.650
3.2	Dana Insentif Daerah	16.371.911	21.826.131	3.000.000	-	-
3.3	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga	35.124.829	24.326.664	29.075.706	26.400.000	26.400.000
3.4	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-	-	-	-	-
3.5	Pendapatan lainnya	671.625	1.315.400	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	11.694.479.699	13.343.358.327	13.737.158.183	15.852.473.882	16.778.305.303

Sumber : DPPAD Provinsi Jawa Tengah dan Biro Keuangan Setda Prov. Jateng, 2013

Keterangan : *) Realisasi sebelum Un Audit **) Anggaran Murni Tahun 2014

***) Hasil Rakor Pendapatan Daerah Tahun 2014

****) Proyeksi dalam RPJMD Prov. Jateng Tahun 2013-2018

Kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah dapat dilihat dari proporsinya terhadap total pendapatan daerah. Proporsi PAD Jawa Tengah terhadap total pendapatan daerah dalam kurun waktu tiga tahun (2010-2012) cukup tinggi, yaitu mencapai 72,21% (Tahun 2010), 73,72% (Tahun 2011), 56,69% (Tahun 2012), 61,55% (Tahun 2013) dan 60,77% (Tahun 2014), terutama bersumber dari pajak daerah. Dana perimbangan dari pemerintah pusat hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sekitar 18-30%, dan sisanya berupa lain-lain pendapatan daerah yang sah sejak Tahun 2012 memberikan kontribusi sebesar 19 – 23%. Kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Persentase Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013*)	2014**)
1	Pendapatan Asli Daerah	72,21	73,72	56,69	61,55	60,77
1.1	Pajak daerah	58,76	60,93	47,81	50,33	51,66
1.2	Retribusi daerah	1,93	0,86	0,58	0,52	0,57
1.3	Hasil pengel. Kekada yg dipisahkan	2,95	2,81	2,04	1,97	2,03
1.4	Lain - lain PAD yang sah	8,57	9,13	6,26	8,72	6,50
2.	Dana Perimbangan	27,34	25,84	19,83	18,49	18,98
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	9,27	8,24	6,43	5,35	5,27
2.2	DAU	17,6	16,91	12,97	12,52	13,13
2.3	DAK	0,43	0,69	0,43	0,62	0,58
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,45	0,44	23,48	19,96	20,25
3.1	Dana penyesuaian	0,03	0,02	23,03	19,60	20,02
3.2	Dana insentif daerah	0,37	0,36	0,14	0,16	0,21
3.3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga	-	-	0,30	0,18	0,02
3.4	Dana Percepatan Pemb. Infrastruktur Daerah		0,04	-	-	-
3.5	Pendapatan lainnya	0,04	0,02	0,01	0,01	-
	Jumlah Pendapatan Daerah(1+2+3)	100,00	100,00	100,00	100,00	100

Sumber : DPPAD Provinsi Jawa Tengah dan Biro Keuangan Setda Prov. Jateng, 2013

Keterangan : *) Realisasi sebelum Un Audit

**) Anggaran Murni Tahun 2014

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, maka kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut.

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka ditetapkan kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2014 meliputi :

- a. Peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah;
- b. Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- c. Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMD;
- d. Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak dan pembaharuan data;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- f. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan DBH Pajak/Bukan Pajak;
- g. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Kebijakan tersebut ditempuh melalui penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel; menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat memberi kontribusi pada PAD; peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2015 serta berkontribusi terhadap capaian RPJMN tahun 2015, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang diarahkan untuk :

- a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, termasuk belanja BLUD, DBHCHT dan pendampingan DAK;
- b. Pemenuhan Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota;
- c. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk fungsi pendidikan;
- d. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2015, meliputi:
 - Mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran;
 - Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat;
 - Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah;
 - Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana;
 - Mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
 - Memantapkan pelaksanaan demokratisasi dan kondusivitas daerah.
- e. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Belanja daerah Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun (2012-2014), cenderung mengalami peningkatan baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Secara proporsi, Belanja Tidak Langsung lebih besar dibandingkan Belanja Langsung. Hal tersebut dikarenakan komponen Belanja Tidak Langsung tidak hanya untuk Belanja Pegawai, namun juga meliputi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Belanja Tidak Terduga yang kesemuanya bukan merupakan belanja rutin, namun pada hakekatnya merupakan belanja modal atau pembangunan di Kabupaten/Kota serta bantuan langsung kepada masyarakat.

Idealnya persentase Belanja Langsung lebih besar dari pada Belanja Tidak Langsung, namun banyak program pembangunan khususnya pembangunan pertanian, pengembangan ekonomi lokal, penanganan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan pendidikan yang harus ditangani, merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga untuk percepatan pelaksanaan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar Kabupaten/Kota maka penyediaan anggaran tidak dapat dialokasikan pada Belanja Langsung, karena alokasi Belanja Langsung merupakan penyediaan anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Guna membiayai implementasi rencana pembangunan daerah Tahun 2015, maka proyeksi kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.16,027 Trilyun terdiri dari : 1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.10,426 Trilyun akan dipergunakan untuk belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasil kepada kabupaten/kota, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja

tidak terduga; 2) Belanja Langsung sebesar Rp.5,601 Trilyun akan dipergunakan untuk Program di tiap SKPD, Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD dan Belanja Urusan Wajib dan Pilihan.

Secara rinci realisasi dan proyeksi belanja daerah serta rincian belanja tiap urusan kewenangan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016, dapat dilihat pada Tabel 3.8 dan Tabel 3.9.

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Jawa Tengah
Tahun 2012 – 2016 (Rp.000,-)

No.	Uraian	Realisasi		2014*)	2015**)	2016**)
		2012	2013			
1.	Belanja Tidak langsung	8.540.012.836	9.213.696.622	9.837.614.877	10.426.141.299	11.216.004.354
1.1.	Belanja Pegawai	1.241.600.971	1.368.517.191	1.956.121.339	2.458.651.342	2.665.707.260
1.2.	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3.	Belanja Hibah	3.123.911.500	3.499.864.176	3.038.721.398	2.950.537.333	3.020.537.333
1.4.	Belanja Bantuan Sosial	7.548.325	14.362.375	31.666.000	28.500.000	28.500.000
1.5.	Belanja Bagi Hasil	2.253.337.259	2.503.166.398	2.720.713.995	3.445.192.914	3.672.793.359
1.6.	Belanja Bantuan Keuangan	1.908.190.237	1.825.598.247	2.060.392.145	1.513.259.710	1.778.466.402
1.7.	Belanja Tidak Terduga	5.424.543	2.188.234	30.000.000	30.000.000	60.000.000
2.	Belanja Langsung	2.906.831.268	3.511.079.685	4.159.543.306	5.601.332.583	5.287.300.948
2.1.	Belanja Pegawai	318.033.644	373.147.586	315.190.623	424.442.631	550.300.948
2.2.	Belanja Barang Jasa	1.977.523.313	2.143.191.579	2.402.376.272	1.735.092.773	3.150.000.000
2.3.	Belanja Modal	611.274.310	994.740.520	1.441.976.411	3.441.797.178	1.587.000.000
	Total Jumlah Belanja (1+2)	11.446.844.105	12.724.776.308	13.997.158.183	16.027.473.882	16.503.305.303

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Keterangan : *) APBD Murni Tahun 2014

**) Proyeksi dalam RPJMD Prov. Jateng Tahun 2013-2018

Tabel 3.9
Anggaran dan Proyeksi Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Kewenangan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016 (Rp.000,-)

NO	URUSAN / PROGRAM	R. 2012*)	R. 2013*)	2014**)	2015***)	2016***)
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN WAJIB	1.466.252.009	1.922.666.118	2.251.325.503	3.523.469.312	3.191.208.979
1.	Pendidikan	218.990.078	228.014.160	196.953.150	192.356.202	234.213.698
2.	Kesehatan	165.254.255	247.409.588	332.719.641	338.614.632	426.314.023
3.	Pekerjaan Umum	515.759.270	758.665.071	1.070.810.947	2.297.425.079	1.812.198.280
4.	Perumahan Rakyat	18.340.401	21.193.337	31.887.000	33.542.500	41.091.480
5.	Penataan Ruang	5.720.338	5.050.000	4.300.000	6.215.500	5.825.680
6.	Perencanaan Pembangunan	15.362.630	18.619.000	21.351.750	23.231.045	24.474.739
7.	Perhubungan	47.928.650	39.491.464	41.797.755	55.315.000	48.954.876
8.	Lingkungan Hidup	29.835.001	43.130.000	30.292.500	33.228.775	39.283.907
9.	Pertanahan	3.394.192	4.015.000	3.560.000	4.300.000	4.233.712
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil	2.425.000	2.588.421	2.290.500	2.300.000	2.642.321
11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.415.495	9.018.750	8.838.569	10.756.902	9.893.735
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	5.428.102	4.270.000	3.899.652	4.630.000	4.546.476
13.	Sosial	36.009.350	36.818.437	38.175.000	47.934.500	46.851.743
14.	Tenaga Kerja	17.438.532	16.637.400	23.835.388	22.234.388	24.756.202
15.	Koperasi dan UKM	33.022.150	34.085.000	23.455.000	27.100.000	35.851.725
16.	Penanaman Modal	6.900.000	5.050.000	5.476.648	6.723.000	6.205.338
17.	Kebudayaan	14.450.000	20.410.000	19.026.700	18.755.535	20.430.659
18.	Pemuda dan Olah Raga	24.828.600	31.320.500	31.690.300	32.058.500	33.381.827
19.	Kesatuan Bangsa Politik dan Dalam Negeri	22.921.936	49.371.480	38.640.324	37.946.000	45.121.916

NO	URUSAN / PROGRAM	R. 2012*)	R. 2013*)	2014**)	2015***)	2016***)
1	2	3	4	5	6	7
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	181.936.262	252.866.390	224.909.373	262.701.617	252.673.838
21.	Ketahanan Pangan	47.916.858	49.780.790	50.068.700	13.155.000	15.037.950
22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.164.605	14.575.000	17.960.304	18.435.000	22.642.138
23.	Statistik	1.250.000	1.200.000	1.586.000	1.442.000	1.796.938
24.	Kearsipan	3.747.681	5.000.000	4.248.550	3.901.525	4.792.555
25.	Komunikasi dan Informatika	17.191.777	17.781.330	17.230.752	22.323.703	20.000.143
26.	Perpustakaan	8.620.846	6.305.000	6.321.000	6.842.900	7.993.083
	URUSAN PILIHAN	255.129.905	254.855.045	229.040.232	240.040.385	281.561.757
27.	Pertanian	82.710.718	98.048.143	94.395.964	112.508.000	130.062.500
28.	Kehutanan	13.316.430	11.736.732	11.734.244	11.098.385	12.783.394
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	37.072.665	36.235.000	45.740.000	36.140.000	40.794.925
30.	Pariwisata	23.315.000	18.045.000	14.820.024	15.125.000	17.821.973
31.	Kelautan dan Perikanan	33.789.000	39.850.170	28.811.000	29.726.800	36.001.203
32.	Perdagangan	16.825.565	14.480.000	13.475.000	15.375.000	16.318.350
33.	Perindustrian	47.324.435	35.875.000	19.245.000	19.097.200	26.953.860
34.	Transmigrasi	776.092	585.000	819.000	970.000	825.552
	BELANJA BLUD	587.917.301	741.987.909	725.800.000	759.938.343	780.388.254
	BELANJA NON URUSAN (EKS BAU)	737.585.785	851.688.048	953.377.571	1.077.884.543	1.034.141.959
	TOTAL BELANJA LANGSUNG	3.046.885.000	3.771.197.120	4.159.543.306	5.601.332.583	5.287.300.949

Sumber : Bappeda Prov. Jawa Tengah, 2014

Keterangan : *) APBD Perubahan;

***) APBD Murni TA. 2013 **) Proyeksi RPJMD Prov.Jateng Tahun 2013-2018

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2012-2014 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dengan jumlah SiLPA cenderung fluktuatif, dan selanjutnya diprediksikan akan semakin kecil. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk :

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2014 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2015, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- b. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*);
- c. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran;
- d. Membentuk dana cadangan.

Selengkapnya realisasi dan proyeksi Pembiayaan Daerah tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2012 – 2016

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	JUMLAH (Rp. 000,-)				
		R. 2012	R. 2013	2014*)	2015**)	2016**)
1.	Penerimaan Pembiayaan					
1.1.	SiLPA	705.308.166	755.371.554	300.000.000	450.000.000	0
1.2.	Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan	800.000	0	0	0	0
1.3.	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir	1.627.793	586.832	0	0	0
1.4.	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir UKM & IKM	0	0	0	0	0
1.5.	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir Sapi Kereman	0	0	0	0	0
1.6.	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir Peralatan utk IKM	0	0	0	0	0
1.7.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.8	Penerimaan Dana Bergulir Penempatan TKI ke LN	0	0	0	0	0
1.9	Penerimaan Dana Bergulir Kemitraan Hutan Rakyat	0	0	0	0	0
1.10	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir Kepada Kelompok Tani	0	0	0	0	0
1.11	Penerimaan Kembali Dana Bergulir Pembangunan Gedung BPR/BKK	0	0	0	0	0
1.12	Pencairan dana cadangan	0	549.991.811	0	0	0
	Jumlah penerimaan pembiayaan	707.735.960	1.306.017.471	300.000.000	450.000.000	0
2.	Pengeluaran Pembiayaan					
2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	150.000.000	0	0	200.000.000	200.000.000

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	JUMLAH (Rp. 000,-)				
		R. 2012	R. 2013	2014*)	2015**)	2016**)
2.2.	Penyertaan Modal (investasi)	50.000.000	235.791.000	40.000.000	75.000.000	75.000.000
2.3.	Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan	0	0	0	0	0
2.4	Pembayaran Utang Daerah	0	0	0	0	0
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	200.000.000	235.791.000	40.000.000	275.000.000	275.000.000
	Jumlah Pembiayaan Netto	507.735.960	1.070.226.471	260.000.000	175.000.000	(275.000.000)

Sumber : Bappeda Prov. Jateng dan Biro Keuangan Setda Prov. Jateng, 2013

Keterangan : *) APBD Murni TA. 2014

***) Proyeksi RPJMD Prov. Jateng Tahun 2013-2018

Sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan. Besarnya APBN yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Jumlah alokasi dana APBN yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2014 menurut Kementerian/Lembaga, dapat dilihat pada tabel 3.11.

Tabel 3.11
Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2014

No.	Kementerian / SKPD Provinsi	JUMLAH (Rp. 000,-)			
		2011	2012	2013	2014
I	Kementerian Dalam Negeri (DK)	85.353.116	85.346.081	77.405.077	81.899.515
1	Bappeda	211.900	2.591.800	5.976.825	850.000
2	Dishubkominfo	-	-	-	-
3	Inspektorat	-	-	-	-
4	Kesbangpolinmas	-	-	1.653.644	-
5	Satpol PP	-	232.420	893.197	867.539
6	Bapermasdes	65.963.072	72.461.681	71.435.288	76.519.236
7	Biro Tapem	19.011.144	9.625.000	5.233.108	904.664
8	Set. BPBD	-	-	950.000	1.170.000
9	Biro Bangda	-	-	-	850.000
10	Biro Otda	-	-	1.247.700	-
11	Biro Orpeg	-	200.000	400.000	-
12	Badan Diklat	167.000	235.180	235.200	235.200
13	Disnakertanduk	-	-	-	502.876
II	Kementerian Pertanian (DK & TP)	267.855.887	623.045.506	690.956.473	717.453.990
1	Dinpertan & TPH	23.306.120	220.690.478	271.133.647	549.879.329
2	Disbun	38.942.790	115.113.789	213.860.388	4.032.036
3	Disnakeswan	102.450.124	163.608.915	76.636.706	77.546.170
4	BKP	34.918.774	33.065.300	40.548.450	23.168.500
5	Set. Bakorluh	55.169.560	78.005.024	75.183.197	62.827.955
6	Balai Proteksi TPH	9.706.500	12.562.000	-	-
7	BPSBPH	3.392.000	-	-	-
III	Kementerian Perdagangan (DK)	17.877.905	20.970.096	10.689.455	4.883.839
	Disperindag	17.877.905	20.970.096	10.689.455	4.883.839
IV	Kementerian ESDM (DK)	1.000.000	617.540	878.389	969.435
	Dinas ESDM	1.000.000	617.540	878.389	969.435
V	Kementerian Pendidikan (DK)	1.858.286.589	896.438.842	738.669.503	3.692.467
	Dinas Pendidikan	1.858.286.589	896.438.842	738.669.503	3.692.467

No.	Kementerian / SKPD Provinsi	JUMLAH (Rp. 000,-)			
		2011	2012	2013	2014
VI	Kementerian Kesehatan (DK)	55.677.567	50.907.071	45.542.580	49.695.171
1	RS Moewardi	5.000.000	902.108	-	-
2	RS Margono	10.000.000	2.480.797	-	-
3	RS Tugurejo	4.500.000	1.702.108	-	-
4	RS Kelet	-	-	-	-
5	RSUD Surakarta	-	1.578.689	-	-
6	RSJD Amino Gondo Hutomo	-	902.108	-	-
7	Balai Lab Semarang	-	-	-	-
8	Dinas Kesehatan	36.177.567	43.341.261	45.542.580	49.695.171
VII	Kementerian PU (DK & TP)	188.036.769	213.656.101	162.391.203	222.679.484
1	Dinas Bina Marga	110.529.431	111.867.321	90.829.202	90.885.237
2	Dinas PSDA	69.839.145	71.648.780	65.259.598	123.001.819
3	Dinas Cipkataru	7.671.193	30.140.000	6.302.403	8.792.428
VIII	Kementerian Tenaga Kerja(DK & TP)	28.006.121	-	25.764.639	17.641.891
1	Dinas Tenaga Kerja	24.390.621	-	25.764.639	17.641.891
2	BPPTK	3.169.310	-	-	-
3	BKK Cilacap	446.190	-	-	-
IX	Kementerian Sosial (DK & TP)	27.988.936	36.593.818	25.935.011	30.694.313
	Dinas Sosial	27.988.936	36.593.818	25.935.011	30.694.313
X	Kementerian Kehutanan (DK)	3.965.341	4.333.165	4.006.715	6.104.079
	Dinas Kehutanan	3.965.341	4.333.165	4.006.715	6.104.079
XI	Kementerian Lutkan (DK & TP)	45.327.604	55.301.029	32.978.450	20.073.658
	Dinas Lutkan	45.327.604	55.301.029	32.978.450	20.073.658
XII	Kementerian LH (DK)	500.000	6.000.000	7.500.000	3.500.000
	BLH	500.000	6.000.000	7.500.000	3.500.000
XIII	Kementerian Koperasi & UKM (DK)	6.562.432	11.954.371	5.731.590	8.097.730
	Dinas Koperasi & UMKM	6.562.432	11.954.371	5.731.590	8.097.730
XIV	Perpustakaan Nasional (DK)	6.485.002	5.480.166	5.667.090	416.300
	Badan Arpus	6.485.002	5.480.166	5.667.090	416.300
XV	Kementerian Pora (DK)	8.258.818	9.574.740	12.652.783	12.756.663
	Dinas Pora	8.258.818	9.574.740	12.652.783	12.756.663
XVI	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	44.770.517	9.502.000	7.614.500	1.075.000
	Dinas Budpar	44.770.517	9.502.000	7.614.500	1.075.000

No.	Kementerian / SKPD Provinsi	JUMLAH (Rp. 000,-)			
		2011	2012	2013	2014
XVII	BKPM (DK)	300.000	500.000	500.000	500.000
	BPM	300.000	500.000	500.000	500.000
XVIII	Kementerian PEMBERDAYAAN Perempuan	2.436.985	-	-	-
	BP3AKB	2.436.985	-	-	-
XIX	Kementerian Perindustrian (DK)	-	-	-	7.017.000
	Disperindag	-	-	-	7.017.000
XX	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (DK)	-	-	-	915.690
Jumlah Total		3.912.089.690	2.646.282.604	2.025.164.257	1.177.701.371

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2014

Kebijakan keuangan daerah, baik arah kebijakan pendapatan, pembiayaan, maupun belanja yang didukung dengan kebijakan keuangan negara, yang tertuang dalam APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBN adalah untuk mendukung tercapainya target sasaran perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Jangka Menengah

Rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 menetapkan visi pembangunan Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 yaitu :

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI

“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Makna yang termuat dalam visi pembangunan Jawa Tengah jangka menengah tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- **Sejahtera**

Adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar rakyat Jawa Tengah yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan *tepo seliro*; serta tersedia prasarana dan sarana publik terkait dengan supra dan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu prasarana dan sarana, supra dan infrastruktur dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat baik secara fisik maupun non-fisik serta sosial dan politik harus secara terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

- **Berdikari**

Adalah tindakan yang didasarkan pada kekuatan sendiri atau berposisi berdiri di atas kaki sendiri. Artinya membangun Jawa Tengah berdasarkan kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan mengeksplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan, baik di Jawa Tengah, Nasional, maupun Internasional. Untuk laku kerjanya, berdaulat dalam

kemitraan dengan para pihak, menjadi sendi gerak kerja bersama yang saling menghormati.

Untuk mewujudkan Jawa Tengah Berdikari, tiga hal yang perlu dilakukan, yaitu:

- ✓ Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada di Jawa Tengah, agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal;
- ✓ Mengeksplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan, teknologi, kearifan lokal, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa Tengah dimanapun bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri;
- ✓ Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri, secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan dalam jangka pendek maupun panjang.

Pada era globalisasi, bidang-bidang terkait komunikasi dan informatika, perdagangan, jasa produksi, teknologi, hiburan, transportasi, pariwisata dan tenaga kerja tidak lagi terhalangi oleh jarak dan batas-batas wilayah administrasi. Berdikari harus tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mengingkari realitas globalisasi atau mengisolasi diri dan menutup peluang kerjasama dengan berbagai pihak di Indonesia dan dunia.

Potensi Jawa Tengah lainnya adalah rakyat Jawa Tengah yang tersebar di berbagai pelosok tanah air dan penjuru dunia sebagai promotor dalam mencari mitra kerjasama strategis di bidang perdagangan, jasa, produksi, pariwisata, tenaga kerja, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun bidang terkait lainnya.

Prinsip Berdikari adalah membuka ruang bagi seluruh rakyat Jawa Tengah untuk dapat mengakses dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan. Selain itu juga memfasilitasi akses rakyat terutama rakyat kecil untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dengan prinsip sesuai kebutuhan, berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup, serta menyediakan ruang publik untuk mempromosikan temuan, karya dan produk rakyat. Hal ini merupakan upaya untuk mengubah ketidakberdayaan rakyat hingga mampu berdiri di atas kaki sendiri, bukan memberikan ikan tetapi memberikan “kail dan jala”. Dengan kata lain memberikan pengetahuan, keterampilan, dan peluang untuk pengembangan diri masyarakat secara maksimal sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, dan potensi bagi pemenuhan kebutuhan produksi, jasa, maupun potensi ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat.

Selain itu berdikari dapat diartikan sebagai suatu kondisi terbentuknya daerah yang mampu mengelola segenap potensi ekonomi, politik, sosial, budaya melalui kerjasama dan sinergitas. Prinsip ini ditunjukkan dengan tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah perkotaan yang bersinergi; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondusivitas politik daerah.

Berdikari hanya akan dicapai dengan sistem dan tata kelola pemerintahan yang mampu memproteksi daerahnya dari intervensi pihak luar yang merugikan rakyat Jawa Tengah, membuka ruang seluas-luasnya bagi rakyat terutama rakyat kecil untuk dapat mengakses aset Jawa Tengah, memberikan jaminan kepada rakyat terutama rakyat kecil untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan pembangunan Jawa Tengah. Sistem tata kelola yang demikian membutuhkan aparatur pemerintah yang mempunyai sikap, tindakan, dan perilaku sebagai pelayan masyarakat yang dilandasi semangat dan nilai keutamaan "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*".

Sehingga makna utuh dari **Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari** "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*" yaitu merupakan instrumen untuk menciptakan nilai-nilai kesejahteraan yang setara bagi segenap komponen masyarakat Jawa Tengah dan mewujudkan kondisi Jawa Tengah yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya, yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan, dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*".

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 7 (tujuh) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*";
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 memiliki tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan

Tujuan : Memberikan haluan pada 6 (enam) misi yang lain dalam pengamalan ajaran Tri Sakti Bung Karno.

Sasaran : Meningkatnya demokratisasi, kesejahteraan dan nilai-nilai budaya berbasis ajaran Trisakti Bung Karno.

Arah Kebijakan : Mewujudkan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan etika dan budaya politik masyarakat, memperkuat ekonomi kerakyatan dan membangun budaya gotong royong sebagai nilai-nilai dasar Trisakti Bung Karno.

2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran

Tujuan :

- a. Menurunkan jumlah penduduk miskin;
- b. Menurunkan jumlah penganggur;
- c. Mengembangkan Koperasi dan UMKM;
- d. Mewujudkan Desa Mandiri/ Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi;
- e. Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan;
- f. Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan produk dalam negeri;
- g. Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi;
- h. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan;
- i. Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS.

Sasaran :

- a. Menurunnya angka kemiskinan;
- b. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka;
- c. Terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal;

- d. Terjaminnya ketersediaan energi dengan potensi lokal;
- e. Meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas Koperasi dan UMKM;
- f. Meningkatnya kelembagaan ekonomi pedesaan;
- g. Meningkatnya kualitas produk unggulan orientasi ekspor dan pengendalian impor non migas;
- h. Meningkatnya realisasi investasi;
- i. Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak;
- j. Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan dan anak termasuk anak berkebutuhan khusus;
- k. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan;
- l. Meningkatnya kualitas dan keterampilan masyarakat;
- m. Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM.

Arah Kebijakan :

- a. Mengurangi penduduk miskin diprioritaskan pada wilayah kabupaten/kota dengan persentase di atas rata-rata Jawa Tengah;
- b. Memprioritaskan pendidikan kejuruan dan keterampilan SDM berbasis kompetensi;
- c. Optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat mesin pertanian berwawasan lingkungan;
- d. Mengembangkan regulasi ketahanan pangan/kedaulatan pangan termasuk alih fungsi lahan pertanian yang didukung dengan reformasi agraria;
- e. Meningkatkan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan berbasis sumber daya lokal dan penanganan rawan pangan serta penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
- f. Meningkatkan pemanfaatan potensi panas bumi dan energi alternatif dengan penggunaan pilihan teknologi sederhana, tepat guna dan ramah lingkungan;
- g. Meningkatkan pembangunan jaringan listrik pedesaan;
- h. Meningkatkan budaya hemat energi;
- i. Mengembangkan wirausaha baru diarahkan pada usaha kreatif bernilai tambah tinggi;
- j. Meningkatkan fasilitas akses modal kerja, pembimbingan teknis dan pendampingan manajerial Koperasi dan UMKM berbasis sumber daya lokal;
- k. Optimalisasi kelembagaan ekonomi pedesaan;

- l. Optimalisasi pengembangan akses dan informasi pasar melalui perkuatan jejaring sentra dan klaster;
- m. Peningkatan kualitas, keberagaman, produktivitas, dan promosi serta mendorong penerapan standar mutu produk lokal;
- n. Membangun kesadaran bersama untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri;
- o. Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional dan global;
- p. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata;
- q. Mendorong percepatan implementasi PUG dan PUHA;
- r. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- s. Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan kasus kekerasan berbasis gender, anak dan *trafficking*;
- t. Meningkatkan upaya pencegahan, penanganan dan pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap perempuan dan anak;
- u. Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dengan pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang pendidikan dasar dan pemberian Bantuan Siswa Miskin pada jenjang pendidikan menengah;
- v. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik;
- w. Meningkatkan ketrampilan dan kewirausahaan masyarakat;
- x. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Tujuan :

- a. Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima;
- b. Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel;
- c. Melaksanakan penegakan hukum.

Sasaran :

- a. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan provinsi;
- b. Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur serta sistem pola karier yang jelas;
- c. Meningkatnya cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. Terwujudnya kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

- e. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan;
- f. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- g. Tercapainya laporan keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
- h. Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- i. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Arah Kebijakan :

- a. Mengembangkan sumber daya aparatur yang terintegritas, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera dan sistem pembinaan karier yang terbuka;
- b. Memprioritaskan perubahan cara pandang dan perilaku dari birokrat menjadi pelayan publik;
- c. Meningkatkan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan berupa kecepatan, kemudahan dan kepastian serta transparansi proses perizinan;
- e. Meningkatkan investasi pada seluruh kabupaten/kota;
- f. Mengimplementasikan aksi PPK yang difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran, serta transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah;
- g. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- h. Menerapkan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi;
- i. Mengoptimalkan proses penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah;
- j. Menerapkan kebijakan peraturan perundang-undangan serta penanganan terhadap pelanggar peraturan daerah;
- k. Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan

Tujuan :

- a. Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama;
- b. Memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan 3 pilar kebangsaan dalam budaya dan jati diri masyarakat;
- c. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat;
- d. Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan.

Sasaran :

- a. Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama;
- b. Meningkatkan peran kelembagaan sosial masyarakat dalam menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya dan jati diri bangsa;
- c. Menguatnya semangat kebangsaan, persatuan dan jiwa patriotik;
- d. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat;
- e. Meningkatkan peran partai politik dan organisasi masyarakat dalam proses demokrasi;
- f. Meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam politik;
- g. Meningkatkan pemahaman masyarakat atas budaya Jawa;
- h. Meningkatkan sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh keluhuran budaya Jawa;
- i. Meningkatkan pelaksanaan tradisi budaya Jawa dalam kehidupan masyarakat.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelejen Daerah (Kominda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) terutama pada wilayah yang rawan konflik;
- b. Meningkatkan wawasan kebangsaan bagi masyarakat;
- c. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat terutama kelompok pemilih pemula dan masyarakat berpendidikan rendah;
- d. Meningkatkan kapasitas kader partai politik dan relawan Ormas yang terdaftar;
- e. Meningkatkan komitmen politik dan kapasitas perempuan di bidang politik;
- f. Meningkatkan pendidikan karakter dan budaya sejak dini;
- g. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya.

5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak

Tujuan :

- a. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- b. Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat.

Sasaran :

- a. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- b. Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah;

- c. Meningkatkan ketepatan waktu dan mutu pelaksanaan pembangunan daerah.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui forum *rembug*;
- b. Meningkatkan partisipasi aktif forum anak dalam pembangunan;
- c. Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mempublikasikan kebijakan dan hasil pembangunan melalui media massa;
- e. Meningkatkan pemerataan pembangunan dengan pendekatan kewilayahan.

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat

Tujuan :

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. Meningkatkan budaya baca masyarakat;
- d. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
- e. Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas.

Sasaran :

- a. Menurunnya angka kematian dan angka kesakitan;
- b. Menurunnya *Drop Out (DO)* KB dan *Unmet Need* serta meningkatnya peserta KB aktif/ *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)*;
- c. Meningkatnya kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan;
- d. Meningkatnya kualitas pendidikan;
- e. Meningkatnya budaya baca masyarakat;
- f. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi, perumahan layak huni;
- g. Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan pemenuhan prasarana sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta pemerataan tenaga medis;
- b. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- c. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

- d. Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan;
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perpustakaan;
- f. Meningkatkan kualitas RTLH dan lingkungan permukiman kumuh khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah;
- g. Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana sarana serta sistem penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat dan institusi (SPAM dan TPA Regional);
- h. Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi serta pengembangan tampungan air baku secara berkelanjutan;
- i. Meningkatkan kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipasi, penyediaan air bersih dan sanitasi serta air baku berbasis pemberdayaan;
- j. Meningkatkan capaian kinerja untuk mengawal pencapaian target SPM dalam setiap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Tujuan :

- a. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi;
- b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi;
- c. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan;
- d. Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana.

Sasaran :

- a. Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan;
- b. Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi;
- c. Meningkatnya penanganan banjir dan rob serta pantai kritis di muara sungai;
- d. Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat;
- e. Meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi;
- f. Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan;
- g. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan struktur, pelebaran, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala serta menjaga kondisi baik jalan dan jembatan, dengan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam

- pemeliharaan jalan;
- b. Meningkatkan penanganan pada ruas jalan dan jembatan utamanya untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan pengembangan wilayah (ruas perbatasan provinsi, akses wisata, akses penghubung Pantura-Pansela, pembangunan perkotaan dan perdesaan, alternatif jalan nasional dan akses langsung jalan arteri, daerah rawan bencana dan strategis lainnya);
 - c. Meningkatkan ketersediaan peralatan penanganan jalan dan SDM teknis kebinamargaan serta pengembangan sistem informasi manajemen dan publik.
 - d. Meningkatkan penataan sistem transportasi antar moda, pengembangan angkutan massal (*mass rapid transport*) di wilayah perkotaan, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu bersama dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
 - e. Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana sarana pengendalian banjir dan pantai kritis di muara sungai utamanya pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal;
 - f. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam pengembangan, penyediaan dan penanganan infrastruktur strategis utamanya kewenangan pemerintah dan kabupaten/kota (jalan tol, jalan strategis pendukung perekonomian, waduk/embung, irigasi, pengendalian daya rusak air); transportasi (bandar udara, pelabuhan, terminal, kereta api dan ASDP); pengembangan infrastruktur lintas kabupaten/kota dan penanganan rob utamanya di wilayah Pantura, penanganan Rawa Pening dan Segara Anakan;
 - g. Meningkatkan upaya dukungan pembiayaan dan penanganan dari Pemerintah dan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*), *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta mengupayakan dukungan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan kondisi infrastruktur kabupaten/kota dan desa;
 - h. Meningkatkan peran swasta dalam pemenuhan jaringan komunikasi;
 - i. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - j. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pihak terhadap fungsi dan manfaat penataan ruang berbasis DAS sebagai langkah awal sebelum penerapan sanksi atas penegakan Perda;
 - k. Meningkatkan pengelolaan dan sebaran RTH;
 - l. Meningkatkan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir dengan melibatkan peran aktif masyarakat;

- m. Meningkatkan pengendalian kerusakan dan rehabilitasi lingkungan hidup;
- n. Meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi).

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018

Visi : Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari
“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
1	Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan	Memberikan haluan pada 6 (enam) misi yang lain dalam pengamalan ajaran Tri Sakti Bung Karno	Meningkatnya demokratisasi, kesejahteraan dan nilai-nilai budaya berbasis ajaran Trisakti Bung Karno	Mewujudkan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan etika dan budaya politik masyarakat, memperkuat ekonomi kerakyatan dan membangun budaya gotong royong sebagai nilai - nilai dasar Trisakti Bung Karno.
2	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> a. Menurunkan jumlah penduduk miskin; b. Menurunkan jumlah penganggur; c. Mengembangkan Koperasi dan UMKM; d. Mewujudkan Desa Mandiri/ Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi; e. Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menurunnya angka kemiskinan; b. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka; c. Terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal; d. Terjaminnya ketersediaan energi dengan potensi lokal; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengurangi penduduk miskin diprioritaskan pada wilayah kabupaten/kota dengan persentase di atas rata-rata Jawa Tengah; b. Memprioritaskan pendidikan kejuruan dan keterampilan SDM berbasis kompetensi; c. Optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
		<p>f. Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan produk dalam negeri;</p> <p>g. Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi;</p> <p>h. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan;</p> <p>i. Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS.</p>	<p>e. Meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas Koperasi dan UMKM;</p> <p>f. Meningkatnya kelembagaan ekonomi pedesaan;</p> <p>g. Meningkatnya kualitas produk unggulan orientasi ekspor dan pengendalian impor non migas;</p> <p>h. Meningkatnya realisasi investasi;</p> <p>i. Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak;</p> <p>j. Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan dan anak termasuk anak berkebutuhan khusus;</p> <p>k. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan penyeleng-garaan pendidikan;</p> <p>l. Meningkatnya kualitas dan keterampilan masyarakat;</p> <p>m. Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM</p>	<p>modernisasi alat mesin pertanian berwawasan lingkungan;</p> <p>d. Mengembangkan regulasi ketahanan pangan/kedaulatan pangan termasuk alih fungsi lahan pertanian yang didukung dengan reformasi agraria;</p> <p>e. Meningkatkan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan berbasis sumber daya lokal dan penanganan rawan pangan serta penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;</p> <p>f. Meningkatkan pemanfaatan potensi panas bumi dan energi alternatif dengan penggunaan pilihan teknologi sederhana, tepat guna dan ramah lingkungan;</p>

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
				<ul style="list-style-type: none"> g. Meningkatkan pembangunan jaringan listrik perdesaan; h. Meningkatkan budaya hemat energi; i. Mengembangkan wirausaha baru diarahkan pada usaha kreatif bernilai tambah tinggi; j. Meningkatkan fasilitas akses modal kerja, pembimbingan teknis dan pendampingan manajerial Koperasi dan UMKM berbasis sumber daya lokal; k. Optimalisasi kelembagaan ekonomi perdesaan; l. Optimalisasi pengembangan akses dan informasi pasar melalui perkuatan jejaring sentra dan klaster; m. Peningkatan kualitas, keberagaman, produktivitas, dan promosi serta mendorong penerapan standar mutu produk lokal;

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
				<ul style="list-style-type: none"> n. Membangun kesadaran bersama untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri; o. Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional dan global; p. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata; q. Mendorong percepatan implementasi PUG dan PUHA; r. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; s. Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan kasus kekerasan berbasis gender, anak dan <i>trafficking</i>; t. Meningkatkan upaya pencegahan, penanganan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
				<p>dan pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap perempuan dan anak;</p> <p>u. Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dengan pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang pendidikan dasar dan pemberian Bantuan Siswa Miskin pada jenjang pendidikan menengah;</p> <p>v. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik;</p> <p>w. Meningkatkan ketrampilan dan kewirausahaan masyarakat;</p> <p>x. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).</p>

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
3	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”	<ul style="list-style-type: none"> a. Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima; b. Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel; c. Melaksanakan penegakan hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan provinsi; b. Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur serta sistem pola karier yang jelas; c. Meningkatnya cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah; d. Terwujudnya kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); e. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan; f. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; g. Tercapainya laporan keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian; h. Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan sumber daya aparatur yang terintegritas, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera dan sistem pembinaan karier yang terbuka; b. Memprioritaskan perubahan cara pandang dan perilaku dari birokrat menjadi pelayan publik; c. Meningkatkan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi; d. Meningkatkan kualitas pelayanan berupa kecepatan, kemudahan dan kepastian serta transparansi proses perizinan; e. Meningkatkan investasi pada seluruh kabupaten/kota; f. Mengimplementasikan aksi PPK yang difokuskan pada peningkatan kemudahan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
			<p>penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.</p>	<p>berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran, serta transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah;</p> <p>g. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;</p> <p>h. Menerapkan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi;</p> <p>i. Mengoptimisasikan proses penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah;</p> <p>j. Menerapkan kebijakan peraturan perundang-undangan serta penanganan terhadap pelanggaran peraturan daerah;</p>

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
				k. Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
4	Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama; b. Memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan 3 pilar kebangsaan dalam budaya dan jati diri masyarakat; c. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat; d. Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama; b. Meningkatnya peran kelembagaan sosial masyarakat dalam menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya dan jati diri bangsa; c. Menguatnya semangat kebangsaan, persatuan dan jiwa patriotik; d. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat; e. Meningkatnya peran partai politik dan organisasi masyarakat dalam proses demokrasi; f. Meningkatnya keterwakilan perempuan di dalam politik; g. Meningkatnya pemahaman masyarakat atas budaya Jawa; h. Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh keluhuran budaya Jawa; i. Meningkatnya pelaksanaan tradisi budaya Jawa dalam kehidupan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelejen Daerah (Kominda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) terutama pada wilayah yang rawan konflik; b. Meningkatkan wawasan kebangsaan bagi masyarakat; c. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat terutama kelompok pemilih pemula dan masyarakat berpendidikan rendah; d. Meningkatkan kapasitas kader partai politik dan relawan Ormas yang terdaftar;

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
				<ul style="list-style-type: none"> e. Meningkatkan komitmen politik dan kapasitas perempuan di bidang politik; f. Meningkatkan pendidikan karakter dan budaya sejak dini; g. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya.
5	Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; b. Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; b. Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah; c. Meningkatnya ketepatan waktu dan mutu pelaksanaan pembangunan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui forum <i>rembug</i>; b. Meningkatkan partisipasi aktif forum anak dalam pembangunan; c. Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan; d. Mempublikasikan kebijakan dan hasil pembangunan melalui media massa;

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
				e. Meningkatkan pemerataan pembangunan dengan pendekatan kewilayahan.
6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; b. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan; c. Meningkatkan budaya baca masyarakat; d. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman; e. Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menurunnya angka kematian dan angka kesakitan; b. Menurunnya <i>Drop Out</i> (DO) KB dan <i>Unmet Need</i> serta meningkatnya peserta KB aktif/ <i>Contraceptive Prevalence Rate</i> (CPR); c. Meningkatnya kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan; d. Meningkatnya kualitas pendidikan; e. Meningkatnya budaya baca masyarakat; f. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi, perumahan layak huni; g. Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pemenuhan prasarana sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta pemerataan tenaga medis; b. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; c. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; d. Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan;

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
				<ul style="list-style-type: none"> e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perpustakaan; f. Meningkatkan kualitas RTLH dan lingkungan permukiman kumuh khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah; g. Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana sarana serta sistem penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat dan institusi (SPAM dan TPA Regional); h. Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi serta pengembangan tampungan air baku secara berkelanjutan; i. Meningkatkan kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipasi, penyediaan air bersih dan sanitasi serta air baku berbasis

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
				<p>pemberdayaan;</p> <p>j. Meningkatkan capaian kinerja untuk mengawal pencapaian target SPM dalam setiap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.</p>
7	<p>Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan</p>	<p>a. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi;</p> <p>b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi;</p> <p>c. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan;</p> <p>d. Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana.</p>	<p>a. Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan;</p> <p>b. Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi;</p> <p>c. Meningkatnya penanganan banjir dan rob serta pantai kritis di muara sungai;</p> <p>d. Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat;</p> <p>e. Meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi;</p> <p>f. Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan;</p> <p>g. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.</p>	<p>a. Meningkatkan struktur, pelebaran, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala serta menjaga kondisi baik jalan dan jembatan, dengan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan;</p> <p>b. Meningkatkan penanganan pada ruas jalan dan jembatan utamanya untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan pengembangan wilayah (ruas perbatasan provinsi, akses wisata, akses penghubung Pantura-Pansela, pembangunan perkotaan dan perdesaan, alternatif jalan nasional dan</p>

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
				<p>akses langsung jalan arteri, daerah rawan bencana dan strategis lainnya);</p> <p>c. Meningkatkan ketersediaan peralatan penanganan jalan dan SDM teknis kebinamargaan serta pengembangan sistem informasi manajemen dan publik.</p> <p>d. Meningkatkan penataan sistem transportasi antar moda, pengembangan angkutan massal (<i>mass rapid transport</i>) di wilayah perkotaan, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu bersama dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;</p> <p>e. Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan</p>

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
				<p>prasarana sarana pengendalian banjir dan pantai kritis di muara sungai utamanya pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal;</p> <p>f. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam pengembangan, penyediaan dan penanganan infrastruktur strategis utamanya kewenangan pemerintah dan kabupaten/kota (jalan tol, jalan strategis pendukung perekonomian, waduk/embung, irigasi, pengendalian daya rusak air); transportasi (bandar udara, pelabuhan, terminal, kereta api dan ASDP); pengembangan infrastruktur lintas kabupaten/kota dan penanganan rob utamanya di wilayah Pantura,</p>

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
				<p>penanganan Rawa Pening dan Segara Anakan;</p> <p>g. Meningkatkan upaya dukungan pembiayaan dan penanganan dari Pemerintah dan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (<i>Public Private Partnership</i>), <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) serta mengupayakan dukungan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan kondisi infrastruktur kabupaten/kota dan desa;</p> <p>h. Meningkatkan peran swasta dalam pemenuhan jaringan komunikasi;</p> <p>i. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;</p> <p>j. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pihak terhadap fungsi dan manfaat penataan ruang berbasis DAS sebagai langkah awal sebelum</p>

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
				<p>penerapan sanksi atas penegakan Perda;</p> <p>k. Meningkatkan pengelolaan dan sebaran RTH;</p> <p>l. Meningkatkan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir dengan melibatkan peran aktif masyarakat;</p> <p>m. Meningkatkan pengendalian kerusakan dan rehabilitasi lingkungan hidup;</p> <p>n. Meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi).</p>

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 merupakan tahun kedua RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, dan merupakan keberlanjutan dari fokus tahun sebelumnya. Selain merupakan penjabaran RPJMD, pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2015 juga diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015.

a. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) merupakan hasil penyerapan aspirasi melalui reses dan rapat dengar pendapat dengan masyarakat dan/atau pemerintah daerah digunakan sebagai salah satu landasan penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah 2015. Pokok-pokok pikiran dimaksud yang harus mendapat perhatian dari eksekutif guna diakomodir dalam RKPD tahun 2015, mencakup :

1. Bidang Infrastruktur

- a) Dalam rangka pencapaian target dan prioritas pembangunan Tahun 2015 serta paska terjadinya bencana banjir dan tanah longsor diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai upaya meningkatkan kembali akses pendukung perekonomian daerah serta pemulihan perekonomian masyarakat.
- b) Pembangunan infrastruktur hendaknya dititikberatkan pada peningkatan kondisi jalan dan jembatan, irigasi pendukung pertanian seperti bendungan, waduk dan embung guna mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dan wilayah.
- c) Infrastruktur strategis seperti Bandara, Pelabuhan, Jalan Tol dan PLTU hendaknya juga menjadi perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan daya saing dan investasi daerah.
- d) Sebagai salah satu upaya pengurangan angka kemiskinan termasuk pencapaian target MDG's yang menjadi komitmen daerah dan nasional, maka penyediaan dan pemenuhan sarana air bersih dan sanitasi perdesaan - perkotaan serta pemugaran RTLH agar ditingkatkan.
- e) Pembenahan sistem dan sarana transportasi antar daerah dan wilayah diharapkan bisa meningkatkan aksesibilitas dan mengurai kemacetan, serta memberi manfaat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, dengan membuat jalan2 dan pelebaran ruas jalan.
- f) Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan memerlukan pembangunan yang integratif, dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan konservasi lingkungan hidup melalui peningkatan kapabilitas dan aksesibilitas wilayah serta modernisasi sarana dan sistem transportasi dengan

mengintegrasikan konsep ramah lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan serta upaya penanggulangan bencana.

2. Bidang Pemerintahan

- a) Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan peningkatan profesionalisme dan disiplin aparatur serta efisiensi sistem birokrasi termasuk sistem pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran yang transparan dan akuntabel.
- b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan disertai dengan keterbukaan informasi publik, untuk memperkuat sistem demokrasi dan meningkatkan kepercayaan pada pemerintahan.
- c) Tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas daerah, difokuskan pada optimalisasi peran Pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan peran serta masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan, serta pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah.

3. Bidang Perekonomian

- a) Pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, dan kemudahan dalam mengakses permodalan serta proteksi kepada pelaku UMKM guna meningkatkan daya saing UMKM.
- b) Pengembangan dan pemberdayaan Daerah Tujuan Wisata untuk meningkatkan PAD kabupaten/kota dan kesejahteraan masyarakat.
- c) Pemberdayaan bagi kelompok petani dan nelayan melalui pelatihan, pendampingan, bantuan alat, pupuk dan bibit serta fasilitasi pasca panen untuk meningkatkan produktivitas sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan serta kesejahteraan petani dan nelayan.
- d) Peningkatan efektivitas pemantauan harga dan operasi pasar sebagai upaya menjamin ketahanan pangan di masyarakat melalui ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi harga pangan pokok di pasar.
- e) Diupayakan mendorong dana desa sebagai akibat adanya UU Desa untuk dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi produktif pedesaan, khususnya pembangunan pertanian dalam arti luas.
- f) Perbaiki kondisi fisik dan infrastruktur pasar tradisional untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing pasar tradisional di tengah era global sekaligus memberikan rasa nyaman dan aman bagi pedagang dan konsumen.

4. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

- a) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat serta pemberdayaan kesejahteraan sosial utamanya bagi masyarakat rentan.

- b) Sebagai upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran, perlu disusun program dan kegiatan prioritas yang mampu mendorong perluasan dan peningkatan kesempatan kerja di perdesaan, peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, optimalisasi peran BLK, perluasan kewirausahaan serta peningkatan daya saing usaha produktif sesuai potensi daerah.
 - c) Peningkatan kualitas hidup perempuan, keterlibatan perempuan di legislatif mencapai 30%, perlindungan terhadap perempuan dan anak terhadap kekerasan, *trafficking*, dan pemenuhan hak anak.
 - d) Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui revitalisasi program KB dan peningkatan kepesertaan KB Pria, KB Mandiri, KB Perusahaan dan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
5. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- a) Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 perlu ditegakkan, termasuk melakukan upaya dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian dalam mendukung komitmen untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
 - b) Pemerintah harus berupaya memberikan dukungan yang nyata terhadap masyarakat dunia usaha dan lembaga pendidikan yang mampu mengimplementasikan kegiatan pembangunan yang bersifat *go green*.
 - c) Diperlukan upaya yang lebih intensif dalam menangani lahan kritis, panjang pantai kritis dan kerusakan ekosistem pesisir serta meningkatkan sebaran dan proporsi Ruang Terbuka Hijau di kabupaten/kota.
6. Bantuan Keuangan
- Optimalisasi bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dalam rangka pencapaian pelaksanaan tahap perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan berdikari, mandiri, berkesinambungan dan berdaya saing tinggi mendasarkan pada hasil evaluasi dan data sesuai dengan kebutuhan kabupaten/kota.
- b. Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) 2015**
- Kebijakan pembangunan nasional tahun 2015 diarahkan untuk “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”, yang dijabarkan sebagai berikut :
- a) *Pertama*, reformasi yang sedang berjalan perlu terus dilanjutkan di segala bidang, yaitu bidang Polhukhankam, Ekonomi, dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b) *Kedua*, percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian;
 - c) *Ketiga*, pembangunan yang inklusif dan peningkatan rasa keadilan.

Dengan merujuk pada RPJPN Tahun 2005-2025, dan memperhatikan hal-hal penting tersebut, prioritas dan arah pembangunan nasional difokuskan pada sembilan bidang pembangunan yaitu :1) Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; 2) Ekonomi; 3) Sarana dan Prasarana; 4) Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 5) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 6) Politik; 7) Pertahanan dan Keamanan; 8) Hukum dan Aparatur; dan 9) Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang.

Sasaran pembangunan nasional yang akan dicapai di tahun 2015, adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5-6,3 persen;
2. Inflasi dapat terkendali pada kisaran 4,5±1 persen;
3. Tingkat kemiskinan menurun menjadi sebesar 9-10 persen;
4. Tingkat pengangguran menjadi sebesar 5,7-5,9 persen.

c. Prioritas Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2015

Mendasarkan pada isu strategis, serta kebijakan upaya pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2015, maka pembangunan daerah Jawa Tengah pada **Tahun 2015** ditujukan untuk **“Meningkatkan Infrastruktur dan Kualitas Pelayanan Dasar Menuju Kemandirian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat”**.

Sedangkan **arah kebijakan** yang telah ditetapkan untuk mendorong pencapaian target dan sasaran pembangunan tahun 2015, meliputi :

1. Peningkatan sinergitas dan harmonisasi program pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan;
2. Peningkatan infrastruktur yang makin berkualitas guna mendukung pengembangan wilayah;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar yang makin luas;
4. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
5. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya;
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas wilayah.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2015 dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, maka penjabaran **prioritas dan fokus pembangunan** Jawa Tengah tahun 2015, yaitu sebagai berikut:

- a. Peningkatan sinergitas dan harmonisasi program pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan, dengan fokus :

- 1) Perluasan intervensi program/kegiatan sektoral pada kecamatan prioritas dengan tingkat kemiskinan tinggi dengan pola *quick win*;
 - 2) Perluasan intervensi penanggulangan kemiskinan dengan pola *bottom up* di semua desa/kelurahan kategori miskin tinggi, sedang dan rendah;
 - 3) Peningkatan kesejahteraan pekerja, fasilitasi pembangunan perumahan layak huni dan murah bagi pekerja serta penyediaan jaminan sosial;
 - 4) Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja;
 - 5) Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan/ketrampilan tematik di BLK sesuai kebutuhan pasar kerja;
 - 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas instruktur BLK;
 - 7) Peningkatan prasarana, sarana dan kurikulum pelatihan di BLK;
 - 8) Optimalisasi bursa lapangan kerja melalui media dan lembaga;
 - 9) Peningkatan informasi sistem *on line* pencari kerja dan pasar kerja;
 - 10) Optimalisasi penyaluran tenaga kerja melalui BPSDM dan PIKM sesuai kebutuhan dunia usaha;
 - 11) Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan calon transmigran sesuai lokasi penempatan;
 - 12) Mendorong masuknya investor ke Jawa Tengah pada bidang usaha yang banyak ciptakan lapangan kerja;
 - 13) Peningkatan fasilitasi pendampingan BOS pendidikan dasar dan pemberian bantuan siswa miskin pada jenjang pendidikan menengah;
 - 14) Peningkatan kewirausahaan baru dan ketrampilan/kecakapan hidup pemuda;
 - 15) Peningkatan kerjasama SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan;
 - 16) Pembentukan warung sosial dan penyusunan kesepakatan (MoU) dengan pemangku kepentingan sekitar;
 - 17) Perlindungan, rehabilitasi, pemberdayaan dan pemberian jaminan sosial bagi PMKS;
 - 18) Peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan di masyarakat.
- b. Peningkatan infrastruktur yang makin berkualitas guna mendukung pengembangan wilayah, dengan fokus :
- 1) Peningkatan struktur dan pelebaran pada jalan dengan MST < 8 ton dan pada jalan dengan lebar < 6 m;
 - 2) Peningkatan kondisi baik jalan dan jembatan, dengan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan;
 - 3) Peningkatan penanganan diutamakan pada jalan dan jembatan pendukung pembangunan sosial ekonomi dan budaya pada koridor

- jalur ekonomi tinggi, sentra produksi, kawasan wisata, kawasan terpencil, perbatasan, rawan dan rehabilitasi rekonstruksi bencana serta pada jalur penghubung koridor Pantai Utara dengan koridor Pantai Selatan (Pemalang-Purbalingga-Kebumen; Wiradesa-Kalibening-Banjarnegara; Weleri-Temanggung; Purworejo-Wonosobo-Kebumen; Pati-Grobogan-Surakarta);
- 4) Peningkatan ketersediaan peralatan penanganan jalan dan SDM teknis kebinamargaan;
 - 5) Fasilitasi peningkatan dan penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan Nasional dan Kabupaten/Kota (diantaranya Jalan tol trans Jawa pada ruas Semarang-Solo, Solo-Kertosono, Semarang-Batang, Batang-Pekalongan, Pekalongan-Pemalang, Pemalang-Pejagan, *underpass* Jatingaleh Kota Semarang dan *flyover* Palur Sukoharjo serta JJLS);
 - 6) Peningkatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di Daerah Irigasi kewenangan provinsi, dengan mengutamakan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta sinergitas penanganannya bersama kewenangan Pemerintah dan Kabupaten/Kota;
 - 7) Pembangunan dan revitalisasi waduk, embung dan tampungan air lainnya untuk ketersediaan air baku;
 - 8) Peningkatan kerjasama pembangunan waduk dan irigasi (Waduk Logung Kudus, Waduk Pidekso Wonogiri, Waduk Gondang Karanganyar, Waduk Matenggeng Cilacap, Waduk Kuningan Brebes, DI Prokopistan Temanggung dan DI Cikawung Cilacap) dan penanganan wilayah sungai kewenangan Nasional dan Kabupaten/Kota.
 - 9) Peningkatan penanganan sarana dan prasarana pengendalian banjir utamanya di wilayah sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal serta konservasi sungai untuk menjaga daya dukung dan daya tampungnya;
 - 10) Fasilitasi percepatan penanganan banjir/rob di wilayah pantura dan Kota Semarang secara komprehensif serta rehabilitasi rekonstruksi bencana banjir bersama Pemerintah dan Kabupaten/Kota;
 - 11) Peningkatan cakupan layanan air minum dan sanitasi;
 - 12) Peningkatan pembangunan rumah layak huni dan perbaikan lingkungan kumuh bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 - 13) Peningkatan keselamatan lalu lintas (kualitas perijinan, penegendalian dan kapasitas masyarakat, sarana prasarana keselamatan, perlintasan Kereta Api) secara komprehensif dan terpadu dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota

- 14) Fasilitasi pengembangan BRT Kota Semarang/Kedungsapur dan Solo/Subosukowonosraten (koridor, bus dan shelter) dan persiapan penerapan BRT di Purwokerto;
 - 15) Fasilitasi dukungan pembangunan intermoda darat di Terminal mangkang Semarang ;
 - 16) Pelaksanaan rintisan transportasi perdesaan;
 - 17) Pengadaan kapal ASDP, peningkatan prasarana sarana dan penyiapan operasional kapal ASDP;
 - 18) Fasilitasi dan dukungan penyelesaian jalur KA Tuntang-Ambarawa dan reaktivasi rel KA di Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang; Ambarawa-Secang-Magelang; jalur rel KA ke Pelabuhan Tanjung Emas; jalur *underpass*/layang;
 - 19) Fasilitasi dan dukungan pembangunan Bandara Dewandaru, Wirasaba, Ahmad Yani (percepatan penyelesaian pembangunan dan operasionalisasi) dan Adisumarmo (aksesibilitas); Pelabuhan Tanjung Emas dengan Terminal Kendal dan Pelabuhan Karimunjawa - Jepara;
 - 20) Peningkatan dan operasionalisasi sistem informasi pembangunan infrastruktur jalan, PSDA dan perhubungan.
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar yang makin luas, dengan fokus :
- 1) Percepatan implementasi pendidikan menengah universal untuk meningkatkan APK pendidikan menengah;
 - 2) Perluasan fasilitasi anak usia sekolah dan berkebutuhan khusus yang belum tertangani serta anak putus sekolah melalui lembaga non formal;
 - 3) Peningkatan penuntasan buta aksara usia non produktif;
 - 4) Optimalisasi penyelenggaraan program kesetaraan dan peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti program kesetaraan;
 - 5) Optimalisasi prasarana sarana pendidikan formal dan informal;
 - 6) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 7) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - 8) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular maupun tidak menular serta Surveillance epidemiologi, penanganan KLB dan bencana;
 - 9) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan serta prasarana sarana layanan dasar dan rujukan;
 - 10) Peningkatan pelaksanaan PUG dan PUHA;
 - 11) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta penanganan kekerasan berbasis gender dan anak, serta *trafficking*;
 - 12) Perluasan peningkatan peserta KB Mandiri (khususnya KB Pria) dan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang;

- 13) Perluasan program KB dalam kurikulum pendidikan sejak dini dan pengembangan media KIE KB di Desa/Kelurahan;
 - 14) Penguatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - 15) Peningkatan dan optimalisasi implementasi SIDA;
 - 16) Peningkatan peran dan fungsi seni, budaya dan budi pekerti, serta pelestarian cagar budaya;
 - 17) Peningkatan kualitas dan kapasitas kepemudaan dengan pengembangan kelembagaan pemuda serta optimalisasi penyelenggaraan pusat pendidikan dan latihan pelajar dalam rangka peningkatan pembinaan dan kualitas keolahragaan;
 - 18) Pengembangan budaya baca masyarakat dengan optimalisasi pendayagunaan perpustakaan keliling, perpustakaan desa dan daerah, serta penyediaan mobil pintar.
- d. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dengan fokus :
- 1) Peningkatan ekonomi kreatif berbasis produk unggulan daerah didukung rekayasa teknologi;
 - 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kemitraan serta penciptaan kondusivitas iklim usaha untuk mendukung daya saing Koperasi dan UMKM;
 - 3) Pembenahan obyek wisata dan infrastruktur destinasi wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata;
 - 4) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan didukung pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
 - 5) Peningkatan penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan produk pertanian;
 - 6) Peningkatan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan, didukung penguatan kelembagaan;
 - 7) Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
 - 8) Membangun jaringan antar petani dan pengolah/industri;
 - 9) Implementasi kartu petani dan BBM nelayan;
 - 10) Peningkatan peran kelembagaan pengelolaan sumber daya air dan irigasi partisipatif;
 - 11) Dukungan peningkatan kondisi dan pengembangan irigasi dan waduk/embung kewenangan kabupaten/kota melalui bantuan keuangan;
 - 12) Pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi, dengan pengembangan dan pembangunan PLTS, PLTMH, dan pengawasan pengendalian PLTPB;
 - 13) Peningkatan rasio elektrifikasi melalui jaringan listrik perdesaan;
 - 14) Peningkatan budaya hemat energi.

- e. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya, dengan fokus :
 - 1) Penguatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 2) Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
 - 3) Pengendalian alih fungsi hutan dan lahan produktif menjadi lahan budidaya lainnya untuk mendukung perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan menjamin kelestarian lingkungan hidup;
 - 4) Pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
 - 5) Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan penguatan kelembagaan masyarakat, dan penegakkan hukum;
 - 6) Peningkatan pengelolaan RTH dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitasnya;
 - 7) Peningkatan rehabilitasi lahan kritis dan penanganan kerusakan wilayah pesisir, dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
 - 8) Peningkatan fungsi kelembagaan dan sistem dalam rangka pengurangan risiko bencana.
- f. Peningkatan tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas wilayah, dengan fokus :
 - 1) Penyusunan kebijakan afirmatif dan peningkatan kapasitas perempuan dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan pada lembaga-lembaga pengambilan keputusan;
 - 2) Peningkatan demokratisasi dan pendidikan politik masyarakat, penegakan hukum dan penghormatan HAM;
 - 3) Promosi jabatan struktural secara terbuka kepada semua PNS yang memenuhi syarat;
 - 4) Pengembangan kapasitas, kedisiplinan, dan kinerja aparatur.

Tujuan, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 merupakan upaya guna mencapai target **sasaran pembangunan daerah** tahun 2015 yaitu :

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 – 6,5%;
- b. Laju inflasi sebesar $5 \pm 1\%$;
- c. PDRB per kapita sebesar Rp. 7,44 juta;
- d. Indeks Gini sebesar 0,347 dan Indeks Williamson sebesar 0,7007;
- e. Persentase penduduk miskin sebesar 9,05 – 8,75%;
- f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,93 – 4,62%;
- g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,68;

h. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 68,22 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 70,49.

Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan Tahun 2015, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan Program Prioritas Daerah Tahun 2015 yang bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta lintas sektor dan lintas wilayah yang dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
	Indikator	Target Capaian		
1	2	3	4	5
<p>1. Peningkatan sinergitas dan harmonisasi program pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan, dengan fokus :</p> <p>a. Perluasan intervensi program/kegiatan sektoral pada kecamatan prioritas dengan tingkat kemiskinan tinggi dengan pola <i>quick win</i>;</p> <p>b. Perluasan intervensi penanggulangan kemiskinan dengan pola <i>bottom up</i> di semua desa/kelurahan kategori miskin tinggi, sedang dan rendah;</p> <p>c. Peningkatan kesejahteraan pekerja, fasilitasi pembangunan perumahan layak huni dan murah bagi pekerja serta penyediaan jaminan sosial;</p> <p>d. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja;</p>	<p>- Tingkat Patisipasi Angkatan Kerja (%)</p> <p>- Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja (%)</p> <p>- Rasio Upah Minimum Kabupaten/kota dibanding KHL (%)</p>	<p>- 72,58</p> <p>- 70,18</p> <p>- 97,5</p>	<p>- Program Peningkatan Kesempatan Kerja</p> <p>- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>- Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan</p>	<p>- Dinakertrans duk</p>

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
	Indikator	Target Capaian		
1	2	3	4	5
e. Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan/ketrampilan tematik di BLK sesuai kebutuhan pasar kerja; f. Peningkatan kualitas dan kuantitas instruktur BLK; g. Peningkatan prasarana, sarana dan kurikulum pelatihan di BLK; h. Optimalisasi bursa lapangan kerja melalui media dan lembaga; i. Peningkatan informasi sistem <i>on line</i> pencari kerja dan pasar kerja; j. Optimalisasi penyaluran tenaga kerja melalui BPSDM dan PIKM sesuai kebutuhan dunia usaha; k. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan calon transmigran sesuai lokasi penempatan;	<ul style="list-style-type: none"> - Calon Transmigran yang meningkat ketrampilannya setelah mendapatkan Pelatihan Dasar Umum (PDU) 	<ul style="list-style-type: none"> - 275 KK 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinakertrans duk
l. Mendorong masuknya investor ke Jawa Tengah pada bidang usaha yang banyak ciptakan lapangan kerja;	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah investor PMA/PMDN (proyek) - Jumlah nilai investasi PMA/PMDN (Rp. Trilyun) - Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (orang) 	<ul style="list-style-type: none"> - 36 - 3,342 - 1.342 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi 	<ul style="list-style-type: none"> - BPMD

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
	Indikator	Target Capaian		
1	2	3	4	5
<p>m. Peningkatan fasilitasi pendampingan BOS pendidikan dasar dan pemberian bantuan siswa miskin pada jenjang pendidikan menengah;</p> <p>n. Peningkatan kerjasama SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan;</p> <p>o. Peningkatan kewirausahaan baru dan ketrampilan/kecakapan hidup pemuda;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lama Perijinan Investasi (hari) - APK PAUD/TK (4-6 tahun) - APK PAUD (0-6 tahun) - APK SD/SDLB/MI/Paket A - APM SD/SDLB/MI/Paket A - APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B - APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B - APK SMA/SMALB/MA/ SMK/ Paket C - APM SMA/SMALB/MA/ SMK/ Paket C - Jumlah desa vokasi yang dikembangkan - Jumlah pelaku/kelompok masyarakat yang terfasilitasi dalam pendidikan kemasyarakatan - Jumlah kewirausahaan pemuda (orang/kelompok) 	<ul style="list-style-type: none"> - 10 - 75,00 - 53,00 - 109,13 - 100 - 100,56 - 79,30 - 74,00 - 60,00 - 35 - 38.000 - 650 /85 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pendidikan Dasar Menengah - Program Pendidikan Non Formal dan Informal - Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan - Dinpora

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
	Indikator	Target Capaian		
1	2	3	4	5
<p>p. Pembentukan warung sosial dan penyusunan kesepakatan (MoU) dengan pemangku kepentingan sekitar;</p> <p>q. Perlindungan, rehabilitasi, pemberdayaan dan pemberian jaminan sosial bagi PMKS;</p> <p>r. Peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan di masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penerima manfaat menjelang purna bina yang dibina - Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan (orang) - Persentase penanganan daerah rawan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 MoU penanganan PM Balai Resos jelang purna bina (re-sosialisasi) - 34.807 - 60 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya - Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial - Program Peningkatan Ketahanan Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial - BKP
<p>2. Peningkatan infrastruktur yang makin berkualitas guna mendukung pengembangan wilayah, dengan fokus:</p> <p>a. Peningkatan struktur dan pelebaran pada jalan dengan MST < 8 ton dan pada jalan dengan lebar < 6 m;</p> <p>b. Peningkatan kondisi baik jalan dan jembatan, dengan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan;</p> <p>c. Peningkatan penanganan diutamakan pada jalan dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase panjang jalan prov sebagai jalan kolektor (MST \geq 8 Ton) - Persentase panjang jalan Prov dengan lebar > 6 m - Panjang jalan yang ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya (km); - Persentase jalan dalam kondisi baik; 	<ul style="list-style-type: none"> - 74,80 - 64,88 - 366,990 - 88,20 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Jalan dan penggantian Jembatan; - Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan; - Peningkatan sarana prasarana kebinamargaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Bina Marga

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
	Indikator	Target Capaian		
1	2	3	4	5
<p>jembatan pendukung pembangunan sosial ekonomi dan budaya pada koridor jalur ekonomi tinggi, sentra produksi, kawasan wisata, kawasan terpencil, perbatasan, rawan dan rehabilitasi rekonstruksi bencana serta pada jalur penghubung koridor Pantura dengan koridor Pansela (Pemalang-Purbalingga-Kebumen; Wiradesa-Kalibening-Banjarnegara; Weleri-Temanggung; Purworejo-Wonosobo-Kebumen; Pati-Grobogan-Surakarta);</p> <p>d. Peningkatan ketersediaan peralatan penanganan jalan dan SDM teknis kebinamargaan;</p> <p>e. Fasilitasi peningkatan dan penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan Nasional dan Kabupaten/Kota (diantaranya Jalan tol trans Jawa pada ruas Semarang-Solo, Solo-Kertosono, Semarang-Batang, Batang-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Keikutsertaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan; - Pemenuhan kebutuhan alat kebinamargaan (alat berat dan alat laboratorium) (%); - Persentase panjang jalan yang sudah dileger (%); - Terfasilitasinya peningkatan dan penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan Nasional dan Kabupaten/Kota; 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan - 86,71 - 80,60 - Terlaksananya rapat koordinasi pengendalian dan sinkronisasi penanganan Jalan Prov, Nasional dan Kab/Kota secara berkala 		

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
	Indikator	Target Capaian		
1	2	3	4	5
<p>Pekalongan, Pekalongan-Pemalang, Pemalang-Pejagan, <i>underpass</i> Jatingaleh Kota Semarang dan <i>flyover</i> Palur Sukoharjo serta JJLS);</p> <p>f. Peningkatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di Daerah Irigasi kewenangan provinsi, dengan mengutamakan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta sinergitas penanganannya bersama kewenangan Pemerintah dan Kabupaten/Kota;</p> <p>g. Pembangunan dan revitalisasi waduk, embung dan tampungan air lainnya untuk ketersediaan air baku;</p> <p>h. Peningkatan kerjasama pembangunan waduk dan irigasi (Waduk Logung Kudus, Waduk Pidekso Wonogiri, Waduk Gondang Karanganyar, Waduk Matenggeng Cilacap, Waduk Kuningan Brebes, DI Progopistan Temanggung dan DI Cikawung Cilacap) dan penanganan wilayah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik; - Persentase pemenuhan kebutuhan air baku; - Terfasilitasinya kerjasama dan pelaksanaan pembangunan waduk dan irigasi serta koordinasi penanganan wilayah sungai kewenangan Nasional dan Kab/Kota; 	<ul style="list-style-type: none"> - 76,00 - 54,00 - Berjalannya pembangunan Waduk dan Irigasi dan rapat koordinasi secara berkala bersama BBWS, Kelembagaan PSDA dan Pemerintah serta Kab/Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya - Program penyediaan dan pengelolaan air baku - Program pengendalian banjir dan pengamanan pantai - Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas PSDA

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
	Indikator	Target Capaian		
1	2	3	4	5
<p>sungai kewenangan Nasional dan Kab/Kota;</p> <p>i. Peningkatan penanganan sarana dan prasarana pengendalian banjir utamanya di wilayah sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal serta konservasi sungai untuk menjaga daya dukung dan daya tampungnya;</p> <p>j. Fasilitasi percepatan penanganan banjir/rob di wilayah pantura dan Kota Semarang secara komprehensif serta rehabilitasi rekonstruksi bencana banjir bersama Pemerintah dan Kabupaten/Kota;</p> <p>k. Peningkatan cakupan layanan air minum dan sanitasi;</p> <p>l. Peningkatan pembangunan rumah layak huni dan perbaikan lingkungan kumuh bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;</p>	<p>- Menurunnya luasan daerah genangan akibat banjir;</p> <p>- Terfasilitasinya penanganan rob dan banjir serta rehabilitasi dan rekonstruksi banjir bersama Pemerintah dan Kabupaten/Kota;</p> <p>- Cakupan pelayanan air minum perkotaan (%)</p> <p>- Cakupan pelayanan air minum perdesaan (%)</p> <p>- Cakupan pelayanan sanitasi (%)</p> <p>- Rasio rumah layak huni</p> <p>- Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani (%)</p>	<p>- 3 % (5.000 Ha)</p> <p>- Terlaksananya penanganan banjir/rob dan rehabilitasi rekonstruksi bencana banjir serta rapat koordinasi rencana penanganan banjir/rob kota Semarang</p> <p>- 75,00</p> <p>- 52,80</p> <p>- 72,00</p> <p>- 76,74</p> <p>- 14,88</p>	<p>- Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi</p> <p>- Program Pembangunan Perumahan</p>	<p>- Dinas Cipkataru</p> <p>- Bapermasdes</p> <p>- Dinas Cipkataru</p> <p>- Bapermasdes</p>

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
	Indikator	Target Capaian		
1	2	3	4	5
<p>m. Peningkatan keselamatan lalu lintas (kualitas perijinan, penengendalian dan kapasitas masyarakat, sarana prasarana keselamatan, perlintasan Kereta Api) secara komprehensif dan terpadu dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;</p> <p>n. Fasilitasi pengembangan BRT Kota Semarang/Kedungsapuran dan Solo/Subosukowonosraten (koridor, bus dan shelter) dan persiapan penerapan BRT di Purwokerto;</p> <p>o. Fasilitasi dukungan pembangunan intermoda darat di Terminal mangkang Semarang ;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan ketersediaan prasarana keselamatan : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jalan provinsi (%) ✓ Perlintasan KA (lokasi) - Peningkatan kualitas perijinan dan kapasitas masyarakat - Terfasilitasinya pengembangan BRT - Terfasilitasinya pembangunan intermoda darat di Terminal Mangkang 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 34,00% ✓ 25 lokasi - 100 % perijinan yang di selesaikan - Pelaksanaan rapat koordinasi dan sosialisasi serta pelatihan kepada masyarakat dan <i>stakeholders</i> perhubungan - Pengembangan 1 Koridor BRT Kota Semarang/Kedungsepur, pembangunan shelter di Solo/Subosukawonosraten dan dokumen pengembangan BRT Purwokerto - Kesepakatan dan meningkatnya dukungan pemerintah dan <i>stakeholders</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Perhubungan Darat - Program Perhubungan Laut - Program Perhubungan Udara 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perhubungan dan Kominfo

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
	Indikator	Target Capaian		
1	2	3	4	5
<p>p. Pelaksanaan rintisan transportasi perdesaan;</p> <p>q. Pengadaan kapal ASDP, peningkatan prasarana sarana dan penyiapan operasional kapal ASDP;</p> <p>r. Fasilitasi dan dukungan penyelesaian jalur KA Tuntang-Ambarawa dan reaktivasi rel KA di Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang; Ambarawa-Secang-Magelang; jalur rel KA ke Pelabuhan Tanjung Emas; jalur <i>underpass</i>/layang;</p> <p>s. Fasilitasi dan dukungan pembangunan Bandara Dewandaru, Wirasaba, Ahmad Yani (percepatan penyelesaian pembangunan dan operasionalisasi) dan Adisumarmo (aksesibilitas); Pelabuhan Tanjung Emas dengan Terminal Kendal dan pelabuhan karimunjawa - jebara;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi pembentukan pengelola transportasi perdesaan - Meningkatnya pelayanan ASDP di Jawa Tengah - Terfasilitasinya penyelesaian jalur KA strategis mendukung pengembangan wilayah di Jawa Tengah - Terfasilitasinya pembangunan dan pengembangan bandara dan pelabuhan di Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya 1 uji coba pengelola transportasi perdesaan - Penyiapan operasional dan pengadaan 1 kapal ASDP serta pembangunan ASDP di Jepara dan Cilacap - Terselenggaranya rapat koordinasi dan adanya penanganan dari Pemerintah Prov/ Pemerintah / PT.KAI penyelesaian jalur KA strategis. - Terlaksananya pengembangan bandara Dewandaru (sisi darat) dan Wirasaba (rintisan penanganan); koordinasi dan pengendalian percepatan penyelesaian bandara Ahmad Yani; koordinasi aksesibilitas Bandara Adisumarmo; 		

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
	Indikator	Target Capaian		
1	2	3	4	5
t. Peningkatan dan operasionalisasi sistem informasi pembangunan infrastruktur jalan, PSDA dan perhubungan.	- Meningkatnya kualitas sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi	Dukungan Pemerintah dalam penyelesaian jalan akses dan penanganan pelabuhan niaga terminal Kendal, pelabuhan Karimunjawa-Jepara dan koordinasi percepatan penyelesaian pengembangan pelabuhan Tanjung Emas - SIM dapat akomodasi "kontrol" masyarakat dan mulai tersedianya data infrastruktur kewenangan Kab/Kota dan Nasional secara bertahap.	- Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. - Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	- Dinas Bina Marga - Dinas PSDA
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar yang makin luas, dengan fokus : a. Peningkatan implementasi pendidikan menengah universal untuk meningkatkan APK pendidikan menengah;	- APK PAUD/TK (4-6 tahun) - APK PAUD (0-6 tahun) - APK SD/SDLB/MI/Paket A - APM SD/SDLB/MI/Paket A	- 75,00 - 53,00 - 109,13 - 100	- Program Pendidikan Anak Usia Dini - Program Pendidikan Dasar - Program Pendidikan	- Dinas Pendidikan

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
	Indikator	Target Capaian		
1	2	3	4	5
<p>b. Perluasan fasilitasi anak usia sekolah dan berkebutuhan khusus yang belum tertangani serta anak putus sekolah melalui lembaga non formal;</p> <p>c. Peningkatan penuntasan buta aksara usia non produktif;</p> <p>d. Optimalisasi penyelenggaraan program kesetaraan dan peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti program kesetaraan;</p> <p>e. Optimalisasi prasarana sarana pendidikan formal dan informal;</p> <p>f. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B - APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B - APK SMA/SMALB/MA/ SMK/ Paket C - APM SMA/SMALB/MA/ SMK/ Paket C - APK Pendidikan Khusus - Angka Putus Sekolah SD/MI - Angka Putus Sekolah SMP/MTs - Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK - Angka Kelulusan SD/MI dan Paket A - Angka Kelulusan SMP/MTs dan Paket B - Angka Kelulusan SMA/MA/SMK dan Paket C - Nilai Rata-Rata SD/MI - Nilai Rata-Rata SMP/MTs - Nilai Rata-Rata SMA/MA/SMK - % Buta aksara > 15 Th 	<ul style="list-style-type: none"> - 100,56 - 79,30 - 74,00 - 60,00 - 56,00 - 0,08 - 0,25 - 0,06 - 99,97 dan 95,40 - 99,19 dan 96,25 - 99,96 dan 98,25 - 7,11 - 6,87 - 7,74 - 3,00 	<p>Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pendidikan Non-Formal dan Informal - Program Pendidikan Khusus - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 	

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
	Indikator	Target Capaian		
1	2	3	4	5
	- % Ruang kelas SD/MI sesuai standar nasional pendidikan	- 65		
	- % Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar nasional pendidikan	- 79		
	- % Ruang kelas SMA/MA/SMK sesuai standar nasional pendidikan	- 84		
	- % SD/SDLB/ MI yang terakreditasi	- 100		
	- % SMP/ SMPLB/ MTs yang terakreditasi	- 100		
	- % SMA/ SMALB/ MA/SMK yang terakreditasi	- 100		
	- % Pendidik berkualifikasi S1/D4	- 76		
g. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak;	- Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 KH)	- 118	- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	- Dinas Kesehatan
h. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular maupun tidak menular serta Surveillance epidemiologi, penanganan KLB dan bencana;	- Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 KH)	- 12,00	- Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	
	- Angka Kematian Balita (AKABA) (per 1.000 KH)	- 11,85	- Program Pelayanan Kesehatan	
i. Peningkatan kualitas dan	- Angka Kematian DBD (%)	- <1	- Program Kesehatan Lingkungan	

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
	Indikator	Target Capaian		
1	2	3	4	5
j. Peningkatan pelaksanaan PUG dan PUHA;	<ul style="list-style-type: none"> - Produk Kebijakan PUG (buah) - Jumlah Kebijakan perlindungan hak perempuan (buah) - Rasio Program dan Kegiatan responsif gender di SKPD Provinsi (%) - Rasio Anggaran Responsif Gender di SKPD Prov (%) - Rasio Kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam RPJM, Renstra SKPD dan Renja SKPD (%) 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 - 1 - 48 - 19,2 - 65,99 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak - Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 	- BP3AKB
k. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta penanganan kekerasan berbasis gender dan anak, serta <i>trafficking</i> ;	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio kabupaten/kota menuju Kota Layak Anak - Rasio KDRT pada perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> - 77,1 - 0,026 		
l. Perluasan peningkatan peserta KB Mandiri (khususnya KB Pria) dan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang;	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%)</i> - DO KB (%) - <i>Unmetneed (%)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - 78,00 - 14,50 - 9,75 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pelayanan Keluarga Berencana - Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja 	- BP3AKB
m. Perluasan program KB dalam	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase usia perkawinan 	<ul style="list-style-type: none"> - 2,20 		

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
	Indikator	Target Capaian		
1	2	3	4	5
<p>kurikulum pendidikan sejak dini dan pengembangan media KIE KB di Desa/Kelurahan;</p> <p>n. Penguatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial;</p> <p>o. Peningkatan dan optimalisasi implementasi SIDA;</p> <p>p. Peningkatan peran dan fungsi seni, budaya dan budi pekerti serta pelestarian cagar budaya</p> <p>q. Peningkatan kualitas dan kapasitas kepemudaan dengan pengembangan kelembagaan pemuda serta optimalisasi penyelenggaraan pusat pendidikan dan latihan pelajar</p>	<p>perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun</p> <p>- Jumlah sarana dan prasarana sosial</p> <p>- Jumlah PSKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS dan UKS</p> <p>- Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah</p> <p>- Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan</p> <p>- Penerapan kurikulum muatan lokal bahasa Jawa</p> <p>- Jumlah Organisasi Pemuda (OK/org)</p> <p>- Jumlah Organisasi Olah Raga (Pengurus Provinsi)</p> <p>- Jumlah Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan</p>	<p>- 10</p> <p>- 2.368</p> <p>- 11 desa inovatif; 6 kab/kota inovatif; 6 klaster</p> <p>- 10,5</p> <p>- 100 %</p> <p>- 59/ 70</p> <p>- 72</p> <p>- 50</p>	<p>- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <p>- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</p> <p>- Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah</p> <p>- Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya</p> <p>- Program Pendidikan Dasar</p> <p>- Program Pendidikan Menengah</p> <p>- Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>- Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/ Organisasi Olahraga</p>	<p>- Dinas Sosial</p> <p>- Balitbang</p> <p>- Dinbudpar</p> <p>- Disdik</p> <p>- Dinpora</p>

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
	Indikator	Target Capaian		
1	2	3	4	5
<p>dalam rangka peningkatan pembinaan dan kualitas keolahragaan;</p> <p>r. Pengembangan budaya baca masyarakat dengan optimalisasi pendayagunaan perpustakaan keliling, perpustakaan desa dan daerah, serta penyediaan mobil pintar.</p>	<p>(SP3)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Cabang Olahraga Unggulan - Jumlah klub OR - Jumlah PPLPD - Jumlah Klub Olahraga/ Ekstra Kurikuler <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi per Tahun - Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Provinsi - Jumlah Perpustakaan Desa yang memenuhi standar perpustakaan 	<ul style="list-style-type: none"> - 8 Cabor - 150 klub - 15 PPLPD (160 org) - 105 Klub <ul style="list-style-type: none"> - 807.085 - 223.946 - 921 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan - Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemasaryakatan Olahraga - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Budaya Baca - Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan - Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Arpus
<p>4. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dengan fokus :</p> <p>a. Peningkatan ekonomi kreatif berbasis produk unggulan daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Produk/komoditas OVOP (komoditas) 	<ul style="list-style-type: none"> - 140 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinkop dan UMKM

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
	Indikator	Target Capaian		
1	2	3	4	5
<p>didukung rekayasa teknologi;</p> <p>b. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kemitraan serta penciptaan kondusivitas iklim usaha untuk mendukung daya saing Koperasi dan UMKM;</p> <p>c. Pembenahan obyek wisata dan infrastruktur destinasi wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presentase koperasi sehat - Persentase koperasi aktif - Nilai ekspor Non Migas (Jt US\$) - Nilai impor non migas (Jt US\$) - Ekspor bersih perdagangan (Jt US\$) - Pertumbuhan Industri Pengolahan (%) 	<ul style="list-style-type: none"> - 16,20 - 81,05 - 5.171 - 5.082 - 89 - 5,20 	<p>dan UMKM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal - Program Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor - Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan - Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perindag - Dinas Budpar
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara (org) - Jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara (org) - Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara (hari) - Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara 	<ul style="list-style-type: none"> - 29.218.463 - 395.261 - 2,94 - 2,41 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 	

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
	Indikator	Target Capaian		
1	2	3	4	5
	(hari)			
	- Rata-rata pengeluaran belanja wisatawan nusantara (rupiah)	- 671.002		
	- Rata-rata pengeluaran belanja wisatawan mancanegara (US dollar)	- 490,14		
	- Jumlah Daya Tarik Wisata	- 395		
	- Jumlah Desa Wisata	- 165		
d. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan didukung pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;	- Produksi Padi (ton)	- 10.228.197	- Program Pengembangan Agribisnis	- Dinperten TPH
e. Peningkatan penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan produk pertanian;	- Produksi Jagung (ton)	- 3.016.834	- Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian	- Dinbun - Dinakkeswan - Biro Bina Produksi - Set. Bakorluh
f. Peningkatan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan, didukung penguatan kelembagaan;	- Produksi Kedelai (ton)	- 143.389		
g. Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;	- Produksi Tebu (ton)	- 5.228.010		
h. Membangun jaringan antar petani	- Produksi Kelapa (ton)	- 186.198		
	- Produksi Daging (Kg)	- 282.661.352		
	- Produksi Susu (liter)	- 101.465.006		
	- Produksi Telur (Kg)	- 285.726.795		
	- Jumlah Balai Penyuluhan yang berkualitas	- 20		
	- Jumlah Posluhdes yang berkualitas	- 50	- Program Peningkatan Ketahanan Pangan	- BKP
	- Jumlah Regulasi Kedaulatan Pangan	- 1	- Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	
	- Ketersediaan Pangan Utama (ton) Beras	- 5.746.958	- Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola	
	- Persentase Penguatan	- 80		

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
	Indikator	Target Capaian		
1	2	3	4	5
<p>dan pengolah/industri;</p> <p>i. Implementasi kartu petani dan BBM nelayan;</p> <p>j. Peningkatan peran kelembagaan pengelolaan sumber daya air dan irigasi partisipatif;</p> <p>k. Dukungan peningkatan kondisi dan pengembangan irigasi dan waduk/embung kewenangan kabupaten/kota melalui bantuan keuangan;</p> <p>l. Pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi, dengan pengembangan dan pembangunan PLTS, PLTMH, dan pengawasan pengendalian PLTPB;</p> <p>m. Peningkatan rasio elektrifikasi</p>	<p>cadangan pangan (%)</p> <p>- Persentase Ketersediaan informasi pasokan, harga, & akses pangan di daerah (%)</p> <p>- Penanganan daerah rawan pangan (%)</p> <p>- Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)</p> <p>- Skor PPH</p> <p>- Produksi Perikanan tangkap (Ton)</p> <p>- Produksi Perikanan budidaya (Ton)</p> <p>- Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita)</p> <p>- Rasio Elektrifikasi (%)</p> <p>- Persentase pemanfaatan EBT terhadap total konsumsi energi</p>	<p>- 100</p> <p>- 60</p> <p>- 80</p> <p>- 91,13</p> <p>- 306.868,21</p> <p>- 309.949,63</p> <p>- 19,59</p> <p>- 87,42</p> <p>- 7,74</p>	<p>Konsumsi Pangan</p> <p>- Program Pengembangan Perikanan Tangkap</p> <p>- Program Pengembangan Perikanan Budidaya</p> <p>- Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan</p> <p>- Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas</p> <p>- Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi</p>	<p>- Dinas Lutkan</p> <p>- Dinas ESDM</p>

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
	Indikator	Target Capaian		
1	2	3	4	5
melalui jaringan listrik perdesaan; n. Peningkatan budaya hemat energi.				
5. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya, dengan fokus : a. Penguatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; b. Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; c. Pengendalian alih fungsi hutan dan lahan produktif menjadi lahan budidaya lainnya untuk mendukung perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan menjamin kelestarian lingkungan hidup; d. Pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup; e. Peningkatan pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi status mutu air (SPM) (%) - Informasi status mutu udara ambien (SPM) (%) - Jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM) (%) - Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dgn rencana tata ruang (%) - Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%) - Luas hutan yang dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman bawah tegakan (Ha) - Persentase unit usaha masyarakat sekitar hutan yang berkembang (%) - Persentase luasan 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 - 100 - 100 - 64 - 15 - 10.000 - 20 - 86 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan - Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam - Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan - Program Pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> - BLH - Dinas Ciptakaru - Dinas Kehutanan - Dinas ESDM

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
	Indikator	Target Capaian		
1	2	3	4	5
<p>pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan penguatan kelembagaan masyarakat, dan penegakkan hukum;</p> <p>f. Peningkatan pengelolaan RTH dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitasnya;</p> <p>g. Peningkatan rehabilitasi lahan kritis dan penanganan kerusakan wilayah pesisir, dengan melibatkan peran aktif masyarakat;</p> <p>h. Peningkatan fungsi kelembagaan dan sistem dalam rangka pengurangan risiko bencana.</p>	<p>pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas RTH di wilayah perkotaan (Ha) - Luas penanaman mangrove (Ha) - Luas terumbu karang buatan (Ha) - Persentase upaya mitigasi bencana alam geologi - Kabupaten/kota memiliki prasarana sarana penanggulangan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - 40 - 8,13 - 5,13 - 17,47 - 35 	<p>Pertambangan dan Air Tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan - Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi - Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - BLH - Dinas Kanlut - Dinas ESDM - Set. BPBD
<p>6. Peningkatan tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas wilayah, dengan fokus :</p> <p>a. Penyusunan kebijakan afirmatif dan peningkatan kapasitas perempuan dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan pada lembaga-lembaga pengambilan keputusan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase partisipasi perempuan bekerja dalam lembaga pemerintahan (%) - Persentase keterwakilan publik perempuan di lembaga parlemen (%) - Persentase perempuan di lembaga swasta (%) 	<ul style="list-style-type: none"> - 2,45 - 30 - 93,88 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 	<ul style="list-style-type: none"> - BP3AKB

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
	Indikator	Target Capaian		
1	2	3	4	5
<p>b. Peningkatan demokratisasi dan pendidikan politik masyarakat, penegakan hukum dan penghormatan HAM;</p> <p>c. Promosi jabatan struktural secara terbuka kepada semua PNS yang memenuhi syarat;</p> <p>d. Pengembangan kapasitas, kedisiplinan, dan kinerja aparatur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Tengah - Penegakkan Perda Provinsi - Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi - Penanganan gangguan keamanan dalam negeri - Terlaksananya promosi jabatan struktural secara terbuka - <i>Indonesia Governance Indeks (IGI)</i> - Peningkatan PAD (%) - Persentase Aset yang dikelola dengan baik (%) - Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern 	<ul style="list-style-type: none"> - 68,11 - 100% - 35 kabupaten/kota - Penanganan konflik sosial 85% - eselon I, II, III, IV - 5,94 - 19,53 - 85 - 15 SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat - Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan - Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan - Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Pengelolaan Aset Daerah - Program Peningkatan Sistem Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bakesbang-polinmas - Satpol PP - Biro Hukum - Bakesbang-polinmas - BKD - 15 SKPD - Biro Keuangan - DPPAD - DPPAD - Inspektorat

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
	Indikator	Target Capaian		
1	2	3	4	5
	Pemerintah - Jumlah kabupaten/kota mengoperasikan SIAK - Jumlah SKPD/UPTD yang melakukan pengelolaan arsip secara baku - Jumlah SKPD yang mengembangkan teknologi informasi - Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu (dok) - Evaluasi Dokumen perencanaan daerah (dok)	- 35 kab/kota - 12 SKPD - 59 - 1 - 1	Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH - Program Penataan Administrasi Kependudukan - Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan - Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi - Program Perencanaan Pembangunan Daerah	- Dinasakertr ansdukcapil - Biro Tapem - Badan Arpus - Dinas Perhubungan dan Kominfo - Bappeda

Guna mendukung tercapainya target dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2015, maka ditetapkan pagu indikatif untuk belanja langsung (tidak termasuk belanja untuk BLUD dan belanja Eks BAU) pada tiap prioritas pembangunan daerah Tahun 2015, sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Pagu Indikatif Anggaran Prioritas Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

No	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	Pagu Indikatif	
		Ribu Rp	%
1.	Peningkatan sinergitas dan harmonisasi program pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi Kewilayahan	<u>228.505.181</u>	<u>6,07</u>
	a. Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa	7.600.000	0,20
	b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	4.325.000	0,11
	c. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	10.329.388	0,27
	d. Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	7.580.000	0,20
	e. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	970.000	0,02
	f. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	3.700.000	0,10
	g. Program Pendidikan Non Formal dan Informal	51.230.467	1,36
	h. Program Pendidikan Dasar	25.057.708	0,67
	i. Program Pendidikan Menengah	37.964.368	1,01
	j. Program Promosi dan Pemberdayaan	49.709.000	1,32
	k. Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	1.500.000	0,04
	l. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya	8.562.000	0,23
	m. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	2.700.000	0,07
	n. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	8.640.000	0,23
	o. Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan	1.400.000	0,04
	p. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	2.100.000	0,06
	q. Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat	4.095.000	0,11
	r. Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	1.042.250	0,03
2.	Peningkatan infrastruktur yang makin berkualitas guna mendukung pengembangan wilayah	<u>2.396.535.635</u>	<u>63,68</u>
	a. Peningkatan Jalan dan penggantian Jembatan	1.585.133.834	42,12
	b. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	502.799.050	13,36
	c. Peningkatan sarana prasarana kebinamargaan	42.423.894	1,13
	d. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	64.188.959	1,71
	e. Program penyediaan dan pengelolaan air baku	9.558.000	0,25

No	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	Pagu Indikatif	
		Ribu Rp	%
	f. Program pengendalian banjir dan pengamanan pantai	35.985.918	0,96
	g. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	26.173.015	0,70
	h. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	14.350.000	0,38
	i. Program Pembangunan Perumahan	13.544.000	0,36
	j. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	19.998.500	0,53
	k. Program Peningkatan Sarpras Perkotaan dan Perdesaan	12.132.400	0,32
	l. Program Perhubungan Darat	43.920.000	1,17
	m. Program Perhubungan Laut	9.550.000	0,25
	n. Program Perhubungan Udara	660.000	0,01
	o. Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	11.438.065	0,30
	p. Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi	4.680.000	0,12
3.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar yang makin luas	475.494.371	12,63
	a. Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.483.200	0,12
	b. Program Pendidikan Khusus	8.740.000	0,23
	c. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	34.837.240	0,93
	d. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	20.770.737	0,55
	e. Program Fasilitasi Sumber Daya Pendidikan Tinggi	3.722.500	0,10
	f. Program Pendidikan Berkelanjutan	5.550.000	0,15
	g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	3.695.000	0,10
	h. Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	3.900.000	0,10
	i. Program Pelayanan Kesehatan	264.200.632	7,02
	j. Program Kesehatan Lingkungan	1.270.000	0,03
	k. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.740.000	0,26
	l. Program Manajemen Informasi dan Regulasi Kesehatan	6.100.000	0,16
	m. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	6.740.000	0,18
	n. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	6.971.902	0,19
	o. Program Pelayanan Keluarga Berencana	3.325.000	0,09
	p. Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja	255.000	0,007
	q. Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD	225.000	0,006
	r. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB Mandiri	100.000	0,003
	s. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Bina Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balit	725.000	0,01
	t. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	15.082.500	0,40

No	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	Pagu Indikatif	
		Ribu Rp	%
u.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	10.100.000	0,27
v.	Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah	8.803.725	0,23
w.	Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya	6.478.500	0,17
x.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Olahraga	1.390.000	0,04
y.	Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/ Organisasi Olahraga	1.233.500	0,03
z.	Program Peningkatan Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan	3.900.000	0,10
aa.	Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	22.185.000	0,59
bb.	Program Pengembangan Budaya Baca	1.546.250	0,04
cc.	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	4.020.570	0,10
dd.	Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan	927.951	0,02
ee.	Program Peningkatan SDM Perpustakaan	348.129	0,009
ff.	Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya	11.841.285	0,31
gg.	Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	435.750	0,01
hh.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan	1.850.000	0,05
4.	Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan	243.706.050	6,48
a.	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	3.650.000	0,10
b.	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal	17.705.000	0,47
c.	Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha	1.450.000	0,04
d.	Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM	2.895.000	0,08
e.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	2.425.000	0,06
f.	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	598.000	0,01
g.	Program Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor	6.500.000	0,17
h.	Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil	5.097.200	0,14
i.	Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan	7.625.000	0,20
j.	Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka	3.500.000	0,09

No	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	Pagu Indikatif	
		Ribu Rp	%
	k. Program Pemasaran Pariwisata	6.954.000	0,18
	l. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	5.770.800	0,15
	m. Program Pengembangan Kemitraan	2.400.200	0,06
	n. Program Pengembangan Agribisnis	103.758.000	2,76
	o. Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian	8.750.000	0,23
	p. Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	1.732.500	0,05
	q. Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	2.782.500	0,07
	r. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	11.225.000	0,30
	s. Program Pengembangan Perikanan Budidaya	7.865.000	0,21
	t. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	5.640.700	0,15
	u. Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas	9.347.500	0,25
	v. Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	12.065.000	0,32
	w. Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan	2.219.650	0,06
	x. Program Peningkatan Logistik Daerah, Akses Pasar Dalam Negeri dan Pemberdayaan UDKM	3.075.000	0,08
	y. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri	5.800.000	0,15
	z. Program Pengembanagan dan Penguatan Kelembagaan Usaha Industri	2.875.000	0,08
5.	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestarian Fungsinya	82.904.360	2,20
	a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	14.077.580	0,37
	b. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	10.100.000	0,27
	c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	4.450.000	0,12
	d. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup	2.981.000	0,08
	e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA	570.195	0,01
	f. Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	2.000.000	0,05
	g. Program Perencanaan Tata Ruang	4.215.500	0,11
	h. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2.967.735	0,08
	j. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	1.593.750	0,04
	k. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	3.275.000	0,09
	l. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	735.000	0,02
	m. Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah	11.105.000	0,30

No	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	Pagu Indikatif	
		Ribu Rp	%
n.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.050.000	0,03
o.	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	2.161.100	0,06
p.	Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi	3.622.500	0,10
q.	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	11.490.000	0,31
r.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	2.210.000	0,06
s.	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	4.300.000	0,11
6.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas wilayah	336.364.100	8,94
a.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	655.000	0,01
b.	Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1.420.000	0,04
c.	Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	1.710.000	0,05
d.	Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	5.130.000	0,14
e.	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	69.641.251	1,85
f.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	50.214.175	1,33
g.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	42.517.980	1,13
h.	Program Pengelolaan Aset Daerah	6.682.981	0,18
i.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	17.689.857	0,47
j.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.300.000	0,06
k.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	1.615.645	0,04
l.	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	500.000	0,01
m.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.155.000	0,11
n.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	213.720	0,006
o.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	200.000	0,005
p.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.306.000	0,03
q.	Program Perencanaan Pembangunan Sosbud	3.017.300	0,08
r.	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	3.325.300	0,09
s.	Program Pos, Telekomunikasi dan SAR	1.185.000	0,03
t.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	13.301.000	0,35

No	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	Pagu Indikatif	
		Ribu Rp	%
u.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	5.092.000	0,14
v.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.663.000	0,04
w.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	4.770.000	0,13
x.	Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH)	6.300.000	0,17
y.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	10.105.000	0,27
z.	Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	5.750.000	0,15
aa.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.930.000	0,05
bb.	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	3.150.000	0,08
cc.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	341.100	0,009
dd.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	54.679.273	1,45
ee.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	1.442.000	0,04
ff.	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	1.750.880	0,05
gg.	Program Peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat	410.000	0,01
hh.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	125.000	0,003
ii.	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	8.482.500	0,23
jj.	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	1.903.138	0,10
kk.	Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak kriminal	1.690.000	0,04
	TOTAL	3.763.509.697	100,00

4.3 Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target MDGs Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2015

Berdasarkan kondisi pencapaian target MDGs di Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2013, beberapa indikator masih perlu upaya keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk itu, melalui kebijakan dan strategi percepatan pencapaian target MDGs yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGs Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2015, diharapkan upaya pencapaian target MDGs di tahun 2015 dapat dilakukan secara optimal. Kebijakan dan strategi percepatan pencapaian target MDGs dimaksud, adalah sebagai berikut :

1. Tujuan 1 : Menanggulangi Kemiskinan, dengan target :

- a. Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US\$ 1,00 (PPP) per kapita per hari dalam kurun waktu 1990 – 2015, ditetapkan arah kebijakan dan strategi yaitu :
- 1) Mengurangi besarnya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan melalui : a) perluasan kesempatan kerja dan berusaha; b) pengurangan kesenjangan antar wilayah; c) pemenuhan hak dasar; dan d) percepatan pembangunan perdesaan;
 - 2) Menurunkan indeks kedalaman kemiskinan, antara lain melalui: a) penajaman prioritas program dan sasaran untuk kelompok masyarakat sangat miskin; b) peningkatan bantuan perlindungan sosial bagi kelompok miskin; c) peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat miskin dan lembaga desa/ kelurahan dalam melaksanakan pembangunan; d) peningkatan peran serta masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di tingkat desa/kelurahan; e) peningkatan fungsi kelembagaan dan sistem informasi yang menunjang pemberdayaan masyarakat; f) peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan; g) peningkatan kemampuan manajemen keuangan desa/kelurahan; h) peningkatan jumlah anggaran bagi penduduk miskin yang dikelola desa/ kelurahan; dan i) peningkatan pengawasan pelaksanaan penggunaan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan agar lebih tepat sasaran.
- b. Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda, ditetapkan arah kebijakan dan strategi yaitu :
- 1) Meningkatkan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, melalui peningkatan kerjasama antar daerah dan antar negara dengan mekanisme AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara), maupun transmigrasi;
 - 2) Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui revitalisasi BLK, fasilitasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, dan pemagangan di dalam dan di luar negeri;
 - 3) Meningkatkan upaya perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin kepastian hukum bagi pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan pekerja.
- c. Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990 – 2015, ditetapkan arah kebijakan dan strategi yaitu :
- 1) Penurunan prevalensi balita dengan berat badan rendah dan prevalensi gizi buruk, melalui : a) peningkatan akses penduduk

miskin terhadap pelayanan kesehatan; b) mengembangkan bantuan khusus untuk penduduk miskin kepada kabupaten/kota; c) meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi tentang perilaku bersih dan sehat; dan d) memperkuat pemberdayaan masyarakat dan merevitalisasi Posyandu.

- 2) Meningkatkan penduduk dengan tingkat konsumsi kalori sesuai angka kecukupan sebesar 2.000 Kkal per kapita per hari, melalui:
 - a) peningkatan ketahanan pangan pada tingkat kabupaten/kota terutama untuk mengurangi disparitas ketahanan pangan antar daerah; dan
 - b) memperkuat kelembagaan di tingkat kabupaten/kota untuk merumuskan kebijakan dan program bidang pangan dan gizi.
2. Tujuan 2 : Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua, dengan target untuk menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar, melalui arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan yaitu :
 - a. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan;
 - b. Perluasan akses yang merata pada pendidikan dasar khususnya bagi masyarakat miskin;
 - c. Penguatan tata kelola dan akuntabilitas pelayanan pendidikan.
3. Tujuan 3 : Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan target untuk menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015, melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan yaitu :
 - a. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat yang berkesetaraan gender dalam rangka mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antar wilayah, gender dan sosial ekonomi;
 - b. Mengoptimalkan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian;
 - c. Mengoptimalkan proporsi partisipasi perempuan dalam legislatif dan partai politik.
4. Tujuan 4 : Menurunkan Angka Kematian Anak, dengan target untuk menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990 – 2015, melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan yaitu :
 - a. Percepatan pencapaian derajat kesehatan bayi dan anak melalui pemantapan komitmen dengan penentu kebijakan dan lintas sektor melalui akselerasi implementasi Perda, pengembangan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan, pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu di semua unit pelayanan kesehatan dasar dan unit pelayanan rujukan;

- b. Revitalisasi Posyandu untuk semua melalui penggalangan kemitraan dengan sektor terkait dalam revitalisasi Posyandu;
 - c. Pengembangan Desa Siaga atau Kelurahan Siaga melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencapaian derajat kesehatan bayi dan anak.
5. Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu, dengan target :
- a. Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990 – 2015, ditetapkan arah kebijakan dan strategi yaitu :
 - 1) Percepatan pencapaian derajat kesehatan ibu melalui penguatan kelembagaan lintas sektor yang ada di desa untuk penyelamatan ibu, optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencapaian derajat kesehatan ibu, dan pemerataan jangkauan jaminan maternal;
 - 2) Pengembangan mutu pelayanan kesehatan ibu di unit kesehatan dasar dan unit pelayanan rujukan, melalui pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu serta pengembangan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan;
 - 3) Penajaman program perencanaan dan pencegahan komplikasi (P4K) untuk semua desa, melalui penggalangan kemitraan dengan sektor terkait;
 - 4) Pengembangan Desa Siaga atau Kelurahan Siaga, melalui pemantapan komitmen dari penentu kebijakan dan lintas sektor dan akselerasi implementasi Perda.
 - b. Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015, dengan kebijakan yang ditempuh adalah peningkatan akses dan pengembangan kualitas pelayanan Keluarga Berencana melalui pemenuhan akses dan mutu pelayanan serta peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat di bidang Keluarga Berencana.
6. Tujuan 6 : Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya, dengan target :
- a. Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS pada tahun 2015;
 - b. Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010;
 - c. Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru malaria dan penyakit utama lainnya (Tuberkulosis) hingga tahun 2015.

Kebijakan dan strategi yang ditetapkan, yaitu :

- a. Percepatan akses pelayanan kesehatan bagi penderita HIV/AIDS melalui penggalangan kemitraan dengan sektor terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
- b. Peningkatan mobilisasi masyarakat untuk meningkatkan upaya pencegahan, perawatan dan pengobatan HIV/AIDS pada populasi

- rentan, melalui peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu di semua unit pelayanan kesehatan dasar dan unit pelayanan rujukan;
- c. Memperkuat sistem informasi dan sistem monev melalui pemantapan komitmen dari penentu kebijakan dan lintas sektor dalam rangka akselerasi Perda;
 - d. Pengembangan Desa Siaga atau Kelurahan Siaga melalui penggalangan kemitraan dengan sektor terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
 - e. Memperkuat pelayanan dalam pencegahan, pengendalian dan pengobatan;
 - f. Pemantapan komitmen dari penentu kebijakan dan lintas sektor;
 - g. Peningkatan cakupan DOTS pengembangan kompetensi, profesionalisme tenaga kesehatan dan pemenuhan pelayanan kesehatan di semua unit pelayanan kesehatan dasar dan unit pelayanan rujukan;
 - h. Peningkatan kapasitas dan kualitas penanganan TB melalui pemantapan komitmen penentu kebijakan dan lintas sektor.
7. Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan target :
- a. Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dalam kebijakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumberdaya lingkungan, dengan kebijakan yang ditetapkan yaitu :
 - 1) Meningkatkan rasio luasan kawasan tertutup pepohonan, melalui peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang kritis dan potensial kritis, dan peningkatan fungsi RTH sebagai jantung kota dan upaya penghijauan di wilayah perkotaan dan sekitar industri;
 - 2) Mengurangi emisi karbondioksida melalui pencarian potensi cadangan energi baru dan penganekaragaman pemanfaatan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan pengolahan gas cerobong pabrik;
 - 3) Mengurangi jumlah konsumsi bahan perusak ozon, melalui peningkatan kampanye hemat energi, pengurangan penggunaan *refrigerant*, dan pengurangan peredaran barang-barang ilegal yang menggunakan CFCs;
 - 4) Mempertahankan jumlah tangkapan ikan yang berada pada batasan yang aman melalui penambahan jumlah kapal berkapasitas di atas 30 GT untuk meningkatkan jangkauan jelajah kapal.
 - b. Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010, dengan kebijakan yang ditetapkan yaitu :

- 1) Mempertahankan fungsi hutan lindung melalui peningkatan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, meningkatkan produksi hasil hutan non kayu untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, dan mengendalikan kerusakan kawasan lindung melalui upaya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan serta fasilitasi penanganan pemulihan kerusakan lingkungan;
 - 2) Peningkatan fungsi kawasan lindung perairan melalui peningkatan pengelolaan, pengawasan dan perlindungan terhadap kawasan konservasi sumberdaya laut, dan peningkatan kesadaran masyarakat di wilayah pesisir tentang pentingnya kelestarian terumbu karang dan sumberdaya perikanan.
- c. Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015, dengan kebijakan dan strategi yang ditetapkan yaitu :
- 1) Mengurangi proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air bersih melalui peningkatan fungsi sarana dan prasarana konservasi sumber daya air untuk kelestarian air dan sumber air, pengurangan kesenjangan penyediaan sarana dan prasarana air bersih antar wilayah dan meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat;
 - 2) Mengurangi proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar melalui peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana sanitasi permukiman bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan, dan peningkatan pelayanan persampahan terutama bagi Rumah Tangga Miskin (RTM);
 - 3) Mendorong sinergitas Pokja AMPL Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan akses AMPL bagi masyarakat tidak mampu;
 - 4) Mendorong pembentukan Pokja AMPL bagi kabupaten/kota yang belum memiliki Pokja AMPL dan mengaktifkan Pokja AMPL yang tidak aktif;
 - 5) Mendorong peningkatan PHBS di masyarakat.
- d. Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020, dengan kebijakan dan strategi yang ditetapkan yaitu :
- 1) Prioritas pemenuhan kebutuhan rumah pada MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah);
 - 2) Pemanfaatan lahan perumahan secara efisien dan efektif melalui pembangunan rumah secara vertikal;
 - 3) Pemberdayaan komunitas perumahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengembangkan kearifan lokal dan memperhatikan kelembagaan yang telah ada;

- 4) Memfasilitasi perwujudan tertib administrasi pertanahan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensertifikatkan tanah;
- 5) Dukungan sertifikasi lahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan serta alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya.

4.4 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kewilayahan Jawa Tengah

Kondisi pembangunan kewilayahan saat ini masih terdapat permasalahan utama pengembangan wilayah di Jawa Tengah, yaitu pembangunan ekonomi yang belum merata pertumbuhannya, diindikasikan dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin wilayah-wilayah tertentu dan kesenjangan ekonomi antar wilayah.

Pengembangan wilayah Jawa Tengah merupakan upaya untuk memantapkan pertumbuhan pembangunan wilayah yang berkeadilan dan berdikari dari aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya, dengan memperhatikan potensi dan keragaman daya dukung serta daya tampung lingkungan, guna mencapai :

- a. Pembangunan yang merata dan harmonis antar wilayah;
- b. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah;
- c. Pembangunan ekonomi dengan berbasis potensi lokal;
- d. Keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dengan kawasan budidaya.

Wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi pengembangan wilayah di Jawa Tengah yang terbagi dalam 8 (delapan) sistem perwilayahan (regionalisasi) dengan mempertimbangkan perpaduan dari aspek homogenitas, nodalitas dan administratif. Kedelapan perwilayahan tersebut adalah Kedungsepur, Wanarakuti, Subosukowonosraten, Bregasmalang, Petanglong, Barlingmascakeb, Purwomanggung, dan Banglor.

1. Kedungsepur

Wilayah pengembangan Kedungsepur meliputi Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan. Fungsi wilayah diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sebagai PKN, arah pengembangan wilayah adalah pada: (1) perwujudan kawasan metropolitan Semarang sebagai ibukota provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama Jawa Tengah; (2) pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam konteks kawasan ekonomi khusus; (3) perwujudan dari sisi hubungan intraregional sebagai pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura; (4) dan perwujudan

secara interregional sebagai wilayah transit/pengumpul perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan. Sedangkan potensi regional yang dimiliki wilayah pengembangan Kedungsepur adalah : (1) primer berupa perikanan; (2) sekunder berupa tekstil, logam, *furniture*, pengolahan ikan; dan (3) tersier berupa jasa dan perdagangan.

Potensi unggulan yang dimiliki dan dapat terus dikembangkan yaitu :

- a. Kabupaten Kendal : industri unggulan garmen, tas, alas kaki; klaster jambu biji getas merah dan pisang raja bulu; serta destinasi wisata Curug Sewu dan Pantai Sendang Sikucing;
- b. Kota Semarang : industri unggulan batik, tas, alas kaki; klaster bandeng, batik semarangan, olahan pangan, *handycraft*; serta destinasi wisata Sam Pho Kong, Maerokoco, Pantai Kota Semarang, Kota Lama, Pecinan Kota Semarang, dan Lawang Sewu;
- c. Kabupaten Demak : industri unggulan garmen, garam, ikan olahan; kawasan agropolitan Kota Tani Utama di Kecamatan Wonosalam, dengan komoditas unggulan jambu delima, jambu citra, kacang hijau, belimbing demak, domba dan kelinci; klaster hortikultura, jambu lele (bule), batik sisik, konveksi pakaian dalam, pengasapan ikan, kerupuk; serta destinasi wisata Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijogo;
- d. Kabupaten Semarang : industri unggulan eceng gondok, pupuk organik; kawasan agropolitan Sub Terminal Agribisnis (STA) Candigaron di Kecamatan Sumowono, dengan komoditas unggulan kopi; klaster gula kelapa, padi organik, aksesoris kain perca, bio farmaka, tanaman hias, industri logam, kopi gunung kelir, kerajinan lidi, batik gemawang, susu sapi, eceng gondok, tahu serasi; serta destinasi wisata Bandungan, Candi Gedong Songo, Museum Kereta Api Ambarawa, Rawapening, Umbul Sidomukti, dan Air Terjun Semirang;
- e. Kota Salatiga : industri unggulan makanan, batik; serta klaster kelinci, pupuk cair organik, sapi, makanan olahan, susu, batik dan bordir;
- f. Kabupaten Grobogan : industri unggulan genteng, jagung, mebel; klaster genteng, kerajinan bambu, jagung, pupuk organik; serta destinasi wisata Bledug Kuwu, sumber api abadi Mrapen, Makam Kyai Ageng Selo, Kyai Tarub dan Bulan Kejawen.

2. Wanarakuti

Wilayah pengembangan Wanarakuti (Juwana – Jepara – Kudus - Pati) meliputi Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati, diarahkan sebagai PKW dan PKL. Simpul utama berada di kawasan perkotaan Kudus, didukung oleh perkotaan Jepara, Pecangaan, Tayu, Pati dan Juwana.

Sektor unggulan yang dapat dikembangkan adalah pertanian, industri, pertambangan dan perikanan. Sedangkan potensi regional yang dimiliki wilayah pengembangan Wanarakuti adalah potensi: (1) primer berupa perikanan; (2) sekunder meliputi *furniture*, pengolahan tembakau, pengolahan ikan; dan (3) tersier berupa pariwisata.

Potensi unggulan yang dimiliki dan dapat terus dikembangkan yaitu :

- a. Kabupaten Jepara : industri unggulan tenun dan mebel; kluster tenun troso, mebel, kacang tanah, pariwisata; serta destinasi wisata Karimun-jawa, Pantai Kartini, Bandengan dan Pulau Panjang;
- b. Kabupaten Kudus : industri unggulan bordir, gebyok, makanan; kluster gebyok rumah adat, pariwisata, bordir, genteng dan batu bata; serta destinasi wisata Air Terjun Montel, Wana Wisata Rahtawu, Rejanu Air Tiga Rasa, Situs Purba Pati Ayam, Makam Sunan Muria di Colo, Makam Sunan Kudus dan Menara Kudus, Museum Kretek;
- c. Kabupaten Pati : industri unggulan tapioka, batik, kuningan; Agropolitan, Minapolitan TPI Bajo Mulyo I dan Bajo Mulyo II di Kecamatan Juwana, dengan komoditas unggulan cumi, kakap merah, pindang, jeruk pamelon dan kelapa kopyor; kluster tapioka, pengolahan hasil laut, kerajinan kuningan, konveksi, buah-buahan, budidaya bandeng air tawar, kopi, sutera alam, makanan ringan, batik tulis bakaran, *handycraft*, kapuk; serta destinasi wisata Waduk Gunungrowo, Kebon Kopi Jolong, Goa Pancur dan Wareh.

3. Subosukowonosraten

Pengembangan wilayah Subosukawonosraten meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Wilayah tersebut sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) meliputi metropolitan Solo Raya terdiri dari kawasan perkotaan Kota Surakarta dan sekitarnya yaitu Kartasura, Sukoharjo, Ngemplak, Mojosongo, Colomadu, Karanganyar, Jaten, dan Sragen. Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdiri dari Boyolali dan Klaten, sedangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Wonogiri dan Boyolali (Ampel).

Pengembangan wilayah diarahkan untuk pengembangan kerjasama kawasan perbatasan dengan Provinsi Jawa Timur di wilayah bagian timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta di wilayah bagian selatan-barat, dikenal dengan nama Karismawirogo (Karanganyar–Sragen–Magetan–Ngawi–Ponorogo), Pawonsari (Pacitan–Wonogiri–Wonosari/Gunung Kidul) dan Kesukosari (Klaten–Sukoharjo–Wonosari/Gunung Kidul). Sektor unggulan wilayah

Subosukowo-nosraten adalah pariwisata, industri dan pertanian. Sedangkan potensi regional yang dimiliki wilayah pengembangan Subosukowonosraten adalah potensi : (1) primer meliputi pertambangan, pertanian, perkebunan, peternakan; (2) sekunder terdiri dari industri kayu, Tekstil Produk Tekstil, batik, jamu, kerajinan; dan (3) tersier berupa perdagangan dan pariwisata.

Potensi unggulan yang dimiliki dan dapat terus dikembangkan yaitu :

- a. Kota Surakarta : industri unggulan batik, mebel; klaster limbah koran, Kampoeng Batik Laweyan, Kampung Wisata Batik Kauman, sangkar burung, *shuttlecock*, mebel; serta destinasi wisata Taman Satwataru Jurug;
- b. Kabupaten Boyolali : industri unggulan tembaga, pupuk organik; agropolitan Goasebo, STA Ampel di Kecamatan Ampel, dengan komoditas unggulan pepaya, salak, jahe, kobis, bunga kol, wortel, tomat dan cabe; minapolitan kampung lele di Kecamatan Banyudono, Sawit dan Teras dengan komoditas unggulan utama ikan lele, didukung ikan mas dan nila; klaster logam Tumang; serta destinasi wisata kawasan unggulan wisata Solo-Selo-Borobudur;
- c. Kabupaten Sukoharjo : industri unggulan batu mulia, mete; klaster pertanian organik, sapi, tahu dan makanan olahan, jamur, mebel, rotan trangsang, lurik, batik; dan destinasi Desa Wisata Wirun;
- d. Kabupaten Karanganyar : industri unggulan atsiri, konveksi; agropolitan Suthomadansih, STA Watusambang di Kecamatan Matesih, dengan komoditas unggulan wortel, bawang putih, kentang, tanaman obat-obatan/biofarmaka, sayuran, duku, salak lawu, durian, pisang, *strawberry*, tanaman hias, ketela rambat, ikan dan tomat; klaster Kelompok Tani Blumbang, batik, biofarmaka; serta destinasi wisata Candi Sukuh, Candi Cetho, Air Terjun Grojogan Sewu dan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I;
- e. Kabupaten Wonogiri : industri unggulan batu mulia, mete; klaster : mebel, tanaman obat, mete, genteng, ketela pohon, ternak; serta destinasi wisata Waduk Gajah Mungkur dan Pantai Sembukan;
- f. Kabupaten Sragen : industri unggulan batik, mebel; klaster mebel, alat rumah tangga, konveksi, batik, ikan, sapi brangus, padi organik; serta destinasi wisata budaya Sangiran dan Gunung Kemukus;
- g. Kabupaten Klaten : industri unggulan logam, mebel, tenun; minapolitan di Kecamatan Tulung, Polanharjo dan Karanganom dengan komoditas ikan nila; klaster lereng merapi, lurik, keramik, makanan olahan, konveksi, bordir, sulam, batik, logam ceper;

serta destinasi wisata Candi Prambanan dan Plaosan, Rowo Jombor, serta Deles Indah.

4. Bregasmalang

Wilayah pengembangan Bregasmalang meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang, yang diarahkan sebagai PKN, PKW dan PKL yang berperan penting di wilayah perbatasan barat-utara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Fokus pengembangan wilayah ini adalah pada pengembangan simpul-simpul pusat pertumbuhan koridor perkotaan Brebes-Tegal-Adiwerna-Slawi, perkotaan Pemalang dan sekitarnya, perkotaan Comal, perkotaan Ketanggungan-Kersana, serta perkotaan Bumiayu dan sekitarnya. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah perikanan, industri, pertanian, agroindustri, pariwisata ditunjang oleh kehutanan dan energi. Sedangkan potensi regional yang dimiliki wilayah pengembangan Bregasmalang adalah: (1) primer meliputi perikanan dan rumput laut; (2) sekunder terdiri dari tekstil, batik, logam, *furniture*, pengolahan ikan; dan (3) tersier berupa jasa dan perdagangan.

Potensi unggulan yang dimiliki dan dapat terus dikembangkan yaitu :

- a. Kabupaten Brebes : industri unggulan telur asin, keramik, batik, rebana; agropolitan Jalabaritangkas, STA Larangan di Kecamatan Larangan, dengan komoditas unggulan bawang merah dan cabe merah; klaster telur asin, bawang merah, rebana, agrowisata, rumput laut; serta destinasi wisata Waduk Malahayu;
- b. Kota Tegal : industri unggulan *shuttlecock*; minapolitan di Kecamatan Tegal Timur, Tegal Barat, Margadana, dengan komoditas ikan bandeng dan udang; klaster itik dan batik; serta destinasi wisata Pantai Alam Indah;
- c. Kabupaten Tegal : industri unggulan komponen mesin dan perkapalan; klaster batik, mesin, hortikultura, *shuttlecock*, padi organik; serta destinasi wisata Guci dan Purwahamba;
- d. Kabupaten Pemalang : industri unggulan pakaian jadi/garmen; agropolitan Waliksarimadu, STA Belik di Kecamatan Belik, dengan komoditas unggulan cabe, tomat, paprika, kentang, nanas, sawi, kobis, alpokat, manggis, *strawberry*, durian, nilam, ayam potong, ayam ras pedaging; minapolitan di Kecamatan Ulujami, dengan komoditas kepiting soka, ikan bandeng dan udang; klaster : konveksi dan desa wisata; serta destinasi wisata Pantai Widuri dan Agropolitan.

5. Petanglong

Wilayah Petanglong meliputi Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan, yang diarahkan sebagai PKW dan PKL dengan

simpul utama pada kawasan perkotaan Pekalongan dan sekitarnya. Sektor unggulan dari wilayah ini adalah pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan. Sedangkan potensi regional yang dimiliki wilayah pengembangan Petanglong adalah potensi: (1) primer berupa perikanan dan rumput laut; (2) sekunder meliputi tekstil, batik, logam, *furniture*, pengolahan ikan; dan (3) tersier berupa jasa dan perdagangan.

Potensi unggulan yang dimiliki dan dapat terus dikembangkan yaitu :

- a. Kabupaten Pekalongan : industri unggulan kopi olahan, batik, tenun; agropolitan dengan Kota Tani Utama di Kecamatan Doro, dengan komoditas unggulan rambutan, teh, durian, jambu biji, sapi, domba; klaster melon, batik simbangkulon, kebalong, tenun dan konveksi, getah pinus, kerajinan bambu, jamur tiram; dan destinasi wisata Pantai Depok dan Bumi Perkemahan Linggoasri.
- b. Kabupaten Batang : industri garmen dan mebel; agropolitan Sorbanwali, STA Limpung di Kecamatan Limpung, dengan komoditas unggulan bawang daun, cabai rawit, kentang, durian, jagung, teh, kopi, nilam, sapi simental, perikanan air tawar, madu, kerupuk, teh rakyat; klaster emping mlinjo, minyak atsiri, perikanan, pariwisata argo binangkit, batik, kerajinan kulit; galangan kapal; serta destinasi wisata Agro Pagilaran, Pantai Sigandu dan Ujungnegoro;
- c. Kota Pekalongan : industri unggulan batik, tenun, galangan kapal; serta klaster perikanan, percetakan kain, pakaian jadi dan tekstil, canting batik cap dan tulis, tempe, perbengkelan dan logam, tenun ATBM dan batik; minapolitan; serta destinasi wisata Pantai Pasir Kencana dan Slamaran.

6. Barlingmascakeb

Wilayah Barlingmascakeb meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. Fokus pengembangan wilayah diarahkan sebagai PKN, PKW dan PKL di wilayah Jawa Tengah bagian barat dan selatan. Kota-kota utama di wilayah ini yaitu Purwokerto, Cilacap, Ajibarang, Wangon, Sokaraja, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Bobotsari, Purworejo Klampok, Adipala, Buntu, Maos, Kroya, Majenang, Gombong, Karanganyar, dan Kebumen. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, industri dan perikanan, ditunjang oleh agroindustri, kehutanan, peternakan dan perdagangan. Sedangkan potensi regional yang dimiliki wilayah pengembangan Barlingmascakeb adalah: (1) primer berupa perikanan, perkebunan,

pasir besi, minyak dan gas; (2) sekunder berupa batik, logam, *furniture*; dan (3) tersier berupa perdagangan dan pariwisata.

Potensi unggulan yang dimiliki dan dapat terus dikembangkan yaitu :

- a. Kabupaten Banjarnegara : industri unggulan batik, keramik; agropolitan Jakabaya, STA Batur di Kecamatan Batur dengan komoditas sayuran; klaster pariwisata Dieng, keramik Klampok, olahan makanan Barasnack, batik Gumelem; serta destinasi wisata Dieng dan Seruling Mas;
- b. Kabupaten Purbalingga : industri unggulan knalpot, gula kelapa; agropolitan Bunga Kondang, STA Kejajar di Kecamatan Bukateja dengan komoditas unggulan kelapa, lada, kayu hutan, jeruk, melati gambir, durian, pisang, duku, jagung, padi, kacang tanah, ketela pohon dan kambing; klaster agrowisata Derang, batik, knalpot, dan sapu; serta destinasi wisata Goa Lawa dan Owabong;
- c. Kabupaten Banyumas : industri unggulan minyak nilam, batik; minapolitan di Kecamatan Kedungbanteng, dengan komoditas unggulan gurami; klaster gula kelapa, minyak atsiri, batik; serta destinasi wisata Kawasan Baturraden;
- d. Kabupaten Cilacap : industri unggulan sabut kelapa, ikan, gula; agropolitan dengan Kota Tani Utama di Kecamatan Majenang, dengan komoditas unggulan pisang, sukun, karet, sapi dan kambing; klaster makanan olahan hasil laut, olahan makanan, sabutret, batik; serta destinasi wisata Nusakambangan, Pantai Teluk Penyus dan Benteng Pendem;
- e. Kabupaten Kebumen : industri unggulan sabut kelapa, makanan; klaster anyaman pandan, sabut kelapa, batik; serta destinasi wisata Gua Jatijajar, Gua Petruk, Waduk Sempor, Pantai Karangbolong, Logending, Suwuk, dan Wisata Geologi Karangsambung.

7. Purwomanggung

Wilayah Purwomanggung meliputi Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung, berfungsi sebagai PKW dan PKL di bagian tengah dan selatan Jawa Tengah, yang berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Potensi unggulan yang dapat dikembangkan adalah pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, perikanan, didukung oleh sektor perkebunan, dan peternakan. Simpul utama sebagai penggerak ekonomi adalah Kota Magelang dan sekitarnya sebagai pusat kegiatan berskala nasional, didukung oleh koridor perkotaan Magelang-Mungkid-Borobudur-Muntilan-Salam, koridor perkotaan Purworejo-Kutoarjo, koridor perkotaan Temanggung-Parakan, Wonosobo, Kertek, dan Wadas Lintang. Sedangkan potensi regional yang dimiliki wilayah

pengembangan Purwomanggung adalah: (1) primer berupa pertambangan, pertanian, perkebunan, dan peternakan; (2) sekunder berupa industri kayu dan pengolahan buah; dan (3) tersier berupa pariwisata.

Potensi unggulan yang dimiliki dan dapat terus dikembangkan yaitu :

- a. Kabupaten Purworejo : industri unggulan mebel, bambu, gula kelapa; Agropolitan Bagelen, STA Krendetan di Kecamatan Bagelen, dengan komoditas unggulan kambing Etawa, buah-buahan, padi; klaster gula kelapa, kambing Etawa Kaligesing, jagung; serta destinasi wisata Gua Seplawan, Pantai Jatimalang dan Ketawang;
- b. Kabupaten Wonosobo : industri unggulan gula kelapa, pupuk organik; Agropolitan Rojoto, STA Sempol di Kecamatan Sukoharjo, dengan komoditas unggulan salak, jagung, durian, kelapa dan kambing; klaster carica, wisata Desa Reco, domba; dan destinasi wisata Dieng;
- c. Kabupaten Magelang : industri unggulan batu pahat, karoseri; Agropolitan Merapi Merbabu, STA Sewukan di Kecamatan Dukun, dengan komoditas unggulan cabai, tomat, kobis, buncis perancis, jeruk manis, klengkeng, duku, jagung, ketela pohon, ketela rambat, sapi, bunga potong, produk olahan, dendeng abon, kripik nangka, durian; klaster pariwisata Borobudur, pahat batu, slondok, salak nglumut; serta destinasi wisata yaitu kawasan wisata Candi Borobudur, Mendut, Pawon dan Ketep Pass;
- d. Kota Magelang : industri unggulan makanan; klaster pengolahan makanan ringan, kerajinan, batik, konveksi; dan destinasi wisata Taman Kyai Langgeng;
- e. Kabupaten Temanggung : industri unggulan kopi, tenun; STA Soropadan, Agropolitan Kota Tani Utama, STA Kranggan di Kecamatan Kranggan, dengan komoditas unggulan kopi dan durian; klaster kopi, genteng dan batu bata, kerajinan tangan, makanan ringan, batik; serta destinasi wisata Mata Air Jumprit dan Air Terjun Lawe.

8. Banglor

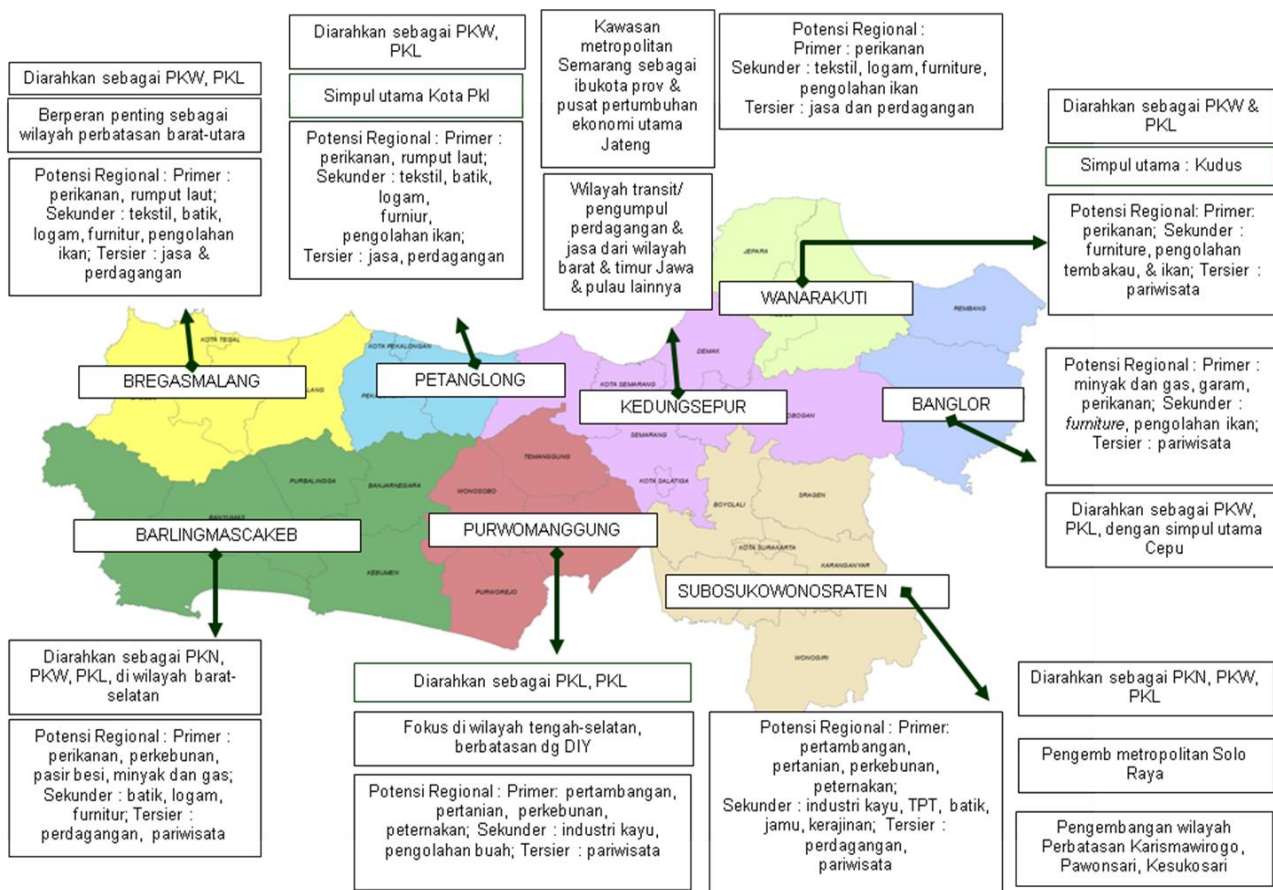
Wilayah pengembangan Banglor meliputi 2 (dua) kabupaten di perbatasan sebelah timur-utara Jawa Tengah dengan Jawa Timur yaitu Kabupaten Rembang dan Blora. Arah pengembangan wilayah difokuskan sebagai PKW dengan kawasan perkotaan Cepu sebagai simpul utama, ditunjang oleh koridor perkotaan Rembang-Lasem. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan adalah pertambangan minyak dan gas, pertambangan mineral, perikanan, pariwisata, perhubungan, pertanian, yang ditunjang oleh kehutanan, perkebunan

dan peternakan. Arah pengembangan sektor unggulan dilakukan dalam wadah kerjasama perbatasan dengan Provinsi Jawa Timur yang disebut sebagai regionalisasi Ratubangnegoro (Blora-Tuban-Rembang-Bojonegoro). Sedangkan potensi regional yang dimiliki wilayah pengembangan Banglor adalah: (1) primer berupa minyak dan gas, garam, perikanan; (2) sekunder berupa *furniture*, pengolahan ikan; dan (3) tersier berupa pariwisata.

Potensi unggulan yang dimiliki dan dapat terus dikembangkan yaitu :

- a. Kabupaten Rembang : industri unggulan batik, garam; kluster genteng dan batu bata, garam rakyat, gula tumbu, batik tulis Lasem, bordir dan konveksi di Kecamatan Sedan, mangga, pengolahan hasil perikanan; serta destinasi wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini dan Wana Wisata Mantingan;
- b. Kabupaten Blora : industri unggulan mebel, keramik, batik; kluster pertanian, mineral dan bahan tambang, pariwisata, *handycraft* dan mebel, pangan olahan, batik; serta destinasi wisata Waduk Tempuran dan Wana Wisata Hutan Jati Blora.

Cakupan wilayah, potensi dan arah pengembangan pada setiap wilayah tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2013

Gambar 4.1.
Peta Potensi Wilayah Pengembangan di Provinsi Jawa Tengah

Dalam upaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh delapan wilayah tersebut, maka strategi dan kebijakan pengembangan wilayah dilakukan melalui :

- a. Peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki, melalui upaya :
 - 1) Pemantapan fungsi-fungsi pusat kegiatan, baik Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), maupun Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - 2) Meningkatkan kapasitas pelayanan prasarana sarana dasar wilayah;
 - 3) Pengembangan interkoneksi antara pusat kegiatan dan *hinterlandnya*;
 - 4) Memantapkan perkembangan kawasan di sepanjang Pantura dan mempercepat pertumbuhan kawasan di sepanjang Pansela.
- b. Pemerataan pembangunan infrastruktur terutama di wilayah tengah dan selatan, melalui upaya :
 - 1) Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas terutama di wilayah tengah dan selatan;
 - 2) Pengembangan sistem transportasi darat, laut, dan udara secara terpadu guna meningkatkan aksesibilitas antar wilayah;
 - 3) Pengembangan sistem energi secara optimal dan mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan listrik agar terdistribusi merata;
 - 4) Mengembangkan sistem prasarana pengairan untuk menunjang kegiatan sektor yang terkait pemanfaatan sumber daya air;
 - 5) Mengembangkan sistem pelayanan prasarana permukiman yang terpadu guna mencapai kualitas lingkungan permukiman yang baik.
- c. Pemeliharaan dan pemulihan fungsi kawasan lindung, melalui upaya:
 - 1) Rehabilitasi dan konservasi kawasan yang berfungsi lindung baik hutan maupun non hutan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - 2) Meningkatkan luas Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan yang merata;
 - 3) Meningkatkan rehabilitasi pada lahan-lahan kritis;
 - 4) Merehabilitasi daerah resapan air guna mempertahankan ketersediaan air.
- d. Pengentasan kemiskinan dan pembangunan kualitas hidup masyarakat terutama di kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi serta IPM rendah, melalui upaya :
 - 1) Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, energi dan rumah layak huni;
 - 2) Mengembangkan ekonomi padat karya untuk mengurangi pengangguran.
- e. Pengembangan ekonomi wilayah berbasis potensi unggulan daerah, terutama pada daerah-daerah yang memiliki sumberdaya alam tinggi tetapi nilai PDRB per kapitanya rendah, melalui upaya:

- 1) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas;
 - 2) Mengendalikan konversi lahan sawah dengan mengimplementasikan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - 3) Mengembangkan kawasan berdasarkan potensi unggulan baik di perdesaan maupun perkotaan;
 - 4) Mengembangkan industri unggulan daerah skala kecil, menengah dan besar;
 - 5) Mendorong fasilitasi akses permodalan untuk pengembangan usaha tani dan UMKM di wilayah perdesaan.
- f. Mendorong percepatan pembangunan wilayah tertinggal dan kawasan perbatasan, melalui upaya :
- 1) Meningkatkan akses masyarakat terhadap lahan dan pemanfaatan sumberdaya alam terutama di perdesaan yang termasuk wilayah tertinggal dan di kawasan perbatasan;
 - 2) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar di desa-desa tertinggal;
 - 3) Mendorong pengembangan investasi pada wilayah tertinggal, terutama di wilayah selatan.
- g. Penguatan kerjasama antar daerah/wilayah/regional dan antar pihak, melalui upaya :
- 1) Memfasilitasi pengembangan kerjasama antar wilayah/daerah;
 - 2) Pemantapan skema kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan.
- h. Penanggulangan bencana, melalui upaya :
- 1) Penanggulangan risiko bencana;
 - 2) Memperkecil faktor kerentanan terhadap bencana;
 - 3) Penguatan kelembagaan dan manajemen bencana.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015

Indikasi rencana program dan kegiatan prioritas Tahun 2015 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang terbagi dalam 26 (duapuluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan.

5.1 Urusan Wajib

1. Pendidikan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Fokus kegiatan pada : peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain melalui peningkatan ketersediaan lembaga PAUD yang sesuai standar dengan pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD, pengembangan sarana dan prasarana PAUD, serta pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/TK (4-6 tahun) sebesar 75%; APK PAUD (0-6 tahun) sebesar 53%; dan persentase lembaga PAUD yang terakreditasi sebesar 53%.

b. Program Pendidikan Dasar

Fokus kegiatan pada : peningkatan ketersediaan, kualitas dan kesetaraan layanan Pendidikan Dasar melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan antara lain rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP, pembangunan ruang perpustakaan SD dan SMP, pengadaan alat laboratorium IPA SMP, pengadaan meubelair untuk SD dan SMP, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A dan B, pendampingan BOS SD/MI sebanyak 3,6 juta siswa dan BOS SMP/MTs sebanyak 1,7 juta siswa, serta percepatan implementasi kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan dasar. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu APK dan APM SD/SDLB/MI/Paket A sebesar 109,13 dan 100; APK dan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B sebesar 100,56 dan 79,30; Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs sebesar 0,08 dan 0,25; Angka Kelulusan SD/SDLB/MI dan SMP/MTs/SMPLB sebesar 99,97 dan 99,19; Nilai Rata-Rata UN SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs sebesar 7,11 dan 6,87; Persentase ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs sesuai standar nasional pendidikan sebesar 65% dan 79%; Persentase SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sesuai standar sebesar 45,50% dan 78%; Persentase SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki sanitasi layak sebesar 70,50% dan 70,10%; Persentase SD/MI dan SMP/MTs yang menerapkan Kurikulum 2013 sebesar 10% dan 20%.

c. Program Pendidikan Menengah

Fokus kegiatan pada : peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan kesetaraan layanan Pendidikan Menengah melalui pembangunan RKB SMA/SMK, rehabilitasi ruang kelas SMA/SMK, pembangunan ruang perpustakaan SMA/SMK, pembangunan Laboratorium IPA SMA/SMK, pengadaan alat bengkel SMK, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket C, pemberian beasiswa SMA/SMK dari keluarga kurang mampu sekitar 16 ribu siswa, pembangunan Tempat Uji Kompetensi dan percepatan implementasi kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan menengah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu APK dan APM SMA/SMALB/MA/SMK/Paket C sebesar 74% dan 60%; Angka Putus Sekolah SMA/ SMALB/MA/SMK sebesar 0,06; Angka Kelulusan SMA/MA/SMK sebesar 99,96; Nilai Rata-Rata UN SMA/MA/SMK sebesar 7,74; Persentase ruang kelas SMA/MA/SMK sesuai standar sebesar 84%; Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki perpustakaan sesuai standar sebesar 92%; Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki sanitasi layak sebesar 28,63%; dan Persentase SMA/MA/SMK yang menerapkan Kurikulum 2013 sebesar 40%.

d. Program Peningkatan Pendidikan Non Formal dan Informal

Fokus kegiatan pada : peningkatan ketersediaan, kesetaraan dan kepastian dalam layanan pendidikan non formal antara lain melalui pengembangan dan penguatan desa vokasi, pembinaan lembaga kursus dan pelatihan, pendidikan keaksaraan, dan pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Angka Kelulusan Paket A sebesar 95,40, Paket B sebesar 96,25, Paket C sebesar 98,25; Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B sebesar 3,20%; Persentase buta aksara usia >15 tahun sebesar 3%; Persentase kecamatan yang memiliki PKBM dan TBM sebesar 15,5%; Jumlah pelaku/kelompok masyarakat yang terfasilitasi sebesar 38.000; dan Jumlah Desa Vokasi yang dikembangkan sebanyak 35 desa.

e. Program Pendidikan Khusus

Fokus kegiatan pada : peningkatan ketersediaan, kesetaraan dan kepastian layanan pendidikan khusus antara lain melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan khusus, pengembangan kelembagaan pendidikan khusus, pembinaan kesiswaan, dan pendidikan inklusi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu APK Pendidikan Khusus sebesar 56; Angka Lulus Pendidikan Khusus sebesar 100; dan Persentase Ruang Kelas Pendidikan Khusus sesuai standar nasional pendidikan sebesar 76%.

f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Fokus kegiatan pada : peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui bantuan studi lanjut ke S1/D4 pendidik PAUD, pendidikan dasar dan menengah, peningkatan kualitas dan jumlah assesor TUK, serta peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan Formal dan Non Formal. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian

Tahun 2015 yaitu persentase pendidik PAUD yang berkualifikasi S1/D4 sebesar 31,85%; pendidik SD/SDLB/MI yang berkualifikasi S1/D4 sebesar 56,47%; pendidik SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 sebesar 87,71%; pendidik SMA/SMALB/MA/SMK sederajat yang berkualifikasi S1/D4 sebesar 94%; Persentase pendidik PAUD bersertifikat pendidik sebesar 16,75%; pendidik SD/SDLB/MI bersertifikat pendidik sebesar 48,14%; pendidik SMP/SMPLB/MTs bersertifikat pendidik sebesar 58,70%; dan pendidik SMA/SMALB/MA/SMK sederajat bersertifikat pendidik sebesar 64%.

g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Fokus kegiatan pada : pengembangan sistem pendataan pendidikan, penguatan tata kelola dan citra publik, akreditasi sekolah/madrasah, serta kerjasama bidang pendidikan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu persentase SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/SMALB/MA/SMK yang terakreditasi sebesar 100%; Persentase SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK yang melaksanakan MBS dengan baik sebesar 35%, 60 % dan 100%.

h. Program Fasilitasi Sumber Daya Pendidikan Tinggi

Fokus kegiatan pada : peningkatan potensi akademi mahasiswa, pemberdayaan KKN, peningkatan potensi sumber daya mahasiswa, pembinaan lingkungan sosial pendidikan tinggi, serta pembinaan potensi olahraga dan seni mahasiswa. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian persentase perguruan tinggi yang terfasilitasi pada Tahun 2015 sebesar 30%.

i. Program Pendidikan Berkelanjutan

Fokus kegiatan pada : pembinaan nasionalisme pendidikan dan karakter bangsa termasuk kepramukaan, koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS), dan mitigasi bencana bidang pendidikan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase sekolah/madrasah yang berwawasan kebangsaan sebesar 5%; dan Persentase sekolah yang melaksanakan ekstra kurikuler pramuka sebesar 10%.

2. Kesehatan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Fokus kegiatan pada : pencegahan penanggulangan penyakit menular melalui upaya pengendalian kejadian penyakit menular di 35 kabupaten/kota; pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular di 35 kabupaten/kota, *Surveillance Epidemiologi* serta penanganan KLB dan bencana melalui pemantapan dan pencapaian UCI desa di 35 kabupaten/kota, respon cepat penanggulangan KLB/bencana (krisis kesehatan) pada 100 kejadian, dan monitoring pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jemaah haji di 34 kabupaten/kota. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Angka Penemuan Kasus Baru TB (*Case Detection Rate/CDR*) sebesar 117; Jumlah Penemuan Kasus Baru HIV-AIDS sebesar 1.967; Angka Penemuan Kasus Baru Kusta sebesar 6,2; Angka Penemuan Kasus Diare

Balita sebesar 44; Angka Kesakitan Malaria sebesar 0,07; Proporsi Kasus Hipertensi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebesar <25; Proporsi Kasus Diabetes Melitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebesar <50; *Acute Flaccid Paralysis* (AFP) *Rate* sebesar 2/100.000; Cakupan UCI Desa sebesar 98,9%; dan Proporsi Kejadian Luar Biasa Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (KLB PD3I) sebesar 100%.

b. Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

Fokus kegiatan pada : fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan distribusi sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan melalui fasilitasi penyediaan *buffer stock* kesehatan provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya di 35 kabupaten/kota dan peningkatan kemampuan petugas pengelola obat dan alat kesehatan di 35 IFK kabupaten/kota; fasilitasi, pembinaan dan pengawasan makanan minuman melalui pembinaan makanan dan minuman produksi rumah tangga di 35 kabupaten/kota, peningkatan kualitas produksi pangan industri rumah tangga di 35 kabupaten/kota, pembinaan penerapan standar cara produksi makanan minuman IRT serta pembinaan, pengawasan dan registrasi makanan minuman IRT di 35 kabupaten/kota, yang diarahkan pada upaya penyediaan dan pengelolaan farmasi dan perbekalan kesehatan di sektor publik. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu proporsi sarana produksi dan distribusi di bidang farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai standar sebesar 60%; Proporsi sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar sebesar 50%; Proporsi kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan makanan minuman sesuai standar sebesar 57,14%.

c. Program Pelayanan Kesehatan

Fokus kegiatan pada : fasilitasi pelayanan kesehatan dasar melalui peningkatan puskesmas rawat inap PONEK di 35 kabupaten/kota, pembinaan puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan tradisional, upaya kesehatan kerja puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa serta narkoba di 29 Kab/Kota, pembinaan 10 kabupaten/kota dalam persiapan pembentukan puskesmas percontohan; Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan melalui pembentukan sistem rujukan dan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu di provinsi dan 6 kabupaten/kota, terbentuknya 50 rumah sakit rujukan PONEK di 35 kabupaten/kota, peningkatan mutu pelayanan rumah sakit melalui akreditasi RS, klasifikasi RS, dan perijinan di 35 kabupaten/kota; Fasilitasi pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui pelaksanaan PWSKIA di 35 kabupaten/kota, terbentuknya 2.000 kelas ibu hamil, pembinaan pada 10 kabupaten/kota yang memiliki Tim DTSP KIBBLA aktif, optimalisasi pemanfaatan rumah singgah di 5 Kabupaten; Fasilitasi pelayanan gizi masyarakat melalui pelaporan kasus gizi buruk yang memperoleh perawatan sebesar 100%, terdistribusinya vitamin A pada anak 6 -59 bulan sebesar 90%, pemberian 90 tablet tambah darah pada ibu hamil sebesar 90%, pemeriksaan *hypothyroid* sebanyak 100 kasus, pembentukan motivator ASI di 20 kabupaten/kota; Peningkatan mutu layanan kesehatan melalui akreditasi dan pelaksanaan sertifikasi ISO di

2 BKPM; serta peningkatan fasilitas dan sarana prasarana kesehatan di 7 RS milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Cakupan pertolongan persalinan Tenaga Kesehatan sebesar 98%; Cakupan Neonatal Komplikasi yang ditangani sebesar 81%; Cakupan kunjungan bayi sebesar 97,5%; Prevalensi Gizi Buruk sebesar 0,05; Proporsi Puskesmas yang memiliki ijin operasional sebesar 25%; Proporsi Puskesmas PONED sesuai standar sebesar 16%; Proporsi Puskesmas terakreditasi sebesar 10%; Rasio Puskesmas per jumlah penduduk sebesar 1 : 37.000; Proporsi RS yang memiliki izin operasional sebesar 60%; Proporsi RS terakreditasi sebesar 11,11%; Proporsi RS terklasifikasi sebesar 21,11%; Proporsi RS PONEK terstandar sebesar 24,49%; NDR RSUD sebesar 28,5; BOR RSJD sebesar 70; LOS RSJD sebesar 29; Cakupan Pelayanan Rawat Jalan sebesar 123.300; dan Cakupan Pelayanan Rawat Inap RSJD sebesar 10.750.

d. Program Kesehatan Lingkungan

Fokus kegiatan pada : pengawasan kualitas air dan sanitasi dasar melalui identifikasi penilaian sarana air bersih dan kualitas air minum di 35 kabupaten/kota, peningkatan komitmen pengembangan klinik sanitasi di 10 kabupaten/kota; pengawasan *hygiene* serta sanitasi Tempat-Tempat Umum dan Tempat Pengelolaan Makanan melalui identifikasi hasil penilaian sarana pelayanan kesehatan di 10 kabupaten/kota, fasilitasi 12 RS bebas merkuri, pembinaan dan pengawasan pengelola makanan, serta asrama di embarkasi haji. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Proporsi Desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebesar 2.347; Proporsi Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat sebesar 79%; dan Proporsi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat sebesar 56%.

e. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan

Fokus kegiatan pada : Fasilitasi organisasi profesi kesehatan melalui; Pembinaan 22 organisasi profesi kesehatan; Pemetaan Tenaga Kesehatan di 35 kabupaten/kota; Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan Akper Provinsi di 2 Kabupaten; Penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan melalui pelatihan di BPTPK Gombong; Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan kesehatan di 7 RS milik Pemerintah Provinsi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu proporsi Pelatihan Kesehatan yang terakreditasi sebesar 11,50%; dan Proporsi Institusi Pendidikan Kesehatan yang terakreditasi sebesar 51,50%.

f. Program Promosi dan Pemberdayaan

Fokus kegiatan pada : penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan melalui peningkatan kualitas desa siaga aktif mandiri di 25 kabupaten/kota, peningkatan kemitraan dengan 3 BUMN/BUMD dalam penanganan masalah kesehatan, dan pemberian pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota di 35 kabupaten/kota. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Proporsi desa/kelurahan Siaga Aktif Mandiri sebesar 7%; Proporsi

penduduk miskin non kuota yang memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) sebesar 54%; dan Persentase kabupaten/kota mengalokasikan 10% APBD untuk Kesehatan sebesar 17,14%.

g. Program Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan

Fokus kegiatan pada : perencanaan dan pengendalian pembangunan kesehatan melalui sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan antara pusat, provinsi dan 35 kabupaten/kota, peningkatan kerjasama bidang kesehatan di daerah lintas batas dan provinsi, pengelolaan aset di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel; pengkajian dan diseminasi pembangunan kesehatan melalui penyusunan 10 kajian kesehatan program prioritas pendukung pencapaian MDGs; penyusunan regulasi kesehatan daerah melalui pemberian perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di provinsi dan 35 kabupaten/kota; penyelenggaraan sistem informasi kesehatan melalui penyusunan 1 dokumen kesehatan SPM dan profil kesehatan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan informasi kesehatan sebesar 21 dokumen.

h. Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan (BLUD)

Fokus kegiatan pada : peningkatan dan pemenuhan operasional pelayanan dan pendukung pelayanan di 7 (tujuh) RSUD/RSJD milik Pemerintah Provinsi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Cakupan Pelayanan BLUD sebesar 100%.

3. Pekerjaan Umum

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan

Fokus kegiatan pada peningkatan kapasitas (pelebaran) dan peningkatan struktur (rekonstruksi) di ruas : jalan perbatasan provinsi (utamanya di Perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta); jalan penghubung wilayah Pantura – Pansela (koridor Pekalongan – Kebumen, Pemalang – Purbalingga dan Pati – Surakarta); alternatif jalan nasional (koridor Temanggung – Patean – Kajen – Randudongkal – Slawi – Ketanggungan sebagai alternatif ruas Pantura dan Purwodadi – Salatiga); jalan yang mempunyai akses langsung ke jalan arteri/ jalan penghubung ruas jalan nasional (utamanya Boyolali – Blabak; Sidareja – Cukangleuleus dan Gombong – Mandiraja) serta jalan yang mendukung kawasan strategis dan pengembangan wilayah (utamanya Jepara – Pati, Semarang – Purwodadi – Blora; Blora – Rembang dan Brebes – Cilacap). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu persentase panjang jalan dengan lebar $\geq 6,00$ m sebesar 64,88%, persentase panjang jembatan dengan lebar $\geq 9,00$ m sebesar 79,72%, persentase panjang jalan sesuai standar jalan kolektor (MST 8 ton) sebesar 74,80%, persentase jembatan sesuai beban standar bina marga sebesar 14,42% dengan total target panjang peningkatan jalan sebesar

366,99 km yang terdiri dari 275,69 km berupa pelebaran jalan dan 91,30 km berupa perbaikan struktur jalan/rekonstruksi.

b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Fokus kegiatan pada pemeliharaan berkala (overlay/pelapisan ulang aspal) dan rehabilitasi di ruas : jalan rawan bencana; jalan protokol/wajah kota; jalan akses pariwisata dan jalan pendukung pertumbuhan ekonomi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu persentase panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 88,20% dan jembatan dalam kondisi baik sebesar 81,24% serta meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Fokus kegiatan pada : pengadaan alat berat untuk mendukung pemeliharaan rutin jalan dan jembatan; Peningkatan sistem informasi kebinamargaan (pemutahiran data jalan dan jembatan, peningkatan kualitas layanan serta penyediaan data jalan jembatan Kabupaten/Kota dan Nasional); penyiapan program dan anggaran sistem jaringan jalan dan jembatan, pembuatan leger jalan dan perhitungan lalu lintas, pemeliharaan alat berat, pemeliharaan dan peningkatan ketersediaan alat laboratorium, serta peningkatan fasilitasi pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Pemenuhan kebutuhan alat kebinamargaan (alat berat dan alat laboratorium) sebesar 86,71%; Panjang jalan yang sudah dileger sebesar 80,60%; Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Manajemen Prasarana Jalan; dan Terfasilitasinya pembangunan infrastruktur strategis (diantaranya : Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS); Jalan tol trans Jawa pada ruas Semarang-Solo, Solo-Kertosono, Semarang-Batang, Batang-Pekalongan, Pekalongan-Pemalang dan Pemalang-Pejagan; *underpass* Jatingaleh Kota Semarang serta *flyover* Palur Sukoharjo).

d. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya

Fokus kegiatan pada : perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana irigasi di 19 Daerah Irigasi (DI); pemeliharaan jaringan irigasi provinsi di 106 DI seluas 86.252 Ha; dukungan pemeliharaan jaringan irigasi pemerintah di 39 DI seluas 346.998 Ha; terfasilitasinya pengembangan DI, antara lain DI Slinga Purbalingga, DI Cikawung Cilacap, DI Progopistan Temanggung; serta pengembangan pengelolaan irigasi partisipatif. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 76%.

e. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Fokus kegiatan pada : perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana air baku melalui lanjutan pembangunan Embung Desa Bagelen (Kabupaten Purworejo), Embung Danasri Lor (Kabupaten Cilacap), pembangunan Embung Slarang Lor (Kabupaten Tegal) dan Embung Tegalorejo (Kabupaten Grobogan); operasi dan pemeliharaan saluran air baku Klambo Kudu (Kabupaten Demak dan Kota Semarang); pemeliharaan prasara-

na dan sarana air baku di 6 Balai PSDA; serta dukungan dari Pemerintah untuk pembangunan Waduk Matenggeng, Waduk Kuningan, Waduk Pidekso Wonogiri, Waduk Gondang Karanganyar dan Waduk Logung Kudus. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu pemenuhan kebutuhan air baku sebesar 54%.

f. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Fokus kegiatan pada : perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana konservasi SDA melalui konservasi DAS Pemali (Kabupaten Brebes), Sub DAS Kupang (Kabupaten Pekalongan), dan Kali Bodri (Kabupaten Kendal); lanjutan pembangunan Klante Rawapening dan pemeliharaan anak sungai Rawapening (Kabupaten Semarang); pemeliharaan prasarana dan sarana konservasi SDA di 6 Balai PSDA; serta dukungan dari Pemerintah untuk konservasi sumber daya air Sub DAS Lusi (Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan), DAS Juana (Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati), DAS Bengawan Solo (Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar), DAS Bogowonto (Kabupaten Purworejo), DAS Sempor (Kabupaten Kebumen), dan DAS Citanduy (Kabupaten Cilacap). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu sungai dalam kondisi baik sebesar 51,86%.

g. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

Fokus kegiatan pada : perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai melalui perkuatan tebing dan normalisasi S. Bodri (Kabupaten Kendal), S. Cacaban (Kabupaten Tegal), S. Kuto (Kabupaten Kendal), S. Blukar (Kabupaten Kendal), S. Pecut (Kabupaten Kendal), S. Layangan (Kabupaten Pekalongan), Pantai S. Bodri (Kabupaten Kendal), S. Comal (Kabupaten Pemalang), S. Glagah dan S. Pedes (Kabupaten Brebes); penanganan prasarana sumber daya air akibat banjir; pemeliharaan prasarana dan sarana pengendalian banjir di 6 Balai PSDA; pemeliharaan sistem S. Silandak (Kota Semarang); dukungan dari Pemerintah untuk perbaikan/perkuatan tanggul/tebing dan normalisasi S. Bengawan Solo, S. Juana (Kabupaten Pati), S. Serang (Kabupaten Grobogan), S. Pemali (Kabupaten Brebes), S. Gung (Kabupaten Tegal), S. Sragi (Kabupaten Pekalongan), sistem Dombo Sayung (Kabupaten Demak), muara S. Onggorawe (Kabupaten Demak), S. Wulan (Kabupaten Kudus/Demak), S. Tuntang, Banjir Kanal Timur Kota Semarang, sistem Dolog – Penggaron (Kota Semarang dan Demak), SWD I dan II (Kabupaten Jepara), S. Tipar, S. Cimeneng, S. Cikawung, S. Lumbir, S. Cilopadang, S. Citanduy, S. Cijolang, S. Cileumeuh (Kabupaten Cilacap), S. Kabuyutan dan S. Babakan (Kabupaten Brebes); serta terfasilitasinya peningkatan pengamanan pantai dan rob di wilayah Pantura. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu menurunnya luasan daerah genangan akibat banjir sebesar 3% (5.000 ha).

h. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan

Fokus kegiatan pada : revitalisasi kawasan perkotaan kumuh sebagai fungsi PKN dan PKW, pembangunan prasarana dan sarana Kawasan

Wisata dan Revitalisasi Kawasan Tradisional/Cagar Budaya, pembangunan prasarana dan sarana pada Kawasan Agropolitan dan Minapolitan, Penataan Kawasan Perbatasan dan Kawasan Strategis, dan pendampingan Program Pusat PPIP. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu 14 kawasan perkotaan kumuh, prasarana dan sarana pendukung kegiatan perekonomian, kawasan perbatasan kabupaten/kota dan kawasan strategis yang tertangani.

i. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi

Fokus kegiatan pada : peningkatan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi, pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS, peningkatan penyediaan prasarana dan sarana air bersih, evaluasi pemanfaatan prasarana dan sarana permukiman, pendampingan pelaksanaan program USRI, perbaikan kualitas air bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu cakupan pelayanan air minum perkotaan sebesar 75% dan perdesaan sebesar 52,8%; cakupan pelayanan sanitasi sebesar 72%.

j. Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi

Fokus kegiatan pada : peningkatan kinerja dan monitoring evaluasi bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi, peningkatan pelayanan laboratorium Sertifikasi dan Advis Teknik, peningkatan pelayanan informasi konstruksi, pengawasan teknis pengelola dan penyelenggara gedung milik daerah, identifikasi bangunan dan kawasan bersejarah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu meningkatnya pengelolaan jasa konstruksi melalui 400 sertifikasi hasil uji; 3 informasi konstruksi; dan 710 orang pelaku jasa konstruksi.

4. Perumahan Rakyat

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pembangunan Perumahan

Fokus kegiatan pada : pembangunan stimulan prasarana dan sarana Rumah Sederhana Sehat, pembangunan Stimulan Perumahan Swadaya, stimulan pembangunan dan perbaikan rumah pasca bencana, dan pemugaran rumah tidak layak huni berbasis masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan yang tertangani sebanyak 6; dan Rasio Rumah Layak Huni sebesar 76,74%.

b. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Fokus kegiatan pada : penataan lingkungan permukiman perbatasan kabupaten/kota, prasarana dan sarana di kawasan perdesaan, pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan di daerah, dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman berbasis masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu kawasan permukiman kumuh yang tertangani sebesar 14,88%; dan KTP2D yang tertangani sebesar 12,6%.

5. Penataan Ruang

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Tata Ruang

Fokus kegiatan pada : peningkatan kinerja penataan ruang, tindak lanjut review Perda RTRWP dan fasilitasi penetapan perda arahan peraturan zonasi sistem provinsi, Penyusunan dan fasilitasi penetapan Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP), pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang kabupaten/kota. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang memiliki Rencana Tata Ruang sebesar 6,6%; dan Persentase kabupaten/kota yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang sebesar 40%.

b. Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Fokus kegiatan pada : pengawasan penyelenggaraan penataan ruang, dan pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang sebesar 64%.

6. Perencanaan Pembangunan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Fokus kegiatan pada : koordinasi pengembangan wilayah perbatasan Jateng - Jabar, Jateng - Jatim, Jateng - DIY dan Regional Jawa - Bali. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu persentase program/kegiatan hasil kesepakatan perbatasan yang terakomodir dalam RKPD sebesar 100%; Jumlah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan sebanyak 1 Forum dan 1 rekomendasi.

b. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Fokus kegiatan pada : peningkatan kualitas SDM Perencana. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu peningkatan kualitas SDM Perencana sebanyak 5 Forum peningkatan kapasitas pegawai, 1 Forum Fungsional Perencana, Penilaian Angka Kredit 5 orang Fungsional Perencana.

c. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Fokus kegiatan pada : Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016; Fasilitasi penyelenggaraan rangkaian Musrenbang Provinsi (Forum SKPD, Musrenbang Wilayah, Dialog Interaktif Eksekutif - Legislatif); Fasilitasi sinergitas perencanaan Pusat - Daerah (Musrenbang Nasional); Evaluasi RKPD Tahun 2014; serta Pengendalian dan evaluasi program/kegiatan APBN/APBD pada SKPD Provinsi dan 35 kabupaten/kota. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu 1 (satu) Peraturan Gubernur tentang RKPD ditetapkan tepat waktu; Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran sebesar 100%;

Persentase capaian antara target perencanaan program/kegiatan dengan realisasi sebesar 100%; dan Evaluasi dokumen perencanaan tahunan (RKPD).

d. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Fokus kegiatan pada : Fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi pembangunan bidang perekonomian daerah melalui : penyusunan dokumen perencanaan pengembangan perekonomian; Tindak lanjut pengembangan ekonomi lokal di Jawa Tengah; Sinkronisasi pelaksanaan Program PEL – FEDEP - Klaster; Pengembangan Klaster – IKM/UMKM; Koordinasi Program Pengelolaan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat (PPKEBM); Fasilitasi Rehabilitasi Konservasi Kawasan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil; Sinkronisasi pelaksanaan penanganan kawasan Muria, pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan, pengembangan PRIMATANI, Monev RAD – Pangan dan Gizi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah sebanyak 2 dokumen.

e. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Fokus kegiatan pada : Pengembangan KHPPIA/SDM Dini; Implementasi penanggulangan GAKY di Kabupaten/Kota; Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial; Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan Mental Spiritual; Fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan perdesaan; Pendampingan TMMD Reguler dan Sengkuyung; Pendampingan dan Penguatan PUG/PPRG di 35 Kabupaten/Kota dan seluruh SKPD Provinsi; Fasilitasi Perencanaan bidang Perlindungan Anak; dan Fasilitasi perencanaan bidang Kependudukan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat sebanyak 3 dokumen dan 4 dokumen bidang pemerintahan dan kependudukan.

f. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

Fokus kegiatan pada : Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dan Bantuan luar negeri WISMP 2. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam sebesar 4 dokumen, 12 kabupaten/kota.

g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Fokus kegiatan pada : Pelaksanaan studi bidang kebencanaan dan koordinasi lintas sektor serta lintas Provinsi tentang kebencanaan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana sebanyak 2 dokumen.

h. Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah

Fokus kegiatan pada : pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun

2015 yaitu meningkatnya kualitas dan penerapan Litbang sebanyak 12 rekomendasi; dan pengembangan SIDA di Jawa Tengah melalui desa inovatif sebanyak 11 desa; 6 kabupaten/kota inovatif dan 6 klaster.

7. Perhubungan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Perhubungan Darat

Fokus kegiatan pada : pengembangan rencana bidang perhubungan dan kominfo, fasilitasi keselamatan ASDP dan perkeretaapian di Jawa Tengah, peningkatan dan pemeliharaan perlintasan sebidang di Jawa Tengah, pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan ruas jalur alternatif di Jawa Tengah, dan fasilitasi angkutan aglomerasi dan perkotaan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu meningkatnya pelayanan dan kinerja angkutan umum; Meningkatnya ketersediaan prasarana keselamatan; Terlaksananya fasilitasi pengembangan angkutan umum dan massal, perkeretaapian dan pengembangan ASDP.

b. Program Pengembangan Perhubungan Laut

Fokus kegiatan pada : pelayanan angkutan laut Kapal Motor Cepat Kartini 1, pelayanan angkutan antar pulau Kapal Motor Kemujan di Karimunjawa, dan fasilitasi pengembangan pelabuhan di Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu beroperasinya kapal KMC Kartini I dan Kemujan sebanyak 312 trip/tahun dan 108 trip; Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelabuhan Kendal; Terfasilitasinya pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas, Karimunjawa Jepara dan pelabuhan lainnya serta pengembangan keselamatan pelayaran.

c. Program Pengembangan Perhubungan Udara

Fokus kegiatan pada : fasilitasi pengembangan Bandara Udara di Jawa Tengah dan Posko Angkutan Haji di Bandara Adi Soemarmo. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu terfasilitasinya pengembangan Bandar Udara Ahmad Yani Semarang, Ngloram Cepu dan Wirasaba Purbalingga; dan terlaksananya fasilitasi pengembangan, pemantauan, dan pembinaan perhubungan udara.

d. Program Pos, Telekomunikasi dan SAR

Fokus kegiatan pada : Koordinasi pembinaan pengawasan penggunaan bersama menara telekomunikasi dan kegiatan penertiban dan pengawasan Jasa titipan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu terlaksananya fasilitasi pengembangan pelayanan Pos Telekomunikasi dan SAR.

8. Lingkungan Hidup

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Fokus kegiatan pada : pengelolaan kualitas air dan penetapan kelas air sungai untuk memenuhi kebutuhan Standar Minimal Bidang LH bagi masyarakat, peningkatan kinerja perusahaan/kegiatan terhadap penataan Peraturan Perundang-undangan di Bidang LH dan penanganan

sengketa lingkungan, penanganan sumber pencemar dari usaha/kegiatan menengah/besar dan industri kecil, perbaikan kinerja pengelolaan B3 dan limbah B3 pada usaha/kegiatan, dan peningkatan pelaksanaan AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Informasi status mutu air (SPM) sebanyak 8 sungai (100%); Jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM) sebesar 100%; Pengendalian dan pengawasan terhadap sumber pencemaran pada UMKM/obyek domestik dan usaha dan/atau kegiatan menengah/besar serta penanganan permukiman kumuh sebanyak 8 UMKM per objek domestik, 220 usaha dan/atau kegiatan, 1 objek kumuh dan 2 bank sampah; Pembinaan perbaikan kinerja pengelolaan B3 dan limbah B3 bagi pelaku usaha dan/kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (di luar proper) bagi 100 pelaku usaha dan/kegiatan; Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi UMKM/obyek usaha dan/kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL bagi 10 usaha/kegiatan.

b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Fokus kegiatan pada : koordinasi penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan serta koordinasi penanganan kerusakan lingkungan di kawasan Dataran Tinggi Dieng. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu meningkatnya konservasi lahan melalui penanaman bibit tanaman konservasi di kawasan lindung di luar kawasan hutan sebanyak 220 bibit tanaman konservasi; dan penanaman tanaman unggulan lokal daerah/tanaman lokal sebanyak 20 jenis.

c. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Fokus kegiatan pada : peningkatan dan pengendalian aspek lingkungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan sebesar 40 Ha.

d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Fokus kegiatan pada : penanganan kerusakan dan pelestarian kawasan tambak/permukiman masyarakat pada ekosistem pesisir pantai utara; penanganan, mitigasi, adaptasi dan pencegahan pencemaran serta kerusakan lingkungan akibat bencana/gangguan lingkungan dan pemanasan global, serta pembangunan sumur pantau. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu penanganan kerusakan lingkungan wilayah pesisir melalui bangunan pencegah abrasi/erosi sebesar 500 m dan tanaman penghijauan sebanyak 40 Ha; Informasi status mutu udara ambien (SPM) di 35 kabupaten/kota (100%); Meningkatnya lokasi lahan bekas tambang yang direklamasi sebanyak 2 lokasi; dan pembangunan sumur pantau sebanyak 5 unit.

e. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Fokus kegiatan pada : peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan dan warga sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu peningkatan kapasitas SDM dan kelebagaannya melalui ADIWIYATA di 17 sekolah.

f. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Fokus kegiatan pada : penyediaan data dan informasi lingkungan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu tersedianya informasi lingkungan hidup Jawa Tengah sebanyak 3 jenis.

9. Pertanahan

Program yang akan dilaksanakan adalah **Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah** dengan fokus kegiatan pada sosialisasi dan penerapan manajemen pertanahan berbasis masyarakat, serta sertifikasi tanah di kawasan lindung dan tanah sawah lestari. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu meningkatnya bidang tanah yang terpetakan (HGU : 10 bidang tanah, HGB : 8 bidang tanah dan HP : 10 bidang tanah); terselesaikannya konflik-konflik pertanahan sebanyak 13 konflik; Tergantikannya tanah kas desa untuk pembangunan kepentingan umum dengan tanah yang lebih baik fungsinya seluas 212.079 m² dengan 361.101 m²; dan Sertifikasi tanah masyarakat dalam kawasan lindung dan LP2B sebanyak 1.750 bidang tanah.

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan adalah **Program Penataan Administrasi Kependudukan** dengan fokus kegiatan pada : pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Admuduk dan Capil) di 35 kabupaten/kota; pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala provinsi; bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Admuduk dan Capil, serta pembinaan kebijakan penyelenggaraan Admuduk di 35 kabupaten/kota. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Rasio penduduk memiliki e-KTP per wajib e-KTP sebesar 100%; Persentase Penduduk 0-18 tahun memiliki Akta Kelahiran sebesar 55%; dan Jumlah kabupaten/kota yang mengoperasikan SIAK sebanyak 35 kabupaten/kota.

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Fokus kegiatan pada : Advokasi integrasi pelaksanaa Sistem Perlindungan Anak (SPA) bagi SKPD Provinsi dan 3 Kabupaten; 3 dokumen kebijakan yang responsif gender; 1 dokumen kebijakan terkait penanggulangan pekerja anak; Pelatihan bagi peningkatan kapasitas

perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan di 3 Bakorwil; penyusunan Pedoman Penganggaran Responsif Anak; Pelatihan penyusunan penganggaran responsif anak bagi 80 orang perencana SKPD Provinsi; Peningkatan kapasitas 80 orang pengambil kebijakan/*stakeholder* tentang sistem perlindungan anak dengan pendekatan SBA. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu produk kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Jawa Tengah sebanyak 3 kebijakan; Jumlah kebijakan perlindungan hak perempuan sebanyak 1 kebijakan; serta Jumlah produk kebijakan terkait penanganan tenaga kerja di bawah umur sebanyak 2 produk.

b. Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Fokus kegiatan pada : pelatihan penyelenggaraan data pilah gender dan anak bagi pengelola data di 15 SKPD provinsi; Pelatihan implementasi sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan berbasis gender dan anak bagi 85 orang pengelola data kasus di Provinsi dan Kabupaten/Kota; Penyusunan 1 dokumen hasil analisis gender di bidang pembangunan dan 1 dokumen analisis situasi kesejahteraan perlindungan anak; Penyusunan dokumen buku statistik gender dan anak; Peningkatan kapasitas 30 orang Anggota P2TP2A/PPT/lembaga masyarakat berbasis komunitas di 4 Kabupaten; Pelatihan ASIA bagi pengambil kebijakan di 2 kabupaten; Pendampingan pelaksanaan PPRG perencana SKPD Provinsi; pendampingan pelaksanaan PPRG di 5 kabupaten/kota yang belum menginisiasi PPRG; serta Implementasi PUG dalam pekerjaan dan jabatan di tempat kerja bagi 240 orang di perusahaan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu program/kegiatan responsif gender di 48 SKPD Provinsi; Rasio anggaran responsif gender di SKPD Provinsi sebesar 19,2%; Rasio kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD sebesar 65,99%.SKPD dan Renja SKPD sebesar 65,99%.

c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Fokus kegiatan pada : peningkatan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi perempuan dan anak; Peningkatan kemampuan 9 kelompok jejaring yang aktif dalam pengelolaan manajemen usaha kecil anggota Jarpuk; Penguatan kapasitas Pokjatab dan Satgas GSIB di 5 Kab./Kota dengan AKI tinggi; Peningkatan kapasitas 30 orang pengambil kebijakan/*stakeholder* Provinsi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan *Restorative Justice*; Layanan penanganan ABH oleh petugas TESA 129; Fasilitasi penyusunan RAD KLA bagi 6 Kabupaten/Kota; Peningkatan kapasitas pekerja sosial tentang kualitas hidup anak; Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang (100% korban melapor dan rujukan yang terjadi antar kabupaten/kota dan provinsi serta membutuhkan test DNA dapat terlayani); Peningkatan kapasitas pelayanan terpadu bagi 35 PPT kabupaten/kota dan kabupaten/kota dalam layanan pengaduan,

paralegal dan konseling; Peningkatan dan Pengembangan kerjasama penanganan kekerasan berbasis gender dan *trafficking* antar provinsi dan Kabupaten/Kota; Pendampingan dan penguatan bagi 40 orang Perempuan IRT dengan ODHA dan PEDILA; Pelaksanakan *Rule Model Support Group* dan *Home Base Care* di 5 Kabupaten/Kota dengan HIV/AIDS tinggi; Peningkatan perlindungan buruh migran bagi 35 orang anggota Pokja Bina Keluarga TKI Tingkat Provinsi; Implementasi Program Kerja Rencana Aksi Provinsi (RAP) Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBPTA); Peningkatan keterampilan bagi 100 orang pekerja anak; 100% korban *trafficking* ketenagakerjaan tertangani; 100 orang KTK mendapatkan layanan kesejahteraan sosial; Penanganan 520 orang anak dan remaja terlantar; Peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi; Peningkatan kewirausahaan bagi 50 orang wanita di lokasi obyek wisata; Fasilitasi Pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESA); Peningkatan kualitas produksi dan manajemen usaha bagi 120 orang wanita usaha/kopwan; Peningkatan keterampilan bidang peternakan bagi 8 kelompok wanita tani ternak; serta Peningkatan kualitas produksi makanan ringan dan pakaian jadi bagi 80 IKM. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 68,22; Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 70,49; Persentase partisipasi perempuan bekerja di lembaga pemerintahan sebesar 2,45%; Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen sebesar 30%; Persentase perempuan di lembaga swasta sebesar 93,88%; Cakupan ketersediaan tenaga pelayanan pengaduan terlatih yang mampu menindaklanjuti pengaduan sebanyak 48,7%; Cakupan ketersediaan petugas bantuan hukum terlatih untuk mendampingi perempuan dan anak korban dan atau saksi KTP/KTA sebanyak 14,6%; Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebanyak 100%; Rasio kabupaten/kota menuju Kota Layak Anak sebesar 77,1%; Rasio kabupaten/kota yang memenuhi perlindungan anak, kesejahteraan dan hak-hak anak sebesar 11,4% dan 5,7%; Rasio KDRT pada perempuan dan anak sebesar 0,026%.

d. Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Fokus kegiatan pada : peningkatan kapasitas bagi 30 orang pengurus Forum Anak yang terlatih menjadi fasilitator anak; inisiasi pelibatan anak dalam pengambilan kebijakan di 2 Kabupaten; Pelatihan penerapan strategi PUG bagi 80 orang pengelola PNPM Mandiri; Peningkatan kapasitas anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/kota serta PSW/G dalam mendorong pelaksanaan PUG; implementasi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) di 35 kabupaten/kota; dan peningkatan peran serta anak dalam pembangunan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Rasio Forum Anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan sebesar 28,6%.

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Keluarga Berencana

Fokus kegiatan pada : peningkatan dan perluasan cakupan serta kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan KB bagi 25.000 akseptor keluarga Pra KS dan KS I di 35 kabupaten/kota; peningkatan partisipasi 12 perusahaan terhadap Program KB bagi pengelola KB; serta peningkatan partisipasi peserta KB Pria di 6 kelompok Prio Utomo. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Peserta KB aktif atau *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) sebesar 78%; *Drop Out* (DO) KB sebesar 14,5%; dan *Unmet Need* sebesar 9,75%.

b. Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Fokus kegiatan pada : peningkatan peran kelompok Pengelolaan Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) di 35 kabupaten/kota melalui berbagai program yang responsif terhadap kebutuhan remaja dalam rangka peningkatan kualitas remaja dalam memahami kesehatan reproduksi remaja; serta peningkatan pencegahan dan penanggulangan NAPZA, PMS, dan HIV/AIDS di sekolah dan masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun sebesar 2,20%.

c. Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD

Fokus kegiatan pada : peningkatan kapasitas dan kinerja 15 orang Pokja Tri Bina provinsi dan 35 orang Pokja Tri Bina kabupaten/kota; peningkatan kapasitas pengelola Tri Bina; pelaksanaan Lomba Kelompok dan Pengelola Tri Bina; peningkatan peran lembaga masyarakat dalam ber-KB dan KS; serta implementasi layanan informasi dalam pelaksanaan KB-KS. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu 1 Draft Peraturan Gubernur tentang pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga

d. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB Mandiri

Fokus kegiatan pada : peningkatan kapasitas Pengelola KB kabupaten/kota tentang KB Mandiri; peningkatan kualitas serta kuantitas Kelompok UPPKS Mandiri Paripurna di 35 kabupaten/kota; serta peningkatan usaha kelompok UPPKS dalam memberikan motivasi kepada akseptor KB untuk meningkatkan peran dan partisipasinya di masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah peserta KB mandiri sebanyak 3.024.113,99; dan Persentase anggota UPPKS yang ber-KB sebesar 83,75%.

e. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita

Fokus kegiatan pada : peningkatan komitmen, partisipasi dan minat Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) terhadap KB-KS melalui fasilitasi TMKK, Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan, Bhayangkara KB

Kesehatan, KB Lestari, Keluarga Sejahtera (Harganas), Bhakti Sosial Muslimat NU, Aisyiyah, PGRI dan Hari Ibu di 9 Kabupaten/Kota; Peningkatan pemahaman dan kinerja anggota Pokja Catur Bina provinsi dan kabupaten/kota, kader di kabupaten/kota mampu mengelola kelompok Tribina, peningkatan peran kelompok Bina Lingkungan Keluarga, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia; serta Pelaksanaan Jambore dan Perkemahan Bhakti Saka Kencana. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu 100% kabupaten/kota telah membentuk jaringan KB – KS.

13. Sosial

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Fokus kegiatan pada : peningkatan kemampuan dan keterampilan serta pemberian bantuan UEP bagi 4.500 orang Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi; Pemberdayaan sosial bagi 200 Komunitas Adat Terpencil; Fasilitasi peningkatan kesejahteraan bagi 300 orang perintis kemerdekaan/pahlawan nasional, veteran dan keluarganya; Fasilitasi dan koordinasi PKH di 24 kabupaten; pemberdayaan sosial melalui peningkatan peran PSKS di 8 desa sejahtera; Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial penerima manfaat pada 25 balai dan panti sosial; serta pengkajian pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial di 27 balai dan 25 unit resos. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah PMKS yang mendapatkan Bantuan Sosial sebanyak 7.411 orang; dan Jumlah Perintis Kemerdekaan/keluarganya, warakawuri dan veteran yang mendapatkan dukungan pelayanan kesejahteraan sosial sebanyak 54 orang.

b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Fokus kegiatan pada : rehabilitasi sosial terhadap 1.400 orang penyandang cacat; Fasilitasi unit pelayanan sosial keliling bagi 1.200 orang penca; Rehabilitasi sosial terhadap 350 anak nakal/ABH dan 700 anak jalanan; Penanganan dan pemberian bantuan sosial terhadap 400 Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) dan Korban Tindak Kekerasan; serta fasilitasi penyantunan terhadap 785 LU terlantar potensial dan Non Potensial. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah panti yang melaksanakan standar pelayanan sesuai SOP sebanyak 27 Panti; dan Jumlah PMKS yang ditangani melalui Panti Sosial milik Pemerintah sebanyak 4.092 orang.

c. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

Fokus kegiatan pada : pelayanan sosial terhadap 175 orang bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan; pelayanan sosial terhadap 100 orang eks pekerja sosial komersial; pelayanan sosial terhadap 150 orang dengan HIV/AIDS (ODHA); pelayanan sosial terhadap 200 orang PGOT; pelayanan sosial terhadap 150 orang eks korban narkoba; serta

penjaringan dan pendampingan sosial bagi 1.050 orang PGOT dan kelompok rentan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan sebanyak 34.807 orang.

d. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Fokus kegiatan pada : pembinaan dan pemberdayaan 700 orang anggota karang taruna; pembinaan dan pengembangan TKSS melalui fasilitasi kepada 100 orang PSM; pendataan bagi 40 lembaga penyelenggara UKS yang siap diakreditasi; pemberdayaan 573 TKSK; pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan sosial keluarga di 35 kabupaten/kota; serta pemberdayaan dan kerjasama 210 dunia usaha. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah PSKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS dan UKS sebanyak 2.368 orang.

e. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Fokus kegiatan pada : fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar pangan bagi 10.000 orang korban bencana; pengerahan TAGANA dalam bidang *recovery* daerah rawan kejadian bencana; pemantapan 400 orang TAGANA. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah TAGANA yang dikerahkan ke lokasi kejadian bencana sebanyak 14; dan 35 kabupaten/kota memiliki prasarana dan sarana penanggulangan bencana.

14. Ketenagakerjaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Fokus kegiatan pada : fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN; pengembangan kewirausahaan di 27 kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi; pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat di 35 kabupaten/kota; informasi pasar kerja bagi 5.000 orang melalui Bursa Kerja Khusus; serta verifikasi di 75 perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,93%-4,62%; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 72,58%; Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja sebesar 70,18; dan Jumlah AKAN sebanyak 85.300 orang.

b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Fokus kegiatan pada : penyiapan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing melalui pendidikan formal dan informal, pelatihan kerja dan pengembangan di tempat kerja serta uji kompetensi sertifikasi tenaga kerja dalam rangka mendukung penempatan tenaga kerja di 35 kabupaten/kota; pelatihan dan pemagangan dalam negeri bagi 100 orang; rekrutmen dan seleksi 300 orang untuk magang ke Jepang; peningkatan kompetensi 25 orang pengelola dan instruktur lembaga penyelenggara pelatihan pemerintah (BLK/LLK) atau swasta (LPK Swasta/LPK Perusahaan), akreditasi 50 LPK yang menerapkan KKNI dan SKKNI; serta meningkatkan peran serta dan partisipasi

lembaga – lembaga pendidikan dalam penyiapan kualitas tenaga kerja; Penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Pengadaan sarana dan prasarana pelatihan di 5 UPTD dan keterampilan bagi calon tenaga kerja di BLK; Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK; serta koordinasi bidang ketenagakerjaan, diarahkan untuk peningkatan kualitas sumber daya tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan pasar. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Produktivitas tenaga kerja sebesar Rp.14,91 juta ; Laju PDRB per tenaga kerja sebesar 14,91%; dan Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja sebesar 36,08%.

- c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**
Fokus kegiatan pada : penciptaan suasana hubungan industrial yang harmonis melalui penetapan upah minimum di 35 kabupaten/kota, fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial di 15 lokasi, penyelesaian kasus di 25 perusahaan rawan, forum koordinasi LKS Bipartit, pembinaan lembaga ketenagakerjaan; pengujian dan pemeriksaan kesehatan dan lingkungan kerja di sektor industri, *ambient* dan emisi *stack* sebanyak 210 perusahaan, peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di 35 kabupaten/kota; Pemantauan kinerja lembaga dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja TKI dalam dan luar negeri di PPTKIS. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Rasio Upah Minimum Kabupaten/Kota dibanding KHL sebesar 97,5%; serta Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian HI sebanyak 3.000 kasus.

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM**
Fokus kegiatan pada : peningkatan pemyarakatan dan kelembagaan koperasi, pembinaan dan pengawasan koperasi, pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan KSP. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu persentase koperasi aktif sebesar 81,05%; Koperasi sehat sebesar 16,20%; dan koperasi provinsi berkualitas sebesar 43%.
- b. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal**
Fokus kegiatan pada : fasilitasi perlindungan produk UMKM, pemberdayaan koperasi produksi di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau, fasilitasi peningkatan produktivitas UMKM di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau, fasilitasi pengembangan potensi ekonomi lokal melalui penumbuhan wirausaha baru di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau, pemberdayaan koperasi produksi di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu jumlah produk/komoditas OVOP di Jawa Tengah sebanyak 140 komoditas.

c. Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan

Fokus kegiatan pada : fasilitasi akses permodalan bagi KUMKM, pengendalian pembiayaan KUMKM, penguatan ekonomi masyarakat melalui bantuan akses permodalan di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau, serta penguatan kemampuan pengelola usaha masyarakat di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase UMKM yang telah mengakses kredit usaha sebesar 24%.

d. Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha

Fokus kegiatan pada : fasilitasi akses pemasaran bagi produk KUMKM, pelayanan klinik usaha bagi KUMKM, serta peningkatan jaringan produk KUMKM bagi Anggota Mitra Praja Utama (MPU). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu jangkauan pemasaran produk KUMKM ke 10 Provinsi dan 1 Luar Negeri.

e. Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM

Fokus kegiatan pada : peningkatan dan penguatan kualitas SDM KUMKM, serta peningkatan dan penguatan kualitas SDM KUMKM di kawasan penghasil dan industri hasil tembakau (DBHCHT). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu jumlah SDM KUMKM yang dilatih sebanyak 14.175 orang.

16. Penanaman Modal

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Fokus kegiatan pada : promosi dalam dan luar negeri, kerjasama penanaman modal, dan Sekretariat Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Fasilitasi Kerjasama Kemitraan UMKM dan Koperasi dengan Pengusaha Nasional/Asing; dan Terselenggaranya Promosi peluang penanaman modal provinsi.

b. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi

Fokus kegiatan pada : perencanaan dan penyusunan kebijakan penanaman modal, peningkatan dan pembinaan pelayanan investasi, pengendalian dan pengawasan penanaman modal, pembinaan kinerja PTSP provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kinerja pelayanan perijinan UPT PTSP, peningkatan kinerja pelayanan non perijinan UPT PTSP. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu jumlah investor berskala Nasional (PMA/PMDN) sebanyak 36 investor; Jumlah nilai investasi berskala Nasional (PMA/PMDN) sebesar Rp.3,374 Trilyun; Daya serap tenaga kerja sebesar 1.342 orang; Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal yaitu Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) kabupaten/kota sesuai

kewenangan pemerintah provinsi sebesar 100%; Implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) sebesar 100%; serta Bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha; dan Sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat.

c. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

Fokus kegiatan pada : penyusunan profil dan potensi investasi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Usaha Unggulan.

17. Kebudayaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya

Fokus kegiatan pada : pembinaan kesenian, Koordinasi/Konsultasi Antar Museum, pengkajian dan pelestarian budaya tradisi, koordinasi dan penguatan litbang kebudayaan, pengembangan pembinaan perfilman, pembinaan nilai budaya, dan pembinaan dan pengembangan kesejarahan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai tradisi, kesenian dan budaya daerah, melalui jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 7 kali; Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 8 lokasi; Jumlah regulasi pengembangan kebudayaan sebanyak 1 regulasi; Cakupan kelompok budaya yang dibina sebanyak 745; Cakupan SDM Kesenian (Jumlah seniman yang dibina, sejarawan, ahli kepurbakalaan) sebanyak 175 orang; Cakupan fasilitas seni sebanyak 6; Cakupan tempat kesenian sebanyak 3 gedung kesenian; Jumlah misi kesenian (pengiriman seni ke LN) sebanyak 4 kali; Cakupan kajian seni sebanyak 1 kajian; Cakupan gelar seni (Jumlah pagelaran, pameran, festival, lomba dan pawai) di 35 kabupaten/kota sebanyak 2 kali; serta Jumlah kelompok kesenian sebanyak 35 kelompok.

b. Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya

Fokus kegiatan pada : pembinaan pengembangan kepurbakalaan dan permuseuman, peningkatan mutu layanan informasi museum, peningkatan karya seni dan apresiasi masyarakat di TBJT, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana TBJT, penyebarluasan informasi museum, dan eksplorasi sumber daya budaya kawasan Situs/BCB dan pelestarian warisan budaya. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu terpeliharanya pelestarian kesenian dan Cagar Budaya daerah, melalui Jumlah cagar budaya (candi, situs) yang dilestarikan sebanyak 200 candi/situs, 5 lokasi (2,5%); Jumlah warisan budaya dunia Nasional yang ditetapkan dan dikelola secara terpadu sebanyak 6 warisan budaya; Jumlah koleksi naskah kuno yang diselamatkan dan dikelola sebanyak 2.500 naskah kuno; Jumlah situs/kawasan yang diinventarisir dan ditetapkan sebanyak 200 situs; Jumlah museum yang dioptimalkan sebanyak 8

museum; serta Jumlah pengunjung museum sebanyak 1,4 juta pengunjung.

c. Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Fokus kegiatan pada : pembinaan penghayat kepercayaan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah organisasi penghayat dan upacara tradisional di Jawa Tengah (Jumlah penghayat sebanyak 188.172 orang, Jumlah organisasi penghayat sebanyak 68 organisasi, serta Jumlah upacara tradisional sebanyak 190).

18. Kepemudaan dan Olah Raga

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Olahraga

Fokus kegiatan pada : pengembangan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan yang dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu peningkatan kinerja manajemen dan harmonisasi kebijakan kepemudaan dan keolahragaan melalui jumlah fasilitasi pengembangan kemitraan sebanyak 210 orang.

b. Program Peningkatan Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan

Fokus kegiatan pada : pembinaan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3) yang dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Peningkatan partisipasi/peran aktif pemuda dalam pembangunan melalui Jumlah Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3) sebanyak 50 orang.

c. Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Fokus kegiatan pada : peningkatan kewirausahaan pemuda berbasis klaster/kelompok yang dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu peningkatan kewirausahaan dan ketrampilan/kecakapan hidup pemuda melalui kewirausahaan pemuda sebanyak 650 orang, 85 kelompok.

d. Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Fokus kegiatan pada : penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLPD) serta penyelenggaraan kompetisi olahraga yang dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu peningkatan pembibitan atlet, prestasi dan budaya olahraga melalui kompetisi keolahragaan dan fasilitasi olahraga pendidikan, prestasi dan rekreasi sebanyak 42.192 orang; serta Jumlah atlet yang dibina melalui PPLPD sebanyak 160 atlet pada 15 PPLPD.

e. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/Organisasi Olahraga

Fokus kegiatan pada : pengembangan industri olahraga yang dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan organisasi olahraga melalui peningkatan kualitas SDM olahraga, mutu manajemen organisasi olahraga, pengembangan IPTEK dan industri olahraga sebanyak 1.545 orang.

f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan

Fokus kegiatan pada : penataan sarana prasarana olahraga dan peningkatan klub olahraga. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keolahragaan melalui jumlah klub olahraga sebanyak 105 klub.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Fokus kegiatan pada : koordinasi pengamanan wilayah; Pelaksanaan koordinasi bidang kesbangpol dan linmas, pendidikan budaya politik dan etika demokrasi, pembinaan sosial politik. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu meningkatnya kondusivitas daerah provinsi dan 35 kabupaten/kota.

b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Fokus kegiatan pada : peningkatan kesadaran belanegara; Fasilitasi pemasyarakatan dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila; Mediasi penanganan masalah strategis yang berdampak politis; Peningkatan pemahaman kesadaran nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa; Peningkatan pemahaman pilar kebangsaan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pembangunan bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi (35 kabupaten/kota).

c. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Fokus kegiatan pada : penguatan penghayatan Ideologi Pancasila; Fasilitasi pemasyarakatan dan revitalisasi Nilai-nilai Pancasila; Pemeliharaan hubungan etnisitas dengan negara. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu meningkatnya kapasitas aparatur kesbangpol tentang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan sebanyak 320 orang.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Fokus kegiatan pada : fasilitasi pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM); Peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik sosial; Penguatan ruang publik bagi pencegahan dan penyelesaian konflik. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase penanganan konflik sosial sebesar 85%; dan pembentukan kader tibumtranmas sebanyak 1.350 kader.

e. Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat

Fokus kegiatan pada : pendidikan politik bagi elemen masyarakat, Peningkatan dan penguatan peran politik ormas/LSM/tokoh masyarakat/tokoh agama; Penguatan budaya etika politik masyarakat.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase penggunaan hak pilih dalam Pemilu pada sebesar 68,64%; dan Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Tengah sebesar 68,11.

f. Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH)

Fokus kegiatan pada : peningkatan ketrampilan pengamanan lingkungan bagi komandan Satlinmas; Peningkatan deteksi dini bagi anggota Satlinmas; Peningkatan ketrampilan pengamanan swakarsa. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Rasio jumlah Ratih/Linmas dengan jumlah penduduk sebesar 0,0086.

g. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Fokus kegiatan pada : pengendalian penanganan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; Pengendalian unjuk rasa di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu pengendalian dan penanganan ketenteraman dan ketertiban umum di 35 kabupaten/kota.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Fokus kegiatan pada : pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota; Penyusunan/revisi peraturan daerah; Penyelenggaraan bantuan hukum penanganan sengketa dan perkara perdata/ Tata Usaha Negara. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Penyusunan 15 Peraturan Daerah; dan Penindakan pelanggaran Perda sebesar 100%.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Fokus kegiatan pada : pengendalian bantuan pembangunan wilayah; Pendampingan penerapan SMM dan sertifikasi ISO 9001:2008; Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; Pengembangan kapasitas kelembagan perangkat daerah; Pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; Fasilitasi penegasan batas daerah; Penyusunan LKPJ; Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan lintas kabupaten/kota; Koordinasi dan fasilitasi dukungan pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikasi ISO sebanyak 23 UPP; Jumlah UPP yang melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebanyak 13 UPP; Perapatan pilar batas sebanyak 75 pilar; Perawatan pilar batas sebanyak 50 pilar; Pengendalian kinerja 48 SKPD; Penyusunan LKPJ dan EKPPD; Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan lintas kabupaten/kota di 3 Bakorwil; serta Jumlah dokumen pengembangan dan pengendalian mutu Diklat sebanyak 1.618 dokumen.

c. Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Fokus kegiatan pada : analisis penyusunan LPPD dan ILPPD; Peningkatan kapasitas daerah dalam rangka peningkatan daya saing; Penyelenggaraan otonomi daerah yang bertumpu pada kapasitas daerah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu tersedianya laporan LPPD Provinsi; Pemetaan kapasitas Pemerintahan Daerah di 7 kabupaten/ kota; dan *desk* Pemilukada di 17 kabupaten/kota.

d. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Fokus kegiatan pada : penerapan layanan pengadaan secara elektronik melalui LPSE; Sistem informasi pengendalian pembangunan daerah, sistem informasi perencanaan pembangunan daerah; Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan LPSE dalam Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 100%.

e. Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah

Fokus kegiatan pada : peningkatan kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga non pemerintah dalam negeri; Peningkatan kerjasama daerah dengan luar negeri; Peningkatan kerjasama pemda dengan lembaga pemerintah dalam negeri. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah MoU dan tindak lanjut kerjasama dengan Luar Negeri sebanyak 5 MoU dan Dalam Negeri sebanyak 16 MoU.

f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Fokus kegiatan pada : pengelolaan keuangan daerah; Pengembangan pelayanan pendapatan; Pengendalian pajak daerah/intensifikasi/ekstensifikasi/sertifikasi; Promosi dan sosialisasi pelayanan wajib pajak; Penyusunan potensi pendapatan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 19,53%.

g. Program Pengelolaan Aset Daerah

Fokus kegiatan pada : pengamanan aset daerah; Penyelesaian kasus sengketa aset; Inventarisasi barang milik daerah, *updating* data pengadaan dan mutasi aset. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu 85% aset dikelola dengan baik.

h. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

Fokus kegiatan pada : evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah; Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah; Pengawasan internal secara berkala. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan (Opini WTP) di Provinsi dan 16 kabupaten/kota; Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di 15 SKPD.

i. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan

Fokus kegiatan pada : pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang profesional sebesar 92%.

j. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Fokus kegiatan pada : reses DPRD Provinsi Jawa Tengah; Kunjungan kerja DPRD; Penyusunan pembahasan Raperda dan Raperda Inisiatif serta peraturan DPRD. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu tercapainya peningkatan profesionalisme dan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

k. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah

Fokus kegiatan pada : pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur teknis/fungsional/kepemimpinan; Pendidikan dan pelatihan pemerintahan daerah; Fasilitasi penyelenggaraan diklat bagi Pemerintah kabupaten/kota; Penataan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional khusus; Mutasi dan pensiun PNS; Evaluasi kinerja pejabat struktural dan fungsional. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu penyelenggaraan promosi jabatan secara terbuka untuk Eselon I, II, III dan IV; dan Jumlah PNS yang mengikuti Diklat sebanyak 36.133 orang.

21. Ketahanan Pangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Fokus kegiatan pada : peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat, pengembangan cadangan pangan Provinsi Jawa Tengah, peningkatan akses pangan masyarakat dan pemantauan harga pangan strategis, pemberdayaan masyarakat desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat serta peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan di masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu 1 (satu) regulasi kedaulatan pangan; Ketersediaan pangan utama beras sebesar 5.746.958 ton; Penguatan cadangan pangan sebesar 80%; Persentase Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah sebesar 100%; serta Persentase penanganan daerah rawan pangan sebesar 60%.

b. Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan

Fokus kegiatan pada : pengembangan pemanfaatan pekarangan dan pengenalan konsumsi pangan B2SA, pengembangan diversifikasi pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 91,13.

c. Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Fokus kegiatan pada : pembinaan mutu dan keamanan pangan, serta pengembangan sertifikasi dan pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada produk pangan segar. Kegiatan tersebut dilakukan untuk

mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sebesar 80%.

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Fokus kegiatan pada : Pengembangan kapasitas desa/kelurahan; Perencanaan partisipatif pembangunan, evaluasi bantuan pemerintahan desa di Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu jumlah pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) yang dilatih sebanyak 70 orang; Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang terlatih sebanyak 300 orang; Jumlah aparat desa/kelurahan yang terlatih sebanyak 105 orang; Jumlah Desa Mandiri sebanyak 6 desa.

b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Fokus kegiatan pada : pemantapan unit pengaduan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan; Pemantapan koordinasi dan keterpaduan program pemberdayaan masyarakat; Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat; Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan Posyandu. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah kelompok pelestarian adat dan budaya lokal yang dibentuk sebanyak 30 kelompok; Persentase PKK aktif di kabupaten/kota sebesar 100%; Jumlah Posyandu Model/integrasi yang dibina sebesar 750 unit.

c. Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Fokus kegiatan pada: penguatan kelembagan UP2K PKK; Pengembangan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa; Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah UP2K yang aktif sebanyak 200 unit; Jumlah BUMDes yang terbentuk sebanyak 183 unit; Jumlah pasar desa yang direvitalisasi sebanyak 311 unit; dan Jumlah UED – SP yang aktif sebanyak 333 unit.

23. Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah** dengan fokus kegiatan pada koordinasi penyusunan data dan informasi pembangunan daerah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu tersedianya data statistik umum, dasar, dan sektoral skala provinsi (JDA, PDRB provinsi, Tinjauan PDRB kabupaten/kota).

24. Kearsipan

Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Fokus kegiatan pada : pengembangan sistem jaringan informasi kearsipan; Pembenahan dan pembinaan kearsipan desa, Peningkatan sumber daya aparatur bidang kearsipan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah

SKPD/UPTD yang melakukan pengelolaan arsip secara baku sebanyak 12 SKPD/UPTD; dan Peningkatan kualitas SDM pengelola kearsipan sebanyak 250 orang.

b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.

Fokus kegiatan pada : peningkatan kualitas informasi arsip, Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan; Fasilitasi akuisisi dan penilaian arsip. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu jumlah arsip yang dilestarikan sebanyak 3.500 arsip.

c. Program Peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat

Fokus kegiatan pada : pemasyarakatan kearsipan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah media pemasyarakatan kearsipan sebanyak 3 media.

d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Fokus kegiatan pada : pengembangan layanan informasi kearsipan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu meningkatnya jumlah pengunjung/ pengguna arsip sebanyak 2.700 pengunjung/pengguna.

25. Komunikasi dan Informatika

Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Fokus kegiatan pada : literasi media di kalangan pelajar dan mahasiswa, Dialog interaktif melalui media televisi dan radio tentang isu-isu penyiaran; Pemantauan penyiaran Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu 5 kabupaten/kota yang membentuk lembaga Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra).

b. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Fokus kegiatan pada : fasilitasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Fasilitasi Forum Komunikasi Media Tradisional, pembuatan rubrik sosialisasi pembangunan, Pengembangan *media centre*. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase kegiatan lembaga penyiaran yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebesar 75%; Persentase pelayanan pengaturan bidang penyiaran sebesar 100%; 3 (tiga) SKPD bidang kominfo melakukan sosialisasi kebijakan nasional.

c. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

Fokus kegiatan pada : pemuatan informasi pembangunan melalui media massa, Analisis berita dan pendapat umum, Fasilitasi penerapan hasil penelitian dan pengembangan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah kajian dan penelitian untuk menetapkan kebijakan di bidang Kominfo sebanyak 5 kajian.

d. Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Fokus kegiatan pada : peningkatan SDM Bidang komunikasi dan Informasi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase SKPD yang mengembangkan teknologi

informasi sebesar 100%; dan Persentase SKPD yang telah meng-*update* data di *websitenya* hingga tahun n-1 sebesar 90%.

26. Perpustakaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Budaya Baca

Fokus kegiatan pada : pengembangan otomasi perpustakaan daerah dan promosi minat baca. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah Pengunjung Perpustakaan sebanyak 807.085 pengunjung; dan Jumlah pendataan dan pemberian nomor pokok perpustakaan sebanyak 525 perpustakaan.

b. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Fokus kegiatan pada : pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan daerah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu jumlah perpustakaan penerima bantuan rak dan koleksi buku sebanyak 70 perpustakaan desa/kelurahan, 35 perpustakaan sekolah dan 35 perpustakaan keliling; serta Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan provinsi sebanyak 223.946 buku.

c. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perpustakaan

Fokus kegiatan pada : bintek pengelolaan perpustakaan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah SDM perpustakaan yang telah mengikuti Bintek sebanyak 105 orang.

d. Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan

Fokus kegiatan pada : pengembangan perpustakaan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Pengembangan perpustakaan se-Jawa Tengah di 35 kabupaten/kota; dan Jumlah perpustakaan desa yang memenuhi standar perpustakaan sebanyak 921 perpustakaan desa.

5.2 Urusan Pilihan

1. Pertanian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Agribisnis

Fokus kegiatan pada : peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan untuk mendukung ketersediaan pangan di masyarakat dan pengembangan komoditas unggulan daerah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Produksi : padi sebesar 10.228.197 ton; jagung sebesar 3.016.834 ton; kedelai sebesar 143.389 ton; bawang merah sebesar 429.112 ton; kentang sebesar 289.548 ton; cabe besar sebesar 123.713 ton; tebu sebesar 5.228.010 ton; kopi sebesar 17.219 ton; kakao sebesar 2.081 ton; kelapa sebesar 186.198 ton; karet sebesar 1.644 ton; cengkeh sebesar 6.659 ton; teh sebesar 6.830 ton; daging sebesar 282.661.352 kg; susu sebesar 101.456.006 liter; dan telur sebesar 285.726.795 kg.

b. Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian

Fokus kegiatan pada : peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM penyuluh dan pengembangan Balai Penyuluhan Model dan Pos penyuluhan Pedesaan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah Balai Penyuluhan yang berkualitas sebanyak 20 unit dan penumbuhan Posluhdes sebanyak 50 unit; serta 50% penyuluh memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahlian.

2. Kehutanan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Fokus kegiatan pada : rehabilitasi dan penanganan DAS serta pengembangan usaha hutan rakyat dan aneka usaha kehutanan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis sebesar 15%; serta Hutan yang dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman bawah tegakan seluas 10.000 Ha.

b. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Fokus kegiatan pada : pemantapan pengendalian penatausahaan hasil hutan dan pemanfaatan hutan serta pengembangan pengelolaan hasil hutan, pemasaran hasil hutan dan restrukturisasi industri kehutanan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang memiliki sertifikat/SVLK sebesar 15%; dan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB sebesar 0,63%.

c. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Fokus kegiatan pada : perencanaan, pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu 10 Dokumen perencanaan yang disusun, disinkronisasi dan dikendalikan; serta Persentase pertimbangan teknis dalam proses pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan sebesar 100%.

d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Fokus kegiatan pada : pengendalian pengelolaan kawasan konservasi, hutan lindung dan perlindungan serta pengamanan hutan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase kawasan konservasi yang meningkat kualitas pengelolaannya sebesar 30%; dan Menurunnya potensi gangguan keamanan hutan di 25 lokasi.

e. Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

Fokus kegiatan pada : pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase unit usaha masyarakat sekitar hutan yang berkembang sebesar 20%.

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah

Fokus kegiatan pada : pengawasan dan penertiban usaha pertambangan di Jawa Tengah, pembinaan usaha pertambangan di Jawa Tengah, serta penyusunan zona pemanfaatan dan konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase luasan pertambangan tanpa ijin yang ditingkatkan sebesar 86%; dan Persentase kajian cekungan air tanah sebesar 68,42%.

b. Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas

Fokus kegiatan pada : pembangunan jaringan listrik pedesaan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Rasio Elektrifikasi sebesar 87,42%.

c. Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi

Fokus kegiatan pada : penataan daerah lahan rawan bencana tanah longsor dan sosialisasi dan pemantauan mitigasi bencana alam geologi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase mitigasi bencana alam dan geologi sebesar 17,47%.

d. Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Fokus kegiatan pada : pembangunan PLTS SHS, identifikasi dan pengembangan potensi gas rawa, pengembangan Desa Mandiri Energi, pembangunan PLTMH, pengembangan panas bumi, penyusunan *Detail Engineer Design* (DED) PLTMH, serta kajian potensi Energi Baru Terbarukan (EBT). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan terhadap total konsumsi energi sebesar 7,74%.

4. Pariwisata

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemasaran Pariwisata

Fokus kegiatan pada : analisa pasar untuk promosi dan pemasaran pariwisata; peningkatan kualitas promosi dan informasi dalam pemasaran pariwisata; pelaksanaan promosi pariwisata dalam negeri; dan peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan informasi pariwisata. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 29.218.463 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 395.261 orang.

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Fokus kegiatan pada : peningkatan manajemen usaha jasa dan sarana pariwisata; pengembangan potensi keunikan lokal masyarakat dan alam menjadi atraksi wisata; optimalisasi dan pemantapan kinerja SDM pariwisata; perkuatan kualitas kompetensi remaja, Mas dan Mbak Duta Wisata bidang pariwisata; dan optimalisasi aset pariwisata milik Pemerintah Provinsi Jateng. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara sebesar 2,41 hari dan nusantara sebesar 2,94 hari; serta rata-rata pengeluaran belanja wisatawan mancanegara sebanyak 490,14 US\$ dan nusantara sebanyak Rp.671.002,00.

c. Program Pengembangan Kemitraan

Fokus kegiatan pada : Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan; Pengembangan dan Penguatan Litbang Pariwisata; Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Pariwisata; dan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Atau Kegiatan Pariwisata. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu meningkatnya jejaring dengan kelompok sadar wisata sebanyak 605 kelompok.

5. Kelautan dan Perikanan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Fokus kegiatan pada : peningkatan usaha 125 orang petambak garam, 125 orang taruna pesisir dan 125 orang wanita pesisir. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu rata-rata pendapatan wanita pesisir sebesar Rp.2.961.073,87/kapita/tahun, dan taruna pesisir sebesar Rp.4.475.418,54/kapita/tahun.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Fokus kegiatan pada : operasi pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sebanyak 10 kali/tahun serta pembinaan bagi Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah kelompok masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumber Daya kelautan yang aktif sebanyak 20 kelompok.

c. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Fokus kegiatan pada : pencapaian target produksi perikanan tangkap melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi nelayan, pengembangan sistem kerja pelabuhan perikanan pantai Jawa Tengah serta pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana 9 Pelabuhan Perikanan Pantai di Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu produksi perikanan tangkapsebesar 306.868,21 ton; Rata-rata pendapatan nelayan sebesar Rp.12.546.157,65/kapita/tahun.

d. Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Fokus kegiatan pada : pengembangan sarana dan prasarana perbenihan dan budidaya di 3 UPT; peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya ikan; revitalisasi perikanan budidaya ikan air tawar dan payau melalui pengembangan kawasan minapolitan dan komoditas unggulan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu produksi perikanan budidaya sebesar 309.949,63 ton; Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan sebesar Rp.17.298.864,23 per kapita per tahun.

e. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Fokus kegiatan pada : pengembangan dan pembinaan teknologi pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan dan kelautan di Jawa Tengah dalam bentuk pembinaan mutu bagi 28 UPI eksportir, sosialisasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan serta peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana

di 3 LPPMHP : Pekalongan, Semarang dan Cilacap, pembinaan pasar ikan tradisional, pembinaan sentra pengolah ikan serta pembinaan UMKM produk nonkonsumsi; peningkatan daya saing dan perluasan usaha ditempuh melalui gelar produk perikanan, partisipasi pameran lintas sektor, bazar UMKM pengolahan hasil perikanan, fasilitasi promosi produk perikanan, peningkatan konsumsi makan ikan melalui Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2015 yaitu tingkat konsumsi ikan sebesar 19,59 kg/kapita/tahun; ekspor produk perikanan sebesar 25.770,99 ton.

f. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Fokus kegiatan pada : rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan dan rehabilitasi habitat vital melalui penanaman 325.000 batang mangrove, 57 unit terumbu karang buatan dan transplantasi karang sebanyak 60 unit, penebaran 325.000 ekor benih ikan serta penyelamatan jenis biota langka perairan umum melalui penebaran 1.500 ekor benih ikan betutu, lele lokal dan nila citra lada. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu penanaman mangrove seluas 8,13 Ha dan terumbu karang buatan seluas 5,13 Ha.

6. Perdagangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor

Fokus kegiatan pada : peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas; peningkatan efisiensi impor non migas; peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri; peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah; dan peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau di wilayah IHT (BPSMB). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Nilai ekspor non migas sebesar 5.171 juta US\$; Nilai impor non migas sebesar 5.082 juta US\$; Ekspor bersih perdagangan sebesar 89; dan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 20,55%.

b. Program Peningkatan Logistik Daerah, Akses Pasar Dalam Negeri dan Pemberdayaan UDKM

Fokus kegiatan pada : pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya; pengembangan jaringan distribusi daerah; pembinaan dan peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional; Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang; Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang; Penyelenggaraan pameran produk unggulan daerah dan pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri; dan pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal sebanyak 5 kelompok; Jumlah ijin usaha perdagangan dalam negeri (SIUP: 418.442, TDP: 88.022); dan Keter-sediaan data harga jenis komoditas bahan pokok sebanyak 18.

c. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri

Fokus kegiatan pada : peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal; pengawasan barang beredar dan jasa; Pembinaan dan pengawasan kemetrologian; Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah; dan peningkatan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar diwilayah IHT. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di 26 kabupaten/kota; dan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK kabupaten/kota.

7. Perindustrian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil (ILMT)

Fokus kegiatan pada : pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil; Pengembangan klaster dan sentra industri logam; Pengembangan klaster dan sentra industri mesin; Fasilitasi standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil; gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil; Peningkatan kualitas pelayanan data dan informasi industri logam, mesin dan tekstil; pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen; pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan; Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam; Pengembangan teknologi produksi tepat guna; Pengenalan hasil rekayasa mesin dan peralatan teknologi tepat guna; Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil; dan pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 32,3%; Pertumbuhan industri (besar, kecil dan menengah) sebesar 5,2%; Jumlah klaster Logam, Mesin dan Tekstil sebanyak 6 klaster; dan Persentase kemampuan ILMT menjadi pemasok industri besar sebesar 15-20%.

b. Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan (IAKHH)

Fokus kegiatan pada : pengembangan klaster dan sentra industri Agro; pengembangan klaster dan sentra industri kimia; Pengembangan klaster dan sentra industri mebel dan kayu olahan; Fasilitasi standarisasi produk industri agro, kimia dan hasil hutan; Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri agro, kimia dan hasil hutan; Peningkatan kualitas pelayanan data dan informasi industri agro, kimia dan hasil hutan; Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu kontribusi sektor industri pengolahan PDRB sebesar 32,3%; Pertumbuhan industri (besar, kecil dan menengah) sebesar 5,2%; Jumlah klaster agro, kimia dan hasil hutan sebanyak 6 klaster; dan Persentase kemampuan sentra IAKHH menjadi pemasok industri besar sebesar 12-18%.

c. Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka (IATEA)

Fokus kegiatan pada : pengembangan klaster dan sentra industri aneka; fasilitasi standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka; Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka; Pengembangan SDM dan produk industri bidang teknologi informasi; dan pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 32,3%; Pertumbuhan industri (besar, kecil dan menengah) sebesar 5,2%; Jumlah klaster komponen otomatis elektronika dan aneka sebanyak 6 klaster; Persentase kemampuan sentra IATEA menjadi pemasok industri besar sebesar 6-10%.

d. Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Industri dan Dagang

Fokus kegiatan pada : peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan; peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah; Pengembangan wirausaha baru IKM potensial; Peningkatan dan pengembangan *database* industri dan dagang; Peningkatan dukungan pendampingan FPESD bagi IKM unggulan daerah Peningkatan dukungan DEKRANASDA Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Pengembangan Kelembagaan Usaha Industri sebanyak 5 lembaga.

8. Transmigrasi

Program yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi** dengan fokus kegiatan pada : fasilitasi penyiapan, penempatan dan pemantapan transmigrasi di provinsi calon penerima; pelatihan keterampilan bagi calon transmigran; penjajagan dan rintisan kerjasama bidang ketransmigrasian di 9 Provinsi dan 25 Kabupaten Penempatan; serta koordinasi bidang ketransmigrasian di provinsi penempatan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Kesepakatan kerjasama antar wilayah dalam pengembangan kawasan transmigrasi dengan 10 provinsi; dan Calon Transmigran yang meningkat keterampilannya setelah mendapatkan Pelatihan Dasar Umum (PDU) sebanyak 275 KK.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan SKPD, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional SKPD sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Fokus kegiatan pada : penyediaan jasa surat menyurat, Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu tercapainya pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, rapat koordinasi dan konsultasi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Fokus kegiatan pada : pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional, Peningkatan

sarana dan prasarana kantor. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu terlaksananya pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, peralatan kantor dan rumah tangga.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Fokus kegiatan pada : pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Fokus kegiatan pada : pendidikan dan pelatihan formal. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu terlaksananya diklat dan bintek aparatur.

Secara rinci program dan fokus kegiatan prioritas SKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, serta prakiraan maju tahun 2016 dijabarkan dalam Tabel Rencana Program dan Kegiatan SKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016.

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Berkenaan dengan hal tersebut, maka guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 harus dipedomani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun 2015 dan menjadi landasan bagi penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun RAPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015.

RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Tahun 2015 dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk di dalamnya dunia usaha serta masyarakat dalam menyusun program/kegiatan sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan. Selain itu nantinya menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Perlu ditekankan bahwa pencapaian target rencana program/kegiatan pembangunan daerah melalui serangkaian program/kegiatan prioritas yang termuat dalam RKPD Tahun 2015, dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara menyeluruh.

Selanjutnya melalui pelaksanaan program/kegiatan dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 ini, diharapkan mampu mendukung upaya menuju tercapainya cita-cita pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018, yakni mewujudkan **“MENUJU JAWA TENGAH YANG SEJAHTERA DAN BERDIKARI”**.

GUBERNUR JAWA TENGAH



GANJAR PRANOWO